

### **BAB III**

#### **GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Perencanaan pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah karena kebijakan pembangunan harus menyesuaikan dengan kemampuan pendanaannya. Dalam penentuan pagu indikatif program prioritas, gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaannya menjadi dasar utama penentuan target sasaran maupun program pembangunan. Dalam upaya memprediksi dengan baik sumber-sumber penerimaan di masa datang maka diperlukan gambaran umum kinerja keuangan melalui realisasi APBD sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) tahun di masa lalu.

Pengelolaan kemampuan daerah yang baik perlu dilakukan melalui prinsip efektivitas, efisien, ekonomis, adil, bermanfaat, wajar, tertib, taat peraturan perundang-undangan, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan sub-sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan juga merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengelolaan keuangan yang baik adalah pengelolaan yang bisa mengoptimalkan potensi-potensi pembangunan suatu daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan. Pengelolaan keuangan daerah dengan kewenangan yang didasarkan pada otonomi daerah melahirkan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Kota Madiun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini telah dijabarkan secara lebih rinci dan teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Demi mencapai upaya prioritas pembangunan seluruh kegiatan pada rencana pembangunan lima tahunan melalui RPJMD, perlu ditetapkan gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan. Kedua hal tersebut perlu ditetapkan agar pengelolaan keuangan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk masyarakat umum. Arah gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan meliputi kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan.

### **3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu**

Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan beberapa tahun terakhir. Dari analisis kinerja beberapa tahun ke belakang dapat menjadi referensi melakukan proyeksi kinerja kondisi keuangan melalui berbagai macam metode analisa misalnya dengan melihat rata-rata pertumbuhan, menggunakan asumsi makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain), dan dapat juga dengan dasar kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah serta dapat melalui kebijakan bidang keuangan daerah.

Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah. Batasan tersebut diatur dalam;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### **3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD**

Kinerja pelaksanaan APBD dilihat dari perkembangan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa APBD terdiri dari aspek pendapatan, belanja dan pembiayaan. Aspek pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Sedangkan pembiayaan terdiri penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.



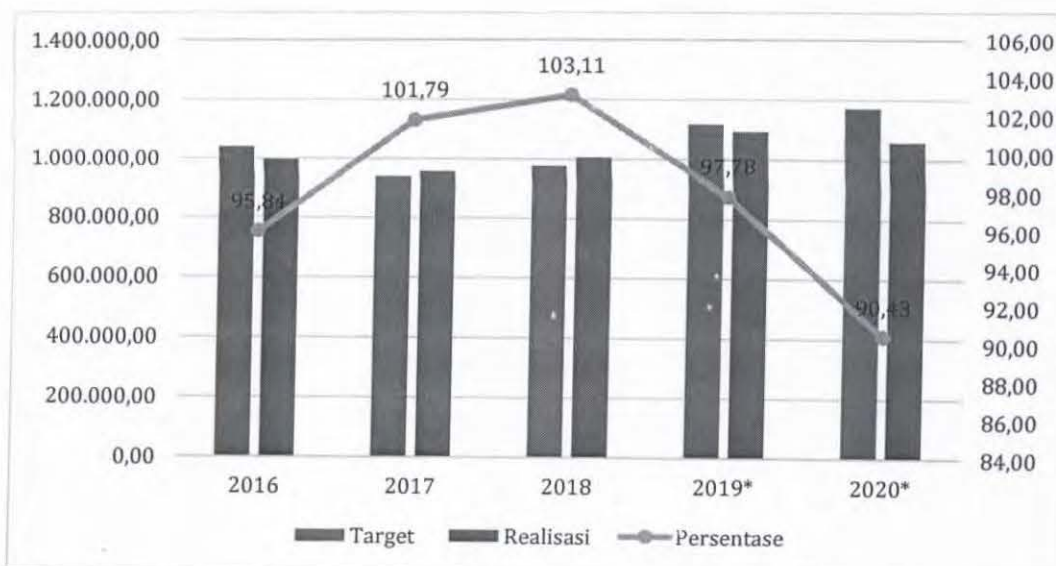


Sumber: Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019

**Gambar 3.1**  
Struktur APBD

### 3.1.1.1 Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih daerah. Pendapatan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Realisasi pengelolaan pendapatan daerah Kota Madiun terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah bersumber pada Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sedangkan pendapatan transfer diantaranya berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah berasal dari Hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya. Gambaran realisasi pendapatan daerah ini diharapkan dapat membantu dalam mendorong berbagai kebijakan, program dan belanja daerah.



Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021

**Gambar 3.2**

Capaian Realisasi terhadap Target APBD Kota Madiun Tahun 2016–2020

Sampai dengan tahun 2018, capaian realisasi pendapatan terhadap target yang ditetapkan mengalami trend yang semakin meningkat. Bahkan di tahun 2017 dan 2018, capaian realisasi pendapatan melebihi 100 persen. Namun untuk tahun 2019 dan 2020, capaian realisasi pendapatan terhadap target pendapatan dalam RPJMD mengalami trend yang menurun bahkan mencapai sebesar 90,43 persen tahun 2020. Penurunan tersebut tidak terlepas dari dampak covid-19 yang terjadi di tahun tersebut. Ringkasan capaian realisasi pendapatan daerah tahun 2019 dan 2020 terhadap target RPJMD 2019 – 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3.1**

Capaian Realisasi Pendapatan Daerah terhadap Target RPJMD Pada Tahun 2019 dan 2020

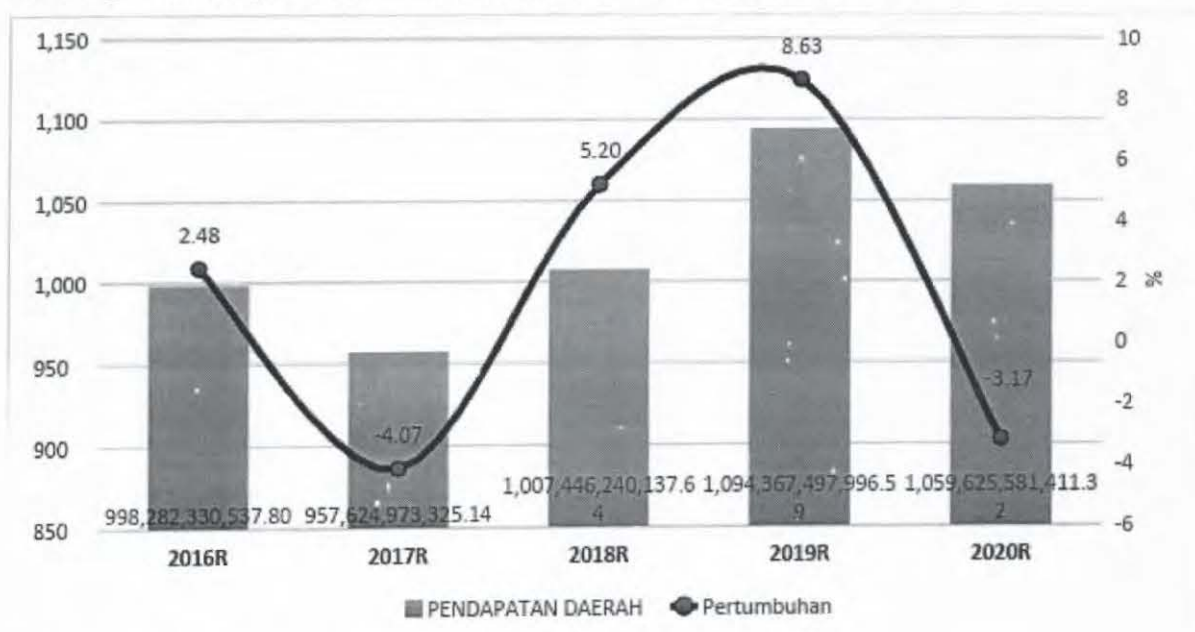
No.	Uraian	Kinerja Anggaran					
		RPJMD 2019	R 2019	Capaian 2019	RPJMD 2020	R 2020	Capaian 2020
1	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.119.169.654.600,00</b>	<b>1.056.906.304.000,00</b>	<b>94,44</b>	<b>1.171.755.147.812,00</b>	<b>1.059.913.793.139,59</b>	<b>90,43</b>
01.01	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>226.307.943.600,00</b>	<b>235.504.941.000,00</b>	<b>104,06</b>	<b>241.576.128.230,00</b>	<b>248.944.404.487,59</b>	<b>102,93</b>
01.01.01	Pajak daerah	77.000.000.000,00	85.000.000.000,00	110,39	84.700.000.000,00	90.291.466.033,07	106,60
01.01.02	Retribusi daerah	17.220.952.600,00	18.762.439.600,00	108,95	18.943.047.860,00	15.619.539.719,00	80,72
01.01.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	12.086.991.000,00	14.934.446.400,00	123,56	12.933.080.370,00	15.216.268.562,40	117,65
01.01.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	120.000.000.000,00	116.808.055.000,00	97,34	125.000.000.000,00	127.817.130.173,12	102,29
01.02	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>730.009.511.000,00</b>	<b>671.425.330.000,00</b>	<b>91,97</b>	<b>763.680.748.502,00</b>	<b>632.559.647.797,00</b>	<b>82,83</b>
01.02.01	Dana bagi hasil pajak	25.371.694.000,00	22.423.248.000,00	88,38	25.980.614.656,00	34.444.290.949,20	132,58



No.	Uraian	Kinerja Anggaran					
		RPJMD 2019	R 2019	Capaian 2019	RPJMD 2020	R 2020	Capaian 2020
	Dana bagi hasil bukan pajak	83.445.154.000,00	31.021.504.000,00	37,18	85.447.837.696,00	51.666.436.423,80	60,47
01.02.02	Dana Alokasi Umum	522.596.024.000,00	527.916.797.000,00	101,02	548.725.825.200,00	473.852.439.000,00	86,36
01.02.03	Dana Alokasi khusus	85.477.493.000,00	76.136.504.000,00	89,07	89.751.367.650,00	72.596.481.424,00	80,89
01.02.04	Dana Bagi hasil cukai	13.119.146.000,00	13.927.277.000,00	106,16	13.775.103.300,00	0	0,00
01.03	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	162.852.200.000,00	149.976.033.000,00	92,09	166.498.271.080,00	178.409.740.855,00	107,15
01.03.01	Hibah	19.356.661.000,00	19.399.600.000,00	100,22	15.000.000.000,00	20.029.980.000,00	133,53
01.03.03	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	86.960.763.000,00	64.366.614.000,00	74,02	92.178.408.780,00	84.049.652.855,00	91,18
01.03.04	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	55.542.726.000,00	65.095.240.000,00	117,20	58.319.862.300,00	73.313.029.000,00	125,71
01.03.05	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	992.050.000,00	1.114.579.000,00	112,35	1.000.000.000,00	1.017.079.000,00	101,71

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021

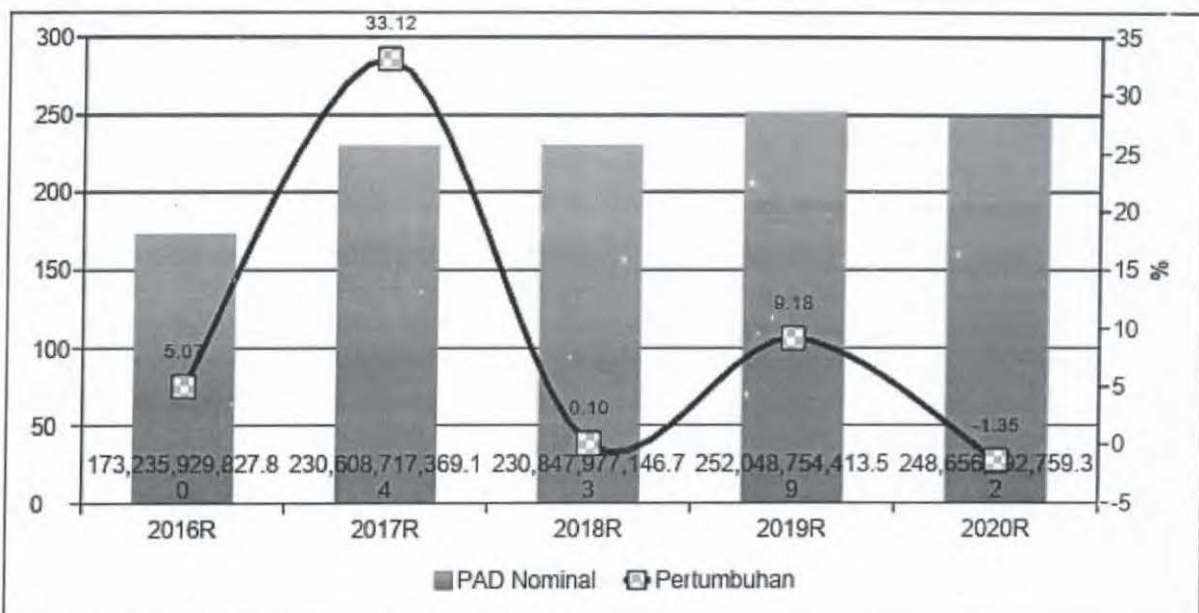
Dari tabel diatas, secara umum dapat dikatakan bahwa capaian realisasi pendapatan daerah tahun 2019 dan 2020 masih di bawah target RPJMD. Realisasi terhadap target pendapatan daerah adalah 94,44 persen tahun 2019 dan 90,43 persen tahun 2020. Jika dilihat dari komponennya, realisasi PAD melampaui target RPJMD tahun 2019 dan 2020 dengan nilai masing – masing sebesar 104,06 persen dan 102,93 persen.



Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021

**Gambar 3.3**  
Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2016–2020

**Pertumbuhan pendapatan nominal Kota Madiun sampai dengan tahun 2019 menunjukkan tren yang semakin meningkat.** Realisasi pendapatan pada tahun 2018 menunjukkan peningkatan sebesar 5,20 persen, dimana pada tahun sebelumnya, nilainya turun sebesar 4,07 persen. Pada tahun 2019, realisasi pendapatan daerah menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,63 persen. Pada tahun 2020, sebagai dampak pandemi Covid-19 pendapatan daerah mengalami penurunan secara nominal dan juga pertumbuhannya sebesar -3,17.

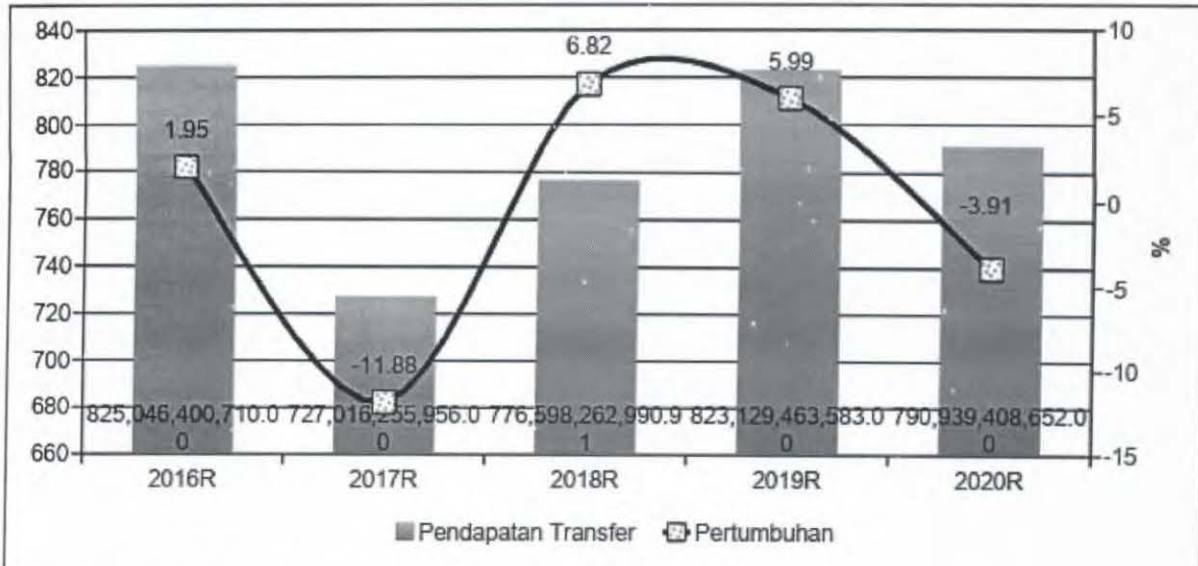


Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021

**Gambar 3.4**  
Perkembangan PAD Kota Madiun Tahun 2016–2020

**Pertumbuhan PAD tahun 2019 mengalami peningkatan yang relatif tinggi dibandingkan tahun 2018.** Tahun 2019 merupakan capaian pertumbuhan PAD tertinggi dengan nilai pertumbuhan sebesar 9,18 persen. Kemudian PAD terus tertekan dengan pertumbuhan -1,35 pada tahun 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19. Namun jika dilihat dari grafik diatas, penurunan PAD tahun 2020 tidak terlalu parah. Dari sisi nominal PAD pada tahun 2020 masih lebih tinggi dibandingkan sebelum tahun 2019. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pandemi Covid-19 tidak terlalu berpengaruh terhadap PAD. Selanjutnya, perkembangan pendapatan transfer dapat dilihat dalam grafik berikut:

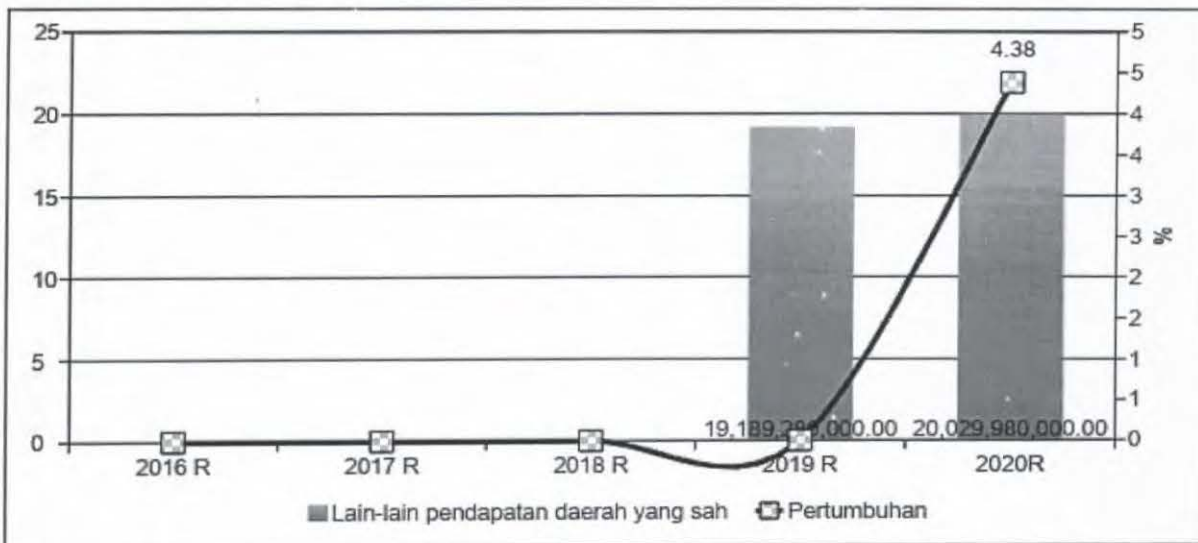




Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021

**Gambar 3.5**  
Perkembangan Pendapatan Transfer Kota Madiun Tahun 2016–2020

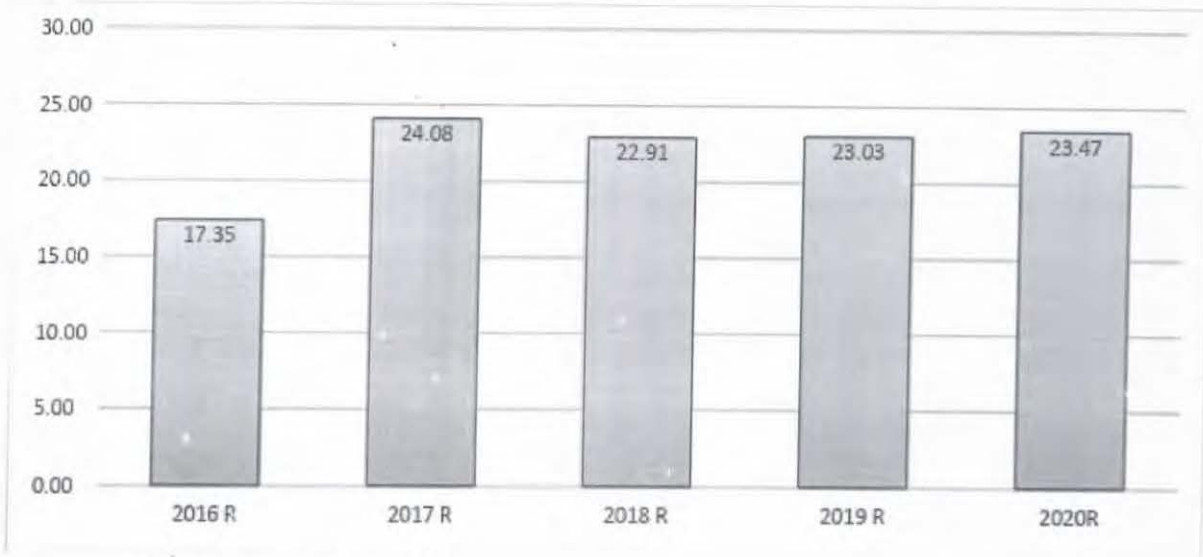
Realisasi pendapatan transfer tahun 2018 menunjukkan tren yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Persentase peningkatan pendapatan transfer tahun tersebut sebesar 6,82 persen namun selanjutnya pendapatan transfer terus turun hingga sebesar -3,91. Penurunan pendapatan transfer sejalan dengan kebijakan realokasi dan *refocusing* dari pemerintah pusat dalam upaya penanganan dan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Selanjutnya, perkembangan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah sebagai berikut:



Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021

**Gambar 3.6**  
Perkembangan Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Madiun Tahun 2016–2020

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah menunjukkan perkembangan sampai dengan tahun 2020. Pertumbuhan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2020 sebesar 4,38 persen. Nilai pertumbuhan yg positif ini adalah posisi terbaik selama lima tahun terakhir. Selanjutnya, mengenai perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) dapat dilihat dalam gambar berikut:



Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021

**Gambar 3.7**  
Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal (dalam %)  
Kota Madiun Tahun 2016–2020

Derajat desentralisasi fiskal mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2020, derajat desentralisasi fiskal sebesar 23,47 persen lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 23,03. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kemandirian daerah, terutama dalam kontribusinya terhadap pendapatan daerah di era pandemi Covid-19. Meskipun mengalami peningkatan, namun kemandirian fiskal masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan sebuah strategi peningkatan pendapatan daerah. Namun demikian, dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dihadapkan pada berbagai permasalahan sebagai berikut:

- Kondisi perekonomian mengalami kontraksi yang mengakibatkan kelesuan usaha, sehingga pendapatan daerah mengalami penurunan.
- Masih perlu ditingkatkannya strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah khususnya dalam penggalian potensi pendapatan daerah;



- Masih terbatasnya kesadaran wajib pajak dan retribusi daerah dalam membayar kewajibannya bagi pembangunan daerah;
- Masih perlu ditingkatkannya kapasitas sumber daya manusia dalam berbagai bidang tugas peningkatan pendapatan asli daerah;
- Masih perlu ditingkatkannya sarana dan prasarana pendukung dalam mobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah;
- Belum optimalnya keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memberdayakan potensi ekonomi daerah serta perannya dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

**Tabel 3.2**  
Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Madiun 2016 – 2020

Kode	Uraian	REALISASI									
		2016R	2017R		2018R		2019R		2020R		Rata-rata Pertumbuhan
		Rp	Rp.	%P	Rp.	%P	Rp.	%P	Rp.	%P	%
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>998.282.330.537,80</b>	<b>957.624.973.325,14</b>	<b>-4,07</b>	<b>1.007.446.240.137,64</b>	<b>5,20</b>	<b>1.094.367.497.996,59</b>	<b>8,63</b>	<b>1.059.913.793.139,59</b>	<b>-3,17</b>	<b>1,65</b>
<b>01.01</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>173.235.929.827,80</b>	<b>230.608.717.369,14</b>	<b>33,12</b>	<b>230.847.977.146,73</b>	<b>0,10</b>	<b>252.048.754.413,59</b>	<b>9,18</b>	<b>248.944.404.487,59</b>	<b>-1,35</b>	<b>10,26</b>
01.01.01	Pajak daerah	64.045.559.079,36	75.224.831.585,44	17,46	83.454.704.361,41	10,94	91.077.191.655,45	9,13	90.291.466.033,07	-0,87	9,17
01.01.02	Retribusi daerah	16.762.538.293,00	18.407.218.016,50	9,81	19.138.960.648,50	3,98	20.301.325.919,00	6,07	15.619.539.719,00	24,68	-1,20
01.01.03	Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	11.172.031.994,51	13.320.249.415,39	19,23	13.365.402.573,59	0,34	14.641.711.340,55	9,55	15.216.268.562,40	3,92	8,26
01.01.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	81.255.800.460,93	123.656.418.351,81	52,18	114.888.909.563,23	-7,09	126.028.525.498,59	9,70	127.817.130.173,12	1,45	14,06
<b>01.02</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>825.046.400.710,00</b>	<b>727.016.255.956,00</b>	<b>-11,88</b>	<b>776.598.262.990,91</b>	<b>6,82</b>	<b>823.129.463.583,00</b>	<b>5,99</b>	<b>790.939.408.652,00</b>	<b>-3,91</b>	<b>-0,75</b>
<b>01.02.01</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>758.944.056.206,00</b>	<b>646.473.881.834,00</b>	<b>-14,82</b>	<b>678.417.066.007,00</b>	<b>4,94</b>	<b>737.079.907.650,00</b>	<b>8,65</b>	<b>705.872.676.797,00</b>	<b>-4,23</b>	<b>-1,37</b>
1.2.1.01.01.1	Dana bagi hasil pajak	34.049.572.850,00	27.325.331.947,00	-19,75	25.390.798.853,00	-7,08	16.076.390.385,00	36,68	34.444.290.949,20	114,25	12,69
1.2.1.01.01.2	Dana bagi hasil bukan pajak	18.880.139.043,00	18.680.122.868,00	-1,06	67.464.332.495,00	261,16	52.685.578.633,00	21,91	51.666.436.423,80	-1,93	59,06
1.2.1.01.01.3	Dana Bagi hasil cukai	12.409.333.957,00	13.308.934.159,00	7,25	13.119.146.000,00	-1,43	13.939.983.813,00	6,26	0,00	100,00	-21,98
1.2.1.01.01.4	Dana Alokasi Umum	511.375.289.000,00	502.392.070.000,00	-1,76	501.753.246.649,00	-0,13	522.596.024.000,00	4,15	473.852.439.000,00	-9,33	-1,76
1.2.1.01.01.5	Dana Alokasi khusus	140.847.099.356,00	77.267.422.860,00	-45,14	70.689.542.010,00	-8,51	76.239.204.819,00	7,85	72.596.481.424,00	-4,78	-12,65
1.2.1.01.02	Dana Insentif Daerah	41.382.622.000,00	7.500.000.000,00	-81,88	0	-100,00	55.542.726.000,00	0,00	73.313.029.000,00	31,99	-37,47
1.2.1.01.03	Dana Otonomi Khusus	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
<b>01.02.02</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>66.102.344.504,00</b>	<b>80.542.374.122,00</b>	<b>21,84</b>	<b>98.181.196.983,91</b>	<b>21,90</b>	<b>86.049.555.933,00</b>	<b>12,36</b>	<b>85.066.731.855,00</b>	<b>-1,14</b>	<b>7,56</b>
1.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil	64.431.714.504,00	79.825.524.122,00	23,89	79.153.128.616,00	-0,84	84.934.976.933,00	7,30	84.049.652.855,00	-1,04	7,33
1.2.2.02	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	1.670.630.000,00	716.850.000,00	-57,09	19.028.068.367,91	2.554,40	1.114.579.000,00	94,14	1.017.079.000,00	-8,75	598,60



Kode	Uraian	REALISASI									
		2016R	2017R		2018R		2019R		2020R		Rata-rata Pertumbuhan
		Rp	Rp.	%P	Rp.	%P	Rp.	%P	Rp.	%P	%
<b>01.03</b>	<b>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</b>	-	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>19.189.280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.029.980.000,00</b>	<b>4,38</b>	<b>1,10</b>
01.03.01	Hibah	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	19.189.280.000,00	0,00	20.029.980.000,00	4,38	1,10
01.03.02	Dana darurat	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00
01.03.03	Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00

Sumber : BKAD Kota Madiun, 2021;

Keterangan : %P adalah persentase pertumbuhan

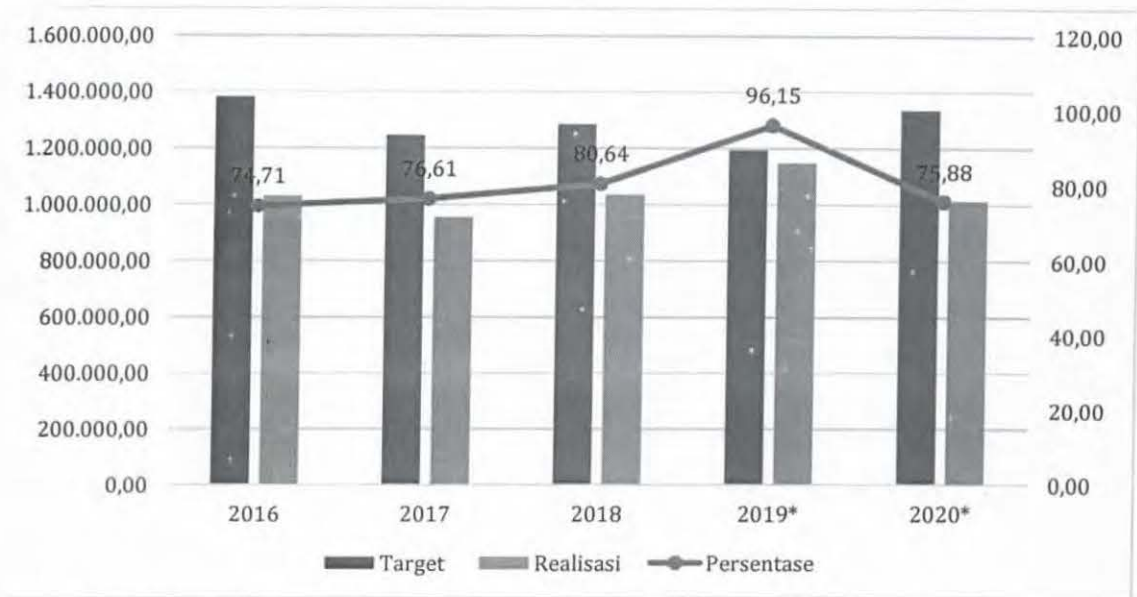
### **3.1.1.2 Realisasi Belanja Daerah**

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja sesuai PP 12 Tahun 2019 meliputi belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Belanja modal meliputi: belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai; belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.



Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.



Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021

**Gambar 3.8**  
Capaian Realisasi Belanja Daerah terhadap Target APBD  
Kota Madiun Tahun 2016–2020

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, capaian realisasi belanja daerah terhadap target APBD relatif rendah. Capaian tertinggi hanya terjadi pada tahun 2019, dimana nilai realisasinya sebesar 96,15 persen. Sedangkan pada tahun 2020, capaian realisasi belanja daerah terhadap target belanja RPJMD hanya mencapai 75,88 persen. Rendahnya pencapaian tersebut diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang mengharuskan setiap daerah untuk merealokasi dan merefokusing anggaran dalam upaya pemulihan dampak Covid-19. Ringkasan capaian realisasi belanja daerah tahun 2019 dan 2020 terhadap target RPJMD dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
Capaian Realisasi Belanja Daerah terhadap Target RPJMD pada Tahun 2019 dan 2020

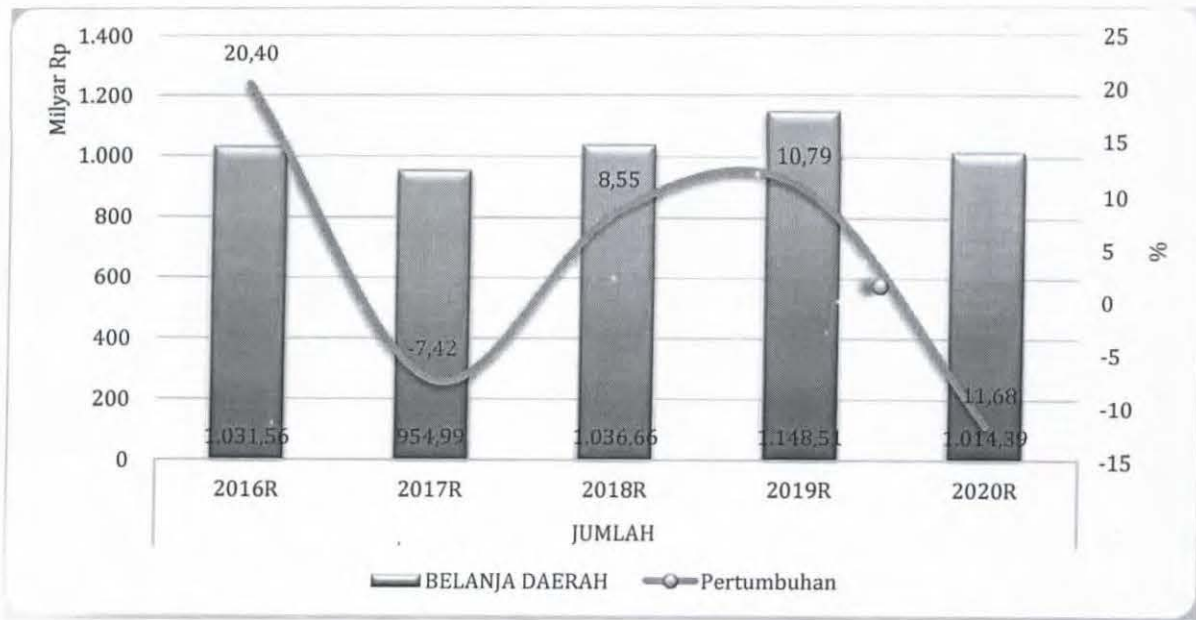
No.	Uraian	Kinerja Anggaran					
		RPJMD 2019	R 2019	Capaian 2019	RPJMD 2020	R 2020	Capaian 2020
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.194.552.988.508,00</b>	<b>1.148.511.321.355,75</b>	<b>96,15</b>	<b>1.336.799.891.335,00</b>	<b>1.014.631.224.152,20</b>	<b>75,90</b>
<b>02.01</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>484.105.379.319,00</b>	<b>402.432.149.206,46</b>	<b>83,57</b>	<b>505.424.220.335,00</b>	<b>403.213.660.624,53</b>	<b>79,78</b>
02.01.01	Belanja Pegawai	447.356.400.319,00	371.056.454.264,38	82,94	469.724.220.335,00	371.359.200.247,00	79,06
02.01.04	Belanja Hibah	16.277.528.500,00	15.603.619.810,08	95,86	16.000.000.000,00	11.938.091.671,53	74,61
02.01.05	Belanja Bantuan Sosial	16.843.600.000,00	15.001.277.870,00	101,63	16.000.000.000,00	12.854.873.000,00	80,34
02.01.06	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
02.01.07	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	627.851.000,00	651.920.000,00	103,83	700.000.000,00	700.062.000,00	100,01
02.01.08	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	118.877.262,00	3,96	3.000.000.000,00	6.361.433.706,00	212,05
<b>02.02</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>710.447.608.689,00</b>	<b>746.245.382.711,92</b>	<b>104,72</b>	<b>831.375.671.000,00</b>	<b>611.417.563.527,67</b>	<b>73,54</b>
02.02.01	Belanja Pegawai	80.751.200.451,00	69.165.928.315,00	85,65	84.788.760.474,00	70.381.629.872,00	83,01
02.02.02	Belanja Barang dan Jasa	354.068.347.460,00	369.278.712.052,86	103,65	371.771.764.833,00	349.956.080.581,10	94,13
02.02.03	Belanja Modal	275.628.060.778,00	307.800.742.344,06	111,67	374.815.145.693,00	191.079.853.074,57	50,98
	<b>Surplus/Defisit</b>	<b>-75.383.333.908,00</b>	<b>-54.310.033.921,79</b>	<b>121,52</b>	<b>-165.044.743.523,00</b>	<b>44.994.357.259,12</b>	<b>-27,26</b>

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian realisasi belanja daerah terhadap target RPJMD pada tahun 2019 dan 2020 tidak memenuhi target. Realisasi belanja daerah tahun 2019 sebesar 96,15 persen, sedangkan tahun 2020 hanya sebesar 75,90 persen. Rendahnya capaian realisasi tahun 2020 terhadap target RPJMD dikarenakan adanya realokasi dan refocusing anggaran tahun 2020 untuk penanganan Covid-19. Hal ini juga bisa dilihat dari realisasi baik belanja tidak langsung dan belanja langsung yang masing – masing hanya sebesar 79,78 persen dan 73,54 persen tahun 2020.

Secara umum selama lima tahun terakhir, jumlah belanja Pemerintah Kota Madiun terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah, kecuali di tahun 2020. Gambar 3.9 menunjukkan jumlah nominal dan rata-rata pertumbuhan total belanja daerah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Jumlah nominal belanja daerah Kota Madiun pada tahun 2016 mencapai sebesar Rp 1,031 triliun yang kemudian meningkat menjadi sebesar Rp. 1,148 trilyun tahun 2019 dan mengalami penurunan hingga Rp 1,014 trilyun pada tahun 2020 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,06 persen.

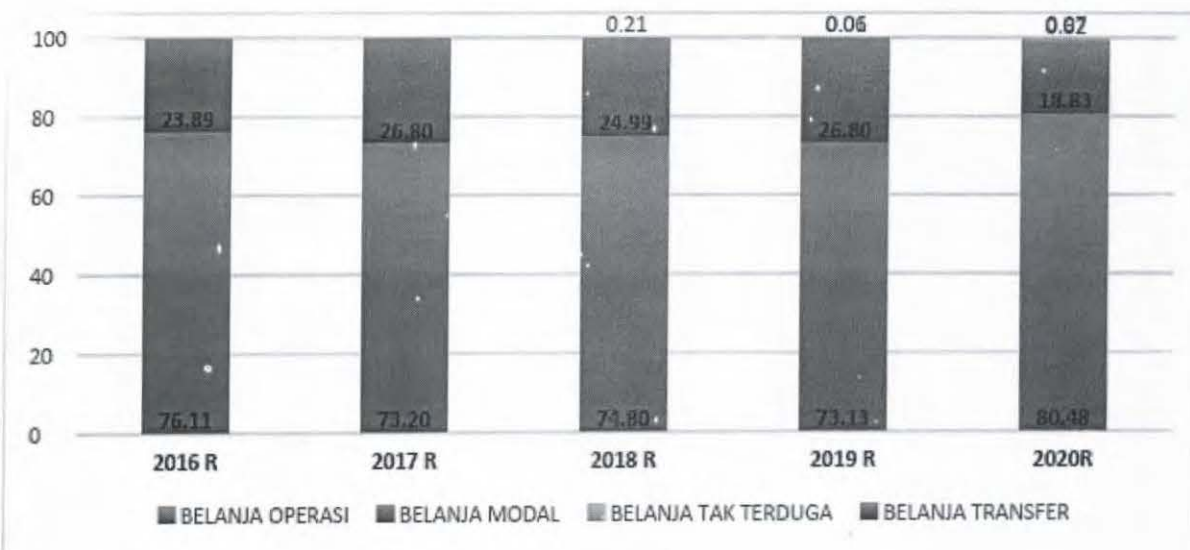




Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021

**Gambar 3.9**  
Perkembangan Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2016–2020

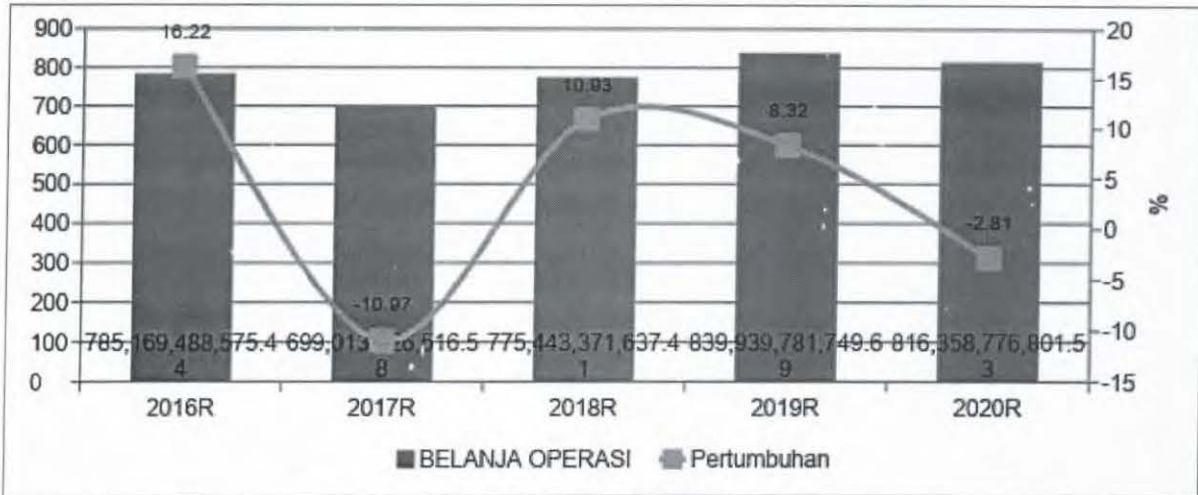
Pertumbuhan belanja daerah pada Tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 11,68 persen dari tahun sebelumnya. Secara nominal, belanja daerah tahun 2019 merupakan belanja daerah tertinggi dalam lima tahun terakhir yaitu sebesar 1,148 triliun dengan tingkat pertumbuhan 10,79 persen. Penurunan belanja daerah tertinggi, terjadi pada tahun 2020 yang dengan nilai nominal sebesar Rp 1.014,39 miliar.



Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021

**Gambar 3.10**  
Perkembangan Komposisi Belanja Daerah (dalam %) Kota Madiun Tahun 2016–2020

Komposisi belanja daerah selama lima tahun terakhir masih didominasi oleh belanja operasi yaitu sebesar 80,48 persen di tahun 2020. Belanja modal menjadi komponen terbesar kedua dalam belanja daerah dengan proporsi sebesar 18,83 tahun 2020. Angka tersebut mengalami penurunan di bandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 26,80 persen. Sedangkan belanja tak terduga dan transfer masing – masing hanya sebesar 0,62 persen dan 0,07 persen.

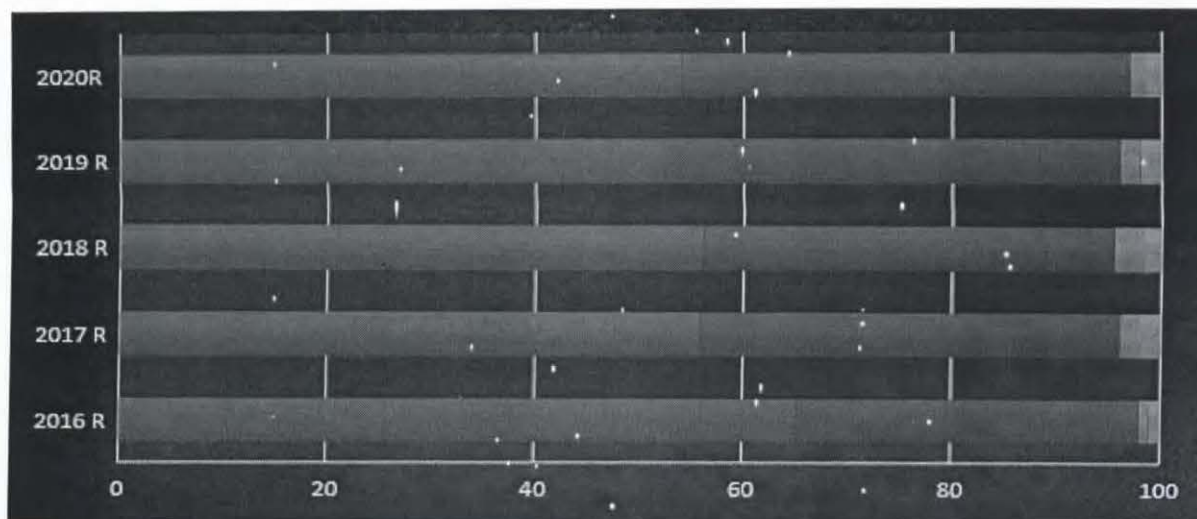


Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021

**Gambar 3.11**  
Perkembangan Pertumbuhan Belanja Operasi Kota Madiun  
Tahun 2016–2020

Dalam lima tahun terakhir, belanja operasi mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2020, belanja operasi mengalami penurunan hingga -2,81 persen atau sebesar 816,36 milyar. Pertumbuhan belanja operasi tertinggi terjadi di tahun 2018 dengan nilai sebesar 10,93 persen. Nilai tersebut mengalami penurunan di tahun setelahnya sebesar 8,32 meskipun secara nominal jumlah belanja operasi mengalami peningkatan. Perkembangan persentase belanja operasi Kota Madiun tahun 2016-2020 dapat dilihat dalam gambar berikut:

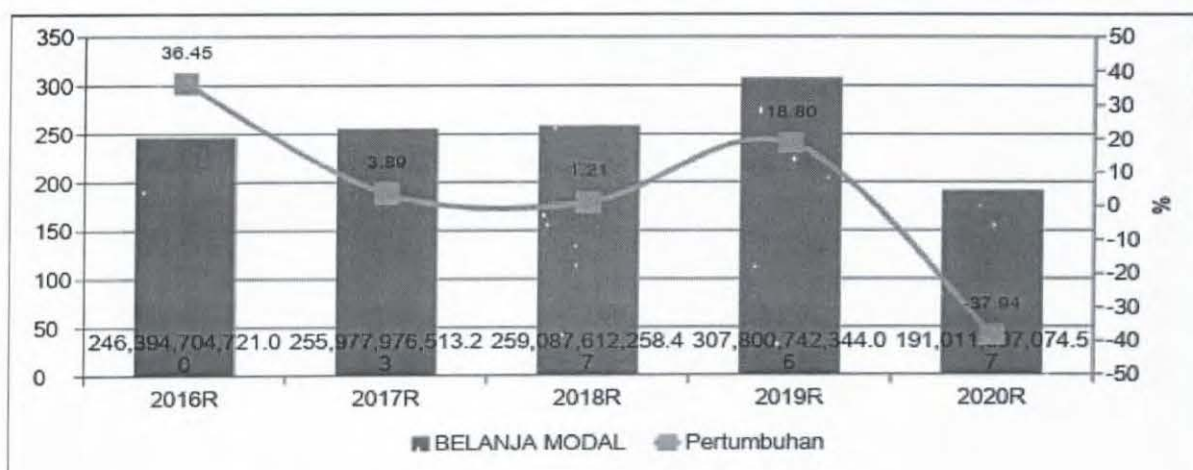




Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021

**Gambar 3.12**  
Perkembangan Komposisi Komponen Belanja Operasi (dalam %) Kota Madiun Tahun 2016–2020

Komposisi Belanja operasi dari tahun ke tahun memiliki tren yang relatif sama. Meskipun secara nominal nilainya berubah dari tahun ke tahun, komposisi terbesar terdapat pada belanja pegawai. Persentase belanja pegawai pada Tahun 2022 sebesar 54,10 persen. Angka tersebut lebih tinggi di bandingkan tahun 2019 namun lebih rendah dibandingkan sebelum tahun 2019 baik secara persentase maupun secara nominal.



Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021

**Gambar 3.13**  
Perkembangan Pertumbuhan Belanja Modal Kota Madiun Tahun 2016–2020

Belanja modal cenderung mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020 memberikan tekanan yang dalam terhadap belanja modal sebagai akibat adanya realokasi dan refokusing anggaran.

Pertumbuhan belanja modal mengalami kontraksi sebesar -37,94 atau sebesar 191,01 miliar. Nilai tersebut jauh berkurang dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami pertumbuhan sampai dengan 18,80 persen dengan nilai belanja modal sebesar 307,80 miliar. Angka tersebut merupakan belanja modal tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

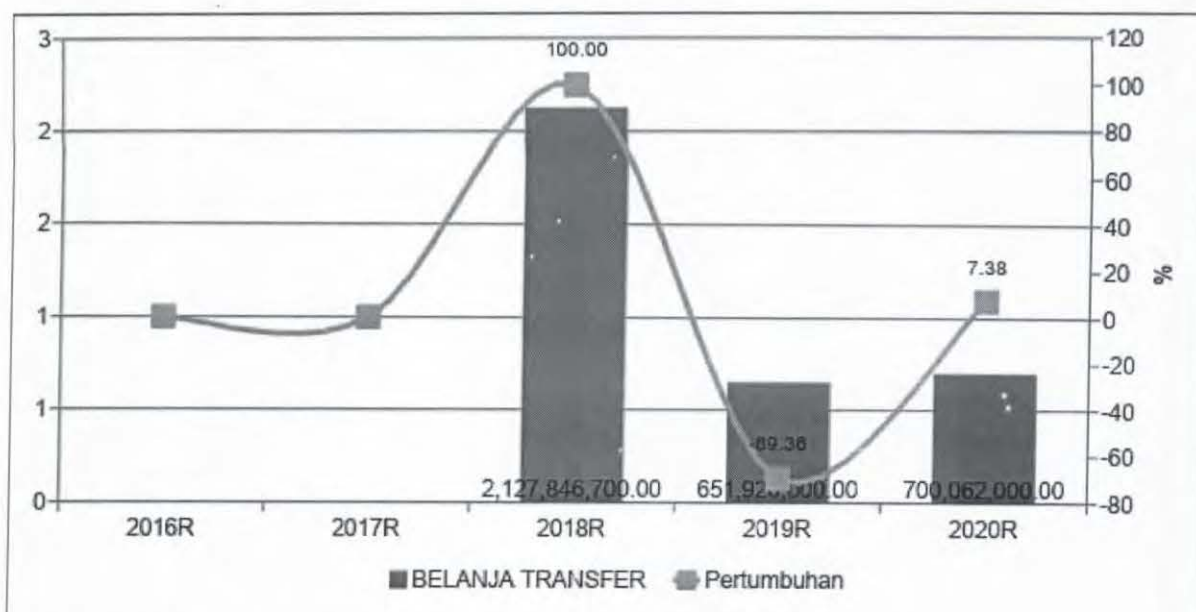


Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021

**Gambar 3.14**  
Perkembangan Pertumbuhan Belanja tak Terduga Kota Madiun  
Tahun 2016–2020

Belanja tak terduga mengalami peningkatan drastis sebagai dampak dari adanya Covid-19. Pada tahun 2020 belanja tak terduga sebesar 6,32 miliar atau meningkat sebesar 5217,38 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan tahun 2019, belanja tak terduga hanya sebesar 0,12 miliar dengan pertumbuhan mendekati nol. Peningkatan Belanja Tidak Terduga terjadi karena digunakan untuk penanganan Covid-19 di tiga cluster, baik untuk penanganan Kesehatan, Pemulihan Ekonomi Nasional maupun Jaring Pengaman Sosial. Dimana semuanya dianggarkan di Belanja Tidak Terduga karena penanganan Pandemi pada tahun 2020 belum bisa direncanakan dan kejadiannya ketika tahun anggaran sudah berjalan. Untuk bisa menganggarkan di Belanja Tidak Terduga itupun harus melakukan refocusing dan realokasi dari pagu anggaran belanja yang sudah dianggarkan. Jadi kenaikan anggaran Belanja Tidak Terduga adalah posting anggaran untuk penanganan pandemic covid-19





Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021

**Gambar 3.15**  
Perkembangan Pertumbuhan Belanja Transfer Kota Madiun  
Tahun 2016-2020

Pertumbuhan belanja transfer mengalami perkembangan yang fluktuatif. Belanja transfer pada tahun 2018 sebesar 2,13 miliar mengalami penurunan hingga 0,70 miliar tahun 2020. Jika dibandingkan antara tahun 2020 dan 2019, belanja transfer mengalami pertumbuhan hingga 7,38 persen atau secara nominal meningkat dari 0,65 miliar tahun 2019 menjadi 0,70 miliar tahun 2020.

Berdasarkan uraian perkembangan belanja daerah diatas, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut

1. Program pemulihan daerah sebagai dampak covid19 telah menyebabkan serapan anggaran relatif cukup rendah.
2. Komposisi belanja daerah masih didominasi oleh belanja operasi dengan nilai lebih dari 70 persen. Dimana sebagian besar penggunaan belanja operasi diperuntukan bagi belanja pegawai sekitar lebih dari 50 persen.
3. Belanja modal sebagai motor utama pembangunan hanya memiliki proporsi sekitar 25 persen dari total belanja daerah. Pandemi Covid-19 menyebabkan anggaran belanja modal dialihkan untuk program penanganan Covid-19. Sehingga beberapa program pembangunan mengalami stagnasi.

Selanjutnya, perkembangan nilai dan pertumbuhan belanja daerah Kota Madiun tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2016-2020

Kode	Uraian	REALISASI									Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2016R		2017R		2018R		2019R		2020R		
		Rp	Rp.	%P	Rp.	%P	Rp.	%P	Rp.	%P		
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.031.564.193.296,44</b>	<b>954.991.703.029,81</b>	<b>-7,42</b>	<b>1.036.658.830.595,88</b>	<b>8,55</b>	<b>1.148.496.711.114,00</b>	<b>10,79</b>	<b>1.014.391.890.792,10</b>	<b>-11,68</b>	<b>0,06</b>	
<b>05.01</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>785.169.488.575,44</b>	<b>699.013.726.516,58</b>	<b>-10,97</b>	<b>775.443.371.637,41</b>	<b>10,93</b>	<b>839.925.171.507,94</b>	<b>8,32</b>	<b>816.358.776.801,53</b>	<b>-2,81</b>	<b>1,37</b>	
05.01.01	Belanja Pegawai	511.243.214.266,00	391.631.558.502,00	-23,40	435.126.974.606,00	11,11	440.222.382.579,38	1,17	441.683.138.649,00	0,33	-2,70	
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	257.954.754.292,44	280.472.821.815,27	8,73	305.475.751.519,41	8,91	369.278.712.052,86	20,14	349.882.673.481,00	-4,66	8,28	
05.01.03	Belanja Bunga	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.04	Belanja Subsidi	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.05	Belanja Hibah	7.013.671.600,00	11.924.689.389,31	70,02	21.318.545.231,00	78,78	15.422.819.810,08	-26,81	11.938.091.671,53	-23,49	24,62	
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	8.957.848.417,00	14.984.656.810,00	67,28	13.522.100.281,00	-9,76	15.001.277.870,00	26,59	12.854.873.000,00	-24,90	14,80	
<b>05.02</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>246.394.704.721,00</b>	<b>255.977.976.513,23</b>	<b>3,89</b>	<b>259.087.612.258,47</b>	<b>1,21</b>	<b>307.800.742.344,06</b>	<b>18,80</b>	<b>191.011.897.074,57</b>	<b>-37,94</b>	<b>-3,51</b>	
05.02.01	Belanja Modal Tanah	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.160.897.084,00	103.557.504.743,48	66,60	47.310.430.082,75	-54,31	68.460.669.520,00	44,71	47.752.974.268,64	-30,25	6,68	
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53.614.816.421,00	43.416.541.452,75	-19,02	64.833.894.806,80	49,33	48.758.211.485,26	-24,80	38.202.379.414,91	-21,65	-4,03	
05.02.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	127.909.902.613,00	102.648.521.200,00	-19,75	138.271.368.268,92	34,70	184.022.541.935,80	33,09	100.281.245.964,15	-45,51	0,63	
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	463.668.600,00	3.188.874.942,00	587,75	3.542.965.670,00	11,10	2.888.082.876,00	-18,48	4.775.297.426,86	65,34	161,43	
05.02.05	Belanja Modal Aset Lainnya	2.245.420.003,00	3.166.534.175,00	41,02	5.128.953.430,00	61,97	3.671.236.527,00	-28,42	0,00	0,00	18,64	
<b>05.03</b>	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>118.877.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.321.154.916,00</b>	<b>5.217,38</b>	<b>1.304,34</b>	
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	0	0	0,00	0	0,00	118.877.262,00	0,00	6.321.154.916,00	5.217,38	1.304,34	
<b>05.04</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.127.846.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651.920.000,00</b>	<b>-69,36</b>	<b>700.062.000,00</b>	<b>7,38</b>	<b>-15,49</b>	
5.4.1	Belanja Transfer Ke Daerah Lain	0	0	0,00	2.127.846.700,00	0,00	651.920.000,00	-69,36	700.062.000,00	7,38	-15,49	
	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>1.031.564.193.296,44</b>	<b>954.991.703.029,81</b>	<b>-7,42</b>	<b>1.036.658.830.595,88</b>	<b>8,55</b>	<b>1.148.496.711.114,00</b>	<b>10,79</b>	<b>1.014.391.890.792,10</b>	<b>-11,68</b>	<b>0,06</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>-33.281.862.758,64</b>	<b>2.633.270.295,33</b>	<b>-107,91</b>	<b>-29.212.590.458,24</b>	<b>-1.209,37</b>	<b>-54.129.213.117,41</b>	<b>85,34</b>	<b>45.233.690.619,22</b>	<b>-183,54</b>	<b>-353,87</b>	

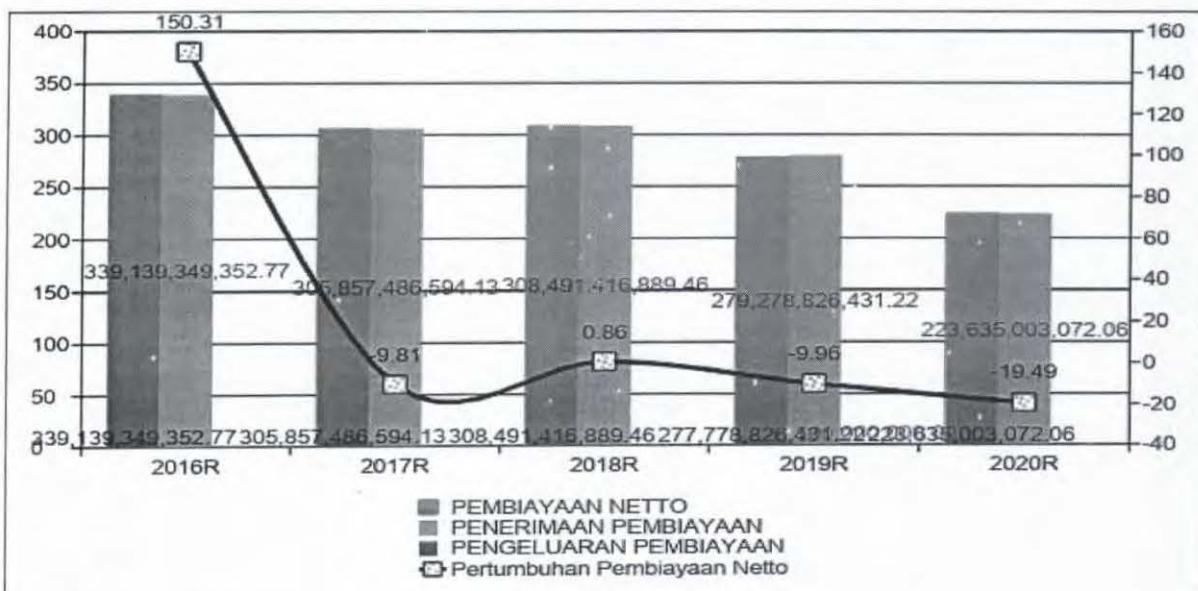
Sumber: BPPKAD Kota Madiun, 2021; Persentase adalah persentase pertumbuhan



**3.1.1.3 Realisasi Pembiayaan Daerah**

Berdasarkan PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan daerah didefinisikan sebagai semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan sumbernya, pembiayaan dibagi menjadi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang di antaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Sedangkan ketika APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.



Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021

**Gambar 3.16**  
Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Netto Tahun Berjalan Kota Madiun Tahun 2016–2020 (Miliar Rupiah)

Dari sisi pembiayaan, realisasi penerimaan pembiayaan menurun mencapai -19,49 persen pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya. Komponen utama penerimaan pembiayaan masih bersumber dari Silpa tahun sebelumnya. Sedangkan Pembiayaan netto pada Tahun 2020 juga mengalami penurunan hingga Rp 223,64 miliar. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian mengenai pembiayaan adalah sebagai berikut

1. Silpa tahun lalu masih relatif tinggi. Hal ini bisa menunjukkan kelemahan dalam perencanaan pembangunan tahunan. Namun disisi lain, silpa yang tinggi bisa jadi akibat adanya efisiensi belanja maupun penangguhan kegiatan pembangunan.
2. Pembiayaan pembangunan masih bertumpu kepada APBD, sehingga kedepan diperlukan pembiayaan alternatif seperti KPBU, CSR dan lain sebagainya.

Selanjutnya, rincian perkembangan nilai penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, serta pembiayaan netto Kota Madiun tahun 2016 sampai dengan proyeksi tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut:



**Tabel 3.5**  
**Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2016-2020**

Kode	Uraian	REALISASI										
		2016R		2017R		2018R		2019R		2020R		Rata-rata Pertumbuhan
		Rp	Rp.	%P	Rp.	%P	Rp.	%P	Rp.	%P	(%)	
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>											
<b>03.01</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>339.139.349.352,77</b>	<b>305.857.486.594,13</b>	<b>-9,81</b>	<b>308.491.416.889,46</b>	<b>0,86</b>	<b>279.278.826.431,2 2</b>	<b>-9,47</b>	<b>223.635.003.072,0 6</b>	<b>-19,92</b>	<b>-9,59</b>	
03.01.01	Penggunaan SiLPA	339.135.179.352,77	305.857.486.594,13	-9,81	308.490.756.889,46	0,86	279.278.826.431,22	-9,47	223.635.003.072,06	-19,92	-9,59	
03.01.02	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
03.01.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
03.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
03.01.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	4.170.000,00	0	-100,00	660.000,00	0,00	0	-100,00	0	0,00	-50,00	
<b>03.02</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-100,00</b>	<b>-25,00</b>	
03.02.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
03.02.02	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0	0	0,00	0	0,00	1.500.000.000,00	0,00	0	-100,00	-25,00	
03.02.03	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
03.02.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>339.139.349.352,77</b>	<b>305.857.486.594,13</b>	<b>-9,81</b>	<b>308.491.416.889,46</b>	<b>0,86</b>	<b>277.778.826.431,2 2</b>	<b>-9,96</b>	<b>223.635.003.072,0 6</b>	<b>-19,49</b>	<b>-9,60</b>	
<b>03.03</b>	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)</b>	<b>305.857.486.594,13</b>	<b>308.490.756.889,46</b>	<b>0,86</b>	<b>279.278.826.431,22</b>	<b>-9,47</b>	<b>223.635.003.072,0 6</b>	<b>-19,92</b>	<b>268.868.693.691,2 8</b>	<b>20,23</b>	<b>-2,08</b>	

Sumber : BKAD Kota Madiun, 2021;

Keterangan : %P adalah persentase pertumbuhan

### **3.1.2 Neraca Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Gambaran umum perkembangan neraca daerah pada periode tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa jumlah nilai total nominal Aset daerah mengalami peningkatan seiring dengan dinamika pengelolaan keuangan daerah Kota Madiun. Pada tahun 2016, nilai total aset daerah mencapai sebesar Rp 2,38 triliun yang kemudian meningkat menjadi sebesar Rp 2,40 triliun pada tahun 2017. Pada tahun 2018, nilai total aset kembali meningkat sebesar Rp 2,53 triliun. Hingga tahun 2020 nilai total aset Kota Madiun mencapai 2,75 triliun.

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Pada pos kewajiban daerah terlihat bahwa sepanjang tahun 2016-2020, jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Madiun terdistribusi kedalam kewajiban jangka pendek.

Pada sisi lain, selama periode tahun 2016-2020, nilai ekuitas dana Kota Madiun juga mengalami peningkatan. Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi (1) Ekuitas Dana Lancar, (2) Ekuitas Dana Investasi, dan (3) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek.



Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang.

**Tabel 3.6**  
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah, Kota Madiun Tahun 2016-2020

	<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Rata-rata Pertumbuhan</b>
<b>1</b>	<b>ASET</b>						
<b>1.1</b>	<b>ASET LANCAR</b>						
1.1.1	Kas						
	Kas di Kas Daerah	275.264,59	39.929,24	37.960,62	203.192,16	230.933,57	157.456
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	20,39	41,69	7,07	2,11	1,81	13,2
	Kas di BLUD RSUD	28.036,19	23.695,74	14.145,09	11.466,24	29.262,96	21.321,24
	Kas di BLUD Puskesmas/JKN	2.536,32	3.527,55	5.779,79	7.160,29	6.899,78	5180,75
	Kas Lainnya	2.672,07	1.296,53	1.480,43	1.877,79	1.835,06	1.832,38
	Deposito berjangka 1 bulan	0	240.000,00	220.000,00	-	-	92.000
	Investasi Jangka Pendek						
1.1.2	Piutang						
	Piutang Pajak	3.433,17	4.062,93	5.147,92	9.834,98	8.748,31	6.245,46
	Piutang Retribusi	1.292,72	1.930,53	2.192,59	3.051,85	5.543,99	2.802,33
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	270,59	215,55	176,62	134,86	124,17	148,39
	Piutang Lain-Lain	30.636,06	35.482,42	23.021,78	32.039,14	1.169,19	24.469,72
	Penyisihan Piutang						
	Persediaan	12.648,25	11.908,19	16.671,48	17.001,49	17.752,06	15.196,29
	Belanja Dibayar Dimuka	1.521,88	2.502,47	2.725,16	2.657,86	19.008,00	5.683,07
	<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>358.332,23</b>	<b>364.592,85</b>	<b>329.308,64</b>	<b>285.335,48</b>	<b>299.326,03</b>	327.379
	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>						
	Investasi Non Permanen						
	Investasi Dana Bergulir	21.282,51	22.535,72	23.268,81	24.042,03	24.563,73	23.138,56



	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
	Penyisihan Investasi Dana Bergulir	-4.033,23	-4.282,74	-4.517,76	-4.532,36	-4.839,30	-4.441,08
	Investasi Permanen						
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	127.812,96	124.924,04	131.473,92	129.781,91	134.595,28	129.717,6
	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>	<b>145.062,24</b>	<b>143.177,02</b>	<b>150.224,97</b>	<b>149.291,58</b>	<b>134.595,27</b>	144.470,2
<b>1.2</b>	<b>ASET TETAP</b>						
1.2.1	Tanah	746.929,75	706.768,92	704.996,32	709.974,67	723.583,59	718.450,7
1.2.2	Peralatan dan Mesin	392.197,74	425.595,97	472.721,59	536.073,04	601.640,70	485.645,8
1.2.3	Gedung dan Bangunan	715.435,06	647.411,66	730.922,73	779.408,09	809.892,28	736.614
1.2.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	705.169,61	800.578,58	951.310,51	1.134.991,90	1.212.978,74	961.005
1.2.5	Aset Tetap Lainnya	4.770,70	4.806,74	5.751,21	5.915,704	6.141,44	5.477,16
1.2.6	Konstruksi dalam pengerjaan	45.425,93	48.322,38	6.106,39	4.916,06	7.607,04	22.475,56
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-787.931,45	-841.927,31	-	-	-	-325.972
	<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>1.821.997,34</b>	<b>1.791.556,94</b>	<b>1.917.628,09</b>	<b>2.090.514,51</b>	<b>2.158.740,82</b>	1.956.088
	<b>DANA CADANGAN</b>						
	Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
<b>1.3</b>	<b>ASET LAINNYA</b>						
1.3.1	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	-
	Tuntutan Perbendaharaan	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Tuntutan Ganti Rugi	2.925,74	155,65	155,65	155,65	121,44	702,83
1.3.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	31.979,76	88.411,76	119.532,90	119.532,90	119.532,90	95.798,04
	Bangun Guna Serah (Built of Transfer)	-	-	-	-	-	-

	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
1.3.4	Aset Tak Berwujud	2.673,16	1.768,02	2.202,96	3.410,65	3.251,33	2.661,22
	Aset Lain-lain	20.891,86	23.096,00	23.299,76	24.743,31	32.817,02	2.543.514
	<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>58.470,52</b>	<b>99.086,05</b>	<b>130.898,44</b>	<b>133.599,73</b>	<b>136.105,40</b>	111.632
	<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>2.383.862,33</b>	<b>2.398.412,87</b>	<b>2.528.060,14</b>	<b>2.658.741,30</b>	<b>2.748.491,96</b>	2.543.514
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>						
<b>2.1</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>						
2.1.1	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-	94	49	-	28,6
	Hutang Bunga	-	-	-	-	-	-
	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	-
	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - LK Bank	-	-	-	-	-	-
	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan	-	-	-	-	-	-
	Bukan Bank.	-	-	-	-	-	-
	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-	-	-	-
	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	3.948,53	4.963,94	6.039,49	5.782,08	4.482,21	5.043,25
	Utang Belanja	28.426,00	5.440,68	8.571	11.050,9	7.999,16	12.297,55



	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
	Utang Jangka Pendek Lainnya	166,39	164,78	56	-	-	77,43
	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>32.540,92</b>	<b>10.569,39</b>	<b>14.759,90</b>	<b>16.882,06</b>	<b>12.481,37</b>	14.070,32
	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>						
	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	-
	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-	-	-
	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bak	-	-	-	-	-	-
	Utang Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-	-	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>32.540,93</b>	<b>10.569,40</b>	<b>14.759,90</b>	<b>16.882,06</b>	<b>12.481,37</b>	17.446,73
<b>3</b>	<b>EKUITAS DANA</b>						
<b>3.1</b>	<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>						
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	305.857	308.490	279.278	223.635	268.868	277.225,6
	Pendapatan yang ditangguhkan	-	-	-	-	-	-
3.1.2	Cadangan Piutang	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Cadangan Persediaan	-	-	-	-	-	-

	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
	Cadangan Belanja Dibayar Dimuka	-	-	-	-	-	-
	Cadangan Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	-	-	-
	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang	-	-	-	-	-	-
	Jangka Pendek	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah Ekuitas Dana Lancar</b>	-	-	-	-	-	-
<b>3.2</b>	<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>						
3.2.1	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	-	-	-	-	-	-
3.2.2	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang	-	-	-	-	-	-
	Jangka Panjang.	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah Dana Investasi</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>EKUITAS DANA CADANGAN</b>						
	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
	RK PPKD	736.059,69	742.163,33	-	-	-	-
	RK SKPD	-736.059,69	-742.163,33	-	-	-	-
	<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>	<b>2.351.321,39</b>	<b>2.387.843,47</b>	<b>2.513.300,24</b>	<b>2.641.859,24</b>	<b>2.736.010,58</b>	2.526.067
	<b>TOTAL UTANG DAN EKUITAS DANA</b>	<b>2.383.862,31</b>	<b>2.398.412,87</b>	<b>2.528.060,14</b>	<b>2.658.741,30</b>	<b>2.748.491,96</b>	2.543.514

Sumber: Neraca Daerah Kota Madiun, 2016-2020



Berdasarkan neraca tersebut, kemudian dianalisis kemampuan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui perhitungan rasio. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas. Rasio kewajiban terhadap aset adalah kewajiban dibagi dengan aset, sedangkan rasio kewajiban terhadap ekuitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas. Rasio Lancar digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah Kota Madiun dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya.

**Tabel 3.7**  
Analisis Rasio Neraca Daerah Kota Madiun, 2016-2020 (Rp juta)

Rasio	Rumus	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Rasio Likuiditas</b>	Aset Lancar	358.332,23	364.592,85	329.308,64	285.335,48	299.326,03
	Kewajiban Jangka Pendek	32.540,92	10.569,39	14.759,90	16.882,06	12.481,37
	<b>Rasio Lancar</b>	<b>11,01</b>	<b>34,50</b>	<b>22,35</b>	<b>16,90</b>	<b>23,98</b>
	Aset Lancar - Persediaan	345.683,98	352.684,66	312.637,16	268.333,99	281.573,97
	Kewajiban Jangka Pendek	32.540,92	10.569,39	14.759,90	16.882,06	12.481,37
	<b>Quick Ratio</b>	<b>10,62</b>	<b>33,33</b>	<b>21,19</b>	<b>15,89</b>	<b>22,56</b>
<b>Rasio Solvabilitas</b>	Total Hutang	32.540,93	10.569,40	14.759,90	16.882,06	12.481,37
	Total Aset	2.383.862,31	2.398.412,87	2.528.060,14	2.658.741,30	2.748.491,96
	<b>Rasio Total Hutang (%)</b>	<b>1,37%</b>	<b>0,44%</b>	<b>0,59%</b>	<b>0,64%</b>	<b>0,46%</b>
	Total Hutang	32.540,93	10.569,40	14.759,90	16.882,06	12.481,37
	Total Ekuitas	2.351.321,39	2.387.843,47	2.513.300,24	2.641.859,24	2.736.010,58
	<b>Rasio Hutang/Modal (%)</b>	<b>1,38%</b>	<b>0,44%</b>	<b>0,59%</b>	<b>0,64%</b>	<b>0,46%</b>

Sumber: Neraca Daerah Kota Madiun, 2016-2020 (diolah)

Tabel diatas menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Madiun tahun 2016 sampai dengan 2020 yang dilihat dari rasio likuiditas dan solvabilitas. Hitungan rasio likuiditas berupa rasio lancar selama periode tahun 2016 sampai dengan 2020 terlihat mengalami fluktuasi seiring dengan dinamika perubahan komposisi kewajiban jangka pendek daerah. Demikaian juga dengan quick rasio yang mengalami tren fluktuatif selama lima tahun terakhir seiring dengan pemenuhan kewajiban jangka pendek daerah. Namun demikian secara keseluruhan terlihat bahwa cukup tingginya kemampuan keuangan daerah Kota Madiun dalam memenuhi kewajiban jangka pendek adalah cukup tinggi.

Kemudian jika dilihat kemampuan keuangan Kota Madiun dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya dapat terlihat dari rasio solvabilitas. Sepanjang tahun 2016-2020, rasio total hutang terhadap aset dan rasio hutang terhadap ekuitas mengalami tren fluktuatif. Pada tahun 2016 rasio hutang sebesar, 1,38 persen, pada tahun 2017 menurun drastis hingga mencapai 0,17 persen. Pada tahun 2018-2019 kembali meningkat hingga sebesar 0,64 persen. Pada tahun 2020 perlahan menurun hingga mencapai 0,44 persen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jumlah hutang jangka panjang daerah relatif kecil jika dibandingkan dengan kekayaan yang dimiliki oleh daerah.

Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun mengindikasikan bahwa Pemerintah dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Walaupun begitu, perlu diperhatikan nilai rasio lancar sangat fluktuatif dari tahun ke tahun. Nilai rasio yang tidak stabil dapat menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya juga mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

*Quick Ratio* lebih akurat dibandingkan rasio lancar (*current ratio*), dikarenakan *Quick ratio* telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai *quick ratio* neraca keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar daerah setelah dikurangi persediaan, mempunyai kemampuan yang kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya walaupun nilainya mengalami tren yang fluktuatif.



*Current ratio* dan *quick ratio* atas keuangan Pemerintah Kota Madiun adalah tergolong kuat. Termasuk rasio total hutang terhadap aset relatif kecil, seperti terlihat pada tabel di atas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan Pemerintah Kota Madiun relatif kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajibannya. Bahkan sebenarnya kapasitas keuangannya masih relatif besar bila akan dilakukan peminjaman dana untuk pembangunan-pembangunan, terlebih yang bersifat jangka panjang.

### **3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu**

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi berikut ini:

- a. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- b. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- e. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Kebijakan Umum Pendapatan Daerah**

Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun yang disepakati setiap tahunnya, maka secara umum kebijakan umum pendapatan daerah Kota Madiun tahun-tahun anggaran sebelumnya sebagai berikut:

- a. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- b. Seluruh penerimaan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.
- c. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sebagai komitmen taat azas dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Madiun menetapkan kebijakan terkait pendapatan daerah sebagai berikut:
  1. Pendapatan Asli Daerah
    - a. Dalam upaya merencanakan target pendapatan asli daerah dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi penerimaan pemerintah daerah serta optimalisasi pencapaiannya.
    - b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun berkenaan.
    - c. Dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, *law enforcement* dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah.



d. Melakukan upaya peningkatan penerimaan bagian laba/deviden atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya yang dapat ditempuh melalui inventarisasi dan menata serta mengevaluasi nilai kekayaan daerah yang dipisahkan baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah). Jumlah rencana penerimaan yang dianggarkan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, telah mencerminkan rasionalitas dibandingkan dengan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan kembali ditetapkan sebagai penyertaan modal (telah diinvestasikan). Dalam upaya peningkatan PAD, pemerintah daerah mendayagunakan kekayaan daerah yang belum dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga sehingga menghasilkan pendapatan. Penyertaan modal pada pihak ketiga ditetapkan dengan peraturan daerah.

## 2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kota Madiun terdiri dari; Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Pajak (DBH-Pajak) dan Sumber Daya Alam (SDA).

- a. Pendapatan dari DBH-Pajak dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran berkenaan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran berkenaan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran berkenaan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran berkenaan belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir;
- b. Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun berkenaan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran berkenaan belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DAU dan DAK didasarkan pada realisasi pendapatan DAU dan DAK selama 3 (tiga) tahun terakhir.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
  - a. Hibah yang diterima berupa uang harus dianggarkan dalam APBD dan didasarkan atas naskah perjanjian hibah antara pemerintah daerah dan pemberi hibah. Sumbangan yang diterima dari organisasi/lembaga tertentu/perorangan atau pihak ketiga, yang tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran maupun pengurangan kewajiban pihak ketiga/pemberi sumbangan diatur dalam peraturan daerah.
  - b. Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana penyesuaian dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### **Kebijakan Umum Belanja Daerah**

Secara umum, kebijakan umum keuangan daerah menyangkut tentang belanja daerah Kota Madiun Tahun 2011-2015, sebagai berikut:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- d. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



### 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

#### 3.2.1.1 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Belanja operasi memiliki proporsi terbesar dalam belanja daerah dengan rata-rata proporsi selama lima tahun terakhir sebesar 75,54 persen. Belanja tersebut diikuti oleh belanja modal dengan proporsi rata-rata sebesar 24,26 persen. Proporsi belanja terendah adalah belanja tak terduga dan transfer dengan nilai rata-rata proporsi masing-masing sebesar 0,13 persen dan 0,07 persen. Perkembangan proporsi belanja daerah dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.8**  
Proporsi Realisasi Belanja Daerah Kota Madiun, 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rerata
<b>BELANJA OPERASI</b>	76,11	73,20	74,80	73,13	80,48	75,54
Belanja Pegawai	65,11	56,03	56,11	52,41	54,10	56,75
Belanja Barang dan Jasa	32,85	40,12	39,39	43,69	42,86	39,78
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	0,89	1,71	2,75	1,86	1,46	1,73
Belanja Bantuan Sosial	1,14	2,14	1,74	2,04	1,57	1,73
<b>BELANJA MODAL</b>	23,89	26,80	24,99	26,80	18,83	24,26
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25,23	40,46	18,26	22,24	25,00	26,24
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21,76	16,96	25,02	15,84	20,00	19,92
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	51,91	40,10	53,37	59,79	52,50	51,53
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,19	1,25	1,37	0,94	2,50	1,25
Belanja Modal Aset Lainnya	0,91	1,24	1,98	1,19	0,00	1,06
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	0,00	0,00	0,00	0,01	0,62	0,13
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	40,00
<b>BELANJA TRANSFER</b>	0,00	0,00	0,21	0,06	0,07	0,07
Belanja Transfer Ke Daerah Lain	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	60,00
<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	%	%	%	%	%	%

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kota Madiun, 2016-2020 (diolah)

#### 3.2.1.2 Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Dalam kerangka untuk melaksanakan fungsi pelayanan dan pembangunan daerah, maka pemerintah daerah membutuhkan sumber pembiayaan *overhead cost* bagi sumber daya pegawai maupun barang jasa serta kebutuhan lainnya.

Dalam konteks penganggaran daerah, *overhead cost* pemerintah ini diletakkan pada berbagai pos pembelanjaan belanja tidak langsung dan belanja langsung. Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kota Madiun tertuang pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.9**  
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama, Tahun 2016 – 2020 (Rp juta)

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	RATA-RATA PER TUMBUHAN
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
<b>A</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>319.592.121.409,00</b>	<b>250.060.682.678,31</b>	<b>324.807.335.863,00</b>	<b>325.250.812.396,08</b>	<b>307.373.774.797,53</b>	<b>105,8</b>
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	303.399.209.708,00	226.393.833.947,00	222.510.284.513,00	225.712.878.659,00	221.623.558.333,00	1,02
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	2.999.290.000,00	3.310.593.550,00	4.414.005.000,00	4.454.496.650,00	4.545.272.900,00	0,98
3	Belanja Bunga						
4	Belanja Bagi Hasil						
5	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	3.214.958.401,00	3.014.975.014,00	4.563.509.829,00	3.992.809.987,00	3.817.429.733,00	1,05
6	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah		892.744.078,00				
7	Tunjangan Profesi Guru			57.829.152.600,00	60.014.609.420,00	51.894.487.160,00	1,16
8	Belanja Hibah	4.895.131.600,00	11.924.689.389,31	21.318.545.231,00	15.422.819.810,08	11.938.091.671,53	1,29
9	Belanja Bantuan Sosial	4.455.685.000,00	3.896.000.000,00	12.043.991.990,00	15.001.277.870,00	12.854.873.000,00	1,17
10	Belanja Bantuan Keuangan	627.846.700,00	627.846.700,00	2.127.846.700,00	651.920.000,00	700.062.000,00	93,12
<b>B</b>	<b>Pembiayaan Pengeluaran</b>	<b>339.139.349.352,77</b>	<b>305.857.486.594,13</b>	<b>308.491.416.889,46</b>	<b>279.278.826.431,22</b>	<b>223.650.613.313,81</b>	<b>124,87</b>
1	Pembentukan Dana Cadangan						
2	Pembayaran Pokok Utang						
3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	4.170.000,00		660.000,00		1.000.000,00	0,00
4	Pendapatan Asli Daerah		14.759.189.827,80				
5	Dana Perimbangan		(62.257.218.794,00)				
6	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		4.199.693.504,00				
7	Belanja	339.135.179.352,77	349.155.822.056,33	308.490.756.889,46	279.278.826.431,22	223.649.613.313,81	124,87
8	PD, Aneka Usaha				1.500.000.000,00		
	<b>TOTAL (A+B)</b>	<b>658.731.470.761,77</b>	<b>555.918.169.272,44</b>	<b>633.298.752.752,46</b>	<b>604.529.638.827,30</b>	<b>531.024.388.111,34</b>	<b>113,84</b>

Sumber : BKAD Kota Madiun, 2021



**Tabel 3.10**  
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur, Tahun 2016 – 2020 (Rp juta)

Uraian		2016	2017	2018	2019	2020
<b>BELANJA</b>		<b>1.031.564.193.296,44</b>	<b>954.991.703.029,81</b>	<b>1.036.658.830.595,88</b>	<b>1.148.496.711.114,00</b>	<b>1.014.631.224.152,20</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>		<b>785.169.488.575,44</b>	<b>699.013.726.516,58</b>	<b>775.443.371.637,41</b>	<b>839.925.171.507,94</b>	<b>816.557.831.371,63</b>
<b>Belanja Pegawai</b>		<b>511.243.214.266,00</b>	<b>391.631.558.502,00</b>	<b>435.126.974.606,00</b>	<b>440.222.361.775,00</b>	<b>441.740.830.119,00</b>
	Dinas Pendidikan	309.888.670.825,00	190.667.725.306,00	188.392.661.089,00	190.598.262.380,00	174.792.378.157,00
	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	25.854.939.831,00	29.478.458.362,00	34.821.126.933,00	34.902.936.663,00	37.008.693.188,00
	RSUD	17.058.483.673,00	18.121.145.987,00	24.000.063.885,00	26.891.041.812,00	28.400.006.313,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.180.172.987,00	7.139.040.557,00	10.132.708.471,00	10.252.671.794,00	8.744.217.456,00
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	3.763.249.708,00	5.203.929.512,00	5.265.542.820,00	5.633.900.438,00
	DKP	10.284.328.415,00				
	Satuan Polisi Pamong Praja	3.939.250.867,00	6.136.502.599,00	6.926.109.921,00	7.039.951.936,00	8.151.783.648,00
	BPBD	2.057.707.835,00	1.046.778.306,00	1.151.970.296,00	1.174.721.906,00	1.367.637.708,00
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	4.352.723.468,00	4.522.137.531,00	4.661.065.597,00	4.526.201.295,00
	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	4.114.957.456,00	3.027.192.588,00	3.492.130.226,00	3.448.385.833,00	3.800.017.709,00
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.598.634.955,00		5.117.732.126,00	5.023.791.156,00	5.021.091.735,00
	Dinas Lingkungan Hidup	1.723.335.204,00	9.996.330.551,00	12.927.368.492,00	12.669.999.211,00	12.858.999.568,00
	Dinas Dukcapil	3.500.081.902,00	3.669.964.657,00	3.892.052.695,00	4.045.559.954,00	3.816.623.191,00
	Dinas Perhubungan	8.544.802.598,00	6.518.188.768,00	7.825.283.871,00	7.593.403.732,00	8.192.811.571,00
	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	3.798.279.607,00	4.663.942.133,00	4.910.728.226,00	4.580.348.886,00
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.895.541.856,00	3.231.946.318,00	4.304.380.668,00	4.162.051.362,00	4.090.955.679,00
	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	4.089.186.986,00	3.594.891.953,00	3.406.259.426,00	3.347.198.454,00	4.178.015.160,00
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.752.853.548,00	1.982.907.306,00	2.440.049.669,00	2.593.258.260,00	3.303.713.338,00
	KDH dan Wakil KDH	726.229.228,00	561.900.334,00	659.314.045,00	629.404.684,00	705.267.744,00
	D P R D	6.796.418.337,00	8.223.883.860,00			
	Sekretariat Daerah	16.304.636.330,00	15.054.347.984,00	16.046.794.687,00	17.021.915.077,00	5.163.056.258,00
	Bappelitbangda	6.192.831.237,00	4.779.555.122,00	4.905.377.524,00	4.991.143.746,00	5.762.592.782,00
	Bakesbangpol	3.275.795.140,00	3.215.943.249,00	3.515.004.868,00	3.238.532.219,00	3.631.686.789,00
	Sekretariat DPRD	2.261.542.566,00	2.667.863.632,00	14.742.708.233,00	15.084.343.422,00	14.964.304.663,00
	BPKAD	15.014.563.097,00	12.248.563.325,00	13.224.955.231,00	13.277.159.465,00	18.945.617.600,00

Uraian		2016	2017	2018	2019	2020
	Inspektorat	4.303.853.446,00	3.701.872.435,00	4.193.843.815,00	4.873.610.991,00	6.426.127.009,00
	Kecamatan Kartoharjo	8.170.491.295,00	7.302.913.570,00	9.957.214.856,00	9.395.694.869,00	9.498.941.202,00
	Kecamatan Taman	8.185.646.415,00	7.596.632.802,00	11.272.962.717,00	10.740.745.115,00	11.450.377.254,00
	Kecamatan Manguharjo	8.076.055.284,00	7.202.044.987,00	10.573.283.182,00	9.606.829.953,00	11.782.442.267,00
	BKPSDM	3.954.880.312,00	3.651.914.114,00	4.675.889.320,00	5.125.067.843,00	5.108.831.947,00
	Dinas Perdagangan	7.953.477.279,00	8.114.296.163,00	9.457.522.228,00	9.434.870.937,00	8.923.980.416,00
	BAPENDA	7.636.437.272,00	6.917.873.681,00	8.682.196.956,00	8.222.472.358,00	7.748.998.522,00
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		<b>257.954.754.292,44</b>	<b>280.472.821.815,27</b>	<b>305.475.751.519,41</b>	<b>369.278.712.052,86</b>	<b>350.024.036.581,10</b>
<b>Belanja Bunga</b>		-	-	-	-	-
<b>Belanja Subsidi</b>		-	-	-	-	-
<b>Belanja Hibah</b>		<b>7.013.671.600,00</b>	<b>11.924.689.389,31</b>	<b>21.318.545.231,00</b>	<b>15.422.819.810,08</b>	<b>11.938.091.671,53</b>
<b>Belanja Bantuan Sosial</b>		<b>8.957.848.417,00</b>	<b>14.984.656.810,00</b>	<b>13.522.100.281,00</b>	<b>15.001.277.870,00</b>	<b>12.854.873.000,00</b>
	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan	-	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial Kelompok Masyarakat	3.046.240.000,00	2.428.950.000,00	5.203.221.415,00	7.841.779.870,00	6.732.010.000,00
	Belanja Bantuan Sosial Anggota Masyarakat	1.334.445.000,00	1.290.050.000,00	6.695.930.575,00	7.092.630.000,00	6.036.763.000,00
	Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan	75.000.000,00	177.000.000,00	144.840.000,00	66.868.000,00	86.100.000,00
<b>BELANJA MODAL</b>		<b>246.394.704.721,00</b>	<b>255.977.976.513,23</b>	<b>259.087.612.258,47</b>	<b>307.800.742.344,06</b>	<b>191.011.897.074,57</b>
	Belanja Modal Tanah					<b>1.972.500.000,00</b>
	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	<b>62.160.897.084,00</b>	<b>103.557.504.743,48</b>	<b>47.310.430.082,75</b>	<b>68.460.669.520,00</b>	<b>68.549.937.238,00</b>
	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	<b>53.614.816.421,00</b>	<b>43.416.541.452,75</b>	<b>64.833.894.806,80</b>	<b>48.758.211.485,26</b>	<b>35.326.461.602,57</b>
	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	<b>127.909.902.613,00</b>	<b>102.648.521.200,00</b>	<b>138.271.368.268,92</b>	<b>184.022.541.935,80</b>	<b>80.833.932.839,00</b>
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	<b>463.668.600,00</b>	<b>3.188.874.942,00</b>	<b>3.542.965.670,00</b>	<b>2.888.082.876,00</b>	<b>1.521.068.895,00</b>
	Belanja Modal Aset Lainnya	<b>2.245.420.003,00</b>	<b>3.166.534.175,00</b>	<b>5.128.953.430,00</b>	<b>3.671.236.527,00</b>	<b>2.807.996.500,00</b>
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>		-	-	-	<b>118.877.262,00</b>	<b>6.361.433.706,00</b>
<b>BELANJA TRANSFER</b>		-	-	<b>2.127.846.700,00</b>	<b>651.920.000,00</b>	<b>700.062.000,00</b>

Sumber: BKAD Kota Madiun , 2021



Berdasarkan tabel berikut, terlihat bahwa Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur secara mengalami pasang surut. Pada tahun 2013, proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur mencapai sebesar 48,17% yang kemudian menurun menjadi sebesar 38,23% pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 43,31% dan kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 34,86% pada tahun 2018.

**Tabel 3.11**  
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Madiun,  
Tahun 2016-2020 (Rp juta)

No.	Uraian	Belanja (Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
		(a)	( b )	(a) / (b) x 100%
1.	Tahun Anggaran 2016	511.243.214.266,00	1.370.703.542.649,21	37,30
2.	Tahun Anggaran 2017	391.631.558.502,00	1.260.849.189.623,94	31,06
3.	Tahun Anggaran 2018	435.126.974.606,00	1.345.150.247.485,34	32,35
4.	Tahun Anggaran 2019	440.222.361.775,00	1.427.775.537.545,22	30,83
5.	Tahun Anggaran 2020	441.740.830.119,00	1.238.281.837.466,01	35,67

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kota Madiun, 2016- 2020 (diolah)

### 3.2.2 Analisis Pembiayaan

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan daerah didefinisikan sebagai semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan sumbernya, pembiayaan dibagi menjadi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang di antaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Sedangkan ketika APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Surplus/Defisit Riil adalah realisasi pendapatan daerah dikurangi realisasi belanja daerah ditambah dengan pengeluaran pembiayaan daerah. Surplus/Defisit riil APBD Kota Madiun selama kurun waktu tahun 2016-2020 disajikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.12**  
Realisasi Pembiayaan Kota Madiun Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pendapatan Daerah	998.282.330.537,80	957.624.973.325,14	1.007.446.240.137,64	1.094.367.497.996,59	1.059.625.581.411,32
2	Belanja Daerah	1.031.564.193.296,44	954.991.703.029,81	1.036.658.830.595,88	1.148.511.321.355,75	1.014.391.890.792,10
	Surplus/Defisit	-33.281.862.758,64	2.633.270.295,33	-29.212.590.458,24	-54.143.823.359,16	45.233.690.619,22
3	Pembiayaan daerah					
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	339.139.349.352,77	305.857.486.594,13	308.491.416.889,46	279.278.826.431,22	223.635.003.072,06
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	-	1.500.000.000,00	-
	Pembiayaan Netto	339.139.349.352,77	305.857.486.594,13	308.491.416.889,46	277.778.826.431,22	223.635.003.072,06
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	305.857.486.594,13	308.490.756.889,46	279.278.826.431,22	223.635.003.072,06	268.868.693.691,28

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kota Madiun, 2016- 2020 (diolah)

Dari tabel di atas, terlihat bahwa dari kurun waktu tahun 2016-2020, secara garis besar terjadi peningkatan pembiayaan netto pada setiap tahunnya sampai tahun 2018. Sedangkan tahun 2019 dan 2020 pembiayaan netto cenderung menurun. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain berasal dari pelampauan pendapatan, penghematan belanja, kewajiban pada pihak ketiga yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum terselesaikan dan sisa dana lanjutan.



Selama tiga tahun terakhir, SilPA tahun anggaran sebelumnya relatif tinggi. Pada tahun 2020, SilPA mengalami peningkatan yang cukup tinggi, setelah ditahun 2019 mengalami penurunan yang tinggi pula di bandingkan tahun sebelumnya. Perencanaan pembiayaan mutlak dilakukan untuk mengoptimalkan SilPA khususnya untuk anggaran tahun berikutnya.

**Tabel 3.13**

Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kota Madiun Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Saldo Kas Neraca Daerah	308.529.553.683,83	68.490.756.889,46	279.373.090.431,22	223.698.605.054,81	268.933.182.301,20
	Dikurangi :					
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	32.540.925.644,25	10.569.398.509,44	14.759.899.497,48	16.882.059.880,05	12.481.370.812,44
3	Kegiatan Lanjutan					
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	275.988.628.039,58	57.921.358.380,02	264.613.190.933,74	206.816.545.174,76	256.451.811.488,76

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kota Madiun, 2016-2020 (diolah)

**Tabel 3.14**  
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Madiun Tahun 2016-2020

No	Uraian	Proporsi Dari Total Devisit Riil									
		(2016)	%	(2017)	%	(2018)	%	(2019)	%	(2020)	%
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	305.857.486.594,13		308.490.756.889,46		279.278.826.431,22		223.649.613.313,81		268.933.182.301,00	
2	Pencairan Dana Cadangan	0		0		0		0		0	
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0		0		0		0		0	
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0		0		0		0		0	
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4.170.000,00		0		660.000,00		0		1.000.000,00	
6	Penerimaan Piutang Daerah	0		0		0		0		0	

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kota Madiun, 2016-2020 (diolah)

**Tabel 3.15**  
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Madiun Tahun 2016-2020 (Rp juta)

No	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp	% dari silpa	Rp	% dari silpa	Rp	% dari silpa	Rp	% dari silpa	Rp	% dari silpa
1	Jumlah SiLPA	305.857.486.594,13		308.490.756.889,46		279.278.826.431,22		223.649.613.313,81		268.932.182.301,20	
	Pelampauan penerimaan PAD	14.759.189.827,80	4,83	38.595.466.369,14	12,51	24.674.582.191,73	8,84	25.600.672.907,59	11,45	26.178.521.061,59	9,73
	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	0	0	0	0	5.011.357.623,00	1,79	0	0	22.847.186.797,00	8,50
	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	3.783.304.504,00	1,24	19.177.114.122,00	6,22	663.457.367,91	0,24	0	0	20.313.418.855,00	7,55
	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	287.314.992.262,33	93,94	250.718.176.398,32	81,27	248.929.429.248,58	89,13	198.048.940.406,22	88,55	199.593.055.587,61	74,22
	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kegiatan lanjutan		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kota Madiun, 2016- 2020 (diolah)



Berdasarkan uraian dan penyajian tabel diatas selanjutnya diuraikan kesimpulan analisis kebijakan pembiayaan daerah antara lain:

- Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran berkenaan. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pinjaman daerah.
- Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

### 3.3 Kerangka Pendanaan

Setelah menguraikan kondisi pengelolaan keuangan daerah masa lalu sampai tahun 2020, maka selanjutnya dapat digambarkan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah dari tahun 2021 hingga tahun 2024 mendatang.

#### 3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Proyeksi pendapatan Kota Madiun dilakukan berdasarkan proyeksi asumsi makro yang disesuaikan dengan asumsi makro nasional dan juga perkembangan data dalam beberapa tahun sebelumnya. Asumsi makro nasional dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3.16**  
Kerangka Makro Ekonomi Indonesia Tahun 2020-2024

	2020	2021f*	2022f*	2023f*	2024f*
<b>Pertumbuhan Ekonomi (%, YoY)</b>	-2,1	5,0	5,4 – 6,0	5,2 – 6,1	5,2 – 6,3
Investasi	-4,9	4,3	6,5 – 7,2	8,1 – 9,1	5,8 – 7,0

	2020	2021f*	2022f*	2023f*	2024f*
Ekspor	-7,7	7,3	6,5 – 7,1	5,6 – 6,5	5,2 – 6,3
Industri Pengolahan	-2,9	5,2	5,6 – 6,3	5,2 – 6,2	5,2 – 6,4
Jasa-Jasa	-1,4	6,0	6,2 – 6,9	5,9 – 6,9	6,0 – 7,1
<b>Stabilitas Makro-Ekonomi</b>					
Inflasi (% akhir periode)	1,7	2,5	2,0 – 4,0	2,0 – 4,0	1,5 – 3,5
Nilai Tukar (USD/IDR)	14.577	14.450	13.900 – 15.000	13.800 – 15.000	13.600 – 15.000
Defisit Transaksi Berjalan (% PDB)	-0,5	- 1,0	(1,6) – (1,7)	(1,8) – (2,1)	(2,2) – (2,7)
Cadangan Devisa (USD Miliar)	135,9	136,1	138,2 – 141,4	138,5 – 144,4	140,3 – 141,2

Sumber: Kemenkeu, 2021

Sejalan dengan asumsi makro nasional, proyeksi pendapatan dan belanja daerah juga mempertimbangkan proyeksi makro di Kota Madiun. Proyeksi makro dengan berbagai skenario dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3.17**  
Kerangka Makro Kota Madiun 2020-2024

Indikator Makro	2020	2021						2022						2023						2024					
		Pesimis		Moderat		Optimis		Pesimis		Moderat		Optimis		Pesimis		Moderat		Optimis		Pesimis		Moderat		Optimis	
Pertumbuhan Ekonomi	-3,39	-1,67	0,00	1,10	2,69	3,04	3,95	-1,65	0,02	1,13	2,71	3,06	3,97	-1,62	0,05	1,15	2,73	3,08	3,99	-1,60	0,07	1,17	2,76	3,11	4,02
Kemiskinan	4,98	5,34	5,19	4,91	4,97	4,32	4,38	5,34	5,19	4,91	4,97	4,32	4,38	5,32	5,17	4,89	4,95	4,30	4,36	5,30	5,14	4,87	4,92	4,28	4,33
TPT	8,32	8,26	8,38	5,62	5,74	3,79	3,85	8,26	8,38	5,62	5,74	3,79	3,85	8,24	8,36	5,60	5,72	3,77	3,83	8,21	8,34	5,57	5,70	3,74	3,80
Gini Rasio	0,39	0,44	0,42	0,37	0,35	0,35	0,34	0,44	0,42	0,37	0,36	0,35	0,34	0,42	0,40	0,35	0,33	0,33	0,32	0,39	0,37	0,32	0,30	0,30	0,29
Inflasi	1,86	4,90	4,78	2,87	2,63	1,98	1,86	4,90	4,66	2,87	2,63	1,98	1,86	4,87	4,76	2,84	2,61	1,95	1,84	4,85	4,73	2,82	2,59	1,93	1,81

Sumber: Data Proyeksi Bapalitbangda, 2021

Pada proyeksi makro di Kota Madiun terdapat 3 kelompok yaitu pesimis, moderat dan optimis. Dengan asumsi sebagai berikut :

1. Kondisi Pesimis adalah apabila :
  - a. Target Vaksin 100% belum dapat dicapai di Tahun 2022
  - b. Terjadi lonjakan kasus Covid-19 yang diikuti dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
2. Kondisi Moderat adalah apabila :
  - a. Target Vaksin 100% belum dapat dicapai di Tahun 2022
  - b. Kasus Covid-19 masih ada, namun perkembangannya cenderung stabil
3. Kondisi Optimis adalah apabila :
  - a. Target Vaksin 100% terselesaikan di Tahun 2021
  - b. Kasus Covid-19 mengalami penurunan, bahkan tidak terjadi perkembangan yang signifikan.



Selain mempertimbangkan asumsi makro ditingkat nasional dan lokal, dilakukan juga penyesuaian dan penilaian terhadap pertumbuhan pos pendapatan daerah selama tahun 2016-2020 dan perkiraan pertumbuhan ekonomi Kota Madiun dalam periode lima tahun yang akan datang, dengan kondisi awal APBD Kota Madiun tahun 2019 dan realisasi APBD Kota Madiun Tahun 2020. APBD tahun 2021 sudah di sahkan pada tahun 2020. Sehingga proyeksi yang dilakukan adalah mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Berdasarkan penghitungan tersebut, pendapatan daerah pada APBD tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp 1,003 triliun, dan meningkat menjadi Rp 1,111 triliun pada tahun 2024.

Komponen pendapatan yang berkontribusi paling besar diproyeksikan dari pendapatan transfer yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU). Seiring dengan perkembangan pendapatan daerah, belanja daerah juga akan mengalami peningkatan, dari sebesar Rp 1,129 triliun pada tahun 2022 kemudian meningkat menjadi sebesar Rp 1,164 triliun pada tahun 2023. Pada akhir periode RPJMD Madiun tahun 2024 ini, belanja daerah diperkirakan akan meningkat menjadi sebesar Rp 1,206 triliun.

**Tabel 3.18**

Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Madiun Tahun 2019-2024

NO	URAIAN	Data Tahun Dasar 2020 (Rp)	Tingkat Pertumbuhan (%)	Proyeksi			
				2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
<b>A</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	307.373.774.797,53	105,82	306.989.694.737,80	306.682.430.690,01	306.426.377.316,85	306.225.675.086,08
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	221.623.558.333,00	1,02	219.068.069.227,53	217.023.677.943,16	215.320.018.539,51	214.184.245.603,75
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	4.545.272.900,00	0,98	4.593.584.865,63	4.632.234.438,13	4.664.442.415,21	4.685.914.399,93
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Insentif Pemungutan Pajak daerah	3.817.429.733,00	1,05	3.836.256.962,13	3.851.318.745,43	3.863.870.231,00	3.872.237.888,00
6	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Tunjangan Profesi Guru	51.894.487.160,00	1,16	53.516.189.883,75	54.813.552.062,75	55.894.697.211,92	56.615.443.978
8	Belanja Hibah	11.938.091.671,53	1,29	12.158.184.173,77	12.334.258.175,55	12.480.986.510,00	12.578.805.400,26
9	Belanja Bantuan Sosial	12.854.873.000,00	1,17	13.117.347.625,00	13.327.327.325,00	13.502.310.408,33	13.618.965.797,22
19	Belanja Bantuan Keuangan	700.062.000,00	93,12	700.062.000,00	700.062.000	700.062.000	700.062.000
<b>B</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	223.650.613.313,81	124,87	220.040.689.375,00	217.634.740.082,61	215.830.278.113,26	214.386.708.537,77
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja	223.649.613.313,81	124,87	220.040.689.370,00	217.634.740.082,61	215.830.278.113,26	214.386.708.537,77
8	PD, Aneka Usaha						
	<b>TOTAL</b>	531.024.388.111,34	113,84	527.030.384.112,89	524.317.170.772,62	522.256.655.430,11	520.642.383.605,85

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kota Madiun, 2016-2020 (diolah)



**Tabel 3.19**  
Realisasi dan Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024

Kode	Uraian	Pertumbuhan (%)	JUMLAH					
			2019R	2020R	2021A	2022P	2023P	2024P
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>3,28</b>	<b>1.094.367.497.996,59</b>	<b>1.059.625.581.411,32</b>	<b>1.003.822.143.093,00</b>	<b>1.004.999.753.910,00</b>	<b>1.037.508.736.351,40</b>	<b>1.067.757.683.350,44</b>
<b>01.01</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>13,00</b>	<b>252.048.754.413,59</b>	<b>248.656.192.759,32</b>	<b>226.891.939.093,00</b>	<b>246.298.823.859,00</b>	<b>256.478.047.876,63</b>	<b>266.375.505.880,08</b>
01.01.01	Pajak daerah	<b>16,96</b>	91.077.191.655,45	90.286.840.987,07	76.978.000.000,00	86.255.000.000,00	90.567.750.000,00	93.284.782.500,00
01.01.02	Retribusi daerah	<b>9,95</b>	20.301.325.919,00	15.291.324.019,00	16.731.224.667,00	17.841.947.807,00	18.198.786.763,14	19.145.123.674,82
01.01.03	Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	<b>7,68</b>	14.641.711.340,55	15.216.268.562,40	15.092.455.426,00	15.216.268.562,00	16.281.407.361,34	17.258.291.803,02
01.01.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	<b>11,53</b>	126.028.525.498,59	127.861.759.190,85	118.090.259.000,00	126.985.607.490,00	131.430.103.752,15	136.687.307.902,24
<b>01.02</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>0,45</b>	<b>823.129.463.583,00</b>	<b>790.939.408.652,00</b>	<b>757.530.604.000,00</b>	<b>739.301.330.051,00</b>	<b>761.631.088.474,77</b>	<b>781.982.577.470,36</b>
<b>01.02.01</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>0,79</b>	<b>737.079.907.650,00</b>	<b>705.872.676.797,00</b>	<b>692.146.911.000,00</b>	<b>677.911.879.000,00</b>	<b>698.221.826.870,08</b>	<b>716.775.410.888,62</b>
1.2.1.01.01.1	Dana bagi hasil pajak	<b>8,58</b>	16.076.390.385,00	34.444.290.949,20	19.174.345.664,00	19.174.345.664,00	20.133.062.947,20	23.153.022.389,28
1.2.1.01.01.2	Dana bagi hasil bukan pajak	<b>3,72</b>	52.685.578.633,00	51.666.436.423,80	43.349.063.336,00	43.349.063.336,00	44.649.535.236,08	46.882.011.997,88
1.2.1.01.01.3	Dana Bagi hasil cukai	<b>2,35</b>	13.939.983.813,00	0,00	16.345.513.000,00	16.345.513.000,00	16.508.968.130,00	17.334.416.536,50
1.2.1.01.01.4	Dana Alokasi Umum	<b>0,42</b>	522.596.024.000,00	473.852.439.000,00	480.897.030.000,00	480.897.030.000,00	481.493.342.317,20	486.356.425.074,60
1.2.1.01.01.5	Dana Alokasi khusus	<b>1,67</b>	76.239.204.819,00	72.596.481.424,00	79.356.096.000,00	79.356.096.000,00	79.760.812.089,60	82.919.340.248,35
1.2.1.01.02	Dana Insentif Daerah	<b>6,13</b>	55.542.726.000,00	73.313.029.000,00	53.024.863.000,00	53.024.863.000,00	55.676.106.150,00	60.130.194.642,00
1.2.1.01.03	Dana Otonomi Khusus		0	0	0	0	0	0
<b>01.02.02</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>- 3,13</b>	<b>86.049.555.933,00</b>	<b>85.066.731.855,00</b>	<b>65.383.693.000,00</b>	<b>61.389.451.051,00</b>	<b>63.409.261.604,69</b>	<b>65.207.166.581,74</b>
1.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil	<b>- 3,29</b>	84.934.976.933,00	84.049.652.855,00	64.366.614.000,00	60.321.518.101,00	62.319.969.995,69	64.096.089.140,56
1.2.2.02	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	<b>7,11</b>	1.114.579.000,00	1.017.079.000,00	1.017.079.000,00	1.067.932.950,00	1.089.291.609,00	1.111.077.441,18
<b>01.03</b>	<b>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</b>	<b>-</b>	<b>19.189.280.000,00</b>	<b>20.029.980.000,00</b>	<b>19.399.600.000,00</b>	<b>19.399.600.000,00</b>	<b>19.399.600.000,00</b>	<b>19.399.600.000,00</b>
01.03.01	Hibah	<b>-</b>	19.189.280.000,00	20.029.980.000,00	19.399.600.000,00	19.399.600.000,00	19.399.600.000,00	19.399.600.000,00



Kode	Uraian	Pertumbuhan (%)	JUMLAH					
			2019R	2020R	2021A	2022P	2023P	2024P
01.03.02	Dana darurat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03	Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>- 0,22</b>	<b>1.148.511.321.355,75</b>	<b>1.014.391.890.792,10</b>	<b>1.140.822.143.093,00</b>	<b>1.129.999.753.910,00</b>	<b>1.137.474.067.834,07</b>	<b>1.147.336.615.545,94</b>
<b>05.01</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2,71</b>	<b>839.939.781.749,69</b>	<b>816.358.776.801,53</b>	<b>939.902.569.530,00</b>	<b>959.324.726.172,00</b>	<b>966.093.763.849,82</b>	<b>970.640.962.947,82</b>
05.01.01	Belanja Pegawai	<b>3,94</b>	440.222.382.579,38	441.683.138.649,00	478.425.879.983,00	485.258.678.433,00	499.476.757.711,09	507.118.752.104,07
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	<b>3,68</b>	366.995.675.620,23	349.882.673.481,00	425.059.231.547,00	436.594.527.461,00	440.960.472.735,61	444.532.252.564,77
05.01.03	Belanja Bunga		0		0	0,00	-	-
05.01.04	Belanja Subsidi		0		0	0,00	-	-
05.01.05	Belanja Hibah	<b>- 21,37</b>	15.603.619.810,08	11.938.091.671,53	13.765.706.000,00	13.572.686.278,00	10.600.267.983,12	8.300.009.830,78
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	<b>- 26,94</b>	17.118.103.740,00	12.854.873.000,00	22.651.752.000,00	23.898.834.000,00	15.056.265.420,00	10.689.948.448,20
<b>05.02</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>- 13,78</b>	<b>307.800.742.344,06</b>	<b>191.011.897.074,57</b>	<b>197.738.448.365,00</b>	<b>165.395.287.479,00</b>	<b>170.380.303.984,26</b>	<b>175.695.652.598,13</b>
05.02.01	Belanja Modal Tanah		0,00	0	0,00	0,00	-	-
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	<b>- 39,55</b>	68.460.669.520,00	47.752.974.268,64	50.500.943.323,00	28.304.237.988,00	30.568.577.027,04	32.708.377.418,93
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	<b>- 28,50</b>	48.758.211.485,26	38.202.379.414,91	56.229.035.949,00	39.281.239.379,00	40.066.864.166,58	41.268.870.091,58
05.02.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	<b>9,72</b>	184.022.541.935,80	100.281.245.964,15	88.974.356.300,00	95.695.457.752,00	97.609.366.907,04	99.561.554.245,18
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	<b>4,99</b>	2.888.082.876,00	4.775.297.426,86	2.034.112.793,00	2.114.352.360,00	2.135.495.883,60	2.156.850.842,44
05.02.05	Belanja Modal Aset Lainnya		3.671.236.527,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>05.03</b>	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>- 23,72</b>	<b>118.877.262,00</b>	<b>6.321.154.916,00</b>	<b>3.181.125.198,00</b>	<b>5.279.740.259,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	<b>- 23,72</b>	118.877.262,00	6.321.154.916,00	3.181.125.198,00	5.279.740.259,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
<b>05.04</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>		<b>651.920.000,00</b>	<b>700.062.000,00</b>	-	-	-	-
5.4.1	Belanja Transfer Ke Daerah Lain		651.920.000,00	700.062.000,00	0,00	0	0	0

Kode	Uraian	Pertumbuhan (%)	JUMLAH					
			2019R	2020R	2021A	2022P	2023P	2024P
	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	- 0,22	1.148.511.321.355,75	1.014.391.890.792,10	1.140.822.143.093,00	1.129.999.753.910,00	1.137.474.067.834,07	1.147.336.615.545,94
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	- 25,90	-54.143.823.359,16	45.233.690.619,22	-137.000.000.000,00	-125.000.000.000,00	-99.965.331.482,68	-79.578.932.195,50
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>							
<b>03.01</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	- 62,24	279.278.826.431,22	223.635.003.072,06	268.868.693.691,28	125.000.000.000,00	99.965.331.482,68	79.578.932.195,50
03.01.01	Penggunaan SiLPA	- 62,24	279.278.826.431,22	223.635.003.072,06	268.868.693.691,28	125.000.000.000,00	99.965.331.482,68	79.578.932.195,50
03.01.02	Pencairan Dana Cadangan		0	0	0	0	0	0
03.01.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0	0	0	0	0	0
03.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah		0	0	0	0	0	0
03.01.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		0	0	0	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>		1.500.000.000,00	-	-	-	-	-
03.02.01	Pembentukan Dana Cadangan		0	0	0	0	0	0
03.02.02	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		1.500.000.000,00	0	0	0	0	0
03.02.03	Pembayaran Pokok Utang		0	0	0	0	0	0
03.02.04	Pemberian Pinjaman Daerah		0	0	0	0	0	0
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	- 62,24	277.778.826.431,22	223.635.003.072,06	268.868.693.691,28	125.000.000.000,00	99.965.331.482,68	79.578.932.195,50
<b>03.03</b>	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)</b>	-100,00	223.635.003.072,06	268.868.693.691,28	131.868.693.691,28	0,00	0,00	0,00

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021



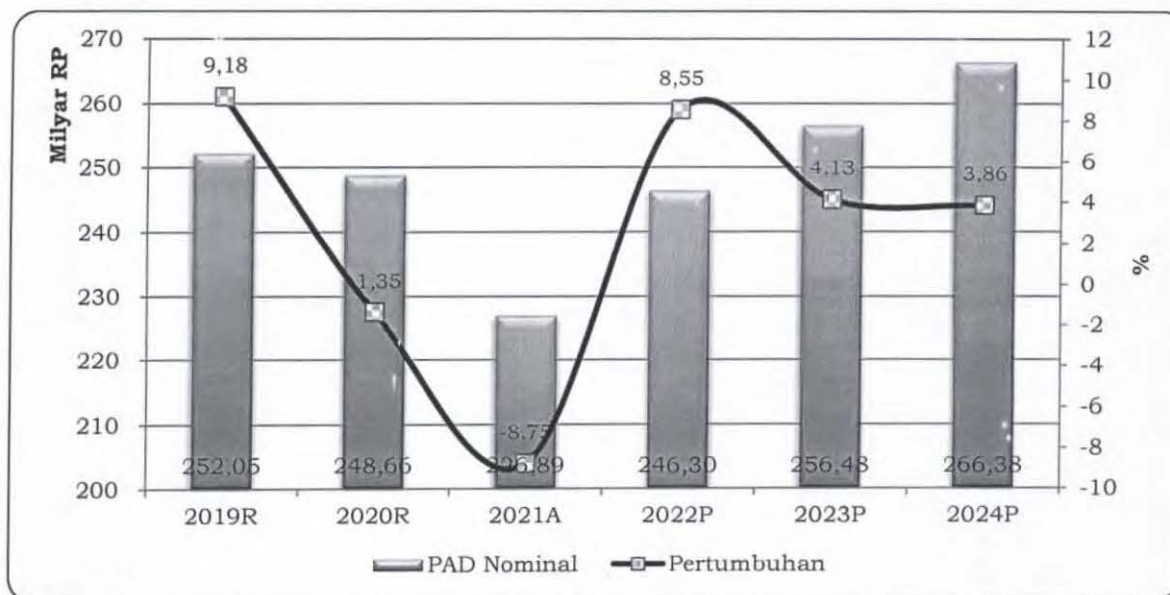


Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021

**Gambar 3.17**

Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Madiun  
Tahun 2019–2024 (Miliar Rupiah)

**Secara nominal, pendapatan daerah diproyeksikan akan mengalami peningkatan sampai akhir periode RPJMD tahun 2024.** Setelah mengalami penurunan pendapatan sebagai dampak Covid19, pendapatan daerah diperkirakan mulai meningkat pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Nilai proyeksi pendapatan daerah tahun 2024 sebesar Rp. 1,067 triliun.

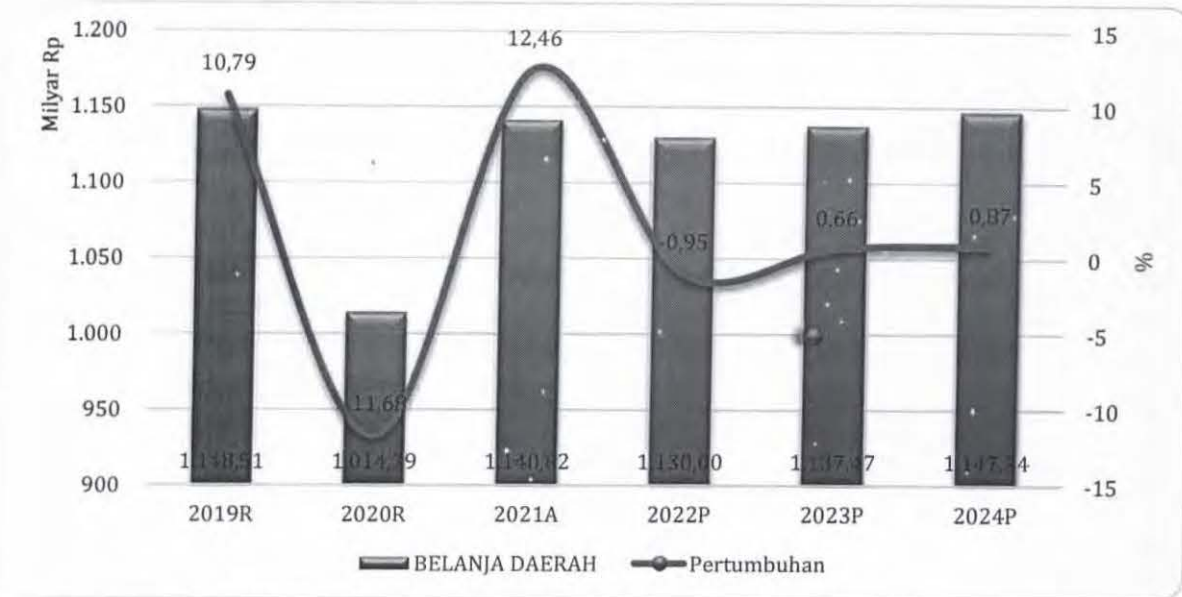


Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021

**Gambar 3.18**

Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun  
Tahun 2019–2024 (Miliar Rupiah)

Sebagai salah satu komponen pembentuk pendapatan daerah, PAD Kota Madiun diproyeksikan mengalami peningkatan mulai tahun 2022. Peningkatan tersebut akan terus berlangsung sampai akhir periode RPJMD dengan nilai nominal sebesar 266,38 Milyar dengan pertumbuhan sebesar 3,86 persen. Peningkatan tersebut cukup moderat ditengah ketidakpastian kondisi ekonomi baik global maupun nasional sebagai dampak Covid-19.



Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021

**Gambar 3.19**  
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Madiun  
Tahun 2019–2024 (Miliar Rupiah)

Belanja daerah diproyeksikan meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan daerah. Realisasi belanja daerah tahun 2020 sebesar 1,014 triliun diproyeksikan akan mengalami peningkatan hingga 1,147 triliun pada tahun 2024. Pertumbuhan belanja daerah diakhir periode RPJMD diproyeksikan sebesar 0,87 persen.

### 3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Langkah pertama yang dilakukan dalam menghitung kerangka pendanaan daerah adalah menentukan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang merupakan hasil proyeksi total penerimaan daerah, baik yang bersumber dari pos pendapatan daerah maupun pos pembiayaan daerah. Selanjutnya total proyeksi penerimaan daerah tersebut dikurangi dengan hasil proyeksi total belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat.



Sesuai dengan kondisi tersebut, proyeksi pendapatan daerah Kota Madiun tahun 2019-2024 dihitung berdasarkan asumsi pertumbuhan moderat, hal ini didasarkan pada data realisasi yang juga moderat selain itu dampak pandemi covid-19 juga berpengaruh terhadap turunnya pendapatan daerah. Kemudian pada tahun 2022-2024 diproyeksikan bahwa tidak akan ada SiLPA tiap tahunnya. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal 6% dari total APBD.

Dalam upaya meningkatkan kapasitas dan efektifitas belanja daerah maka perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah ke dalam tiga kelompok prioritas;

- a. Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
- b. Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah
- c. Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

**Tabel 3.20**

Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kota Madiun Tahun 2019-2024

NO	URAIAN	Data Tahun Dasar 2020	Tingkat Pertumbuhan	Proyeksi			
				2021	2022	2023	2024
		(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Saldo Kas Neraca Daerah	268.933.182.301,20	83,18	186.398.811.863,07	168.051.911.606,15	132.389.044.046,84	110.095.793.937,81
	Dikurangi :						
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	12.481.370.812,44	135,26	11.129.878.680,77	10.034.384.712,83	9.231.026.519,94	8.972.635.920,29
3	Kegiatan Lanjutan						
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	256.451.811.488,76	80,65	175.268.933.182,30	158.017.526.893,32	123.158.017.526,89	101.123.158.017,53

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021

**Tabel 3.21**  
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024

No.	Uraian	PROYEKSI					
		2019R	2020R	2021	2022	2023	2024
<b>01.00</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>1.094.367.497.997</b>	<b>1.059.625.581.411</b>	<b>1.003.822.143.093</b>	<b>1.004.999.753.910</b>	<b>1.037.508.736.351</b>	<b>1.067.757.683.350</b>
02.00	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-	-
03.00	Sia Lebih Riil Perhitungan Anggaran	279.278.826.431	223.635.003.072	268.868.693.691	125.000.000.000	99.965.331.483	79.578.932.196
<b>Jumlah Penerimaan</b>		<b>1.373.646.324.428</b>	<b>1.283.260.584.483</b>	<b>1.272.690.836.784</b>	<b>1.129.999.753.910</b>	<b>1.137.474.067.834</b>	<b>1.147.336.615.546</b>
Dikurangi							
04.00	Belanja Operasi*	472.944.106.129	466.476.103.321	514.843.337.983	522.730.198.711	525.133.291.114	526.108.710.383
05.00	Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000	0	0	0	0	0
<b>Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah</b>		<b>899.202.218.298</b>	<b>816.784.481.163</b>	<b>757.847.498.801</b>	<b>607.269.555.199</b>	<b>612.340.776.720</b>	<b>621.227.905.163</b>

\*Belanja operasi diluar belanja barang dan jasa

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021

**Tabel 3.22**  
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024

Uraian	PROYEKSI					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	899.202.218.298	816.784.481.163	757.847.498.801	607.269.555.199	612.340.776.720	621.227.905.163
Prioritas I	395.648.976.051	359.385.171.712	333.452.899.473	267.198.604.288	269.429.941.757	273.340.278.272
Prioritas II	377.664.931.685	343.049.482.088	318.295.949.497	255.053.213.184	257.183.126.222	260.915.720.168
Prioritas III	125.888.310.562	114.349.827.363	106.098.649.832	85.017.737.728	85.727.708.741	86.971.906.723

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021



### 3.3.3. Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan pada bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Kebijakan keuangan daerah memberikan gambaran tentang arah dan upaya dalam pengelolaan keuangan daerah. Optimalisasi penerimaan dan pembiayaan daerah serta efisiensi dan efektifitas belanja daerah menjadi upaya prioritas dalam arah kebijakan keuangan daerah mendatang.

Selain pendanaan yang bersumber dari APBD baik yang bersumber dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pendanaan non APBD seperti dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). Uraikan lebih lanjut mengenai kebijakan pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dalam tabel berikut

**Tabel 3.23**  
Perbandingan Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

<b>KEBIJAKAN</b>	<b>RPJMD SEBELUM PERUBAHAN</b>	<b>RPJMD SETELAH PERUBAHAN</b>
<b>Kebijakan Pendapatan daerah (umum)</b>	Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.	Peningkatan target pendapatan daerah sesuai dengan kondisi perekonomian dan peraturan yang berlaku;
	Seluruh penerimaan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.	Peningkatan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah;
	Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak / retribusi untuk peningkatan pembangunan;
		Penanganan ekonomi daerah sebagai dampak Covid-19 membutuhkan relaksasi kebijakan pendapatan daerah khususnya bagi masyarakat maupun dunia usaha. Oleh karena itu dibutuhkan insentif

KEBIJAKAN	RPJMD SEBELUM PERUBAHAN	RPJMD SETELAH PERUBAHAN
		fiscal dalam bentuk relaksasi pajak, susnset policy maupun penanguhan atau pembebasan pajak/retribusi sesuai dengan perkembangan kondisi penanganan Covid-19
<b>Kebijakan PAD</b>	Dalam upaya merencanakan target pendapatan asli daerah dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi penerimaan pemerintah daerah serta optimalisasi pencapaiannya.	Sejalan dengan kebijakan penanganan COVID19, kebijakan peningkatan PAD di fokuskan pada upaya instensifikasi pajak/retribusi, salah satunya melalui updating database perpajakan melalui pemanfaatan sistem informasi dan teknologi.
	Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun berkenaan.	Optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah ataupun kerjasama dengan pihak ketiga;
	Dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, <i>law enforcement</i> dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah.	Optimalisasi BUMD yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan PAD
	Melakukan upaya peningkatan penerimaan bagian laba/deviden atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya yang dapat ditempuh melalui inventarisasi dan menata serta mengevaluasi nilai kekayaan daerah yang dipisahkan baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah). Jumlah rencana penerimaan yang dianggarkan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,	Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.



KEBIJAKAN	RPJMD SEBELUM PERUBAHAN	RPJMD SETELAH PERUBAHAN
	<p>telah mencerminkan rasionalitas dibandingkan dengan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan kembali ditetapkan sebagai penyertaan modal (telah diinvestasikan). Dalam upaya peningkatan PAD, pemerintah daerah mendayagunakan kekayaan daerah yang belum dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga sehingga menghasilkan pendapatan. Penyertaan modal pada pihak ketiga ditetapkan dengan peraturan daerah</p>	
<p><b>Dana Perimbangan</b></p>	<p>Pendapatan dari DBH-Pajak dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran berkenaan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran berkenaan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran berkenaan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran berkenaan belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir;</p>	<p>Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program maupun kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)</p>
	<p>Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun berkenaan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran berkenaan belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DAU dan DAK didasarkan pada realisasi pendapatan DAU dan DAK selama 3 (tiga) tahun terakhir.</p>	<p>DAU khususnya pada saat pandemic diprioritaskan pada pada program yang sangat prioritas dan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.</p>
	<p>Pendapatan dari DBH-Pajak dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran berkenaan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran berkenaan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran berkenaan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak</p>	<p>peningkatan DID melalui Rencana aksi yang jelas dan terukur didukung oleh perencanaan program dan kegiatan yang berkualitas.</p> <p>Selain itu, pemerintah kota Madiun perlu meningkatkan koordinasi secara aktif dengan pemerintah provinsi untuk mendukung program pembangunan melalui bantuan</p>

KEBIJAKAN	RPJMD SEBELUM PERUBAHAN	RPJMD SETELAH PERUBAHAN
	Tahun Anggaran berkenaan belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir;	keuangan, hibah, dan bantuan sosial.
<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	Hibah yang diterima berupa uang harus dianggarkan dalam APBD dan didasarkan atas naskah perjanjian hibah antara pemerintah daerah dan pemberi hibah. Sumbangan yang diterima dari organisasi/lembaga tertentu/perorangan atau pihak ketiga, yang tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran maupun pengurangan kewajiban pihak ketiga/pemberi sumbangan diatur dalam peraturan daerah.	Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat mengenai kepastian danahibah; dana darurat; dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi, yang diperoleh Kota Madiun;
	Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana penyesuaian dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah.	Meningkatkan kerjasama antar OPD Pemerintah Kota Madiun dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara intensif.
<b>Kebijakan Belanja daerah (umum)</b>	Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.	Konsolidasi anggaran dengan menekankan pada paradigma anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada output dan outcome
.....	Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.	Belanja daerah perlu difokuskan dalam rangka percepatan <i>recovery</i> dan penanganan dampak atas pandemi COVID-19 pada semua bidang khususnya yang strategis.
.....	Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.	Belanja daerah diarahkan untuk membiayai belanja program-program prioritas mengarah pada pemulihan ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pemenuhan dan peningkatan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;



KEBIJAKAN	RPJMD SEBELUM PERUBAHAN	RPJMD SETELAH PERUBAHAN
	<p>Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>Belanja daerah difokuskan dapat memenuhi <i>mandatory spending</i> atau belanja-belanja yang sudah di-<i> earmark</i>, seperti pendidikan 20%, kesehatan 10%, dana transfer umum penggunaannya diarahkan 25% untuk belanja infrastruktur, anggaran fungsi pengawasan, dan alokasi dana kelurahan. Selain itu, belanja daerah diarahkan untuk menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM);</p>
	-	<p>Efektivitas dan efisiensi belanja daerah, melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah (<i>money follow program</i> prioritas); efisiensi belanja daerah dengan memerhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan. Mengendalikan belanja perjalanan dinas, rapat dan honor-honor pegawai</p>
	-	<p>Mengalokasikan kebutuhan belanja operasi, dan belanja modal secara terukur dan terarah.</p>
Belanja Operasi	-	<p>Diarahkan untuk tetap memberikan pemenuhan belanja pegawai, peningkatan kesejahteraan ASN dengan tetap memerhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran, serta sensitivitas pada dinamika yang berkembang</p>
Belanja Modal	-	<p>Difokuskan untuk mendanai program dan kegiatan berkaitan dengan prioritas pembangunan daerah, yang terangkum pada masing-masing OPD;</p>
	-	<p>Penggunaan belanja modal diarahkan dalam mendukung sasaran dan prioritas pembangunan daerah khususnya pencapaian visi dan misi</p>

KEBIJAKAN	RPJMD SEBELUM PERUBAHAN	RPJMD SETELAH PERUBAHAN
<b>Kebijakan Pembiayaan daerah</b>	Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran berkenaan. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pinjaman daerah.	Mengoptimalkan penerimaan pembiayaan daerah yang diperkirakan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja;
	Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SiLPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.	Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas, dan profitabilitas;
		Peningkatan pembiayaan non-APBD melalui kerjasama dengan pihak swasta, melalui <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).



## **BAB IV**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**

#### **4.1 Permasalahan Pembangunan**

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya disebabkan karena adanya peluang (potensi daerah) dan kekuatan yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi. Pada penyusunan Rancangan Perubahan RPJMD Kota Madiun yang nantinya akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan P-RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, perlu diidentifikasi terlebih dulu permasalahan pembangunan daerah agar rencana pembangunan yang disusun dapat meminimalkan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat. Permasalahan tersebut merupakan masalah prioritas utama yang menjadi agenda rencana pembangunan dalam periode 2019-2024. Berbagai permasalahan tersebut sesuai salah satunya diidentifikasi di bab II.

Permasalahan pembangunan di Kota Madiun selama beberapa tahun terakhir akan diidentifikasi berdasarkan aspek kesejahteraan rakyat, aspek layanan umum, dan aspek daya saing. Khusus untuk aspek layanan umum akan diurai berdasarkan urusan pemerintah daerah. Urusan pemerintah daerah yang diidentifikasi permasalahannya meliputi urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan umum dan penataan ruang, Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Sosial, Tenaga kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan hidup, Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Pemberdayaan masyarakat dan, Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perhubungan, Komunikasi dan informasi, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olah Raga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, Industri, Transmigrasi, Urusan penunjang perencanaan, Keuangan, Kepegawaian pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta urusan penunjang lainnya. Hasil identifikasi permasalahan Pembangunan di Kota Madiun dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.1**

Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Kota Madiun

No	ASPEK/BIDANG URUSAN	Permasalahan
<b>A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>		
		1) Meningkatnya angka kemiskinan sebagai dampak Covid-19
		2) Indeks Pembangunan Manusia relatif tinggi namun dengan peningkatan yang lambat
		3) Pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi yang dalam sebagai akibat Covid-19
		4) Masih terjadi kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat yang di indikasikan oleh gini rasio
		5) Kualitas dan kuantitas layanan infrastruktur perkotaan masih perlu ditingkatkan
		6) Manajemen bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup masih perlu ditingkatkan dan dijaga kelestariannya
		7) Masih perlu ditingkatkannya tercapainya target indeks reformasi birokrasi dan Tata kelola pemerintahan daerah perlu terus untuk ditingkatkan
		8) Ketentraman, ketertiban dan keharmonisan kehidupan masyarakat yang perlu terus dijaga
<b>B. ASPEK LAYANAN UMUM</b>		
<b>B.1 Fokus Urusan Wajib Layanan Dasar</b>		
1.	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pandemic Covid-19 menyebabkan pembelajaran di lakukan dengan online / daring sehingga dapat menurunkan kualitas pembelajaran</li> <li>b. Masih perlu ditingkatkannya target Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)</li> <li>c. Masih perlu ditingkatkannya jumlah tenaga pendidik SD/MI dan SMP/MTS yang memiliki sertifikat pendidik</li> <li>d. Masih perlu ditingkatkannya tenaga pendidik SD/MI dan SMP/MTS dengan lulusan S1/S2/S3</li> <li>e. Masih perlu ditingkatkannya jumlah tenaga pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang memiliki sertifikat pendidik</li> <li>f. Masih perlu ditingkatkannya kualitas penyelenggaraan pendidikan kesetaraan</li> </ul>
2.	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penangan pandemi covid membutuhkan pembiayaan dan tenaga medis dan medis serta sarana dan prasarana kesehatan yang memadai</li> <li>b. Masih perlu ditingkatkannya ketercapaian target SPM pelayanan bidang kesehatan sesuai standar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal</li> <li>c. Masih terdapatnya balita stunting</li> <li>d. Masih terdapatnya angka kematian bayi</li> <li>e. Masih perlu ditingkatkannya imunisasi dasar lengkap bagi balita.</li> <li>f. Masih perlu ditingkatkannya capaian Rumah Tangga Sehat</li> <li>g. diperlukannya pencegahan dan penanganan terhadap penyakit menular seperti Tuberculosis (TB), HIV/AIDS, Demam Berdarah dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, serta penguatan <i>surveillance</i> penyakit yang berpotensi wabah dan <i>re-emerging disease</i></li> <li>h. Masih perlu ditingkatkannya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) melalui perubahan perilaku masyarakat;</li> <li>i. Masih perlu ditingkatkannya pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun</li> </ul>
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Realokasi dan refocusing anggaran tahun 2020 untuk pemulihan dampak Covid-19 menyebabkan tertundanya berbagai proyek infrastruktur</li> <li>b. Terdapat jalan yang menjadi kewenangan Kota Madiun dalam kondisi rusak.</li> <li>c. Masih terbatasnya kawasan pejalan kaki/pedestrian/trotoar yang menunjang aktivitas masyarakat. Kawasan pejalan kaki/pedestrian/trotoar banyak dipakai oleh pedagang kaki lima;</li> </ul>



No	ASPEK/BIDANG URUSAN	Permasalahan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Masih perlu ditingkatkannya sistem drainase kota yang disebabkan oleh tingginya tingkat sedimentasi pada saluran drainase, sempadan saluran yang dimanfaatkan oleh masyarakat, serta banyaknya plengsengan saluran yang rusak;</li> <li>e. Masih perlu ditingkatkannya pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pencapaian indikator penataan ruang tidak tercapai.</li> <li>f. Masih perlu ditingkatkannya penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik karena terbatasnya jumlah lahan yang dapat dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau.</li> <li>g. Masih perlu ditingkatkannya memadainya pemahaman pelaku pembangunan daerah terhadap perencanaan yang berbasis pada perspektif tata ruang di wilayah Kota Madiun.</li> </ul>
4.	Perumahan dan Pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Masih terdapatnya rumah tidak layak huni meskipun dengan rasio kurang dari 1 persen</li> <li>b. Masih perlu ditingkatkannya sarana sanitasi pada rumah tinggal</li> <li>c. Masih terdapatnya kekurangan kebutuhan kepemilikan rumah (<i>backlog</i>) dalam rangka penyediaan perumahan</li> <li>d. Masih perlu ditingkatkannya penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dalam lingkungan perumahan dan kawasan permukiman;</li> <li>e. Masih perlu ditingkatkannya legislasi daerah terutama tataran operasional terkait urusan perumahan dan kawasan permukiman;</li> <li>f. Masih perlu ditingkatkannya pengelolaan sarana dan prasarana aset Pemerintah Kota Madiun, yaitu sarana dan prasarana pemakaman sebanyak 83 lokasi pemakaman;</li> <li>g. Cakupan layanan penerangan jalan permukiman perlu ditingkatkan seiring dengan perkembangan perumahan dan permukiman dengan memperhatikan pemeliharaan, penataan iluminasi serta peralatan dan utilitas pendukung lainnya;</li> <li>h. Masih perlu ditingkatkannya ketersediaan dan kualitas RTH publik Kota Madiun hingga 20% dari luas kota.</li> </ul>
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan masih perlu di tingkatkan</li> <li>b. Masih perlu ditingkatkannya penegakan Perda dan Perwal oleh masyarakat;</li> <li>c. Meningkatnya persentase pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang ditemukan;</li> <li>d. Sumber Daya Manusia (SDM) petugas perlindungan masyarakat (Linmas) rendah;</li> <li>e. Meningkatnya kasus kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).</li> <li>f. Masih terdapatnya potensi bencana di Kota Madiun;</li> <li>g. Masih perlu ditingkatkannya kapasitas aparatur daerah dalam penanggulangan bencana;</li> <li>h. Masih perlu ditingkatkannya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam dan bencana sosial;</li> <li>i. rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana</li> </ul>
6.	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menurunnya ketahanan sosial (kemiskinan meingkat) sebagai dampak dari Covid-19</li> <li>b. Penanganan PMKS belum 100 persen</li> <li>c. Cakupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima bantuan sosial belum memenuhi target SPM</li> <li>d. Masih terbatasnya jumlah tenaga yang terdidik/terlatih dalam menangani masalah kesejahteraan sosial;</li> <li>e. terbatasnya sarana prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial;</li> </ul>

No	ASPEK/BIDANG URUSAN	Permasalahan
		f. Masih perlu ditingkatkannya pemberian bantuan dan pemberdayaan sosial pada masyarakat; g. Meningkatnya populasi penyandang penyakit sosial kemasyarakatan di wilayah perkotaan; h. Masih terbatasnya perhatian akan pentingnya pengembangan modal sosial, kesetiakawanan sosial, kearifan lokal, dan semangat kegotongroyongan di masyarakat.
<b>B.2</b>	<b>Fokus Urusan Wajib Bukan Layanan Dasar</b>	
1.	Tenaga Kerja	1. Meningkatnya Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) sebagai dampak Covid-19 2. Masih terbatasnya angkatan kerja dengan kualifikasi pendidikan tinggi. Angkatan kerja sebagian besar didominasi lulusan pendidikan menengah dan pendidikan dasar 3. Kurang optimalnya penyerapan tenaga kerja 4. Masih perlu ditingkatkannya optimalnya peningkatan kesempatan kerja 5. Masih perlu ditingkatkannya pemetaan/data dukung kebutuhan tenaga kerja yang ada di perusahaan-perusahaan yang berinvestasi sehingga belum dapat direncanakan secara baik kebutuhan tenaga kerja yang berasal dari Kota Madiun
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Masih terdapatnya kasus KDRT 2. Partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah masih terbatas 3. Masih terdapatnya terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga 4. Masih terbatasnya akses sumber daya dan peran serta perempuan dalam pembangunan 5. Masih terbatasnya peranan perempuan untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat sejahtera dan bahagia dalam pembangunan 6. Masih terdapatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; 7. Masih cukup tingginya tingkat tenaga kerja anak/ pekerja bawah umur. 8. Masih perlu ditingkatkannya pemahaman tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan berbagai bidang pembangunan daerah 9. Masih terbatasnya peranan organisasi perempuan dan lembaga terhadap perlindungan perempuan dan anak; 10. Masih perlu ditingkatkannya perangkat daerah dalam Penyusunan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
3.	Pangan	1. Diversifikasi sumber pangan lokal relatif terbatas; 2. Peningkatan akses pangan masyarakat mensyaratkan akses terhadap inovasi dan teknologi pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal dan sudah berkembang tapi belum maksimal; 3. rendahnya kapasitas SDM pelaku/petani pengolah pangan sebagai salah satu penentu kapasitas penyediaan bahan pangan; 4. terbatasnya jumlah dan kapasitas petugas keamanan pangan segar dan olahan untuk mendorong tersedianya pangan yang sehat; 5. Peningkatan keamanan pangan dengan promosi dan kampanye sudah dilaksanakan tapi belum maksimal; 6. Pola pangan harapan yang belum optimal
4.	Pertanahan	1. Tingginya permintaan perubahan penggunaan tanah sebagai dampak pertumbuhan ekonomi; 2. Adanya kecenderungan pertumbuhan investasi berdampak pada permintaan izin lokasi untuk perolehan tanah dalam rangka investasi; 3. Adanya potensi konflik pertanahan seiring meningkatnya kebutuhan pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum



No	ASPEK/BIDANG URUSAN	Permasalahan
5.	Lingkungan Hidup (dan Bencana Alam)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih terdapatnya usaha/kegiatan yang belum memenuhi persyaratan administrasi dan belum tersedianya teknis pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>2. belum taatnya para pelaku usaha/kegiatan terhadap pengelolaan lingkungan;</li> <li>3. Masih perlu ditingkatkannya pemahaman dan kesadaran masyarakat maupun aparatur terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup sehingga berdampak pada Masih terbatasnya penegakan aturan di bidang lingkungan hidup;</li> <li>4. Masih perlu ditingkatkannya pelayanan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;</li> <li>5. Masih perlu ditingkatkannya pelayanan penerapan izin lingkungan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</li> <li>6. Masih terdapat usaha/kegiatan yang belum mempunyai dokumen lingkungan dan usaha/kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan belum membuat laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup;</li> <li>7. Kurang kesadaran/partisipasi masyarakat untuk mengelola sampah pada sumber sampah sehingga target pengurangan sampah pada sumber sampah belum sesuai target/harapan dengan Masyarakat berpola pikir bahwa penanganan sampah menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemerintah Kota Madiun;</li> <li>8. Kurang optimalnya kualitas pengelolaan Bank Sampah sehingga masyarakat perlu di dorong untuk mengolah dan memilah sampah pada sumber sampah;</li> <li>9. Kapasitas/daya tampung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo Madiun mendekati <i>over load</i>.</li> <li>10. Belum mempunyai tenaga fungsional pengawas Lingkungan Hidup</li> </ol>
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil</li> <li>2. Belum optimalnya koordinasi dan validasi data kependudukan dengan pihak terkait</li> <li>3. Kurang optimalnya sosialisasi pemanfaatan data SIAK kepada Instansi/ OPD</li> <li>4. Kurang optimalnya sinkronisasi/ konsolidasi antara daerah dan pusat</li> <li>5. Kurangnya sosialisasi terkait pelayanan di masa pandemi</li> </ol>
7.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Belum adanya penyusunan <i>Grund Design</i> Kependudukan 5 aspek dan pemanfaatannya bagi perangkat daerah;</li> <li>2) Masih terdapatnya keluarga pra sejahtera dan sejahtera I</li> <li>3) Masih diperlukannya upaya untuk meningkatkan cakupan peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</li> <li>4) Masih terdapatnya usia kawin pertama di bawah 20 tahun;</li> <li>5) Masih terdapatnya <i>Unmeet Need</i> KB</li> </ol>
8.	Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Masih minimnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan di jalan raya;</li> <li>2) banyaknya terjadi pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya pelajar yang menggunakan sepeda motor untuk ke sekolah;</li> <li>3) Fungsi Sub Terminal Kota Madiun belum optimal;</li> <li>4) Perlengkapan jalan yang belum banyak menggunakan teknologi (Belum adanya Area Traffic Control System dan Intelygent Transport System di Dishub Kota Madiun);</li> <li>5) Belum tercukupinya kebutuhan rambu lalu lintas sesuai standart;</li> </ol>



No	ASPEK/BIDANG URUSAN	Permasalahan
9.	Komunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Masih perlu ditingkatkannya pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah Kota Madiun;</li> <li>2) Masih perlu ditingkatkannya penyebarluasan informasi citra positif pemerintah di media masa untuk menangkal berita bohong/<i>hoax</i>;</li> <li>3) Masih terbatasnya ruang informasi publik yang memadai untuk akses informasi bagi masyarakat;</li> <li>4) Informasi pembangunan yang dilakukan pemerintah belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat;</li> <li>5) Masih perlu ditingkatkannya partisipasi masyarakat dalam penyebarluasan informasi program dan kegiatan pemerintah;</li> <li>6) Masih perlu ditingkatkannya pelaksanaan standar layanan informasi publik di bidang publik lingkungan pemerintah Kota Madiun;</li> <li>7) Masih perlu ditingkatkannya penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) untuk mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);</li> <li>8) Masih perlu ditingkatkannya pemerataan fasilitas akses informasi publik dan internet sehat;</li> <li>9) Masih perlu ditingkatkannya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana peningkatan usaha yang produktif berbasis online menuju <i>e-commerce</i>;</li> <li>10) Masih perlu ditingkatkannya regulasi daerah dalam pelaksanaan SPBE dan terwujudnya <i>Smart City</i>;</li> <li>11) terbatasnya sumber daya yang memadai dibidang layanan komunikasi dan informatika.</li> </ol>
10.	Koperasi dan UKM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Masih perlu ditingkatkannya fungsi koperasi, dimana sebagian besar koperasi bergerak pada kegiatan simpan pinjam;</li> <li>2) Masih perlu ditingkatkannya terbangunnya jaringan kemitraan antara UKM dengan pelaku usaha secara maksimal;</li> <li>3) Kualitas produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih terbatas dalam memenuhi standar nasional karena rendahnya penerapan teknologi dan inovasi produksi;</li> <li>4) rendahnya kemampuan SDM koperasi dalam pengembangan koperasi.</li> </ol>
11.	Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jumlah dan nilai investasi masih perlu ditingkatkan</li> <li>2) Masih perlu ditingkatkannya pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dari pelaku usaha</li> <li>3) Proses perijinan yang terbit tepat waktu masih perlu dipertahankan</li> </ol>
12.	Kepemudaan dan Olah Raga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Masih terbatasnya ketersediaan sarana prasarana olahraga;</li> <li>2) Masih terbatasnya prestasi olahraga di tingkat regional, nasional bahkan ke tingkat internasional;</li> <li>3) Kurang optimalnya peran serta pemuda</li> </ol>
13.	Statistik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Masih perlu ditingkatkannya sistem integrasi data-data statistik sektoral daerah;</li> <li>2) Masih perlu ditingkatkannya ketersediaan data-data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan daerah;</li> <li>3) Masih terbatasnya koordinasi berbagai pihak dalam penyediaan data statistik pembangunan daerah;</li> <li>4) Masih perlu ditingkatkannya kapasitas sumber daya manusia dalam pendataan dan statistik daerah.</li> </ol>
14.	Persandian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Masih perlu ditingkatkannya penyelenggaraan keamanan informasi di lingkungan pemerintah Kota Madiun;</li> <li>2) Masih perlu ditingkatkannya perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan;</li> <li>3) Masih perlu ditingkatkannya sarana dan prasarana jejaring persandian daerah dan informasi;</li> <li>4) Masih terbatasnya sumber daya manusia di bidang pengelolaan persandian daerah.</li> </ol>
15.	Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Masih terbatasnya pelestarian seni tradisi masyarakat Kota Madiun;</li> </ol>



No	ASPEK/BIDANG URUSAN	Permasalahan
		2) Masih terbatasnya pembinaan pelaku seni; 3) Masih terbatasnya optimalisasi revitalisasi cagar budaya; 4) Perlu adanya museum daerah Kota Madiun; 5) Masih terbatasnya pembinaan sejarah lokal daerah .
16.	Perpustakaan dan Kearsipan	1) Masih perlunya dilakukan peningkatan pada sistem pelayanan perpustakaan untuk menghadapi era digitalisasi dan dinamika perkembangan teknologi informasi; 2) Masih terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan sehingga masyarakat kurang memiliki minat untuk berkunjung; 3) Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola perpustakaan dan kearsipan. 4) Belum optimalnya pengelolaan arsip di Perangkat Daerah 5) Belum optimalnya Sosialisasi perpustakaan dan kearsipan
<b>B.3 Fokus Urusan Pilihan</b>		
1)	Kelautan dan Perikanan	1) Keterbatasan lahan untuk pengembangan budidaya perikanan; 2) terbatasnya SDM, permodalan, dan infrastruktur di bidang perikanan dan industri perikanan; 3) terbatasnya penerapan teknologi tepat guna untuk mengembangkan produk dengan daya saing tinggi berbasis usaha rakyat (masyarakat lokal); 4) Rendahnya margin keuntungan pembudidaya ikan; 5) rendahnya konsumsi makan ikan masyarakat; 6) Menurunnya SDI (Sumber Daya Ikan) di perairan umum; 7) rendahnya kelembagaan dan sistem perijinan usaha perikanan.
2)	Pariwisata	1) Masih terbatasnya pengelolaan destinasi pariwisata; 2) Kurang optimalnya pemasaran pariwisata; 3) Masih perlu ditingkatkannya prasarana ruang kreatif sebagai ruang ekspresi, promosi bagi masyarakat kreatif Kota Madiun; 4) Masih terbatasnya kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.
3)	Pertanian	1) Keterbatasan lahan untuk pengembangan sektor pertanian mengingat wilayah kota yang kecil; 2) Tingginya alih fungsi lahan sektor pertanian menjadi kawasan industri, perdagangan dan permukiman penduduk; 3) Produksi dan produktivitas komoditas pertanian pangan dan hortikultura belum optimal karena belum diterapkannya sistem pertanian yang modern; 4) rendahnya kapasitas SDM petani dalam meningkatkan produksi; 5) Kegiatan layanan pelatihan dan pendampingan oleh penyuluh sangat terbatas; 6) Keterbatasan kemampuan petani memanfaatkan prasarana dan sarana pertanian yang dimiliki; 7) Tingginya ketergantungan petani terhadap penggunaan pestisida kimia dan pupuk kimia; 8) Keterbatasan akses petani terhadap permodalan yang berkelanjutan; 9) Petani belum mendapatkan keuntungan maksimal karena panjangnya tata niaga produk pertanian; 10) Terjadinya fluktuasi iklim yang tidak menentu yang banyak menimbulkan kerugian bagi petani; 11) Keterbatasan petani dalam mengakses pupuk bersubsidi; 12) Masih perlu ditingkatkannya pengawasan produk hasil ternak yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) karena keterbatasan petugas yang memiliki kompetensi di sektor Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet); 13) Peningkatan fasilitas permodalan untuk sektor peternakan (terutama peternak kecil yang tidak mempunyai agunan); 14) Masih terbatasnya promosi pemasaran hasil peternakan; 15) Masih terbatasnya obat-obatan hewan baik jenis maupun jumlahnya; 16) Masih terbatasnya peralatan laboratorium dan kesehatan hewan; 17) Masih terbatasnya tenaga petugas pemeriksa daging untuk Rumah Potong Hewan (RPH).



No	ASPEK/BIDANG URUSAN	Permasalahan
4)	Perdagangan	1) Belum maksimalnya revitalisasi pasar rakyat dan pengembangan kapasitas paguyuban pedagang; 2) Masih perlu ditingkatkannya penerimaan PAD dari retribusi tera dan/atau tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP); 3) Belum adanya jaminan ketersediaan barang dalam jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau serta terhindar dari praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat. Selain itu, hal yang mendorong terjadinya praktik yang tidak sehat tersebut adalah belum maksimalnya tingkat kesadaran konsumen dalam menggunakan haknya sebagai konsumen; 4) Pemberdayaan pedagang dengan pelaksanaan penataan Pedagang kaki Lima (PKL); 5) Masih perlu ditingkatkannya informasi jumlah dan volume usaha perdagangan baik perdagangan formal dan informal.
5)	Perindustrian	1) Masih terbatasnya akses permodalan untuk industri kecil dan menengah; 2) Masih perlu ditingkatkannya pemanfaatan kawasan industri; 3) banyak potensi sumber daya lokal yang belum diolah secara maksimal dalam skala industri; 4) Kualitas SDM yang bergerak di bidang industri kecil belum optimal sehingga lemah dalam penerapan teknologi pengolahan.
6)	Transmigrasi	1) Masih terbatasnya motivasi dan rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi
<b>B.4 Fokus Unsur Penunjang</b>		
<b>B4.1. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan</b>		
1)	Indeks Kepuasan Masyarakat cenderung fluktuatif.	
2)	Perlunya revitalisasi nilai dan budaya kerja yang profesional, jujur, dan bersih di setiap jenjang birokrasi;	
3)	Belum maksimalnya penerapan SOP pelayanan kepada masyarakat;	
4)	adanya permasalahan pada kelembagaan seperti tumpang tindih tugas pokok fungsi yang mengakibatkan kinerja menjadi kurang maksimal;	
5)	Belum meratanya beban kerja antar dan intra perangkat daerah.	
6)	Masih perlu ditingkatkannya penataan ketatalaksanaan dan kelembagaan perangkat daerah;	
7)	Masih perlu ditingkatkannya system administrasi untuk mendukung kinerja pimpinan;	
8)	Masih perlu ditingkatkannya daya dukung perlengkapan untuk mendukung kinerja pimpinan;	
9)	Masih perlu ditingkatkannya pelayanan keprotokolan kepada pimpinan;	
10)	Kurang Akuratnya data dalam penyusunan laporan kinerja pemerintahan;	
11)	Kurang tertibnya administrasi kecamatan/kelurahan;	
12)	Belum maksimalnya penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);	
13)	Belum tersedianya data Rupa bumi yang terbaru;	
14)	Sering terjadinya permasalahan tentang batas wilayah;	
15)	Belum ditindaklanjutinya MoU dengan Perjanjian Kerja Sama;	
16)	adanya permasalahan pada kelembagaan, seperti adanya tumpang tindih kewenangan yang mengakibatkan kinerja menjadi kurang maksimal;	
17)	Belum adanya dukungan ketersediaan data kebutuhan PNS berdasarkan analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja (ABK);	
18)	Masih perlu ditingkatkannya penataan ketatalaksanaan dan kelembagaan perangkat daerah;	
19)	Belum dimulainya penerapan pelaporan kegiatan Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi (LPUK) berbasis online menggunakan sistem aplikasi;	
20)	Masih perlu ditingkatkannya koordinasi dan kerjasama antar-unit kerja serta antar-instansi;	
21)	Prinsip <i>money follow function</i> , <i>money follow organization</i> harus mulai ditinggalkan, menjadi <i>money follow programme</i> ;	
22)	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan selama ini belum sepenuhnya melibatkan <i>civil society</i> ;	



No	ASPEK/BIDANG URUSAN	Permasalahan
23)		Masih perlu ditingkatkannya layanan pengadaan barang/jasa pemerintah;
24)		Masih perlu ditingkatkannya ketersediaan data yang akurat dan komprehensif untuk pembangunan daerah;
25)		Masih perlu ditingkatkannya kinerja Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Madiun Dalam Rangka mengendalikan laju inflasi daerah;
26)		Masih perlu ditingkatkannya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari 3 (tiga) BUMD yang ada ;
27)		Belum Terpenuhinya SOP Dalam Pembinaan BUMD;
28)		Masih perlu ditingkatkannya Kualitas Produk Hukum Daerah, Pelayanan dan Kesadaran Hukum serta Publikasi;
29)		Kuantitas, Kapabilitas dan Kualitas SDM Sekretariat DPRD kurang optimal, sehingga perlu ditingkatkan melalui training, supervise dan rekrutmen pegawai sesuai kebutuhan organisasi;
30)		Optimalisasi ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan;
31)		Belum tersedianya standar atau pedoman secara menyeluruh dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dan dukungan sesuai standar terhadap penyelenggara tugas dan fungsi DPRD;
32)		Makin tingginya tuntutan peningkatan kualitas dan efektifitas pelayanan serta dukungan, yang dibebankan kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun untuk peningkatan kapasitas DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
<b>B4.1.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan Pembangunan</b>	
1)		Masih perlu ditingkatkannya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran Perangkat Daerah;
2)		Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas Aparatur Pengawasan
<b>B4.2.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan</b>	
1)		Belum terciptanya satu sistem perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan integratif antar wilayah serta sektor perekonomian daerah;
2)		Masih perlu ditingkatkannya kualitas penyusunan dokumen perencanaan baik pada tingkat daerah maupun Perangkat Daerah;
3)		Masih perlu ditingkatkannya kordinasi antar pelaku pembangunan daerah, baik pada tataran horizontal dengan Perangkat Daerah, maupun dengan pemerintah Pusat dan Provinsi;
4)		Masih perlu ditingkatkannya ketersediaan data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Madiun yang berkualitas;
5)		Masih terbatasnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah;
6)		Masih perlu ditingkatkannya kuantitas dan kualitas sumber daya perencanaan di daerah;
7)		masih perlu ditingkatkannya pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
<b>B4.3.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan</b>	
1)		Ketergantungan pendapatan daerah yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat yang mencapai 66,73% pada tahun 2017;
2)		Belum akuratnya <i>database</i> pajak dan retribusi daerah;
3)		Masih perlu ditingkatkannya penggalan potensi dan pemetaan potensi pendapatan daerah;
4)		Masih perlu ditingkatkannya manajemen pengelolaan pajak daerah;
5)		Perlunya komitmen mempertahankan opini WTP;
6)		Belum adanya pemahaman yang sama terkait mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial;
7)		Masih perlu ditingkatkannya pengelolaan aset daerah.
<b>B4.4.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan</b>	
1)		Masih perlu ditingkatkannya sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i> dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
2)		Penempatan pegawai belum berdasarkan kompetensi dan prestasi kerja;
3)		Jumlah pegawai yang ada kurang dari jumlah pegawai yang dibutuhkan sesuai perhitungan ABK;
4)		Masih perlu ditingkatkannya kapasitas sumber data manusia aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan.



No	ASPEK/BIDANG URUSAN	Permasalahan
<b>B4.5. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan</b>		
1)		Masih perlu ditingkatkannya inovasi pembangunan daerah untuk peningkatan pelayanan bagi masyarakat;
2)		Terbatasnya sumber daya aparatur dalam bidang penelitian dan pengembangan daerah;
3)		Belum dimanfaatkannya hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan daerah
<b>B4.6. Urusan Pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>		
1)		Masih terbatasnya kesadaran masyarakat dalam memahami kehidupan berbangsa dan bernegara;
2)		Masih terbatasnya pemahaman generasi muda khususnya para pelajar SMP dan SMU/SMK tentang pentingnya Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara;
3)		Masih terbatasnya semangat Bhinneka Tunggal Ika masyarakat yang berbeda suku, adat, ras dan etnis;
4)		Masih terbatasnya pembinaan dalam pelayanan aliran kepercayaan yang ada ;
5)		Masih terbatasnya pemahaman masyarakat khususnya generasi muda dan pelajar dalam mengantisipasi dan menanggulangi bahaya narkoba dan kenakalan remaja;
6)		Masih terbatasnya rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat dan generasi muda;
7)		rendahnya peran serta masyarakat dalam menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif dalam kehidupan sosial di masyarakat;
8)		Masih terbatasnya keterpaduan dan sinkronisasi pencegahan antar aparat dalam penanganan konflik sosial ;
9)		Masih terbatasnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik;
10)		rendahnya pemahaman masyarakat dan Ormas/LSM dalam ikut berpartisipasi sebagai salah satu <i>stakeholder</i> dalam pembangunan daerah dan kemasyarakatan.
<b>B4.7. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penunjang kecamatan</b>		
1)		Belum adanya pemetaan potensi wilayah kelurahan sehingga usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat di kelurahan tidak optimal. Kapasitas masyarakat dalam melakukan usaha-usaha produktif rendah;
2)		Masih perlu ditingkatkannya pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat pembangunan;
3)		Semangat kepedulian nilai-nilai kegotongroyongan semakin menurun sebagai akibat dari berkembangnya semangat materialistis dan individualistis di tingkat kelurahan;
4)		Menurunnya semangat kepedulian dan kemauan dari warga masyarakat dalam pemberdayaan dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah sebagai akibat dari berkembangnya semangat materialistik dan individualis;
5)		Masih perlu ditingkatkannya SDM di kelurahan dalam mengelola data dan aplikasi profil serta monografi kelurahan sehingga pemetaan potensi wilayah kelurahan belum tersajikan dengan baik.
6)		Sarana dan prasarana kecamatan belum optimal dalam pelayanan kepada masyarakat;
7)		terbatasnya kemampuan SDM di kecamatan dan kelurahan.
<b>C. ASPEK DAYA SAING</b>		
		1) Masih terbatasnya kemandirian fiskal daerah yang ditunjukkan dengan masih reoatif rendahnya Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)
		2) Kualitas infrastruktur perkotaan seperti jalan, jembatan, dan jaringan irigasi masih perlu terus ditingkatkan



**Terdapat lima pokok masalah pembangunan Kota Madiun berdasarkan identifikasi permasalahan pembangunan.** Lima masalah pokok permasalahan pembangunan tersebut adalah 1. masih perlu ditingkatkannya kualitas sumber daya manusia; 2. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur dengan kondisi sangat baik perlu ditingkatkan; 3. Pembangunan ekonomi perlu didorong untuk lebih berkualitas dan mampu pulih secepatnya sebagai dampak Covid-19; 4. Reformasi birokrasi mengalami peningkatan namun masih perlu ditingkatkannya sesuai target; dan 5. Perlunya peningkatan kehidupan masyarakat yang tentram dan harmonisasi. Hasil pemetaan tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut.



**Gambar 4.1**  
Lima Masalah Pokok Pembangunan Kota Madiun

**Dalam upaya mengatasi permasalahan pokok pembangunan, perlu diidentifikasi faktor penyebab (akar masalah) masalah pokok yang telah diidentifikasi.** Permasalahan pokok masih perlu ditingkatkannya kualitas sumberdaya manusia, disebabkan oleh capaian IPM yang lambat meskipun IPM Kota Madiun tertinggi ketiga di Jawa Timur. Selain itu peningkatan kemiskinan dan permasalahan kesehatan akibat Covid-19 perlu juga menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas SDM. Masih terbatasnya pencapaian ekonomi daerah yang inklusif disebabkan oleh masih rendahnya pertumbuhan ekonomi sebagai dampak Covid-19 dan relatif tingginya ketimpangan pendapatan. Hal tersebut disebabkan oleh masih rendahnya nilai investasi dan nilai tambah sektor unggulan, serta masih perlu ditingkatkannya infrastruktur ekonomi daerah dan kemampuan keuangan daerah.

Hasil pemetaan tersebut sudah sejalan dengan tabel 2.160 21n tabel 261 di bab II. Hasil pemetaan masalah pokok pembangunan lebih rinci dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 4.2**  
Hasil Pemetaan Masalah Pokok berdasarkan Identifikasi Permasalahan Pembangunan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia	Indek Pembangunan manusia sudah sangat tinggi namun belum mencapai target RPJMD	Masih perlu ditingkatkannya Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
			Masih perlu ditingkatkannya tenaga pendidik SD/MI dan SMP/MTS dengan kualifikasi lulusan S1/S2/S3
			Belum terpenuhinya target SPM pelayanan bidang kesehatan
			Masih perlu ditingkatkannya pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun
		Meningkatnya tingkat kemiskinan	Pandemic Covid-19 menyebabkan tingkat kemiskinan meningkat
			Meningkatnya jumlah PMKS
		Masih terbatasnya jaring pengaman sosial	
2.	Ketersediaan dan kualitas infrastruktur perkotaan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu ditingkatkan	Kuantitas dan kualitas infrastruktur masih perlu peningkatan	Masih perlu ditingkatkannya indeks kenyamanan kota
			Perencanaan pembangunan infrastruktur masih perlu ditingkatkan dan direncanakan secara komprehensif
			Masih terdapat jalan berkualitas buruk
			Masih terbatasnya indeks infrastruktur ekonomi daerah
			Proporsi Belanja modal relatif rendah meskipun mengalami peningkatan
		Masih terbatasnya pengelolaan lingkungan hidup	Masih perlu ditingkatkannya sanitasi dan penyediaan air dan udara yang bersih
			Penurunan kualitas lingkungan
			Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana kota
			Pengelolaan limbah dan persampahan
			Sanitasi dan penyediaan air bersih
		Alih fungsi lahan pertanian	
3	Pembangunan ekonomi perlu didorong untuk lebih berkualitas	Menurunnya pertumbuhan ekonomi	Pandemic covid 19 masih belum pasti kapan akan diatasi
			Pembatasan mobilitas akibat Covid-19 dan menurunnya tingkat konsumsi



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Industri utama di Kota Madiun terdampak Covid-19 sehingga mengalami penurunan produksi
			Nilai tambah sektor unggulan masih terbatas
		Ketimpangan Pendapatan	Masih perlu ditingkatkannya infrastruktur ekonomi daerah
			Masih terjadinya ketimpangan antar wilayah khususnya antar kelurahan
		Kapasitas fiskal daerah terbatas	Masih terbatasnya penggalian potensi PAD
			Penentuan target pendapatan masih dalam skema pesimis
4	Reformasi birokrasi mengalami peningkatan namun masih perlu ditingkatkannya sesuai target	Tata kelola pemerintahan dalam pelaksanaannya belum optimal	Indeks reformasi birokrasi belum optimal
			Masih terbatasnya kualitas ASN
			Kualitas pelayanan terhadap masyarakat masih perlu ditingkatkan
		Masih perlu ditingkatkannya tata kelola pemerintahan yang baik berbasis sistem informasi dan teknologi / digitalisasi	
			Masih terbatasnya kualitas aparatur
			Masih perlu ditingkatkannya kapasitas pengelolaan pemeritahan
5	Perlunya peningkatan kehidupan masyarakat yang tentram dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat	Masih perlu ditingkatkannya harmonisasi dan stabilisasi kehidupan masyarakat	Masih terdapatnya kriminalitas
			Masih rawannya konflik sosial
		Masih rendahnya IPG dan IDG	Masih perlu ditingkatkannya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keindahan serta masih perlu ditingkatkannya tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban ketentraman, keindahan)
			Masih terbatasnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak

Sumber: bab II (diolah, 2021)

## 4.2 Isu Strategis

### 4.2.1 Identifikasi Isu-isu Strategis

**Penentuan isu-isu strategis merupakan langkah utama dalam menentukan arah kebijakan kedepan.** Isu strategis merupakan kondisi yang perlu diperhatikan berdasarkan hasil analisis kondisi internal dan eksternal sebagaimana digambarkan dalam uraian kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan Kota Madiun.

Analisis isu-isu strategis didefinisikan berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang yang terjadi dan akan terjadi termasuk memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan. Isu strategis juga disusun berdasarkan berbagai hal yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancaman.

**Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang sampai dengan berakhirnya masa perencanaan jangka menengah.** Isu-isu strategis adalah isu-isu yang jika diprioritaskan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan pada sisa waktu pelaksanaan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Jika isu strategis ini tidak ditangani maka tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai dan apabila tidak diantisipasi maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, demikian pula sebaliknya jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Penetapan isu-isu strategis pembangunan Kota Madiun berdasarkan hasil analisis terhadap lingkungan eksternal berupa permasalahan/agenda/aspek yang menjadi isu pada tingkat internasional, nasional dan regional yang berpengaruh luas. Disamping itu, dilakukan juga analisis terhadap kondisi lingkungan internal berupa permasalahan pembangunan yang dihadapi dan harus ditangani selama lima tahun mendatang. Adapun isu pada tingkat internasional, nasional, regional, dan permasalahan internal yang berpengaruh signifikan dapat dilihat dalam tabel berikut



**Tabel 4.3**  
**Identifikasi Isu-isu Strategis Daerah Kota Madiun**

No	Tingkat Isu / Dinamika	Isu Strategis Pembangunan Daerah
1	INTERNASIONAL	Dampak Pandemic Covid-19 terhadap ekonomi global dan vaksinasi global
		<p><b>Sustainable Development Goals (SDGs)</b> dicetuskan untuk meneruskan Milenium Development Goals (MDGs) agar lebih terarah dan berkelanjutan. SDGs diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030 dan memiliki 5 pondasi utama meliputi: manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian dan kemitraan dengan 17 target sasaran utama, yaitu:</p>
		<p><b>1 Tanpa Kemiskinan:</b> Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.</p>
		<p><b>2 Tanpa Kelaparan:</b> Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.</p>
		<p><b>3 Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan:</b> Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.</p>
		<p><b>4 Pendidikan Berkualitas:</b> Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.</p>
		<p><b>5 Kesetaraan Gender:</b> Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.</p>
		<p><b>6 Air Bersih dan Sanitasi:</b> Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.</p>
		<p><b>7 Energi Bersih dan Terjangkau:</b> Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.</p>
		<p><b>8 Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak:</b> Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.</p>
<p><b>9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur:</b> Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.</p>		

No	Tingkat Isu / Dinamika	Isu Strategis Pembangunan Daerah
		<p><b>10 Mengurangi Kesenjangan:</b> Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.</p> <p><b>11 Keberlanjutan Kota dan Komunitas:</b> Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan.</p> <p><b>12 Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab:</b> Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.</p> <p><b>13 Aksi Terhadap Iklim:</b> Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.</p> <p><b>14 Kehidupan Bawah Laut:</b> Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.</p> <p><b>15 Kehidupan di Darat:</b> Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.</p> <p><b>16 Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian:</b> Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.</p> <p><b>17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan:</b> memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.</p>
2	NASIONAL	<p>Pemulihan ekonomi nasional dampak dari Covid-19</p> <p>Perpres 80/2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Diperlukan klasterisasi wilayah</p>



No	Tingkat Isu / Dinamika	Isu Strategis Pembangunan Daerah
		<p>Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar</p> <p>Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman</p> <p>Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya</p> <p>Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air</p> <p>Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu nasional dan daerah</p> <p>Konsep pembangunan berbasis <i>Smart City</i> dengan pengintegrasian teknologi untuk menciptakan efisiensi, memperbaiki pelayanan public dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang inovatif;</li> <li>2. Terobosan pada sektor unggulan;</li> <li>3. Terobosan dalam penyelesaian masalah;</li> <li>4. Penggunaan data sebagai pengambil kebijakan atau keputusan;</li> <li>5. Kolaborasi antar bidang dalam penyelenggaraan pembangunan.</li> </ol> <p>Dimensi pembangunan berbasis <i>Smart City</i> meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Smart Governance</i>, meliputi unsur pelayanan public, birokrasi dan kebijakan public;</li> <li>2. <i>Smart Branding</i>, meliputi unsur membangun ekosistem pariwisata, daya saing bisnis dan industry kreatif serta penataan wilayah kota;</li> <li>3. <i>Smart Economy</i>, meliputi unsur penataan industri, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan membangun ekosistem keuangan;</li> <li>4. <i>Smart Living</i>, meliputi unsur pembangunan lingkungan, menjamin fasilitas dan pelayanan kesehatan serta membangun transportasi dan logistik;</li> <li>5. <i>Smart Society</i>, meliputi unsur membangun masyarakat yang smart, membangun system edukasi, keamanan &amp; keselamatan;</li> <li>6. <i>Smart Environment</i>, meliputi unsur perlindungan sosial, tata kelola sampah dan limbah serta membangun daya saing energi yang berkelanjutan.</li> </ol>
3	PROVINSI JAWA TIMUR	Pemulihan dan percepatan pertumbuhan ekonomi dan kondisi sosial masyarakat akibat pandemic Covid-19

No	Tingkat Isu / Dinamika	Isu Strategis Pembangunan Daerah
		<p>Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial</p> <p>Peningkatan lapangan kerja melalui Millineal Job Center dengan cara memberikan job training, pendidikan vokasi, membantu starting-up usaha, membantu promosi bagi usahawan muda, dan membantu pembiayaan usaha pada tahap awal usaha.</p> <p>Peningkatan pendidikan dan kesehatan gratis berkualitas</p> <p>Pembangunan infrastruktur dalam kerangka pengembangan wilayah terpadu, dan keadilan akses bagi masyarakat pesisir dan terluar seperti Kawasan Lingkar Wilis, Lingkar Bromo, Lingkar Ijen, Gerbang Kertasusila, Koridor Maritim Pantura Jawa-Madura, Koridor Maritim Selatan Jawa.</p> <p>Pemberian tunjangan kehormatan bagi imam masjid di kampung, pesisir, dan pulau terluar. Kemudian perluasan tunjangan kehormatan bagi hafidz-hafidzoh. Penguatan peran pondok pesantren dalam mendorong partisipasi sekolah</p> <p>Peningkatan sektor pertanian, peternakan, perikanan darat dan laut, kehutanan, perkebunan untuk mewujudkan kesejahteraan petani dan nelayan.</p> <p>Penguatan ekonomi kerakyatan dengan berbasis UMKM, koperasi, dan mendorong pemberdayaan pemerintahan.</p> <p>Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, dan anti korupsi. Peningkatan budaya meritokrasi, menyelenggarakan complain handling system, budaya birokrasi yang melayani dan efektif, menjaga clean government, sound governance, perluasan dan pelayanan berbasis IT.</p> <p>Penguatan harmoni sosial dan alam dengan melestarikan kebudayaan dan lingkungan hidup.</p>
4	KOTA MADIUN	<p>Isu strategis berdasarkan <b>kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pengelolaan potensi ekonomi daerah secara optimal</li> <li>• Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial</li> <li>• Mewujudkan pemerintahan yang baik dalam situasi yang tertib, aman dan damai.</li> </ul>



No	Tingkat Isu / Dinamika	Isu Strategis Pembangunan Daerah
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kerja sama antar pemangku kepentingan pembangunan, baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional</li> <li>• Melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan, penanggulangan dan pemulihan dengan melibatkan partisipasi masyarakat</li> </ul>
		Isu strategis berdasarkan <b>kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah:</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah dalam rangka mendorong peluang investasi dan pemerataan wilayah</li> <li>• Keseimbangan Fungsi Budidaya dan Fungsi lindung dalam Upaya membentuk Daerah yang berkelanjutan</li> <li>• Pusat kegiatan wilayah dan Penetapan kawasan-kawasan strategis Kota</li> <li>• Pusat-pusat pelayanan ekonomi skala regional</li> <li>• Pengembangan pusat pelayanan kegiatan memperkuat hubungan antar kawasan</li> <li>• Pengembangan kegiatan pertanian perkotaan</li> <li>• Peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan</li> <li>• Pelestarian kawasan cagar budaya</li> <li>• Pengembangan kawasan budidaya terbangun yang mempertimbangkan efisiensi pemanfaatan ruang</li> <li>• Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman</li> </ul>
		Isu strategis berdasarkan <b>Kebijakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan air minum dan sanitasi lingkungan</li> <li>• Penanggulangan kriminalitas dan keamanan</li> <li>• Peningkatan kesehatan masyarakat</li> <li>• Pengelolaan limbah dan sampah</li> <li>• Penanggulangan kemiskinan dan Penangguran</li> <li>• Penurunan kualitas lingkungan hidup</li> <li>• Kualitas pendidikan belum merata</li> </ul>

No	Tingkat Isu / Dinamika	Isu Strategis Pembangunan Daerah
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana</li><li>• Kesetaraan gender dan perlindungan anak</li><li>• Pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah</li><li>• Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</li><li>• Sarana dan prasarana perkotaan</li></ul>
		Isu Strategis umum lainnya meliputi
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemulihan dan percepatan pertumbuhan ekonomi dan kondisi sosial masyarakat akibat pandemi Covid-19</li><li>• Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing</li><li>• Peningkatan ekonomi daerah yang inklusif dan pengembangan Kawasan pertumbuhan ekonomi baru peran yang mandiri</li><li>• Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan secara komprehensif</li><li>• Penguatan tata kelola pemerintahan dan yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan public</li><li>• Peningkatan harmonisasi kehidupan bermasyarakat</li><li>• Kolaborasi, kerjasama dan Sinergi dengan daerah baik secara vertical maupun horizontal</li><li>• Klasterisasi wilayah sesuai potensi sosial ekonomi</li></ul>



#### 4.2.2 Penetapan Isu Strategis Pembangunan Daerah

Isu strategis yang dapat dirumuskan dalam RPJMD ini ditetapkan berdasarkan kriteria-kriteria dalam tabel di bawah. Setiap kriteria akan dikalikan dengan angka maksimum 100.

**Tabel 4.4**  
Kriteria Pembobotan Isu-isu Strategis Daerah Kota Madiun

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah	15
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	20
3	Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	15
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	20
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	15
<b>Total</b>		100

Dari berbagai isu strategis pada sub bab sebelumnya kemudian dikelompokkan dan di ranking

**Tabel 4.5**  
Hasil Perankingan Isu-isu Strategis Daerah Kota Madiun

No	Isu Strategis berdasarkan pengelompokan	Isu Strategis utama	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor	Ranking
			1	2	3	4	5	6		
1	<b>Sumberdaya manusia</b>	Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	90	90	80	90	80	80	85,5	3
	Pencapaian SDGs									
	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial									
	Kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.									
2	<b>Pembangunan Ekonomi</b>	Percepatan pemulihan ekonomi daerah untuk mencapai ekonomi daerah yang inklusif melalui pengembangan	90	85	90	90	85	85	87,5	1
	Pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak Pandemic Covid-19 terhadap ekonomi global									







No	Isu Strategis berdasarkan pengelompokan	Isu Strategis utama	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor	Ranking
			1	2	3	4	5	6		
	Meningkatkan kerja sama antar pemangku kepentingan pembangunan, baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional	teknologi serta inovasi								

Sesuai dengan kriteria diatas, terdapat lima isu strategis pembangunan daerah. Selain itu, berpijak pada analisis atas kondisi daerah dan masukan dari para pemangku kepentingan, maka isu strategis yang menjadi agenda dan prioritas pembangunan Kota Madiun pada tahun pelaksanaan rencana jangka menengah daerah 2019–2024 adalah sebagai berikut:

- Percepatan pemulihan ekonomi daerah untuk mencapai ekonomi daerah yang inklusif melalui pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi
- Peningkatan pembangunan infrastruktur kota dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan secara terpadu
- Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
- Penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan public berbasis system informasi dan teknologi serta inovasi
- Peningkatan keamanan dan ketentraman kehidupan bermasyarakat

Gambar 4.2  
Isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Madiun



1. Percepatan pemulihan ekonomi daerah untuk mencapai ekonomi daerah yang inklusif melalui pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi.

Kondisi perekonomian daerah Kota Madiun perlu ditingkatkan ditengah pemulihan ekonomi daerah akibat pandemi Covid-19. Peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan fokus pada peningkatan industri pengolahan, ekonomi kreatif dan perdagangan, serta pertumbuhan sektor pariwisata. Struktur perekonomian daerah Kota Madiun masih didominasi oleh sektor tersier. Sampai dengan tahun 2020 sektor yang paling dominan berkontribusi terhadap perekonomian adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Rata-rata kontribusi sektor tersebut lebih dari 25 persen terhadap PDRB. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan sektor yang menjadi mata pencaharian sekaligus menyerap banyak tenaga kerja. Agar menjadi pilar pertumbuhan daerah sekaligus pemulihan dan peningkatan ekonomi yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya-upaya meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan daerah.

Peningkatan sektor unggulan dapat dimulai dengan peningkatan pertumbuhan sektor pengolahan dapat didukung dengan peningkatan ekonomi kreatif melalui proses produksi yang dilakukan pengerajin batik, kayu, souvenir, anyaman dan pengolahan makanan. Hasil pengolahan tersebut dapat diperdagangkan sekaligus meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan sektor perdagangan. Dalam rangka pengembangan sektor pengelolaan dan perdagangan Pemerintah Kota Madiun harus menyiapkan lahan untuk pengembangan sektor industri serta mempercepat pemulihan dan peningkatan ekonomi daerah. Selain sektor unggulan tantangan dalam mempercepat pemulihan ekonomi ditengah pandemi yang berlangsung adalah pengembangan pariwisata. Perlu dilakukan upaya-upaya meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata dengan cara mempromosikan lokasi wisata di Kota Madiun yang memiliki nilai jual dan layak dipromosikan seperti; kawasan wisata spiritual, kawasan wisata kuliner, kawasan wisata cagar budaya dan kawasan wisata belanja/*shopping centre*. Dengan pengembangan potensi kawasan wisata, diharapkan dapat memberikan dampak ganda dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi dan pembangunan Kota Madiun. Selain itu basis pengembangan ekonomi perlu dilakukan di masing – masing kelurahan. Sehingga setiap kelurahan bias mandiri dan menjadi pusat Kawasan pertumbuhan ekonomi baru.

2. Peningkatan pembangunan infrastruktur kota dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan secara terpadu.

Salah satu aset paling penting dalam pembangunan daerah adalah infrastruktur. Secara umum kondisi infrastruktur di Kota Madiun cukup baik. Hal ini diindikasikan oleh indeks infrastruktur Kota Madiun tahun 2020 sebesar 96%. Selain itu, persentase panjang jalan dapat menggambarkan kondisi infrastruktur daerah, kondisi panjang jalan dalam keadaan baik Kota Madiun pada tahun 2020 meningkat sebesar 94,02% dari total panjang jalan sepanjang 433,485 km. Meningkatnya pembangunan infrastruktur juga ditandai dengan meningkatnya sarana panjang jalan di Kota Madiun yang telah memiliki trotoar yaitu sepanjang 92,74 km. Namun demikian, secara keseluruhan indeks sarana prasarana Kota Madiun tahun 2020 sebesar 86,62 persen.

Perlu dilakukan peningkatan dari sisi kuantitas dan kualitas diseluruh wilayah Kota Madiun. Pada sisi lain, intensitas yang tinggi dalam peningkatan pembangunan infrastruktur dapat menimbulkan dampak negatif pada kelestarian lingkungan hidup (perubahan iklim mikro, menyusutnya daerah serapan air, berkurangnya sumber mata air, menurunnya kualitas air. Terwujudnya infrastruktur kota juga harus memperhatikan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan. Kualitas lingkungan hidup dapat diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH terdiri dari Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, dan Indeks Tutupan Lahan. Berdasarkan pengukuran IKLH Kota Madiun menunjukkan perbaikan dengan terus meingkatkan nilai indeks setiap tahun hingga pada tahun 2020 sebesar 65,42. Indeks Kualitas Air Kota Madiun juga meningkat sebesar 78,50, peningkatan kualitas air selaras dengan peningkatan Indeks Kualitas Udara hingga sebesar 87,94. Sedangkan Indeks Kualitas Tutupan Kota Madiun 2020 hanya sebesar 38,87.

Selain IKLH kualitas lingkungan hidup dapat dilihat persentase ruang yang dimanfaatkan, pada tahun 2020 pemerintah Kota Madiun telah berhasil memanfaatkan ruang sebesar 100 persen. Dapat dikatakan pemerintah Kota Madiun telah meningkatkan kualitas penataan ruang sekaligus pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas. Lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan juga dapat menanggulangi bencana alam yang sering terjadi di Kota Madiun yaitu banjir.



3. Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Indikator utama kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia dapat dihitung berdasarkan tiga aspek dasar yaitu aspek kesehatan, aspek pendidikan, dan aspek ekonomi. Selama lima tahun terakhir kualitas sumber daya manusia di Kota Madiun menunjukkan peningkatan. IPM Kota Madiun pada tahun 2020 meningkat hingga mencapai 80,91. Hal tersebut menunjukkan trend yang sangat positif, pada tahun sebelumnya IPM Kota Madiun termasuk dalam kategori tinggi pada tahun 2020 berubah menjadi kategori sangat tinggi. Kota Madiun menduduki posisi tiga IPM tertinggi dibandingkan dengan wilayah karisidenan Madiun bahkan di Provinsi Jawa Timur.

Beberapa faktor yang menyebabkan IPM Kota Madiun berada di posisi 3 dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur diantaranya adalah cukup meratanya jumlah kualitas pelayanan dasar masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Pada bidang pendidikan harapan lama sekolah telah mencapai sebesar 14,40 tahun atau harapan penduduk untuk bersekolah telah mencapai jenjang perguruan tinggi. Rata-rata lama sekolah Kota Madiun telah mencapai 11,14 tahun dapat diartikan bahwa rata-rata penduduk di Kota Madiun mampu menempuh pendidikan hingga kelas 1 SMA. Selain pendidikan, derajat kesehatan masyarakat di Kota Madiun cukup tinggi yang diindikasikan dengan indeks kesehatan sebesar 0,81 satuan indeks. Pemerintah Kota Madiun juga mampu menurunkan angka kematian ibu dan bayi dengan dibuktikan oleh tidak adanya angka kematian ibu dan kematian bayi yang tercatat pada tahun 2020. Hal tersebut mempengaruhi tingginya umur harapan hidup masyarakat Kota Madiun.

4. Penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik berbasis system informasi dan teknologi serta inovasi.

Tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pembangunan harus dibarengi dengan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, akuntabel, dan berorientasi pada publik. Perkembangan kinerja tata kelola pemerintahan Kota Madiun selama lima tahun terakhir cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator kinerja keuangan melalui opini BPK dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang konsisten selama lima tahun terakhir.

Selain itu, Indeks Kepuasan Masyarakat kota Madiun telah mencapai 89,12%. Fungsi penunjang administrasi pemerintah reformasi birokrasi dan nilai hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah telah mencapai target. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah selama lima tahun terakhir mendapatkan nilai B dan ditargetkan pada akhir periode RPJMD 2019-2024 telah mencapai target dengan nilai A.

Perbaikan dan pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik tetap perlu dilaksanakan secara terus-menerus, terutama meliputi kelembagaan, manajemen aparatur, manajemen perencanaan dan penganggaran, prosedur operasi standar (*SOP/standart operation procedure*), dan keterbukaan informasi publik yang memadai serta peningkatan pelayanan publik berbasis IT. Perlunya perbaikan dan peningkatan kualitas SDM aparatur masih perlu ditingkatkan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik serta pengembangan tata kelola pemerintahan berdasarkan kerangka pikir bahwa kinerja birokrasi pemerintahan yang baik dan profesional serta penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi faktor kunci keberhasilan pembangunan di Kota Madiun.

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional juga dilaksanakan melalui peningkatan kualitas perencanaan, pembangunan, pengendalian dan penganggaran daerah dengan melakukan evaluasi kinerja. Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin maju, maka proses evaluasi kinerja dapat melalui melalui *e-government* yang meliputi *e-planning*, *e-budgeting*, dan lain sebagainya. Selanjutnya perlu juga melakukan optimalisasi pendapatan daerah melalui Pengembangan Potensi Penerimaan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan *Local Taxing Power*, Optimaliasi penerimaan dana perimbangan dari DAK yang bersifat *bottom up*, dalam mendukung pengembangan infrastruktur daerah; Optimaliasi Pendapatan dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

5. Peningkatan keamanan dan ketentraman kehidupan bermasyarakat.

Keamanan dan ketentraman kehidupan bermasyarakat dapat diindikasikan oleh tingkat kriminalitas, rasa tentram dan jumlah pelanggaran perda. Angka kriminalitas yang tertangani di Kota Madiun menunjukkan penurunan.



Pada tahun 2016 angka kriminalitas mencapai 14,93 persen menurun secara signifikan pada tahun 2018 sebesar 4,06 persen. Semakin rendah angka kriminalitas semakin tinggi rasa aman suatu daerah. Indeks ketentraman Kota Madiun tahun 2020 mencapai 75% dan ditargetkan pada akhir periode RPJMD 2019-2024 akan mencapai 85%. Tingkat keberhasilan penegakan Perda suatu daerah dapat diukur dengan indikator persentase penegakan Perda. Persentase penegakan perda tahun 2020 di Kota Madiun telah mencapai 100%. Sedangkan, pelanggaran K-3 pada tahun 2020 mengalami penurunan dan pelanggaran K-3 yang berhasil ditangani sebanyak 2051 kasus.

Peningkatan keamanan dan ketentraman juga akan meningkatkan toleransi dalam bermasyarakat. Disisi lain, toleransi masyarakat yang masih rendah mengenai pentingnya menjaga kebersamaan dan keharmonisan kehidupan sosial bermasyarakat akan memicu terjadinya konflik sosial. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya perlu dioptimalkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya sistematis, berkesinambungan, konsisten untuk meningkatkan toleransi dan peran/partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta mengurangi angka kriminalitas dan penggunaan NAPZA.

Perubahan isu-isu strategis pada P-RPJMD dari RPJMD murni dapat dilihat dalam tabel berikut

**Tabel 4.6**  
Perbandingan Isu Strategis RPJMD 2019-2024 dengan Ranwal RPJMD Perubahan 2019-2024

NO	RPJMD 2019-2024 sebelum perubahan		NO	RPJMD Perubahan 2019-2024
1	Peningkatan Kualitas Sekolah pada Semua Jenjang Pendidikan;		1	Percepatan pemulihan ekonomi daerah untuk mencapai ekonomi daerah yang inklusif melalui pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi
2	Peningkatan Pelayanan Kesehatan;		2	Peningkatan pembangunan infrastruktur kota dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan secara terpadu
3	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik;		3	Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4	Pengembangan Kota Madiun sebagai Pusat Pengembangan Jawa Timur Bagian Barat;		4	Penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik berbasis system informasi dan teknologi serta inovasi
5	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;		5	Peningkatan keamanan dan ketentraman kehidupan bermasyarakat
6	Percepatan Pengembangan Agroindustri;			
7	Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota;			
8	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota			
9	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ( <i>Sustainable Development Goals</i> );			
10	Penguatan Pola Pembangunan Partisipatif;			
11	Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah.			

Berdasarkan tabel diatas, sebgaiian isu-isu strategis dalam RPJMD murni hampir semuanya bisa dikelopmakan dalam berbagai isu startegis dalam P-RPJMD. Sehingga bisa dikatakan isu-isu strategis dalam P-RPJMD merangkum secara eksplisit isu strategis dalam RPJMD murni. Sleain itu, capaian indikator kinerja pada beberapa aspek isu strategis RPJMD murni sudah tercapai seperti pada peningkatan kualitas sekolah yang diindikasikan oleh indeks pendidikan yang mengalami peningkatan, peningkatan kemampuan keuangan daerah yang diindikasikan oleh derajat desentralisasi fiskal pun sudah mengalami peningkatan meskipun masih perlu terus diupayakan agar dapat mandiri secara fiskal.



Sedangkan beberapa isu-isu staretgis yang lainnya sudah tidak relevan, seperti pengembangan kota Madiun sebagai Pusat Pengembangan Jawa Timur Bagian Barat. Hal ini dikarenakan kebijakan pusat dan provinsi yang berorientasi pada pengembangan kawsaan selingkar wilis. Dimana Kota Madiun diarahkan pada pengembangan industri dan wisata. Selanjutnya, banyaknya isu strategis dalam RPJMD murni berakibat pada kurang fokusnya arah kebijakan pembangunan daerah.

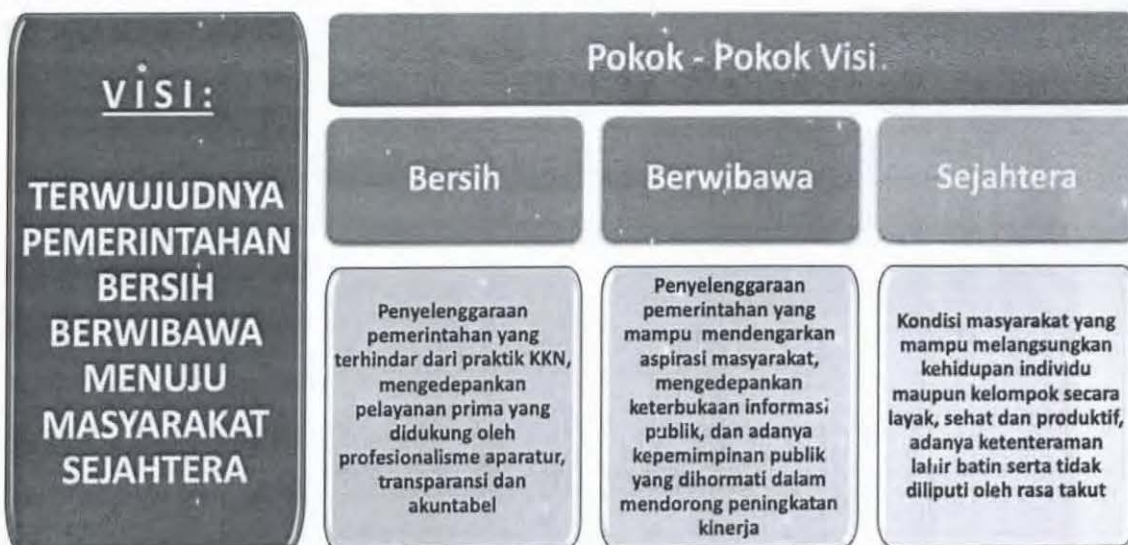
**BAB V**  
**VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**

**5.1 Visi**

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin diwujudkan dalam periode lima tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Visi yang ditetapkan dapat memberikan motivasi kepada seluruh aparatur serta masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mewujudkan visi tersebut. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis pada bab sebelumnya maka rumusan Visi Kota Madiun tahun 2019-2024 adalah:

**“Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”**

Terdapat Tiga pilar utama dalam rumusan visi pembangunan Kota Madiun 2019-2024. Dalam menuju masyarakat Kota Madiun yang sejahtera diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan komprehensif, sehingga visi tersebut dapat tercapai. Memperhatikan Visi Kota Madiun diatas serta perubahan kondisi dan situasi baik internal dan eksternal yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kota Madiun dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional terkhusus di Provinsi Jawa Timur, tingkat nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap Visi dimaksud, menghasilkan pokok-pokok Visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana Gambar 5.1.



**Gambar 5.1**  
Visi Pembangunan Kota Madiun Tahun 2019-2024



**Rumusan Visi RPJMD Kota Madiun 2019-2024 memiliki keterkaitan dengan visi RPJPD Kota Madiun 2005 – 2025, visi RPJMD provinsi Jawa Timur 2019-2024, dan visi RPJP Provinsi Jawa Timur 2005-2025.** Dalam upaya menjamin konsistensi, sinergitas antara rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan RPJMN dan RPJPD, penjelasan visi harus menggambarkan keterkaitannya dengan RPJPD dan RPJPN untuk RPJMD provinsi dan keterkaitannya dengan RPJPD provinsi untuk RPJMD Kota Madiun. Keterkaitan visi Kota Madiun dengan RPJPD Kota Madiun 2005-2025, RPJPD dan RPJMD Provinsi Jawa Timur dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 5.1**  
Keterkaitan Visi dengan RPJMD dan RPJP Provinsi

Visi RPJP Jatim 2005-2025	Visi RPJMD Jatim 2019-2024	Visi RPJPD Kota Madiun 2005-2025	Visi RPJMD Kota Madiun 2019-2024
Terwujudnya Jawa Timur sebagai pusat agribisnis terkemuka, berdaya saing global dan berkelanjutan	Terwujudnya Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan gotong royong	Terwujudnya kota Madiun sebagai Pusat pengembangan Jawa Timur bagian barat yang maju dan sejahtera	Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera

## 5.2 Misi

**Terdapat empat misi pembangunan dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Madiun tahun 2019 – 2024.** Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

**Tabel 5.2**  
Keterkaitan Pokok-Pokok Visi, Panca Karya, dan Rumusan Misi

No.	Pokok-pokok Visi	Panca Karya (Janji Politik)	Misi
1	Bersih Berwibawa	KARYA 2: Madiun Kota MELAYANI KARYA 5: Madiun Kota TERBUKA	Mewujudkan pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> )
2	Sejahtera	KARYA 1: Madiun Kota PINTAR	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun
		KARYA 3: Madiun Kota MEMBANGUN	Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan
		KARYA 4: Madiun Kota PEDULI	Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Rumusan misi juga memperhatikan janji politik kepala daerah pada saat kampanye yang tercermin dalam Panca karya. Panca karya ini akan menjiwai setiap misi yang dirumuskan, namun beberapa Panca karya di fokuskan pada beberapa misi seperti terlihat dalam tabel:



Gambar 5.2  
Misi Pembangunan Kota Madiun Tahun 2019-2024

Empat misi diatas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah ditemukan dalam bentuk Visi pembangunan daerah Kota Madiun 2019-2024. Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut serta mengurangi potensi ambiguitas dalam memahami butir misi, maka penjabaran Misi diatas dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.3  
Perumusan dan Penjelasan Misi

No.	Pokok-pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
1	Bersih Berwibawa	Mewujudkan pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> )	Dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kota Madiun yang prima, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan kompetensi aparat yang professional dan system modern berbasis informasi teknologi (IT) menuju tatakelola pemerintahan yang baik ( <i>Good Governance</i> ) dan pemerintahan yang bersih ( <i>Clean Government</i> )



No.	Pokok-pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
2	Sejahtera	Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Mewujudkan pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan
		Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun	Mewujudkan manusia yang cerdas, sehat dan mandiri; meningkatnya pembangunan responsive gender.
		Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun	Meningkatkan pembangunan ekonomi, kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM, mewujudkan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan, Meningkatkan ketahanan pangan. Selain itu kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang menurun; menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); tingginya peran pemuda dalam pembangunan, dan meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional dan internasional.

### 5.3 Tujuan dan Sasaran

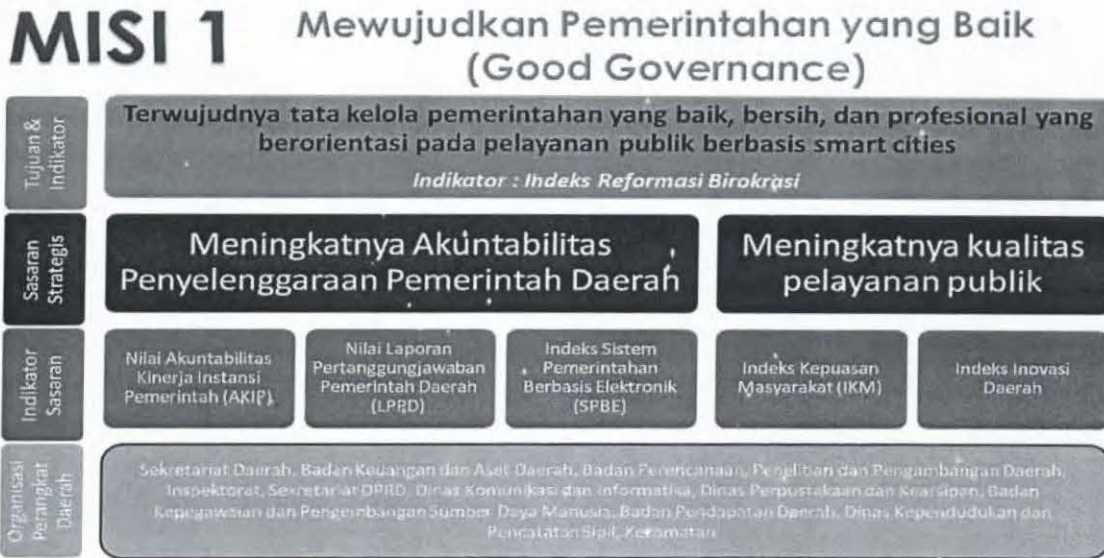
Sesuai dengan visi dan misi yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

#### 5.3.1 Tujuan dan Sasaran Misi pertama

Dalam rangka pencapaian misi 1. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis *smart cities*, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:
  - S1. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
  - S2. Meningkatnya kualitas pelayanan public

Tujuan dan Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui desain kerangka logis pencapaian Misi-1 sebagai berikut:



**Gambar 5.3**  
Kerangka Logis Pencapaian Misi-1 Tujuan 1

### 5.3.2 Tujuan dan Sasaran Misi kedua

Dalam rangka pencapaian misi Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

2. Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

S3. Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur kota

S4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Kerangka logis pencapaian misi kedua sesuai dengan tujuan dan sasaran diatas dapat diuraikan dalam gambar berikut:



**Gambar 5.4**  
Kerangka Logis Pencapaian Misi-2 Tujuan 2



### 5.3.3 Tujuan dan Sasaran Misi ketiga

Dalam rangka pencapaian misi Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Kota Madiun, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

3. Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:
  - S5. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
  - S6. Meningkatnya Derajat kesehatan Masyarakat
  - S7. Meningkatnya Pemberdayaan Gender

Tujuan dan Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain kerangka logis Pencapaian Misi ketiga yang disajikan sebagai berikut:



**Gambar 5.5**  
Kerangka Logis Pencapaian Misi-3 Tujuan 3

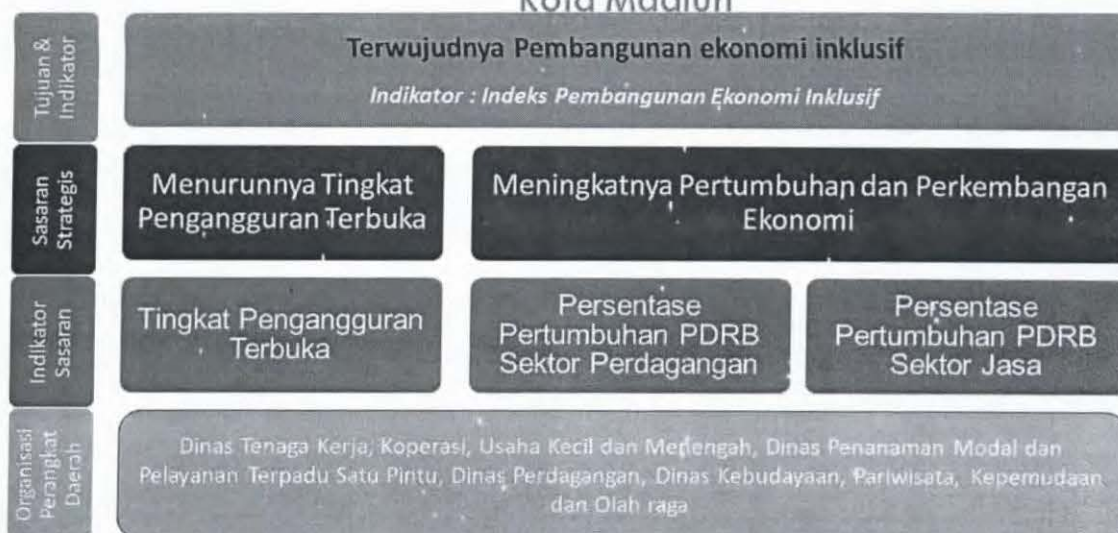
### 5.3.4 Tujuan dan Sasaran Misi keempat

Dalam rangka pencapaian misi Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

4. Terwujudnya Pembangunan ekonomi inklusif, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:
  - S8. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka
  - S9. Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui desain kerangka logis Pencapaian Misi keempat yang disajikan sebagai berikut:

## MISI 4 Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun



**Gambar 5.6**  
Kerangka Logis Pencapaian Misi-4 Tujuan 4

5. Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

S10. Pengurangan Kemiskinan

S11. Meningkatnya stabilitas kehidupan social masyarakat

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui desain kerangka logis Pencapaian Misi keempat tujuan ke 5 yang disajikan sebagai berikut:

## MISI 4 Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun



**Gambar 5.7**  
Kerangka Logis Pencapaian Misi-4 Tujuan 5



Secara umum terdapat perubahan tujuan dan sasaran pembangunan dalam dokumen perubahan RPJMD 2019 – 2024. Tujuan pembangunan mengalami perubahan dari yang sebelumnya terdapat empat tujuan menjadi lima tujuan dengan narasi yang berubah. Tambahan 1 tujuan tersebut adalah Terwujudnya Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Dinamis dan Kondusif. Selanjutnya sasaran pembangunan mengalami perubahan dari 14 menjadi 11 sasaran. Perubahan tersebut sejalan dengan refocusing pembangunan sesuai dengan perkembangan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat terkini.

**Tabel 5.4**

Tujuan Sasaran Sebelum dan Sesudah

<b>MISI 1: Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)</b>			
<b>RPJMD</b>		<b>P-RPJMD</b>	
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
<b>Terwujudnya Pemerintahan yang Baik</b>	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah	<b>Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities</b>	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan		Meningkatnya kualitas pelayanan public
<b>MISI 2: Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan</b>			
<b>RPJMD</b>		<b>P-RPJMD</b>	
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
<b>Terwujudnya Infrastruktur Kota yang Berwawasan Lingkungan</b>	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, sarana transportasi kota dan Permukiman	<b>Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan</b>	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota
	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
<b>MISI 3: Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Kota Madiun</b>			
<b>RPJMD</b>		<b>P-RPJMD</b>	
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
<b>Terwujudnya Masyarakat Kota Madiun yang berkualitas baik</b>	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Kota Madiun	<b>Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing</b>	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Madiun		Meningkatnya Derajat kesehatan Masyarakat

			Meningkatnya pemberdayaan Gender
<b>MISI 4: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun</b>			
<b>RPJMD</b>		<b>P-RPJMD</b>	
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
<b>Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat</b>	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif, dan peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja	<b>Terwujudnya Pembangunan ekonomi inklusif</b>	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka
	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah		Meningkatnya Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi
	stabilitas Ketersediaan Pangan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		
<b>Terwujudnya Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Dinamis dan Kondusif</b>	Meningkatnya Kerukunan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Pemuda yang Berprestasi	<b>Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat</b>	Pengurangan Kemiskinan
	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat

Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam perubahan RPJMD Kota Madiun 2019-2024 menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan. Konsistensi penjabaran Visi dan Misi ke dalam Tujuan dan Sasaran menentukan efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan amanat pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Walikota Terpilih. Berangkat dari tuntutan tersebut, maka dapat dijabarkan konsistensi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran tersebut kedalam matriks berikut ini:



**Tabel 5.5**  
**Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kota Madiun Tahun 2019-2024**

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian				Kondisi Akhir		
				2021	2022	2023	2024			
<b>Misi 1: Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)</b>										
T.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities	IT1.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	(B) 65,55	(B) 67	(B) 68	(B) 69	(BB) 70,01	(BB) 70,01
S.1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	IS1.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun (AKIP)	Skor	BB (70,01)	BB (73)	BB (76)	BB (79)	A (80,01)	A (80,01)
		IS1.2	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Skor	3,385 (tinggi)	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		IS1.3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	Tidak ada penilaian tahun 2020	2,83 (BAIK)	2,85 (BAIK)	2,87 (BAIK)	2,90 (BAIK)	2,90 (BAIK)
			Opini BPK	WTP	WTP	-	-	-	-	WTP
			Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada	%	18,51	-	-	-	-	18,51
S.2	Meningkatnya kualitas pelayanan public	IS2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun	Indeks	85,501 (baik)	82,85 (baik)	83 (baik)	85 (baik)	86 (baik)	86 (baik)
		IS2.2	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	1892	1892	1900	1925	1950	1950

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian				Kondisi Akhir		
				2021	2022	2023	2024			
<b>Misi 2: Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan</b>										
T.2	Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	IT2.1	Indeks Kenyamanan Kota (livable city)	Indeks	86,67	87,78	88,19	88,60	89,01	89,01
S.3	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota	IS3.1	Indeks infrastruktur	Indeks	96,85	98,06	98,25	98,42	98,59	98,59
			Indeks Sarana-Prasarana Permukiman	Indeks	87,12	-	-	-	-	87,12
			Kinerja Ruas Jalan	%	0,38	-	-	-	-	0,38
S.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IS4.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	60,15	57,69	57,77	57,85	57,93	57,93
			Persentase Ruang yang dimanfaatkan RTRW	%	100	-	-	-	-	100
<b>Misi 3: Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Kota Madiun</b>										
T.3	Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	IT.3.1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	80,91	81,25	81,70	82,15	82,35	82,35
		IT.3.2	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94,38	94,40	94,44	94,49	94,51	94,51
S.5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	IS5.1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,39	14,40	14,41	14,42	14,43	14,43
		IS5.2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,14	11,14	11,15	11,16	11,17	11,17



Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian				Kondisi Akhir		
				2021	2022	2023	2024			
	Indeks Pengetahuan	Indeks	0,77	-	-	-	-	0,77		
	Prestasi Pemuda dan Olahraga ditingkat regional dan nasional	Kali	79	-	-	-	-	79		
S.6	Meningkatnya Derajat kesehatan Masyarakat	IS6.1	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,81	72,81	72,81	72,81	72,81	
			Indeks Kesehatan	Indeks	0,81				0,81	
S.7	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	IS7.1	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	77,18	77,07	77,20	77,21	77,22	
<b>Misi 4: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun</b>										
T.4	Terwujudnya Pembangunan ekonomi inklusif	IT4.1	<b>Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif</b>	<b>Indeks</b>	<b>6,69</b>	<b>6,38</b>	<b>6,40</b>	<b>6,42</b>	<b>6,44</b>	<b>6,44</b>
			<b>Pertumbuhan PDRB</b>	<b>%</b>	<b>-3,39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-3,39</b>
			<b>PDRB Perkapita</b>	<b>Juta</b>	<b>52,57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52,57</b>
S.8	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	S9.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,32	8,15	5,74	5,12	5,00	5,00
			ICOR	%	-0,91	-	-	-	-	-0,91
S.9	Meningkatnya Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi	IS8.1	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	-10,83	2,16	4,81	5,69	6,91	6,91
		IS8.2	Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa	%	-0,93	0,58	0,76	2,78	3,42	3,42
			Persentase Pertumbuhan Sektor Pengolahan	%	-12,84	-	-	-	-	-12,84
			Persentase Pertumbuhan Sektor Pariwisata	%	8,7	-	-	-	-	8,7

Misi/Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian				Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	
T.5	Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	IT5.1	Indeks Ketentraman	Indeks	76,87	76,95	77,05	77,15	77,2	77,2
		IT5.2	Indek Gini	Indeks	0,39	0,38	0,37	0,36	0,35	0,35
S.10	Pengurangan Kemiskinan	IS10.1	Angka Kemiskinan	%	4,98	4,97	4,96	4,95	4,94	4,94
			Rasio Ketersediaan Pangan Utama dan Konsumsi Pangan	Rasio	1,38	-	-	-	-	1,38
S.11	Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat	IS11.1	Indeks Kerukunan	Indeks	B skor 74,0306 (Harmonis)	B skor 74,30 (Harmonis)	B skor 76,40 (Harmonis)	B skor 78,40 (Harmonis)	B skor 80,00 (Harmonis)	B skor 80,00 (Harmonis)
		IS11.2	Indeks rasa aman	Indeks	76,05	76,15	76,2	76,27	76,35	76,35



**BAB VI**  
**STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM**  
**PEMBANGUNAN DAERAH**

**6.1 Strategi Pembangunan**

Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi yang sudah ditetapkan merupakan langkah awal dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan dirumuskan Kota Madiun sebagai upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun. Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dalam konetks ini melingkupi perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dan perencanaan operasional berupa perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Perencanaan Strategis dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. Sedangkan perencanaan operasional dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD yang dituangkan secara lebih rinci kedalam masing-masing misi berdasarkan pendekatan urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Adapun arah kebijakan merupakan acuan untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap periode waktunya. Penetapan arah kebijakan menjadi fokus yang sesuai dengan pengaturan pada level pelaksanaannya. Secara lebih detil strategi dan arah pembangunan kota madiun dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6.1**  
Strategi dan Arah kebijakan P-RPJMD Kota Madiun

Misi/Tujuan/Sasaran		Sasaran	Strategi		
<b>Misi 1: Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)</b>					
T.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada	S.1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran
				2	Peningkatan kapasitas fiskal daerah

Misi/Tujuan/Sasaran		Sasaran	Strategi		
	pelayanan publik berbasis smart cities	S.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3	Peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan publik
<b>Misi 2: Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan</b>					
T2	Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	S.3	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota	4	Peningkatan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana kota dan Permukiman
		S.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	5	Peningkatan kualitas penataan ruang
				6	Peningkatan kualitas lingkungan hidup
<b>Misi 3: Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Kota Madiun</b>					
T.3	Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	S.5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	7	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan
		S.6	Meningkatnya Derajat kesehatan Masyarakat	8	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
		S.7	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	9	Peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan berbasis kesetaraan dan keadilan gender
<b>Misi 4: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun</b>					
T.4	Terwujudnya Pembangunan ekonomi inklusif	S.8	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	10	Perluasan kesempatan kerja
				11	Peningkatan kondusifitas iklim berinvestasi
		S.9	Meningkatnya Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi	12	Pengembangan kebudayaan yang berbasis kearifan lokal untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat
				13	Peningkatan kontribusi sector unggulan dalam perekonomian
				14	Peningkatan produktivitas dan daya saing IKM, Usaha Mikro dan koperasi
T.5	<b>Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat</b>	S.10	Pengurangan Kemiskinan	15	Peningkatan kualitas dan kuantitas ketersediaan pangan
				16	Penurunan tingkat kemiskinan
				17	Peningkatan Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial
		S.11	Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat	18	Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga kerukunan, ketenteraman dan ketertiban
				19	Peningkatan mitigasi resiko dan ketangguhan bencana

Berdasarkan tabel 6.1 maka perumusan strategi pembangunan dan arah kebijakan pada tahun 2019 – 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Strategi 1:** Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran.



Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran merupakan salah satu strategi pendukung perubahan dalam percepatan Reformasi Birokrasi suatu proses perubahan besar dalam paradigma tata kelola pemerintahan yang mengarah pada area akuntabilitas serta pola pikir Pemerintahan Daerah. Strategi percepatan reformasi birokrasi pemerintahan daerah merupakan salah satu cara untuk memperkuat daerah dalam rangka menjalankan tata kelola pemerintahan dan fungsinya. Lebih lanjut, pemerintah Daerah Kota Madiun sebagai daerah otonom, diberikan hak untuk mengurus proses bisnis pemerintahan dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan, dan pembangunan daerah, berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas. Untuk itu, daerah perlu menggali sumber daya yang dimiliki agar dapat dimanfaatkan dalam rangka mensejahterakan masyarakat melalui penyediaan pelayanan, meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi daerah serta dikelola secara demokratis dan akuntabel.

Untuk mencapai hasil yang maksimal Kota Madiun melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik (*good Governance*). Untuk mewujudkannya, dibutuhkan komitmen yang konsisten dari semua pihak baik aparatur pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta. Dalam strategi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran juga diperlukan perubahan perilaku terkait etika pemerintahan penegak hukum yang efektif serta pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab.

## 2. **Strategi 2** : Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah.

Pada era otonomi daerah, pemerintah mendapatkan kewenangan yang luas untuk mengatur, mengurus, mengembangkan dan memajukan daerah yang dikelola. Oleh karena itu keutamaan pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran aktif masyarakat. Tantangan yang dihadapi Kota madiun saat ini adalah potensi ekonomi daerah yang masih perlu dioptimalkan dan *uncenrtainty* yang tinggi akibat pandemic covid-19. Daerah yang kurang potensi ekonominya akan menghadapi kesulitan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga menimbulkan ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat sebagai salah satu sumber pembiayaan di daerah. Oleh karea itu untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang mandiri, upaya optimalisasi potensi PAD dan upaya lainnya diperlukan dalam rangka meningkatkan kemandirian fiskal daerah.



3. **Strategi 3:** Peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan publik.

Pelayanan publik merupakan salah satu pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah dengan cara pemberian layanan (melayani) keperluan masyarakat terkait kepentingan tertentu sesuai dengan regulasi dan tata cara yang telah ditetapkan. Upaya peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan terhadap publik merupakan persoalan penting dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan program pemerintahan di mana fungsi utama dari pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan pada dasarnya adalah pemberian pelayanan publik yang optimal agar kepentingan masyarakat umum dapat terpenuhi. Untuk mencapai pelayanan yang berkualitas, perlu disusun suatu aturan ataupun ketentuan mengenai pelayanan kepada masyarakat yang efisien. Hal ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan lebih terarah dan memiliki proses yang terukur. Dalam perkembangannya, isu permasalahan kualitas layanan muncul dari masih lemahnya proses pelayanan publik yang diberikan pemerintah sehingga belum dapat memenuhi ekspektasi yang diharapkan masyarakat. Lebih jauh hal tersebut dapat ditandai dengan masih adanya keluhan masyarakat ataupun opini public yang buruk, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap pemerintah daerah.

4. **Strategi 4:** Peningkatan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana kota dan Permukiman.

Upaya meningkatkan sistem penyediaan dan pengelolaan infrastruktur, sarana prasarana dan pemukiman kota yang berkualitas dilakukan melalui beberapa pendekatan diantaranya seperti pembenahan sistem jaringan drainase perkotaan; pengembangan sistem jaringan jalan yang terpadu dan kualitas prima; peningkatan kualitas manajemen dan rekayasa transportasi; akses perumahan dan pemukiman; serta upaya - upaya penciptaan lingkungan perumahan yang sehat.

5. **Strategi 5:** Peningkatan kualitas penataan ruang.

Perkembangan membawa konsekuensi pada pemanfaatan pola tata ruang kota untuk berbagai kegiatan usaha maupun permukiman. Peningkatan pengelolaan ruang kota merupakan upaya mengendalikan ruang kota agar pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang. Selain itu, peningkatan pengelolaan ruang kota diarahkan pada peningkatan upaya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.

Dengan demikian, strategi ini perlu didukung oleh tata ruang mencakup ketersediaan produk hukum dan regulasi terkait pengaturan tata ruang yang dapat dijadikan acuan dalam membangun ruang kota, peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan ruang dan daya dukung lingkungan.



6. **Strategi 6:** Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Pada dasarnya, peningkatan kualitas lingkungan hidup dilakukan melalui kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Upaya tersebut dilakukan dengan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan penerapan siklus perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakkan hukum terkait lingkungan hidup. Selain itu, strategi ini dilakukan mengoptimalkan ruang terbuka hijau agar dimanfaatkan secara berkesinambungan tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan saat ini tetapi juga kebutuhan sumber daya di masa yang akan datang.

7. **Strategi 7:** Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan.

Pendidikan merupakan aspek fundamental pembentukan pola pikir dan kepribadian manusia. Oleh karena itu keberadaan sistem pendidikan yang baik sangat krusial sehingga diharap dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, terampil dan berdaya saing. Arah upaya – upaya yang dilakukan diantaranya adalah terkait peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, seperti pengembangan layanan pendidikan anak usia dini, balai masyarakat, Lembaga pendidikan non-formal hingga optimalisasi pelaksanaan wajib belajar serta upaya pencapaian SPM bidang pendidikan.

8. **Strategi 8:** Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Kesehatan juga berpengaruh pada kualitas pembangunan manusia di mana masyarakat yang sehat mampu beraktivitas secara produktif dan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Untuk itu strategi peningkatan kualitas kesehatan perlu didukung oleh upaya penyediaan layanan kesehatan berkualitas bagi semua kalangan baik dari sisi infrastruktur kesehatan, tenaga kesehatan, sampai dengan penyediaan informasi kesehatan terpadu.

9. **Strategi 9:** Peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan berbasis kesetaraan dan keadilan gender

Pengarus utamaan gender menjadi salah satu strategi pembangunan baik ditingkat nasional maupun daerah dalam upaya meningkatkan pembangunan yang berkualitas. Upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan berbasis kesetaraan dan keadilan gender, salah satunya dapat dilakukan melalui Peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat responsif gender.

10. **Strategi 10:** Perluasan kesempatan kerja.

Strategi peningkatan kesempatan kerja dilakukan dengan intervensi pasar kerja baik pada unsur tenaga kerja maupun industri yang memberi pekerjaan. Kesempatan kerja yang luas dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Adanya kesempatan kerja melalui industri ditunjukkan dari peningkatan penyerapan tenaga kerja secara merata dari berbagai kalangan. Upaya tersebut dilaksanakan melalui peningkatan jaringan tenaga kerja, serta peningkatan keterampilan masyarakat agar siap kerja.

Disisi lain, peningkatan keterampilan masyarakat diarahkan pada optimalisasi jejaring pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi serta pelatihan berbasis kewirausahaan.

11. **Strategi 11:** Peningkatan kondusifitas iklim berinvestasi.

Kondusifitas iklim berinvestasi adalah upaya yang dalam rangka perbaikan pelayanan investasi kepada investor agar mendapat kemudahan dalam meraih peluang investasi di berbagai sektor ekonomi daerah. Cakupan peningkatan kemudahan berinvestasi dilakukan melalui upaya-upaya penyederhanaan prosedur berinvestasi, promosi investasi, dan penataan jaringan usaha investasi. Adapun peningkatan kemudahan berinvestasi diarahkan pada penyediaan regulasi dan kebijakan yang pro investasi dengan prosedur yang pendek dan efisien.

12. **Strategi 12:** Pengembangan kebudayaan yang berbasis kearifan lokal untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Peningkatan kualitas hidup masyarakat pada dasarnya merupakan strategi yang megupayakan penciptaan kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya. Upaya itu dilakukan dengan memanfaatkan potensi budaya dan kearifan lokal yang ada di wilayah Kota Madiun dan wilayah sekitarnya agar tetap lestari. Kemudian budaya lokal dijadikan *branding* daerah agar warisan dari leluhur dieksplorasi secara optimal.

Adapun untuk pelestarian seni dan budaya yang berbasis kearifan lokal, diarahkan melalui pelestarian kawasan dan bangunan cagar budaya serta situs budaya serta peranan lembaga seni budaya. Kemudian, dari sisi kelompok masyarakat, partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam kondisi sosial masyarakat yang rukun dan berbudaya di Kota Madiun. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dilakukan dengan kebijakan yang mengarah pada peningkatan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dan gender, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta peningkatan partisipasi aktif pemuda.



13. **Strategi 13:** Peningkatan kontribusi sector unggulan dalam perekonomian.

Pembangunan perekonomian melalui penguatan sektor unggulan merupakan strategi yang bertujuan untuk mendorong, merangsang, memelihara aktivitas usaha untuk dapat berkembang sehingga menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan meningkatkan nilai tambah perekonomian. Pengembangan produk ekonomi unggulan diarahkan pada pengembangan sentra-sentra usaha serta produk ekonomi dari sisi perdagangan dan jasa berbasis keunggulan lokal, ekonomi kreatif, pariwisata, sarana prasarana perdagangan hingga upaya menuju masyarakat ekonomi digital.

14. **Strategi 14:** Peningkatan produktivitas dan daya saing IKM, Usaha Mikro dan koperasi.

Industri kecil menengah, Usaha Mikro dan koperasi merupakan penyangga ketahanan perekonomian masyarakat dan sumber pendapatan rumah tangga mikro. Kebijakan penguatan dan pengembangan IKM, Usaha Mikro, dan koperasi diarahkan pada peningkatan produktivitas Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro. Adapun arah strategi pembangunan koperasi adalah pada dasarnya peningkatan kelembagaan koperasi yang berkelanjutan sehingga mampu bernilai ekonomi tinggi dan mensejahterakan anggotanya.

15. **Strategi 15:** Peningkatan kualitas dan kuantitas ketersediaan pangan.

Strategi peningkatan kualitas dan kuantitas ketersediaan pangan merupakan faktor penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Lebih lanjut, penyediaan pangan diperlukan dalam lingkup untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga hingga individu secara berkelanjutan. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan ketersediaan pangan dilakukan melalui peningkatan ketersediaan pangan, peningkatan akses pangan dan perilaku pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman.

16. **Strategi 16 :** Penurunan Tingkat kemiskinan

Permasalahan kemiskinan masih menjadi isu krusial di Kota Madiun. Sebelum pandemic Covid19 kemiskinan di Kota Madiun telah mengalami penurunan yang relative baik sekitar 4 persen. Namun Covid 19 berdampak pada peningkatan kemiskinan dengan besaran mendekati 5 persen. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya penurunan kemiskinan khususnya tipe kemiskinan yang sangat miskin

17. **Strategi 17:** Peningkatan Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial.

Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial merupakan upaya yang berkaitan dengan upaya mengurangi keterlantaran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Kelompok PMKS yang tidak direhabilitasi secara tepat akan berakibat pada kesenjangan sosial yang semakin meluas, melemahnya ketahanan sosial masyarakat, serta meningkatnya penduduk yang rentan (*vulnerable*). Ole karena itu, perlindungan sosial diarahkan pada peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS, termasuk bagi penduduk lanjut usia terlantar, penyandang cacat, dan anak terlantar.

18. **Strategi 18:** Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga kerukunan, ketenteraman dan ketertiban.

Ketenteraman dan ketertiban merupakan wujud dari masyarakat yang modern dan maju di mana hal tersebut menjadi tanggung jawab bagi seluruh pihak di Kota Madiun. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan peran serta masyarakat untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban diantaranya pemberdayaan masyarakat serta peningkatan masyarakat agar senantiasa tertib dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tersebut dapat diarahkan pada penegakan peraturan perundang-undangan daerah, peningkatan cakupan penanganan gangguan ketentraman, ketertiban dan kenyamanan umum. Selain itu, peningkatan ketentraman dan ketertiban diarahkan keberadaan petugas perlindungan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang menjalankan fungsi penjagaan kenyamanan lingkungan.

19. **Strategi 19:** Peningkatan mitigasi resiko dan ketangguhan bencana.

Pada dasarnya strategi ini berupaya mempersiapkan kejadian bencana yang tidak dapat diperkirakan. Dengan upaya kesiapsiagaan masyarakat baik fisik maupun non fisik dalam menghadapi bencana maka dampak negative dari bencana dapat meminimalisasi berdasarkan resiko di setiap area lokasi rawan bencana. Upaya peningkatan ketangguhan bencana dilakukan melalui kebijakan peningkatan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana.



## 6.2 Arah kebijakan Pembangunan

Strategi dan arah kebijakan harus dipandang sebagai satu kesatuan skenario-skenario selama periode 5 (lima) tahun. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi, yang selanjutnya menjadi arah kebijakan pembangunan untuk tiap tahunnya. Arah kebijakan merupakan pedoman dalam mengarahkan rumusan strategi yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode pembangunan. Arah kebijakan memberikan pedoman dan arahan tema pembangunan dan prioritas tahunan apa yang harus dikerjakan. Pada tiap tahunnya diberikan penekanan terhadap prioritas tertentu sesuai dengan pemetaan strategi yang telah dirumuskan.

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam upaya memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan setiap tahun dalam jangka 5 (lima) tahun, terlebih dahulu disederhanakan dalam agenda atau tema pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Atas dasar tema pembangunan inilah disusun arah kebijakan lebih jelas agar RPJMD mudah dituangkan dalam RKPD. Selanjutnya, tahapan-tahapan dimaksud dijadikan sebagai dasar dan disesuaikan dengan pentahapan RKPD.

Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Fokus atau tema pembangunan Kota Madiun dapat dilihat pada Gambar berikut



Gambar 6.1

Tema RPJMD/ Arah Kebijakan Pemerintah Kota Madiun 2019 - 2024

**Tabel 6.2**  
Arah kebijakan Pembangunan Kota Madiun

ARAH KEBIJAKAN					
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Konsolidasi implementasi PANCA KARYA untuk mewujudkan Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera	Penguatan kapasitas pemberdayaan masyarakat untuk percepatan pertumbuhan yang berkualitas	Peningkatan Pembangunan dan Ketahanan Sosial Ekonomi Menuju Masyarakat Sejahtera	Penguatan Pembangunan dan Ketahanan Sosial Ekonomi menuju Masyarakat Sejahtera	Peningkatan Pembangunan Ekonomi Inklusif Menuju Masyarakat Sejahtera	Pemantapan Pembangunan Ekonomi Inklusif Menuju Masyarakat Sejahtera

Pada perubahan RPJMD Kota Madiun ini, agenda / tema pembangunan pada tahun 2021 adalah peningkatan pembangunan dan ketahanan sosial ekonomi menuju masyarakat sejahtera. pada tahun 2022 adalah Penguatan Pembangunan dan ketahanan sosial ekonomi menuju masyarakat sejahtera. Selanjutnya pada tahun 2023 yaitu Peningkatan pembangunan ekonomi inklusif menuju masyarakat sejahtera. Sedangkan agenda pembangunan akhir masa periode RPJMD adalah Pemantapan pembangunan ekonomi inklusif menuju masyarakat sejahtera. Sesuai dengan agenda pembangunan tersebut, arah kebijakan dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi di setiap tahunnya sebagai berikut:

**Tabel 6.3**  
Penjelasan Operasional Arah kebijakan Pembangunan Kota Madiun

Strategi		Penjelasan Operasional Arah Kebijakan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran	1 Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan			√	√	√	√
		2 Peningkatan dan pengintegrasian kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis e-government			√	√	√	√
		3 Peningkatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah			√	√	√	√
		4 Peningkatan peran dan kinerja lembaga pengelolaan keuangan daerah			√	√	√	√



Strategi		Penjelasan Operasional Arah Kebijakan		2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	Peningkatan kapasitas fiskal daerah	5	Optimalisasi potensi PAD			√	√	√	√
		6	Peningkatan kemandirian fiskal daerah			√	√	√	√
		7	peningkatan DID melalui Rencana aksi yang jelas dan terukur didukung oleh perencanaan program dan kegiatan yang berkualitas			√	√	√	√
		8	Peningkatan Profesionalisme ASN			√	√	√	√
3	Peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan publik	9	Penerapan layanan public berbasis sistem informasi dan teknologi (e-government) terpadu			√	√	√	√
		10	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang professional dan melayani			√	√	√	√
4	Peningkatan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana kota serta Permukiman	11	Peningkatan kualitas layanan moda transportasi umum			√	√	√	√
		12	Manajemen dan rekayasa transportasi			√	√	√	√
		13	Peningkatan kualitas infrastruktur jalan			√	√	√	√
		14	Optimalisasi jaringan drainase perkotaan			√	√	√	√
		15	Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman			√	√	√	√
5	Peningkatan kualitas penataan ruang	16	Peningkatan upaya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang			√	√	√	√
		17	Penguatan kualitas koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta sinergi pemanfaatan ruang			√	√	√	√
6	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	18	optimalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH)			√	√	√	√
		19	Peningkatan tata kelola sampah dan limbah secara berkelanjutan			√	√	√	√
		20	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan			√	√	√	√
7	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	21	Peningkatan Harapan Lama Sekolah			√	√	√	√
		22	Peningkatan kualitas manajemen sekolah			√	√	√	√
		23	Peningkatan kualitas proses pembelajaran untuk memenuhi target SPM bidang pendidikan			√	√	√	√

Strategi		Penjelasan Operasional Arah Kebijakan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		24 Pengembangan layanan pendidikan anak usia dini			√	√	√	√
		25 Pengembangan layanan pendidikan inklusif			√	√	√	√
8	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	26 Peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan terpadu			√	√	√	√
		27 Peningkatan sumberdaya dan informasi kesehatan			√	√	√	√
		28 Peningkatan Promosi, upaya Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan			√	√	√	√
		29 Peningkatan pelayanan kesehatan primer dan rujukan			√	√	√	√
		30 Peningkatan Advokasi dan Penggerakan Program Bangga Kencana dan Penguatan Sistem Informasi Keluarga serta Penguatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk			√	√	√	√
		31 Peningkatan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif			√	√	√	√
		32 Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga			√	√	√	√
		9	Peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan berbasis kesetaraan dan keadilan gender	33 Peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat responsif gender			√	√
10	Perluasan kesempatan kerja	34 Peningkatan kompetensi dan ketrampilan masyarakat			√	√	√	√
		35 Peningkatan jaringan tenaga kerja			√	√	√	√
11	Peningkatan kondusifitas iklim berinvestasi	36 Penyediaan kebijakan ramah investasi			√	√	√	√
		37 Penyederhanaan prosedur pendukung perijinan dan investasi			√	√	√	√



Strategi		Penjelasan Operasional Arah Kebijakan		2019	2020	2021	2022	2023	2024
12	Pengembangan kebudayaan yang berbasis kearifan lokal untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	38	Pelestarian Seni dan Budaya yang berbasis kearifan lokal			√	√	√	√
		39	Peningkatan partisipasi aktif pemuda			√	√	√	√
13	Peningkatan kontribusi sektor unggulan dalam perekonomian	40	Peningkatan kontribusi sector perdagangan dan jasa terhadap PDRB			√	√	√	√
		41	Pengembangan sentra-sentra usaha/produk ekonomi lokal (produk khas daerah) berbasis kelurahan			√	√	√	√
		42	Peningkatan Pengelolaan Pariwisata			√	√	√	√
		43	Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif			√	√	√	√
		44	Pengembangan ekonomi kreatif			√	√	√	√
		45	Pengembangan ekonomi digital masyarakat			√	√	√	√
14	Peningkatan produktivitas dan daya saing IKM, Usaha Mikro dan koperasi	46	Peningkatan Produktivitas IKM dan Usaha Mikro			√	√	√	√
		47	Pengembangan Sistem Pendukung Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro			√	√	√	√
		48	Peningkatan kelembagaan koperasi			√	√	√	√
15	Peningkatan kualitas dan kuantitas ketersediaan pangan	49	Peningkatan ketersediaan pangan			√	√	√	√
		50	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat			√	√	√	√
		51	Peningkatan akses pangan dan perilaku pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.			√	√	√	√
16	Penurunan tingkat kemiskinan	52	Peningkatan database kemiskinan berbasis RT/RW			√	√	√	√
		53	Peningkatan jejaring sosial			√	√	√	√
		54	Penguatan program pengentasan kemiskinan			√	√	√	√

Strategi		Penjelasan Operasional Arah Kebijakan		2019	2020	2021	2022	2023	2024
17	Peningkatan Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	55	Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS			√	√	√	√
		56	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Rehabilitasi Sosial			√	√	√	√
18	Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga kerukunan, ketenteraman dan ketertiban	57	Peningkatan masyarakat yang tertib dan patuh terhadap peraturan			√	√	√	√
		58	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban			√	√	√	√
		59	Penguatan peran masyarakat dalam membangun Kerukunan			√	√	√	√
19	Peningkatan mitigasi resiko dan ketangguhan bencana	60	Peningkatan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana			√	√	√	√



**Tabel 6.4**  
 Persandingan Strategi, Sasaran dan Arah Kebijakan Antara  
 RPJMD 2019-2024 Dengan Perubahan P-RPJMD 2019-2024

RPJMD 2019-2024			P-RPJMD 2019-2024		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Misi 1: Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)</b>					
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) untuk peningkatan kinerja birokrasi melalui peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah serta pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pengintegrasian pada sistem akuntabilitas kinerja yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.	Tidak spesifik	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran	peningkatan kualitas perencanaan pembangunan
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) pada seluruh pelayanan publik perangkat daerah.	Tidak spesifik			Peningkatan dan pengintegrasian kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis e-government
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintah melalui pengintegrasian sistem yang berbasis E-government, E-planning, E-budgeting, E-Contract dan E-Monev.	Tidak spesifik			Peningkatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah
	Penerapan Wilayah yang telah terintegrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan warga (Smart City) di Kota Madiun	Tidak spesifik			Peningkatan peran dan kinerja lembaga pengelolaan keuangan daerah
	Optimalisasi Program satu RT satu free wifi untuk peningkatan pembelajaran online dan pengembangan ekonomi masyarakat berbasis internet.	Tidak spesifik	Meningkatnya Kapasitas keuangan daerah	Peningkatan kapasitas fiskal daerah	Optimalisasi potensi PAD
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kebijakan keterbukaan informasi publik melalui pengintegrasian dalam Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).	Tidak spesifik			Peningkatan kemandirian fiskal daerah
					peningkatan DID melalui Rencana aksi yang jelas dan terukur didukung oleh perencanaan program dan kegiatan yang berkualitas

RPJMD 2019-2024			P-RPJMD 2019-2024		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pengelolaan keuangan Daerah melalui pembinaan maturitas penerapan sistem pengendalian internal Pemerintah, penguatan prosedur standar pengelolaan keuangan serta peningkatan komitmen seluruh jajaran di Perangkat Daerah dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.	Tidak spesifik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan publik	Peningkatan Profesionalisme ASN penerapan layanan public berbasis sistem informasi dan teknologi (e-government) terpadu
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan	Menguatkan kualitas mekanisme peningkatan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Madiun melalui pengembangan ide atau gagasan inovatif masyarakat untuk peningkatan ekonomi masyarakat Kota Madiun.	Tidak spesifik			Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang professional dan melayani Peningkatan dan Pengintegrasian kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis e-government
<b>Misi 2: Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan</b>					
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, sarana transportasi kota dan Permukiman	Meningkatkan Indeks Daya Saing Infrastruktur melalui penguatan koordinasi dan sinergi vertikal dan horizontal dan penguatan kualitas koordinasi, pembinaan dan pengawasan, yang meliputi jalan dan jembatan; air minum; penyehatan lingkungan perumahan; dan aksesibilitas masyarakat terhadap perumahan dan permukiman.	Tidak spesifik	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota	Peningkatan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana kota dan Permukiman	Peningkatan kualitas layanan moda transportasi umum
	Menurunkan disparitas wilayah lingkup Kota Madiun yang sinergis dengan kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Jawa Timur melalui penguatan prioritas pembangunan infrastruktur.	Tidak spesifik			Manajemen dan rekayasa transportasi
					Peningkatan kualitas infrastruktur jalan
					Optimalisasi jaringan drainase perkotaan
					Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman
Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup melalui penguatan kualitas koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta sinergi pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkesinambungan dan melalui optimalisasi RTH dan peningkatan peran seluruh stakeholder dalam meningkatkan keasrian lingkungan.	Tidak spesifik	meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Peningkatan kualitas penataan ruang	Peningkatan upaya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang



RPJMD 2019-2024			P-RPJMD 2019-2024		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
					penguatan kualitas koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta sinergi pemanfaatan ruang
					optimalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH)
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan tata Kelola Sampah dan Limbah Secara Berkelanjutan
					Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
<b>Misi 3: Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Kota Madiun</b>					
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Madiun	Meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan aksesibilitas, kualitas manajemen sekolah, serta kualitas proses pembelajaran untuk memenuhi target SPM bidang pendidikan.	Tidak spesifik	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas Pendidikan	Peningkatan Harapan Lama Sekolah
	Meningkatkan Harapan Lama Sekolah masyarakat Kota Madiun melalui peningkatan kualitas koordinasi dengan Pemerintah Provinsi.	Tidak spesifik			Peningkatan kualitas manajemen sekolah
	Meningkatkan kapasitas ASN aparatur melalui optimalisasi pendidikan dan pelatihan, beasiswa khusus serta mempercepat dan mempermudah pengembangan karir ASN.	Tidak spesifik			Peningkatan kualitas proses pembelajaran untuk memenuhi target SPM bidang pendidikan
					Pengembangan layanan pendidikan anak usia dini
					Pengembangan layanan pendidikan inkulif
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Kota Madiun	Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui peningkatan pembudayaan paradigma sehat di masyarakat serta peningkatan keberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatannya.	Tidak spesifik	Meningkatnya Derajat kesehatan Masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan terpadu
	Peningkatan kualitas koordinasi, pembinaan dan pengawasan, kemitraan dan sinergi para pihak terkait untuk mewujudkan Madiun Kota Sehat.	Tidak spesifik			Peningkatan sumberdaya dan informasi kesehatan
	Peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan terpadu bagi warga Kota Madiun.	Tidak spesifik			Peningkatan Promosi, upaya Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan

RPJMD 2019-2024			P-RPJMD 2019-2024		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
					Peningkatan pelayanan kesehatan primer dan rujukan
					Peningkatan Advokasi dan Penggerakan Program Bangga Kencana dan Penguatan Sistem Informasi Keluarga serta Penguatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk
					Peningkatan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif
					Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga
				Peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan berbasis kesetaraan dan keadilan gender	Peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat responsif gender
<b>Misi 4: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun</b>					
Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif, dan peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja	Meningkatkan daya saing iklim investasi Kota Madiun melalui peningkatan kualitas koordinasi, pembinaan dan pengawasan dan sinergi para pihak dalam meningkatkan iklim investasi.	Tidak spesifik	Meningkatnya pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif	Peningkatan kontribusi sector unggulan dalam perekonomian	Pengembangan sentra-sentra usaha/produk ekonomi lokal (produk khas daerah) berbasis kelurahan
	Meningkatkan penciptaan lapangan kerja sektor formal dan non formal melalui penyesuaian kompetensi tenaga kerja sesuai dengan karakteristik Kota Madiun dalam konteks wilayah Provinsi Jawa Timur.	Tidak spesifik			Peningkatan kontribusi sector perdagangan dan jasa terhadap PDRB Pengelolaan Pariwisata
	Mengembangkan ekonomi kreatif yang disinergikan dengan penyelenggaraan Seni Budaya Mingguan.	Tidak spesifik			Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif
	Mengoptimalkan bantuan modal dan pengembangan SDM UKM Kota Madiun.	Tidak spesifik			Pengembangan ekonomi kreatif



RPJMD 2019-2024			P-RPJMD 2019-2024		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Mengembangkan sektor perdagangan melalui optimalisasi kualitas pelayanan Bis Wisata gratis keliling Kota Madiun.	Tidak spesifik			Pengembangan ekonomi digital masyarakat
			Meningkatnya kerukunan kehidupan masyarakat yang berbudaya	Peningkatan kualitas hidup bermasyarakat yang berbudaya	Pelestarian Seni dan Budaya yang berbasis kearifan lokal
					Peningkatan partisipasi aktif pemuda
	Mengembangkan pemasaran produk unggulan lokal yang ada di wilayah Bakorwil 1 Madiun melalui pengembangan Madiun Display.	Tidak spesifik	Meningkatnya penguatan daya saing usaha mikro dan koperasi	Peningkatan produktivitas dan daya saing IKM, Usaha Mikro dan koperasi	Peningkatan Produktivitas IKM dan Usaha Mikro
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Meningkatkan peran Kota Madiun sebagai pusat perdagangan dan jasa melalui peningkatan kualitas koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta sinergi para pihak terkait pengembangan sektor unggulan daerah.	Tidak spesifik			Pengembangan Sistem Pendukung Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro
stabilitas Ketersediaan Pangan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kualitas koordinasi dan sinergi para pihak dalam penyediaan pangan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.	Tidak spesifik			Peningkatan kelembagaan koperasi
	Optimalisasi subsidi pupuk bagi petani kurang mampu dan potensial serta subsidi listrik dan air bersih bagi pengembangan ekonomi masyarakat.	Tidak spesifik	Meningkatnya realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja	Peningkatan kondusifitas iklim berinvestasi	Penyediaan kebijakan ramah investasi
	Meningkatkan dan Mengoptimalkan Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Tidak spesifik			Penyederhanaan prosedur perijinan dan investasi
				Perluasan kesempatan kerja	Peningkatan kompetensi dan ketrampilan masyarakat
					Peningkatan jaringan tenaga kerja
			Pengurangan Kemiskinan	Penurunan Tingkat Kemiskinan	Peningkatan database kemiskinan berbasis RT/RW
					Peningkatan Jejaring Sosial
					Penguatan Program Pengentasan Kemiskinan
				Peningkatan Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS
					Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Rehabilitasi Sosial

RPJMD 2019-2024			P-RPJMD 2019-2024		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Peningkatan kualitas dan kuantitas ketersediaan pangan	Peningkatan ketersediaan pangan
					Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
					Peningkatan akses pangan dan perilaku pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.
Meningkatnya Kerukunan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Pemuda yang Berprestasi	Meningkatkan peran masyarakat melalui peningkatan kualitas koordinasi dan sinergi para pihak untuk penguatan peran masyarakat dalam membangun Kerukunan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Pemuda yang Berprestasi.	Tidak spesifik			
Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pengembangan aspek keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui peningkatan koordinasi dan sinergi para pihak.	Tidak spesifik	Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga kerukunan, ketenteraman dan ketertiban	Peningkatan masyarakat yang tertib dan patuh terhadap peraturan
					Peningkatan ketenteraman dan ketertiban
					penguatan peran masyarakat dalam membangun Kerukunan
					Peningkatan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana
			Peningkatan mitigasi resiko dan ketangguhan bencana		



### **6.3 Program Pembangunan Kota Madiun**

Pengembangan program pembangunan Kota Madiun dilakukan dengan menjaga keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan dan rumusan indikator kinerja sasaran yang kebijakan yang dituju. Perumusan prioritas program pembangunan daerah merupakan rencana pembangunan dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan visi dan misi pembangunan Daerah. Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kota Madiun menetapkan beberapa program yang menjadi prioritas sehingga wajib dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

**Tabel 6.5**  
Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan serta program prioritas/aksi (janji politis)

1	STRATEGI	2	ARAH KEBIJAKAN	3	PROGRAM RPJMD	4	PROGRAM AKSI/ JANJI POLITIK	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran	2	Peningkatan dan pengintegrasian kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis e-government	1	program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	1	Penguatan atas pelaksanaan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				2	program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah			
				3	program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota			
				4	Program Pengelolaan Arsip			
				5	Program Perlindungan dan Penyelamatan arsip			
				6	Program Aplikasi Informatika			
				7	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi			
		3	Peningkatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah	8	program penyelenggaraan pengawasan	3	Mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat untuk pengawasan jalannya roda pemerintahan sehingga terbangunnya budaya yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.	Inspektorat
				9	program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi			
				10	program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat			
		4	Peningkatan peran dan kinerja lembaga pengelolaan keuangan daerah	11	program pengelolaan barang milik daerah			Badan Keuangan dan Aset Daerah



1	STRATEGI	2	ARAH KEBIJAKAN	3	PROGRAM RPJMD	4	PROGRAM AKSI/ JANJI POLITIK	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				12	program pengelolaan keuangan daerah					
2	Peningkatan kapasitas fiskal daerah	5	Optimalisasi potensi PAD	13	program pengelolaan pendapatan daerah			Badan Pendapatan Daerah		
		6	Peningkatan kemandirian fiskal daerah	14	program perekonomian dan pembangunan			Sekretariat Daerah		
		7	peningkatan DID melalui Rencana aksi yang jelas dan terukur didukung oleh perencanaan program dan kegiatan yang berkualitas							
3	Peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan publik	8	Peningkatan Profesionalisme ASN	15	program kepegawaian daerah	4	Mempercepat dan mempermudah pengembangan karir ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
				16	program pengembangan sumber daya manusia	5	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas ASN			
		9	Penerapan layanan public berbasis sistem informasi dan teknologi (e-government) terpadu	17	Program Informasi dan Komunikasi Publik	6	Program Satu RT satu free Wifi untuk pembelajaran online	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				18	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral					
		10	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang professional dan melayani		19	Program Pendaftaran Penduduk	7	Memberikan pelayanan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
					20	Program Pencatatan Sipil				
					21	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
					22	Program Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD				Sekretariat DPRD
					23	Program Pelayanan Pemerintah dan Pelayanan Publik				
					24	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				Kecamatan
25	Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan									

1	STRATEGI	2	ARAH KEBIJAKAN	3	PROGRAM RPJMD	4	PROGRAM AKSI/ JANJI POLITIK	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				26	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			
						8	Program Walikota Bersama Rakyat (WBR) Program 2 (dua) hari bersama rakyat di kelurahan guna menampung aspirasi masyarakat	Sekretariat Daerah
						9	Tersedianya layanan berkualitas bagi setiap warga masyarakat Kota Madiun dalam memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku	Dinas Komunikasi dan Informatika
						10	Tersedianya informasi publik oleh setiap organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akurat secara terbuka, benar dan tidak menyesatkan.	Dinas Komunikasi dan Informatika
				27	program penelitian dan pengembangan daerah	11	Menghasilkan gagasan atau ide sehingga dapat di desain sebagai basis program pemerintah Kota Madiun ke depan.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4	Peningkatan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana kota dan Permukiman	11	Peningkatan kualitas layanan moda transportasi umum	28	program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	12	Penyediaan Bis Wisata Gratis Keliling Kota Madiun	Dinas Perhubungan
		12	Manajemen dan rekayasa transportasi					
		13	Peningkatan kualitas infrastruktur jalan	29	program penyelenggaraan jalan			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				30	program penataan bangunan gedung			
				31	program pengembangan jasa konstruksi			



1	STRATEGI	2	ARAH KEBIJAKAN	3	PROGRAM RPJMD	4	PROGRAM AKSI/ JANJI POLITIK	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				32	program penataan bangunan dan lingkungan					
				33	program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum					
				34	program pengelolaan sumber daya air (sda)					
				14	Optimalisasi jaringan drainase perkotaan	35	program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase			
				15	Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman	36	program pengembangan perumahan			
37	program kawasan permukiman									
5	Peningkatan kualitas penataan ruang	16	Peningkatan upaya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	38	program pengelolaan izin lokasi			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
				39	program penatagunaan tanah					
				40	program penyelesaian sengketa tanah garapan					
				41	program penyelenggaraan penataan ruang					
		17	Penguatan kualitas koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta sinergi pemanfaatan ruang			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
18	optimalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH)	42	program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	13	Mewujudkan Madiun sebagai Kota Sejuta Bunga	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
6	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	19	Peningkatan tata kelola sampah dan limbah secara berkelanjutan	43	Program Pengelolaan Persampahan			Dinas Lingkungan Hidup		
				20	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	44	Program Perencanaan Lingkungan Hidup			
						45	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
						46	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)			

1	STRATEGI	2	ARAH KEBIJAKAN	3	PROGRAM RPJMD	4	PROGRAM AKSI/ JANJI POLITIK	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				47	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan			
				48	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)			
				49	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat			
				50	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup			
7	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	21	Peningkatan Harapan Lama Sekolah	51	Program Pengelolaan Pendidikan	14	Beasiswa ikatan dinas pendidikan tinggi untuk mengganti ASN yang pensiun.	Dinas Pendidikan
						15	Memberikan bantuan laptop atau notebook dan seragam gratis bagi siswa SD dan SMP negeri-swasta se kota Madiun	
						16	Program Outdoor learning Centre	
		22	Pengembangan layanan pendidikan anak usia dini					
		23	Pengembangan layanan pendidikan inklusif					
		24	Peningkatan kualitas manajemen sekolah	52	Program Pengembangan Kurikulum			
		25	Peningkatan kualitas proses pembelajaran untuk memenuhi target SPM bidang pendidikan	53	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	17	Beasiswa Bagi Tenaga Kependidikan	



1	STRATEGI	2	ARAH KEBIJAKAN	3	PROGRAM RPJMD	4	PROGRAM AKSI/ JANJI POLITIK	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				54	Program Pembinaan Perpustakaan			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				55	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno			
8	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	26	Peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan terpadu	56	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	18	Pelayanan kesehatan terpadu bagi warga Kota Madiun.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		27	Peningkatan Promosi, upaya Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan	57	program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan			
		28	Peningkatan sumberdaya dan informasi kesehatan	58	program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan			
		29	Peningkatan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	59	program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		30	Peningkatan Advokasi dan Penggerakan Program Bangga Kencana dan Penguatan Sistem Informasi Keluarga serta Penguatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk	60	program pengendalian penduduk			
		31	Peningkatan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif	61	program pembinaan keluarga berencana (kb)			
32	Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga	62	program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)					
9	Peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan berbasis kesetaraan	33	Peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat responsif gender	63	program peningkatan kualitas keluarga			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				64	program pengelolaan sistem data gender dan anak			

1	STRATEGI	2	ARAH KEBIJAKAN	3	PROGRAM RPJMD	4	PROGRAM AKSI/ JANJI POLITIK	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	dan keadilan gender			65	program perlindungan perempuan			
				66	program pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan			
				67	program perlindungan khusus anak			
				68	program pemenuhan hak anak (pha)			
10	Perluasan kesempatan kerja	34	Peningkatan kompetensi dan ketrampilan masyarakat	69	program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	19	Menghadirkan tenaga profesional yang kompeten di bidangnya untuk melatih masyarakat dalam merealisasikan ide atau gagasan yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		35	Peningkatan jaringan tenaga kerja	70	program hubungan industrial	20	Asuransi bagi Tenaga Kerja Sektor Informal	
				71	program penempatan tenaga kerja	21	Menciptakan lapangan kerja sektor formal dan non formal.	
				72	program pembangunan kawasan transmigrasi			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11	Peningkatan kondusifitas iklim berinvestasi	36	Penyediaan kebijakan ramah investasi	73	program pengembangan iklim penanaman modal			
		37	Penyederhanaan prosedur pendukung perijinan dan investasi	74	program promosi penanaman modal			
				75	program pelayanan penanaman modal			
				76	program pengendalian pelaksanaan penanaman modal			
				77	program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal			
12	Peningkatan kualitas hidup bermasyarakat yang berbudaya	38	Pelestarian Seni dan Budaya yang berbasis kearifan lokal	78	program pengembangan kebudayaan	22	Menyapa Masyarakat dengan Seni Budaya Minggu	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
				79	program pengembangan kesenian tradisional			



1	STRATEGI	2	ARAH KEBIJAKAN	3	PROGRAM RPJMD	4	PROGRAM AKSI/ JANJI POLITIK	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				80	program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya			
		39	Peningkatan partisipasi aktif pemuda	81	program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan			
				82	program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	23	Program Peningkatan Kepedulian pada Bidang Olah Raga	
				83	program pengembangan kapasitas kepramukaan			Dinas Pendidikan
13	Peningkatan kontribusi sector unggulan dalam perekonomian	40	Peningkatan kontribusi sector perdagangan dan jasa terhadap PDRB	84	program perizinan dan pendaftaran perusahaan			Dinas Perdagangan
		41	Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	85	program peningkatan sarana distribusi perdagangan	24	Penghapusan retribusi parkir untuk pasar tradisional.	
						25	Penghapusan retribusi bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Madiun.	
				86	program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting			
				87	program standardisasi dan perlindungan konsumen			
				88	program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri			
		42	Peningkatan Pengelolaan Pariwisata	89	program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata			Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
				90	program pemasaran pariwisata			
		43	Pengembangan ekonomi kreatif	91	program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif			
		44	Pengembangan sentra-sentra usaha/produk ekonomi lokal (produk khas daerah) berbasis kelurahan	92	program pengelolaan sistem informasi industri nasional			
				93	program perencanaan dan pembangunan industri			Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil

1	STRATEGI	2	ARAH KEBIJAKAN	3	PROGRAM RPJMD	4	PROGRAM AKSI/ JANJI POLITIK	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		45	Pengembangan ekonomi digital masyarakat	94	program pengembangan umkm	26	Bantuan Modal dan Pengembangan SDM untuk UKM Kota	dan Menengah
14	Peningkatan produktivitas dan daya saing IKM, Usaha Mikro dan koperasi	46	Pengembangan Sistem Pendukung Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro			27	Madiun Display meningkatkan dan mengembangkan produk unggulan lokal yang ada di wilayah Bakorwil 1 Madiun.	
		47	Peningkatan Produktivitas IKM dan Usaha Mikro					
		48	Peningkatan kelembagaan koperasi	95	program pendidikan dan latihan perkoperasian			
				96	program pemberdayaan dan perlindungan koperasi			
15	Peningkatan kualitas dan kuantitas ketersediaan pangan	49	Peningkatan ketersediaan pangan	97	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat			Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian
				98	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	28	Subsidi Pupuk Bagi Petani	
				99	Program Penanganan Kerawanan Pangan			
		50	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100	Program Pengawasan Keamanan Pangan			
		51	Peningkatan akses pangan dan perilaku pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.	101	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya			
				102	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan			
				103	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			
				104	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian			
	105			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				



1	STRATEGI	2	ARAH KEBIJAKAN	3	PROGRAM RPJMD	4	PROGRAM AKSI/ JANJI POLITIK	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				106	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian			
				107	Program Perizinan usaha Pertanian			
				108	Program Penyuluhan Pertanian			
16	Penurunan tingkat kemiskinan	52	Peningkatan database kemiskinan berbasis RT/RW					
		53	Peningkatan jejaring sosial	109	program pemberdayaan sosial	29	Subsidi Listrik dan Air Bersih Bagi Masyarakat Kurang mampu	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				110	program program perlindungan dan jaminan sosial	30	Memberikan Bantuan Pemakaman bagi masyarakat tak berdaya	
		54	Penguatan program pengentasan kemiskinan	111	program penanganan bencana			
				112	program pengelolaan taman makam pahlawan			
17	Peningkatan Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	55	Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS	113	program rehabilitasi sosial	31	Program peningkatan kepedulian pada lansia, kaum marjinal, perempuan, ibu dan anak	
		56	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Rehabilitasi Sosial					
18	Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga kerukunan, ketenteraman dan ketertiban	57	Peningkatan masyarakat yang tertib dan patuh terhadap peraturan					Satuan Polisi Pamong Praja
		58	Peningkatan ketentraman dan ketertiban	114	program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	32	Memberdayakan Pesilat untuk keamanan lingkungan di setiap kelurahan	

1	STRATEGI	2	ARAH KEBIJAKAN	3	PROGRAM RPJMD	4	PROGRAM AKSI/ JANJI POLITIK	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		59	Penguatan peran masyarakat dalam membangun Kerukunan			33	Bantuan Perbaikan dan Sarana Prasarana Ibadah	Sekretariat Daerah
				115	program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				116	program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik			
				117	program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan			
				118	program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya			
				119	program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik social			
19	Peningkatan mitigasi resiko dan ketangguhan bencana	60	Peningkatan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana	120	program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran			Satuan Polisi Pamong Praja
				121	Program Penanggulangan Bencana			Badan Penanggulangan Bencana Daerah



**Tabel 6.6**  
Program Prioritas Pembangunan daerah yang disertai Pagu Indikatif

Kode	Misi			Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
	Tujuan					Realisasi 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
	Sasaran					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Prioritas 1																			
	Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)																		
			Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities	Indeks Reformasi Briokrasi	(B) 67,34	(B) 65,55		(B) 67		(B) 68		(B) 69		(BB) 70,01		(BB) 70,01			
			Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun		BB (70,01)		BB (73)		BB (76)		BB (79)		A (80,01)		A (80,01)			
				Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		3,385 tinggi		Tinggi		Tinggi		Tinggi		Sangat tinggi		Sangat tinggi			
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,82	Tidak ada penilaian tahun 2020		2,83 (baik)		2,85 (baik)		2,87 (baik)		2,90 (baik)		2,90 (baik)			
4	4	2	Program Penataan Daerah Otonom Baru	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Kepala daerah yang tepat Syarat	6 dokumen	6 dokumen	817.968.835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 dokumen	817.968.835	Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pemerintahan Umum)
0	0	1		Penyampaian LKPJ Tepat Waktu	tepat waktu	tepat waktu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	tepat waktu		
4	0	0	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	80,08 nilai		-		-		-		80,08 nilai	30.614.876.059	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat)	
1	2			Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	-	6.849.063.710	100%	7.201.761.318	100%	7.921.937.450	100%	7.921.937.450	100%	8.642.113.582			
4	4	2	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Produk Hukum yang berkualitas	100	100%	847.826.505	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	847.826.505	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	





Kode	Misi				Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
	Tujuan						Realisasi 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
	Sasaran						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	
	Program						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	
4	4	1			Program Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Capaian target program pembangunan bidang ekonomi, sosil dan budaya	-	100%	355.497.949	-	-	-	-	-	-	-	100%	355.497.949		
	4	0				Persentase Dokumen perencanaan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya yang dapat dimanfaatkan	100%	100%		-	-	-	-	-	-	-	100%			
4	4	1			Program Perencanaan Fisik dan Sarana Prasarana Kota	Persentase Capaian target program pembangunan bidang prasarana wilayah	-	100%	515.325.581	-	-	-	-	-	-	-	100%	515.325.581		
	4	0				Persentase Dokumen Perencanaan pembangunan prasarana wilayah yang dapat dimanfaatkan	100%	100%		-	-	-	-	-	-	-	100%			
5	0	0			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi sesuai ketentuan	100%	100%	-	100%	1.579.333.325	100%	1.317.008.885	100%	1.669.300.135	100%	1.669.300.135	100%	6.857.358.025	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2	2	1			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Pelayanan Publik yang sudah terintegrasi	25	33,04	9.342.188.500	-	-	-	-	-	-	-	33,04	9.342.188.500	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	1	0			Program Aplikasi Informatika	Nilai Domain Layanan SPBE Administrasi Pemerintahan	-	-	-	3,6 skor	-	-	-	-	-	-	3,6 skor	-		
						Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	100%	-	100%	10.587.483.00	100%	11.510.000.00	100%	11.860.000.00	100%	43.717.933.60			
						Persentase perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	-	-	-	100%	9.760.450.600	100%	0	100%	0	100%	0			

Kode	Misi			Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
	Tujuan					Realisasi 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
	Sasaran					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	
	Program					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun		82,85 (baik)		82,85 (baik)		83 (baik)		83 (baik)		85 (baik)		86 (baik)		
					Indeks Inovasi Daerah		1892		1892		1900		1925		1950		1950		
4	4	1		Program Pengembangan Kajian dan Penelitian	Persentase hasil penelitian/ kajian yang dapat dimanfaatkan	100%	100%	199.688.047	-	-	-	-	-	-	-	100%	199.688.047	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	0	0		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	persentase hasil penelitian/kajian yang dapat dimanfaatkan	100%	100%	-	100%	727.489.507	-	-	1.220.033.946	-	1.220.033.946	100%	4.271.082.145	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
4	4	1		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	Persentase Tercukupinya Usulan Diklat Aparatur	100	113%	1.642.075.075	-	-	-	-	-	-	-	113%	1.642.075.075	Badan Kepegawaian Daerah	
4	4	1		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase pengembangan dan pembinaan ASN	99,6	112%	814.211.395	-	-	-	-	-	-	-	112%	814.211.395		
4	4	1		Program Penataan Aparatur	Persentase Penempatan PNS Sesuai SKM	103,24	96%	288.459.697	-	-	-	-	-	-	-	96%	288.459.697		
5	0	0		Program Kepegawaian Daerah	Nilai IKM Pelayanan Kepegawaian	87,97	87,62	-	87,52	2.032.523.200	87,6	2.644.572.260	87,7	2.775.000.000	87,7	2.800.000.000	87,7	10.636.280.960	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	0	0		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase peningkatan kapasitas sesuai dengan keahlian dan kompetensi	-	-	-	100%	2.648.819.070	-	4.426.619.390	-	4.600.000.000	-	4.600.000.000	-	19.998.851.865	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Persentase Realisasi Pengembangan SDM	-	-	-	10%	-	12%	-	13%	-	14%	14%	-		
2	2	1		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Sasaran Penyebaran Informasi Publik	75	75	5.585.257.703	-	-	-	-	-	-	-	-	75	5.585.257.703	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	1	0		Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase OPD yang memenuhi standart layanan informasi publik	-	75%	-	75%	4.619.278.000	77%	4.788.605.000	80%	5.500.000.000	82%	5.900.000.000	82%	20.807.883.000	
4	4	1		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam RKPD	10	100	273.741.424	-	-	-	-	-	-	-	100	273.741.424	Kecamatan Kartoharjo	



Kode	Misi			Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
	Tujuan					Realisasi 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
	Sasaran					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
	Program					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
4 4 0 9	1 8		Program Dana Kelurahan	Indeks Perkembangan Kelurahan	0,73		5.577.566.978	-	-	-	-	-	-	-	0,73	5.577.566.978		
				Persentase Kelurahan yang mendapat klasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	-	22%		-	-	-	-	-	-	-	22%			
4 4 0 9	1 7		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam RKP	10	10%	206.199.173	-	-	-	-	-	-	-	10%	206.199.173	Kecamatan Manguharjo	
4 4 0 9	1 8		Program Dana Kelurahan	Indeks Perkembangan Kelurahan	0,73		5.531.574.554	-	-	-	-	-	-	-	0,73	5.531.574.554		
				Prosentase usulan masyarakat kecamatan Manguharjo yang terakomodir dalam RKP	-	10%		-	-	-	-	-	-	-	10%			
				Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	-	30%		-	-	-	-	-	-	-	30%			
4 4 0 9	1 7		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam RKP	10		198.987.534	-	-	-	-	-	-	-	10	198.987.534	Kecamatan Taman	
				Persentase Peserta yang Memberikan Usulan	-	100%		-	-	-	-	-	-	-	100%			
4 4 0 9	1 8		Program Dana Kelurahan	Indek Perkembangan Kelurahan	0,73	100%	5.629.024.604	-	-	-	-	-	-	-	100%	5.629.024.604		
7 0 1 3			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKP	18 usulan	18 usulan	-	18 usulan	4.028.206.193	18 usulan	3.052.276.276	-	3.465.000.000	-	18 usulan	13.421.306.895	Kecamatan Kartoharjo	





Kode	Misi			Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
	Tujuan					Realisasi 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
	Sasaran					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
	Program					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	0	0		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100%	100%	-	19.023.618.740	100%	22.490.417.230	100%	27.000.000.000	100%	28.000.000.000	100%	99.688.535.570	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
0	0	3		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	3.010.026.500	-	-	-	-	-	100%	3.010.026.500	-	Dinas Perhubungan	
				Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Kota Madiun														
				Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia		80,91		81,25		81,70		82,15		82,35		82,35	
					Indeks Pembangunan Gender		94,38		94,40		94,44		94,49		94,51		94,51	
				Meningkatnya pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender		77,18		77,07		77,20		77,21		77,22		77,22	
				Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah		14,39		14,40		14,41		14,42		14,43		14,43	
					Rata-rata Lama Sekolah		11,14		11,14		11,15		11,16		11,17		11,17	
1	1	1		Program Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Murni SD/SMP	152,99%	132,26%	104.431.778.931	-	-	-	-	-	-	132,26%	104.431.778.931	-	Dinas Pendidikan
1	1	1		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga kependidikan yang lulus pelatihan	100	100%	543.850.985	-	-	-	-	-	-	100%	543.850.985	-	
					Persentase Jumlah tenaga pendidik yang bersertifikasi	76,66			-	-	-	-	-	-	76,66			
1	0	0		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	-	-	-	A skor	199.816.763.917	A skor	205.213.092.252	A skor	202.345.219.300	A skor	202.345.219.300	A skor	809.720.294.769
1	0	0		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	100%	100%	-	100%	119.094.672.764	100%	67.421.236.524	100%	129.743.179.643	100%	131.784.897.563	100%	448.043.986.494
1	0	0		Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikasi yang Berprestasi	78,98%	-	-	20%	1.959.105.000	20%	1.658.000.000	25%	2.450.385.000	25%	2.450.385.000	25%	8.517.875.000

Kode	Misi			Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
	Tujuan					Realisasi 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
	Sasaran					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	
	Program					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				Meningkatnya Derajat kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup		72,81			72,81				72,81			72,81		
1	1	1		Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan	Persentase penduduk Kota Madiun yang menjadi peserta JKN	87,6	95,21 %	35.903.672.680	-	-	-	-	-	-	-	-	95,07 %	35.903.672.680	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	1	1		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Kesehatan Masyarakat yang sesuai standart	16,67	25	6.093.820.696	-	-	-	-	-	-	-	-	25	6.093.820.696	
1	1	2		Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase Penurunan Kasus Kejadian Luar Biasa	100 (20 kasus)	1.940 %	3.105.216.940	-	-	-	-	-	-	-	-	1.940 %	3.105.216.940	
1	1	2		Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang terakreditasi	48,27	75	21.377.920.542	-	-	-	-	-	-	-	-	75	21.377.920.542	
1	1	1		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar	88,55	91,15	4.530.614.956	-	-	-	-	-	-	-	-	91,15	4.530.614.956	Rumah Sakit Umum Daerah
1	1	1		Program Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pencaaian Kinerja Badan Layanan Umum Daerah	100	60	80.943.285.683	-	-	-	-	-	-	-	-	60	80.943.285.683	
1	1	1		Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan	Persentase penyediaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	88,55	91,15	6.295.049.457	-	-	-	-	-	-	-	-	91,15	6.295.049.457	
1	0	0		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	0,33	0,43			0,39							0,39		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	-	66,67 %	-	50,00%	1.974.015.887,78	66,67%	82.687.756.549	75%	162.988.308.912	75%	99.820.515.624	75%	478.806.069.050	
1	0	0		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang sesuai standar	-	80%	-	89%	235.589.050	90%	279.413.000	91%	225.252.245	92%	232.009.812	92%	975.711.057	



Kode	Misi				Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
	Tujuan						Realisasi 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
	Sasaran						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	
	Program						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	0	0			Program Sedlaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) sesuai Standar	-	-	85%	86%	178.376.700	87%	226.563.000	88%	233.359.890	89%	240.360.686	89%	902.553.576	
1	0	0			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang mengalami kenaikan strata	68,63%	60,38 %	-	61,50%	1.130.949.900	62%	2.492.754.000	62,50%	1.157.179.250	63,00%	1.191.894.628	63,00 %	11.526.646.878	
					Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun															
					Terwujudnya Pembangunan ekonomi inklusif	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	6,78	6,69		6,38		6,40		6,42		6,44		6,44		
					Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,85	8,32		8,15		5,74		5,12		5,00		5,00		
2	2	1			Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	79	73,04 %	350.882.216	-	-	-	-	-	-	-	-	73,04 %	350.882.216	Dinas Tenaga Kerja
						Persentase lulusan pelatihan yang mempunyai sertifikat kompetensi dasar	98	100		-	-	-	-	-	-	-	-	100		
2	0	0			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Dilatih	21,75%	0,69%	-	23%	418.950.040	23%	862.016.290	-	-	-	23%	3.817.970.730	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
						Persentase jumlah peserta pelatihan yang berbasis kompetensi	-	-	-	20%	-	25%	862.016.290	30%	1.345.000.000	35%	1.345.000.000	35%		
2	0	0			Program Hubungan Industrial	Persentase Penurunan Kasus-kasus Perselisihan Hubungan Industrial	-	-	-	10%	1.682.439.130	10%	1.719.214.240	-	-	-	2.274.134.040	10%	7.949.921.450	
						persentase perusahaan yang mengesahkan peraturan perusahaan	-	-	-	16%	0	16%	1.719.214.240	16%	2.274.134.040	16%	2.274.134.040	16%		

Kode	Misi				Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
	Tujuan						Realisasi 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
	Sasaran						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	
	Program						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					Meningkatnya Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	5,82	-10,83		2,16		4,81		5,69		6,91		6,91		
						Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa		-0,93		0,58		0,76		2,78		3,42		3,42		
2	2	1			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	98,05	98,7	612.897.052	-	-	-	-	-	-	-	98,7	612.897.052	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro	
2	2	1			Program Pengembangan Sistem Pendukung Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan usaha mikro	0,4	0,42	505.342.770	-	-	-	-	-	-	-	0,42	505.342.770		
2	1	0			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi bersertifikat NIK	0	81,29 %	-	80,13%		86,50%		-		-	86,50 %		Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
						Persentase jumlah koperasi yang disetujui permohonan bersertifikat NIK	-	-	-	75,0%	750.310.000	75,0%	500.318.900	75,0%	773.058.000	75,0%	773.058.000	2.796.744.900		
2	1	0			Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro terfasilitasi yang beromzet naik	-	-	-	7%	829.985.000	7%	309.850.000	-	715.000.000	-	715.000.000	2.569.850.000		
						Persentase Usaha Mikro dibina yang beromzet naik	-	-	-	7%		7%		7,33%	715.000.000	8%				
2	2	1			Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Jumlah Pemuda Berprestasi yang dikirim kompetisi	16	2 orang	1.640.940.7	-	-	-	-	-	-	-	2 orang	1.640.940.745	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga	
						Jumlah Atlit yang ikut kejuaraan di tingkat Provinsi dan Nasional	189	124 orang	45	-	-	-	-	-	-	-	124 orang			
2	1	0			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah medali yang diraih di bidang olahraga	50 medali	79 medali	-	33 medali	3.511.442.880	33 medali	4.434.615.445	35 medali	2.036.668.700	35 medali	2.239.335.570	265 medali	10.136.838.550	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga
2	2	1			Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Kekayaan Budaya yang dipentaskan	31,6	4%	1.901.047.967	-	-	-	-	-	-	-	4%	1.901.047.967	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga	
2	2	0			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina	100 orang	100 orang	-	100 orang	123.886.145	100 orang	123.886.145	100 orang	242.000.000	100 orang	266.200.000	500 orang	928.200.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga



Kode	Misi			Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
	Tujuan					Realisasi 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
	Sasaran					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.		
	Program					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14
3	3	1		Program Pengelolaan Pasar Rakyat	Jumlah Omset Pasar Rakyat	547.949	3,106,543,877,840	5.113.702.485	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,106,543,877,840	5.113.702.485	Dinas Perdagangan
3	3	0		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar sesuai standar	-	-	-	5,88%	-	-	-	-	-	-	-	-	5,88%	-	Dinas Perdagangan
					Persentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	0	0	-	100%	8.242.965.872	100%	6.261.231.818	100%	3.256.000.000	100%	3.256.000.000	100%	29.885.229.000	0	Dinas Perdagangan
				Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Indeks Ketentraman		76,87			76,95		77,05		77,15		77,2		77,2		
					Indek Gini	0,35	0,39			0,38		0,37		0,36		0,35		0,35		
				Pengurangan Kemiskinan	Angka Kemiskinan	4,35	4,98			4,97		4,96		4,95		4,94		4,94		
1	1	1		Program Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani	100	100	3.155.942.559	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	3.155.942.559	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	0	0		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial	-	-	-	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	90%	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Persentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	-	-	-	-	2.210.456.099	50%	3.860.177.515	58%	4.375.378.420	66%	4.812.916.262	66%	19.260.071.368	8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	0	0		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	-	-	-	18,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	18,7%	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	-	-	-	-	1.508.844.750	100%	1.742.901.123	100%	2.049.045.215	100%	2.253.949.737	100%	6.045.896.075	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	0	0		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	46.549.372.750	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						-	-	-	-	9.360.726.880	100%	11.312.409.780	100%	12.570.286.850	100%	13.305.949.240	100%	46.549.372.750	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	3	1		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan Produktivitas Pertanian	7,2	6,90	2.447.921.843	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,90	2.447.921.843	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Rasio Pendapatan Usaha Pertanian dengan biaya Produksi		1,81		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,81		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan





Kode	Misi				Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
	Tujuan						Realisasi 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
	Sasaran						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	
	Program						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,82		Tidak ada penilaian tahun 2020			2,83 (baik)		2,85 (baik)		2,87 (baik)		2,90 (baik)			
4	4	1			Program Peningkatan Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	100	32,11		493.425.447	-	-	-	-	-	-	-	32,11		493.425.447	Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pembangunan)
					Prosentase jumlah pengadaan barang/jasa yang terealisasi		100%			-	-	-	-	-	-	-	100%			
4	4	2			Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	100				-	-	-	-	-	-	-	100			Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pembangunan)
					Jumlah dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan		2 dokumen		105.974.436	-	-	-	-	-	-	-	2 dokumen		105.974.436	
					Prosentase jumlah tender yang terealisasi		100%			-	-	-	-	-	-	-	100%			
4	4	1			Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Pemerintah Daerah	5 kerjasama	10 kerjasama		186.458.697	-	-	-	-	-	-	-	10 kerjasama		186.458.697	Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pemerintahan Umum)
4	4	1			Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	100	100		77.840.000	-	-	-	-	-	-	-	100		77.840.000	Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat)
4	4	2			Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ekonomi	100	-		-	-	-	-	-	-	-	-	100		-	
4	4	1			Program Stabilisasi Ekonomi Daerah	4%	1,8		189.597.882	-	-	-	-	-	-	-			189.597.882	
4	4	1			Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	105,87 %		593.745.402	-	-	-	-	-	-	-	105,87 %		593.745.402	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)

Kode	Misi			Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
	Tujuan					Realisasi 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
	Sasaran					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
	Program					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	0	0	3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	-	-	80,98 nilai	781.786.292	-	600.700.000	-	830.000.000	-	915.000.000	80,98 nilai	3.199.572.502,00	Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan)
					Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
4	0	0	3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	-	-	80,98 nilai	623.733.600	-	866.000.000	-	1.277.100.000	-	1.393.200.000	80,98 nilai	4.160.033.600	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat)
					Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
4	4	1	095	Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Ketersediaan Basis Data Pajak daerah	100	100%	-	211.988.000	-	-	-	-	-	-	100%	211.988.000	Badan Pendapatan Daerah
					Jumlah penerimaan pajak daerah	-	118,26 %	-		-	-	-	-	-	-	118,26 %		
5	0	0	24	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pajak Asli Daerah	-	-	1,5%	-	-	-	-	-	-	-	1,5%	-	Badan Pendapatan Daerah
					Persentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak	10%	10%	10%	616.777.500	10%	1.200.439.000	10%	1.447.675.000	10%	1.499.358.000	10%	4.995.628.000	
					Peningkatan Capaian Penagihan Pajak Daerah	37%	41%	41%		41%		42%		43%		43%		
5	0	0	13	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase capaian target program pembangunan daerah	-	-	100%	1.452.140.380	-	1.887.650.000	-	2.376.650.000	-	2.376.650.000	100%	8.279.198.640	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
					Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
4	4	1	075	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase penerbitan SP2D tepat waktu	100%	100%	217.944.427	-	-	-	-	-	-	-	100%	217.944.427	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4	4	1	055	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	-	-	-	-	-	-	-	-	Tepat Waktu	968.759.403	
					Presentase OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai SAP	100%	100%	968.759.403	-	-	-	-	-	-	-	100%	968.759.403	



Kode	Misi				Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
	Tujuan						Realisasi 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
	Sasaran						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	
	Program						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
4	4	1			Program Pengelolaan Anggaran Daerah	Pengesahan Perda APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	676.717.415	-	-	-	-	-	-	-	-	676.717.415		
	0	6				Pengesahan Dokumen DPA dan DPPA	Tepat Waktu	Tepat Waktu		-	-	-	-	-	-	-	-			
4	4	1			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Kontribusi pengelolaan aset terhadap PAD	4.930.372.055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.930.372.055		
	0	8				Presentase keakuratan data aset OPD	-	100%	2.790.892.165	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		
	5					Presentase peningkatan Nilai aset pemda	-	6%		-	-	-	-	-	-	-	-	6%		
						Presentase aset yang diasuransikan	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	4	2			Program Peningkatan Manajemen Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak daerah	1,5	-	453.729.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5		
	0	0				Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	-	100%		-	-	-	-	-	-	-	-	100%		
	5																		Badan Pendapatan Daerah	
5	0	0			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	100%	100%	-	100%	60.340.673.185	100%	11.270.987.599	100%	7.505.329.560.00	100%	7.510.329.650.00	100%	73.121.335.148	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	0	0			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Aset yang berkondisi baik	100%	100%	-	100%	3.748.942.400	100%	2.099.685.020	100%	3.337.189.000.00	100%	3.337.189.000.00	100%	13.348.756.040	
4	4	1			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase OPD yang maturitas SPI nya level 3	25	25	1.341.655.581	-	-	-	-	-	-	-	-	25		
	0	5				Persentase Temuan Hasil pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	-	96,42 %		-	-	-	-	-	-	-	-	96,42 %		
4	4	1			Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase aparaturnya yang bersertifikat	100%	100%	372.981.909	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	372.981.909	Inspektorat

Kode	Misi			Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
	Tujuan					Realisasi 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
	Sasaran					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	
	Program					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4 4 0 3	1 9			Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Sisdur Pengawasan	Persentase dokumen kebijakan dan sisdur pengawasan yang terpenuhi	100%	100%	5.996.400	-	-	-	-	-	-	-	100%	5.996.400		
6 1 2	0 0			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3	-	25%	-	30%	848.332.295	35%	1.237.019.000	40%	1.428.000,80	45%	1.533.500,00	45%	4.728.339.000	Inspektorat
6 1 3	0 0			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan serta Asistensi yang Terpenuhi	-	100%	-	100%	1.019.621.160	100%	1.138.997.000	100%	1.327.550,00	100%	1.387.500,00	100%	4.738.923.000	
2 1 5	2 1			Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase PD yang mengimplementasikan keamanan Informasi	8,8	25	486.210.682	-	-	-	-	-	-	-	-	25	486.210.682	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 1 2	2 0			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi	-	-	-	II (dua) Level	-	-	-	-	-	-	II (dua) Level	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan Informasi	100%	100%	-	100%	195.502.695	100%	350.000.000	100%	500.000.000	100%	600.000.000	100%	1.695.502.695	
2 1 8	2 1			Program Penyelamatan, Peningkatan SDM dan Layanan Arsip Daerah	Jumlah Berkas Arsip yang dikelola	55.323 berkas	56.300 berkas	426.396.352	-	-	-	-	-	-	-	-	56.300 berkas	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Jumlah Unit Daerah Kearsipan yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	-	5 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 unit	426.396.352	
2 4 2	2 0			Program Pengelolaan Arsip	Jumlah berkas arsip yang dikelola	57.615 berkas	60.004 berkas	-	59.500 berkas	-	-	-	-	-	-	-	59.500 berkas	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	-	82%	-	84%	436.331.945	86%	651.625.000	88%	900.000.000	90%	1.000.000.000	90%	2.987.956.945	



Kode	Misi				Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
	Tujuan						Realisasi 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
	Sasaran						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	
	Program						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
2	2	0			Program Perlindungan dan Penyelamatan arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	-	8,2		8,2		8,4	149.291.000	8,6	150.000.000	8,8	200.000.000	8,8	499.291.000	
					Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun		82,85 (baik)		82,85 (baik)		83 (baik)	83 (baik)		85 (baik)		86 (baik)			
						Indeks Inovasi Daerah		1892		1892		1900	1925		1950		1950			
2	2	1			Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	81,03	82%	206.825.853									82%	206.825.853	
2	2	1			Program Penataan dan Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan dokumen akta pencatatan sipil		92,00 %	1.332.303.658									92,00 %	1.332.303.658	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	2	1			Program Pengelolaan Data Kependudukan dan Inovasi Pelayanan	Persentase Uptime database kependudukan dan pencatatan sipil	99	99%	330.025.931									99%	330.025.931	
2	1	0			Program Pendaftaran Penduduk	Presentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	99,18	93,33 %	-	84%	228.148.160	84%	233.627.050	84,50%	276.070.000	85%	303.160.000	85%	1.309.873.136	
2	1	0			Program Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	100	93,33 %	-	94%	559.472.520	94,25%	402.719.632	94,50%	551.590.000	94,75%	605.550.000	94,75 %	2.266.229.296	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	1	0			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	akurasi database kependudukan	-	-	-	99%	347.749.070	99,10%	362.506.923	99,15%	420.780.000	99,20%	462.550.000	99,20 %	2.043.603.047	
2	2	1			Program Sosialisasi di Bidang Cukai	Persentase Penyebaran Informasi tentang Cukai	100	89	825.498.000									89	825.498.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	2	1			Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi	50	60	257.773.734									60	257.773.734	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Misi				Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
	Tujuan						Realisasi 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
	Sasaran						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
	Program						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	2	0	2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	80	-	Dinas Komunikasi dan Informatika	
					Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	313.278.000	100%	499.250.000		550.000.000		550.000.000	100%	1.912.528.000		
					Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
4	4	1	0	Program Layanan Perundang-Undangan, Dokumentasi dan Rapat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan perundang-undangan, Dokumentasi dan Rapat	81	80	14.070.912.044	-	-	-	-	-	-	-	80	14.070.912.044	Sekretariat DPRD	
4	0	0	2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan Tugas dan Fungsi	81,29	90,42	-	79	12.826.552.255	80	14.587.486.385	81	19.318.960.080	82	22.288.971.373	82	72.546.774.111	Sekretariat DPRD
4	4	1	0	Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kepegawaian	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian sesuai SOP	99	145%	197.835.501	-	-	-	-	-	-	-	145%	197.835.501	Badan Kepegawaian Daerah	
4	4	1	0	Program Fasilitas Kesejahteraan PNS	Persentase penyelesaian SK terkait kesejahteraan PNS yang sesuai SOP	107,4	108%	95.467.940	-	-	-	-	-	-	-	108%	95.467.940		
7	0	0	1	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan dan tidak dilaksanakan OPD lain	100%	100%	-	100%	136.144.080	100%	173.179.750	100%	231.335.276	100%	236.000.000	100%	755.449.767	Kecamatan Kartoharjo
7	0	0	1	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan dan tidak dilaksanakan OPD lain	100%	100%	-	100%	181.926.494	100%	181.926.494	100%	191.022.819	100%	200.573.960	100%	834.642.042	Kecamatan manguharjo



Kode	Misi				Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
	Tujuan						Realisasi 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
	Sasaran						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.		
	Program						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		
7	0	0		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan dan tidak dilaksanakan OPD lain	100%		100%		100%	114.893.950	100%	156.717.790	100%	164.553.680	100%	172.781.363	100%	633.972.483	Kecamatan Taman	
4	4	0	9	Program Penyelenggaraan Kelurahan	Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100%		100%	5.114.048.355									100%	5.114.048.355	Kecamatan Kartoharjo	
4	4	0	9	Program Penyelenggaraan Kelurahan	Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100%		100	5.193.265.339										100	5.193.265.339	Kecamatan manguharjo
4	4	0	9	Program Penyelenggaraan Kelurahan	Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100%		100	4.540.005.727										100	4.540.005.727	Kecamatan Taman
7	0	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kartoharjo	87,56		87,7		87,7	7.476.445.846	87,75	6.902.855.400	87,8	6.118.927.554	87,85	6.424.851.850	87,85	25.515.710.436	Kecamatan Kartoharjo	
7	0	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Manguharjo	93,34		90,54		90,49	7.396.857.097	90,03	7.189.758.228	90,03	6.553.593.481	90,03	6.881.273.156	90,03	24.096.928.692	Kecamatan manguharjo	
7	0	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Taman	88,30		88,29		88,12	8.112.850.452	88,46	7.030.198.834	88,78	7.381.708.776	88,94	7.750.794.214	88,94	25.551.736.008	Kecamatan Taman	
				Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan																	
				Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	livable city	85,32		86,67		87,78			88,19		88,60		89,01		89,01		
				Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota	Indeks infrastruktur	96,72		96,85		98,06			98,25		98,42		98,59		98,59		
1	1	0	3	Program Peningkatan Kualitas Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Kota	Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan	100		95,04			15.595.185.816							95,04	15.595.185.816	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	

Kode	Misi			Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
	Tujuan					Realisasi 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
	Sasaran					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
	Program					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.1.03.1	1.1.03.1	1.1.03.1	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik	92,41	94,03 % 57.038.311.374	-	-	-	-	-	-	-	94,03 % 57.038.311.374	4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.1.03.3	1.1.03.3	1.1.03.3	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran/ Drainase/ Gorong-gorong	Persentase Panjang Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan air tidak tersumbat	89,75	90,40 % 14.047.224.710	-	-	-	-	-	-	90,40 % 14.047.224.710	0				
1.1.03.3	1.1.03.3	1.1.03.3	Program Pengendalian Banjir	Jumlah Titik/ Lokasi Banjir/ Genangan	12	12 Titik 7.217.269.810	-	-	-	-	-	-	12 Titik 7.217.269.810	10				
1.1.03.3	1.1.03.3	1.1.03.3	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase Terlayannya air bersih	94	-	-	-	-	-	-	-	94	-				
1.1.03.3	1.1.03.3	1.1.03.3	Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Ketaatan Terhadap RTRW	100%	86% 736.311.193	-	-	-	-	-	-	86% 736.311.193	193				
1.1.03.3	1.1.03.3	1.1.03.3	Program Pengelolaan Sumberdaya Air	Persentase rawan banjir/genangan	-	-	20,05%	12.299.394.650	19,09%	8.369.843.440	18,47%	28.517.074.300	17,34%	31.368.781.730	17,34 % 98.737.388.030			
1.1.03.3	1.1.03.3	1.1.03.3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang terlayani kebutuhan air minum	-	-	100%	-	100%	101.669.000	100%	111.835.900	100%	123.019.490	100% 336.524.390			
1.1.03.3	1.1.03.3	1.1.03.3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Panjang Drainase dalam Kondisi Baik	90,96%	90,40 % -	80,03%	22.274.002.000	80,06%	20.731.396.010	80,09%	48.653.618.200	80,12%	53.518.980.020	80,12 % 165.621.452.220			
1.1.03.3	1.1.03.3	1.1.03.3	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan Gedung Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	20.857.814.000	100%	18.746.270.000	100%	25.922.380.000	100%	28.514.618.000	100% 98.616.248.000			
1.1.03.3	1.1.03.3	1.1.03.3	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	19.966.147.160	100%	14.499.606.270	100%	21.178.289.462	100%	23.296.118.408	100% 81.160.898.290			
1.1.03.3	1.1.03.3	1.1.03.3	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dalam Kondisi Mantab	93,64%	94,03 % -	94,50%	58.330.391.462	95,00%	49.495.103.351	95,50%	109.548.668.724	96,00%	120.503.535.596	96,00 % 384.418.242.032			
1.1.03.3	1.1.03.3	1.1.03.3	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Pelaku jasa Konstruksi yang memenuhi standart kompetensi	-	-	47,68%	500.000.000	62,83%	540.000.000	77,98%	594.000.000	94,95%	653.400.000	94,95 % 2.287.400.000			
1.1.03.3	1.1.03.3	1.1.03.3	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	100%	100%	100%	1.280.982.460	100%	1.880.000.000	100%	2.068.000.000	100%	2.274.800.000	100% 7.722.800.000			





Kode	Misi					Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
	Tujuan							Realisasi 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
	Sasaran							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.		
	Program							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14
2	2	1				Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang tersedia	58,97	64,01	445.978.043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,01	445.978.043	Dinas Lingkungan Hidup
2	2	1				Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase titik Sample Kualitas Air dan Udara yang memenuhi baku mutu	44,7	53,19	747.189.821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,19	747.189.821	
2	2	1				Program Penataan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	31,39	44,59	354.933.375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,59	354.933.375	
2	2	1				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	74,9	74,97	5.528.779.345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,97	5.528.779.345	
2	1	0				Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Data Perencanaan LH yang Tersedia	61,54%	64,10 %	-	69,23%	397.958.000	71,79%	419.892.000	79,49%	583.000.000	79,50%	642.000.000	79,50 %	2.230.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	1	0				Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	44,89%	53,19 %	-	48%	1.242.680.365	49%	1.161.745.000	50%	1.760.000.000	50,10%	1.937.000.000	50,10 %	6.666.000.000		
2	1	0				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	-	-	-	96,83	125.500.000	96,83	56.500.000	200.000.000	225.000.000	96,83	675.000.000				
							Persentase jumlah spesies KEHATI Lokal Daerah	-	-	-	94,32%	-	97,20%	100%	100%	100%	100%					
2	1	0				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	-	70,96	-	71,0	257.127.000	71,5	41.500.000	75%	200.000.000	78%	225.000.000	78%	640.000.000		
2	1	0				Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pelaku usaha / kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	40%	44,59 %	-	52,90%	336.516.400	64,70%	681.549.200	76,47%	532.000.000	88,20%	585.000.000	88,20 %	2.038.762.500		



Kode	Misi				Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
	Tujuan						Realisasi 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
	Sasaran						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	
	Program						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2	1	0	1	8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	-	-	100%	-	90%	654.550.000	100%	670.000.000	100%	851.400.000	100%	1.040.000.000	100%	3.439.400.000	
2	1	1	1	0	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	-	-	100%	-	90%	85.000.000	100%	94.000.000	100%	104.000.000	100%	114.000.000	100%	397.000.000	
2	1	1	1	1	Program Pengelolaan Persampahan	-	-	74,97 %	-	74%	8.576.232.000	73%	7.951.800.000	72%	47.928.000.000	71%	61.190.000.000	71%	127.268.970.000	
Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Kota Madiun																				
Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing																				
Meningkatnya pemberdayaan Gender																				
a	2	1	0	5	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	-	-	25,21 %	2.267.373.362	-	-	-	-	-	-	-	-	25,21 %	2.267.373.362	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	2	1	0	6	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Rehabilitasi Sosial	-	-	100%	8.793.371.080	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	8.793.371.080	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	0	0	8	2	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	-	-	-	-	10%	303.007.740	15%	846.501.000	20%	1.105.807.150	30%	1.216.387.865	30%	3.471.703.755	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	0	0	8	3	Program Perlindungan Perempuan	-	-	-	-	100%	225.292.045	100%	419.590.865	100%	348.895.000	100%	363.550.000	100%	1.357.327.910	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	0	0	8	4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	-	-	-	-	5%	196.558.420	10%	835.086.470	20%	1.178.847.140	30%	1.296.731.854	30%	3.507.223.884	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Misi			Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
	Tujuan					Realisasi 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
	Sasaran					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
	Program					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2085				Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Jumlah dokumen Data Terpilah Gender dan Anak	-	-	100%	113.615.510	1 dokumen	229.549.120	1 dokumen	353.814.360	1 dokumen	277.754.436	1 dokumen	974.733.426	
2086				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase peningkatan pelembagaan dan penguatan pemenuhan hak anak	-	-	100%	266.276.000	-	470.265.980	-	534.095.000	-	602.000.000	100%	2.112.564.040	
					Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	-	-	-	-	12,50%	-	22,43%	-	42,20%	42,20%	-	-	
2087				Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase pelaksanaan kegiatan perlindungan khusus anak	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	
					Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak	-	-	-	81.739.101	0,003	410.605.078	-	168.349.000	-	177.000.000	0,003	734.126.420	
					Persentase kasus kekerasan terhadap anak	-	-	-	-	0,04	-	0,04	-	0,04	0,04	0,04	-	-
				Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah		14,39	14,40	14,41	14,42	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	
					Rata-rata Lama Sekolah		11,14	11,14	11,15	11,16	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	
1011				Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pengolahan database informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan berbasis TIK	100%	100%	-	239.807.439	-	-	-	-	-	-	100%	239.807.439	Dinas Pendidikan
					Persentase Sekolah Standar Nasional Pendidikan	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-
1081				Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar PAUD	106,70%	98,48%	4.703.194.291	-	-	-	-	-	-	-	98,48%	4.703.194.291	
1091				Program Pendidikan NonFormal	Jumlah Lembaga yang terakreditasi	80	100%	464.060.253	-	-	-	-	-	-	-	100%	464.060.253	
1013				Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Sekolah yang Berkurikulum SNP	100%	100%	100%	572.110.560	100%	3.480.307.628	100%	5.319.203.262	100%	5.324.203.262	100%	16.430.719.214	Dinas Pendidikan
2215				Program Pengembangan	Jumlah Bahan Pustaka yang dipinjam	22.568 eksemplar	-	944.202.757	-	-	-	-	-	-	-	22.568 eksemplar	944.202.757	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



Kode	Misi				Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
	Tujuan						Realisasi 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
	Sasaran						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	
	Program						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
7					Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Nilai IKM Pemustaka terhadap layanan Perpustakaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	-	33,25 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,25 %		
2	2	0			Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai IKM Pemustaka terhadap Layanan Perpustakaan	-	87,24	-	72	-	-	-	-	-	-	72	12.784.187.30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
						Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	5,35%	5,95%	-	5,95%	-	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	0		
2	2	0			Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	-	-	-	36%	-	37%	100.000.000	37%	260.000.000	38%	280.000.000	38%	640.000.000	
					Meningkatnya Derajat kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup		72,81		72,81		72,81		72,81		72,81		72,81		
2	2	1			Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	42,73%	42,88 %	1.856.462.422	-	-	-	-	-	-	-	-	42,88 %	1.856.462.422	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2	1	0			Program Pengendalian Penduduk	Persentase Angka UKP (Usia Kawin Pertama) < 20 tahun	5,58%	4,95%	-	≤ 4.8%	≤ 4.7%	755.101.420	8 SSK	686.573.713	9 SSK	707.170.924	9 SSK	2.375.972.396	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						Meningkatnya Jumlah SSK	-	4 SSK	-	4 SSK	300.956.040	7 SSK	-	-	6	-	6			
						Meningkatnya Kampung KB yang berstandar paripurna	-	3 Kampung KB	-	3 Kampung KB	-	4 Kampung KB	5 Kampung KB	-	6 Kampung KB	-	6 Kampung KB			
2	1	0			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Menurunnya Unmet Need	4,2%	11,60 %	-	16,93%	2.727.576.000	8,00%	2.554.439.400	7,50%	2.867.064.740	7,00%	2.953.076.682	7,00%	11.108.317.322	
2	1	0			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya kepesertaan anggota Tribina PUS yang ber-KB	79,10%	82,25 %	-	80,25%	257.495.200	81,00%	1.331.867.514	82,00%	784.633.813	83,00%	808.172.827	83,00 %	3.135.200.234	





Kode	Misi				Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
	Tujuan						Realisasi 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
	Sasaran						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	
	Program						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					Meningkatnya Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	5,82	-10,83		2,16		4,81		5,69		6,91		6,91		
						Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa		-0,93		0,58		0,76		2,78		3,42		3,42		
2	1	0			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi aktif dengan omzet meningkat	0	30%		30%	148.050.000	30%	224.161.900	30%	170.000.000	30%	170.000.000	30%	712.211.900	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
						Persentase koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah	-	-		2,5%		2,5%		2,5%		2,5%		2,5%		
2	2	1			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Ralisasi Investasi	Persentase investor yang merealisasikan investasi	-	19,23	248.406.789	-	-	-	-	-	-	-	-	19,23	248.406.789	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
2	2	1			Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Persentase Pengaduan Pelayanan Perizinan terselesaikan	-	100	475.791.083	-	-	-	-	-	-	-	-	100	475.791.083	
2	1	0			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanaman modal	-	-	-	0		100%	161.250.000	100%	254.312.500	0	116.587.500	0	342.150.000	
2	1	0			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Investor yang Merealisasikan Investasinya	-	19,23	-	13%	373.118.200	26%	294.755.750	32%	300.650.865	39%	306.663.900	39%	1.275.188.715	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	1	0			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan terselesaikan	-	-	-	80%	876.549.000	85%	626.851.000	90%	696.500.000	95%	756.500.000	95%	2.733.930.000	
2	1	0			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	-	-	-	80 perusahaan	525.800.000	100 perusahaan	525.800.000	100 perusahaan	535.000.000	100 perusahaan	546.000.000	100 perusahaan	2.132.600.000,00	
2	1	0			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase jenis izin yang diproses secara elektronik	-	-	-	90%	83.200.000	100%	174.061.400	100%	200.000.000	100%	210.000.000	100%	615.661.400	
3	3	0			Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	Persentase Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						Rasio Pendapatan pelaku usaha perikanan dengan biaya produksi	-	2,25	496.518.752	-	-	-	-	-	-	-	-	2,25	496.518.752	





Kode	Misi			Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
	Tujuan					Realisasi 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
	Sasaran					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
	Program					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	2	0		Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase seni budaya yang dilestarikan	4%	-	4%	1.924.765.097	35%	1.256.014.150	35%	3.932.500.000	40%	4.325.750.000	40%	15.083.250.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemuda an, dan Olahraga
2	2	0		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase benda/ bangunan cagar budaya yang dilestarikan	21%	-	21%	200.000.000	21%	91.547.225	21%	242.000.000	21%	266.200.000	21%	928.200.000	
3	3	1		Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengawasan Perdagangan Non Pasar Rakyat	Persentase Pertumbuhan Perdagangan Non Pasar Rakyat	-	-	1,76%	861.719.402	-	-	-	-	-	-	1,76%	861.719.402	Dinas Perdagangan
3	3	0		Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Jumlah Barang Kena Cukai ilegal	0	-	0	46.401.600	-	-	-	-	-	0	46.401.600		
3	3	0		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase perusahaan yang memperbarui perijinan	100%	-	100%	388.870.000	100%	107.083.000	100%	155.000.000	100%	155.000.000	100%	600.100.000	Dinas Perdagangan
3	3	0		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Bahan Pokok dengan Harga Stabil	100%	-	100%	-	-	77.500.800	-	-	-	-	-	867.724.000	
					Persentase pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan barang penting	100%	-	100%	100%	77.966.680	100%	-	100%	196.000.000	100%	240.000.000	100%	
3	3	0		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase UTTP dan BDKT yg telah melakukan tera dan pengawasan BDKT	100%	-	100%	342.050.000	100%	216.946.035	100%	287.000.000	100%	287.000.000	100%	1.102.019.000	
3	3	0		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah produk perdagangan yang dipromosikan	-	-	15 produk	-	-	-	-	-	-	-	15 produk	3.849.545.000	
					Persentase produk perdagangan yang dipromosikan	100%	-	100%	100%	379.622.600	100%	243.423.850	100%	726.000.000	100%	726.000.000		
3	3	1		Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Persentase IKM yang berstandart	17,09	-	19,63 %	440.979.658	-	-	-	-	-	-	19,63 %	440.979.658	Dinas Tenaga Kerja
3	3	0		Program Pembinaan Industri	Persentase IKM yang melaksanakan GMP (Good Manufacturing Practice)	80	-	100%	41.523.000	-	-	-	-	-	-	100%	41.523.000	

Kode	Misi				Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
	Tujuan						Realisasi 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
	Sasaran						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
	Program						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase tersedianya Dokumen Induk Perindustrian	-	-	-	100%		100%		100%		100%			
3	3	0				persentase IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat	-	-	-	2,5%	563.351.320	5%	364.324.050	5%	615.000.000	5%	615.000.000	5%	2.945.151.320
					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang mengikuti Publikasi Produk	-	-	-	12,80%		12,80%		12,80%		12,80%		12,80%	
3	3	0				persentase IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat	-	-	-	10,0%	407.053.895	10,0%	591.025.135	10,0%	610.000.000	10,0%	610.000.000	10,0%	2.336.000.000
					Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Indeks Ketentraman				76,87		76,95		77,05		77,15		77,2	
						Indek Gini	0,35	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		0,35	
					Pengurangan Kemiskinan	Angka Kemiskinan	4,35	4,98		4,97		4,96		4,95		4,94		4,94	
2	2	1			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	95,4	95,04		-		-		-		-		95,04	
						Indeks Ketahanan Pangan	-	80,64	707.485.783	-		-		-		-		80,64	707.485.783
2	0	0			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan	-	-	-	95,8		-		-		-		95,8	
						Persentase Angka Kecukupan Energi (%)	-	-	-	100%	1.287.926.000	100%	1.095.000.000	100%	1.287.200.000	100%	1.307.500.000	100%	4.977.626.000
2	0				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan dan Rawan Pangan	-	-	-	-		-		25%	60.000.000	22%	60.000.000	22%	120.000.000
2	0	0			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Peningkatan Sample Pangan Aman yang Teruji (%)	-	-	-	80	211.622.000	80	175.000.000	80	318.000.000	80	335.000.000	80	1.039.622.000
						Persentase Pangan Segar Aman yang Teruji (%)	-	-	-	80		80		80		80		80	
3	3	1			Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Peternakan	Persentase Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan	2	2	375.352.624	-		-		-		-		2	375.352.624



Kode	Misi			Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
	Tujuan					Realisasi 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
	Sasaran					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
	Program					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Rasio pendapatan pelaku usaha peternakan dengan biaya produksi	-	1.4										1.4		
3	2	0		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	0	0	50	29.653.000	50	542.900.000	75	3.750.000.000	100	4.950.000.000	100		8,900,653,000	
3	2	0		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	0	0	75%		75%							75%	1,730,450,000	
					Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit hewan Menular (%)	0	50,86	10		10	175.000.000		533.700.000	10	543.700.000	10		
3	2	0		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	0	0	70	171.200.400	72	111.750.000	74	350.000.000	76	400.000.000	76		1.032.950.400	
3	2	0		Program Perizinan usaha Pertanian	0	0			10	50.000.000	12	100.000.000	15	150.000.000	15		300.000.000	
3	2	0		Program Penyuluhan Pertanian	0	0	15	131.363.000	20	148.837.400	20	800.000.000	20	800.000.000	20		1,885,840,400	
1	0	0		Program Penanganan Bencana		100%	100%	344.885.800	100%	628.979.400	100%	859.284.765	100%	954.760.850	100%		2.787.910.815	
1	0	0		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan			100%											
					Persentase Pengelolaan Taman makam Pahlawan dalam kondisi baik			100%	103.194.134	100%	186.106.080	100%	213.236.600	100%	236.929.556	100%		475.720.016

Kode	Misi				Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
	Tujuan						Realisasi 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
	Sasaran						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	
	Program						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat	Indeks Kerukunan	B (73,95) harmonis	B skor 74,0306 (Harmonis)		B skor 74,30 (Harmonis)	B skor 76,40 (Harmonis)	B skor 78,40 (Harmonis)	B skor 80,00 (Harmonis)	B skor 80,00 (Harmonis)			B skor 80,00 (Harmonis)			
						Indeks rasa aman	73,55	76,05		76,15		76,2		76,27		76,35		76,35		
1	0	5	1	5	Program Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Persentase kasus Pengakuan Perda yang diselesaikan	100	100	276.423.739	-	-	-	-	-	-	-	100	276.423.739	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	0	5	8	5	Program Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)	100%	100	1.193.872.410	-	-	-	-	-	-	-	100	1.193.872.410	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	0	5	9		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Korban Bencana Alam yang Tertangani	100	100%		-	-	-	-	-	-	-	100%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Persentase Tingkat Pemenuhan atau Kecukupan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	100	100%	1.485.457.021	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.485.457.021		
						Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	-	100%		-	-	-	-	-	-	-	100%			
						Persentase Early Warning System (EWS) di daerah rawan bencana	-	100%		-	-	-	-	-	-	-	100%			
1	0	5	4		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	100%		100%	1.285.321.000	100%	1.289.528.000	100%	2.336.187.000	100%	2.361.187.000	100%	8.293.882.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	0	5	3		Program Penanggulangan Bencana	Persentase Korban Bencana yang ditangani	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Persentase Tingkat Pemenuhan atau Kecukupan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan	100%	100%		100%	1.377.859.000	0%	1.717.005.000	0%	2.030.000.000	0%	2.275.000.000	0%		7.411.174.000









Kode	Misi			Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
	Tujuan					Realisasi 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
	Sasaran					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
	Program					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	0	0		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase pemahaman masyarakat dibidang politik	-	-	100%	871.058.100	-	1.139.076.250	-	1.159.379.650	-	1.275.317.600	100%	7.805.255.850	
	1	6			Persentase pendidikan politik kepada Partai Politik Pemenang Pemilu	100%	100%	100%		100%		100%		100%				

## **BAB VII**

### **KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Program pembangunan daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. pemenuhan pelayanan wajib dasar masyarakat berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
2. penjabaran visi dan misi Walikota dan wakil Walikota terpilih;
3. berbasis permasalahan serta isu strategis daerah;
4. peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup;
5. peningkatan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah.

Indikasi rencana program prioritas merupakan program penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024. Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah, pemerintah Kota Madiun menyusun berbagai program yang disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Madiun. Program-program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif dan target kinerja terukur yang akan dilaksanakan oleh semua Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Madiun.

Visi dan misi pembangunan Kota Madiun yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 diimplementasikan melalui berbagai bentuk program pembangunan. Program tersebut harus mencerminkan kebutuhan pembangunan yang mendesak sehingga perlu dituangkan kedalam kebijakan umum dan program prioritas disertai kebutuhan pendanaan yang merupakan program unggulan Pemerintah Kota Madiun. Dengan demikian, kebijakan umum dan program unggulan yang disampaikan dalam RPJMD ini hanya yang bersifat prioritas, sementara untuk kebijakan umum dan program yang terkait penyelenggaraan maupun operasional pemerintahan dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemilahan program-program pembangunan guna tersusunnya program prioritas yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat serta pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.



Program prioritas pembangunan daerah dibagi menjadi tiga prioritas, diantaranya :

1. Prioritas I, yaitu dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar, antara lain kebutuhan urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Urusan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat serta Urusan Sosial serta Pemenuhan Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar dan Urusan Pilihan.
2. Prioritas II, yaitu dialokasikan untuk pendanaan program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota dan wakil Walikota Kota Madiun periode 2019-2024, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah.
3. Prioritas III, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja pada Urusan Pemerintah Lainnya.

Rincian mengenai program prioritas beserta anggarannya dapat dilihat dalam tabel 7.1.

**Tabel 7.1**  
**Prioritas Alokasi Program Prioritas Kota Madiun Tahun 2019-2024**

Uraian	PROYEKSI					
	2019R	2020R	2021	2022	2023	2024
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	899.202.218.298	816.784.481.163	757.847.498.801	607.269.555.199	612.340.776.720	621.227.905.163
Prioritas I	395.648.976.051	359.385.171.712	333.452.899.473	267.198.604.288	269.429.941.757	273.340.278.272
Prioritas II	377.664.931.685	343.049.482.088	318.295.949.497	255.053.213.184	257.183.126.222	260.915.720.168
Prioritas III	125.888.310.562	114.349.827.363	106.098.649.832	85.017.737.728	85.727.708.741	86.971.906.723



Kerangka pendanaan pembangunan daerah perlu memperhatikan kapasitas riil kemampuan keuangan. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa program pembangunan daerah dapat didanai dengan baik. Idealnya Kapasitas Riil suatu daerah harus mampu memenuhi kebutuhan program pembangunan (belanja langsung) dalam kerangka pendanaan. Tabel 7.2. menunjukkan proyeksi Kapasitas Riil beserta proporsi belanja langsung dan tidak langsung Kota Madiun.

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah selama periode 2019-2024 diproyeksikan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, kapasitas riil kemampuan keuangan sebesar Rp. 899.202.218.298 diprediksikan mengalami penurunan menjadi Rp. 742.624.007.849 tahun 2024. Penurunan ini sejalan dengan kondisi perekonomian yang mengalami penurunan sebagai dampak Covid19.

**Tabel 7.2**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun 2019 -2024**

	2019R	2020R	2021	2022	2023	2024
Kapasitas Riil Kemampuan keuangan Daerah	899.202.218.298,35	816.784.481.162,85	757.847.498.801,28	607.269.555.199,00	612.340.776.719,87	621.227.905.162,90
BELANJA OPERASI	839.939.781.749,69	816.358.776.801,53	939.902.569.530,00	959.324.726.172,00	966.093.763.849,82	970.640.962.947,82
Belanja Pegawai	440.222.382.579,38	441.683.138.649,00	478.425.879.983,00	485.258.678.433,00	499.476.757.711,09	507.118.752.104,07
Belanja Barang dan Jasa	366.995.675.620,23	349.882.673.481,00	425.059.231.547,00	436.594.527.461,00	440.960.472.735,61	444.532.252.564,77
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	15.603.619.810,08	11.938.091.671,53	13.765.706.000,00	13.572.686.278,00	10.600.267.983,12	8.300.009.830,78
Belanja Bantuan Sosial	17.118.103.740,00	12.854.873.000,00	22.651.752.000,00	23.898.834.000,00	15.056.265.420,00	10.689.948.448,20
BELANJA MODAL	307.800.742.344,06	191.011.897.074,57	197.738.448.365,00	165.395.287.479,00	170.380.303.984,26	175.695.652.598,13
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.460.669.520,00	47.752.974.268,64	50.500.943.323,00	28.304.237.988,00	30.568.577.027,04	32.708.377.418,93
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.758.211.485,26	38.202.379.414,91	56.229.035.949,00	39.281.239.379,00	40.066.864.166,58	41.268.870.091,58
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	184.022.541.935,80	100.281.245.964,15	88.974.356.300,00	95.695.457.752,00	97.609.366.907,04	99.561.554.245,18
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.888.082.876,00	4.775.297.426,86	2.034.112.793,00	2.114.352.360,00	2.135.495.883,60	2.156.850.842,44
Belanja Modal Aset Lainnya	3.671.236.527,00					
BELANJA TAK TERDUGA	118.877.262,00	6.321.154.916,00	3.181.125.198,00	5.279.740.259,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	118.877.262,00	6.321.154.916,00	3.181.125.198,00	5.279.740.259,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
BELANJA TRANSFER	651.920.000,00	700.062.000,00	-	-	-	-
Belanja Transfer Ke Daerah Lain	651.920.000,00	700.062.000,00	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.148.511.321.355,75	1.014.391.890.792,10	1.140.822.143.093,00	1.129.999.753.910,00	1.137.474.067.834,07	1.147.336.615.545,94
% Kapasitas Riil terhadap Belanja	78%	81%	66%	54%	54%	54%









Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp		
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	0 2 2	0 0 0	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	0,33	0,43	0,39	-	-	-	-	-	-	-	0,39	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	-	66,67%	50,00%	1.974.015.887.78	66,67%	82.687.756.549	75%	162.988.308.912	75%	99.820.515.624	75%	478.806.069.050		
1	0 2 3	0 0 0	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang sesuai standar	-	80%	89%	235.589.050	90%	279.413.000	91%	225.252.245	92%	232.009.812	92%	975.711.057	
1	0 2 4	0 0 0	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) sesuai Standar	-	85%	86%	178.376.700	87%	226.563.000	88%	233.359.890	89%	240.360.686	89%	902.553.576	
1	0 2 5	0 0 0	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang mengalami kenaikan strata	68,63%	60,38%	61,50%	1.130.949.900	62%	2.492.754.000	62,50%	1.157.179.250	63,00%	1.191.894.628	63,00%	11.526.646.878	
			Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman														
			Program Permendagri 13 Tahun 2006														
1	0 6 4	1 1 1	Program Pengelolaan RTH, PJU dan Permakaman	Persentase RTH, Penerangan Jalan dan Pemakaman yang dikelola	64,96	72,01	16.667.680.618								72,01	16.667.680.618	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp	
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Indeks Pengelolaan RTH, PJU dan Permakaman		74,59%										74,59%		
	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman															
	Program Permendagri 90 Tahun 2019															
1 0 0 4 5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100%	100%		100%	19.023.618.740	100%	22.490.417.230	100%	27.000.000.000	100%	28.000.000.000	100%	99.688.535.570	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat															
	Program Permendagri 13 Tahun 2006															
1 0 5 1 6	Program Pembinaan, Penertiban dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang diselesaikan	98,83%	97%	1.450.879.321									97%	1.450.879.321	Satuan Polisi Pamong Praja
1 0 5 1 7	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kota	1,3 orang tiap RT	1,3 orang tiap RT	287.772.906									1,3 orang tiap RT	287.772.906	
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat															
	Program Permendagri 90 Tahun 2019															
1 0 5 2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Ketertiban	98%	97%		97%	4.683.621.000	97%	5.117.465.000	97%	7.587.413.000	97%	5.232.413.000	97%	22.565.746.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp		
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota															
Urusan Sosial																	
Program Permendagri 13 Tahun 2006																	
1	0	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			Program Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani	100	100	3.155.942.559								100	3.155.942.559	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial																	
Program Permendagri 90 Tahun 2019																	
1	0	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial	-	-	-	90%	2.210.456.099	3.860.177.515	4.375.378.420	4.812.916.262	19.260.071.368				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Persentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	-	-	-	50%		58%	66%	66%					
1	0	6	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	-	-	18,7%	1.508.844.750	1.742.901.123	2.049.045.215	2.253.949.737	6.045.896.075					
				Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	-	-	-	100%		100%	100%	100%					
1	0	6	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	-	-	100%	9.360.726.880	11.312.409.780	12.570.286.850	13.305.949.240	46.549.372.750					

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp		
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																	
Urusan Tenaga Kerja																	
Program Permendagri 13 Tahun 2006																	
2	0	5	1	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	79	73,04%	-	-	-	-	-	-	-	73,04%	350.882.216	Dinas Tenaga Kerja
					Persentase lulusan pelatihan yang mempunyai sertifikat kompetensi dasar	98	100	-	-	-	-	-	-	100			
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja																	
Program Permendagri 90 Tahun 2019																	
2	0	7	0	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Dilatih	21,75%	0,69%	-	23%	23%	-	-	-	23%	3.817.970.730	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
						Persentase jumlah peserta pelatihan yang berbasis kompetensi	-	-	-	20%	418.950.040	25%	862.016.290	30%			1.345.000.000
2	0	7	5	Program Hubungan Industrial	Persentase Penurunan Kasus-kasus Perselisihan Hubungan Industrial	-	-	-	10%	10%	-	-	-	10%	7.949.921.450	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
						persentase perusahaan yang mengesahkan peraturan perusahaan	-	-	-	16%	1.682.439.130	16%	1.719.214.240	16%			2.274.134.040



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp			
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Urusan Perhubungan																		
Program Permendagri 13 Tahun 2006																		
0	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	3.010.026.500	-	-	-	-	-	-	-	100%	3.010.026.500	Dinas Perhubungan	
Urusan Komunikasi dan Informatika																		
Program Permendagri 13 Tahun 2006																		
2	2	1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Sasaran Penyebaran Informasi Publik	75	75	5.585.257.703	-	-	-	-	-	-	-	75	5.585.257.703	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	2	1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Pelayanan Publik yang sudah terintegrasi	25	33,04	9.342.188.500	-	-	-	-	-	-	-	33,04	9.342.188.500		
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika																		
Program Permendagri 90 Tahun 2019																		
2	1	0	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase OPD yang memenuhi standart layanan informasi publik	-	75%	-	75%	4.619.278.000	77%	4.788.605.000	80%	5.500.000.000	82%	5.900.000.000	82%	20.807.883.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	1	0	Program Aplikasi Informatika	Nilai Domain Layanan SPBE Administrasi Pemerintahan	-	-	-	3,6 skor	-	-	-	-	-	-	3,6 skor	-		
				Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh	100%	100%	-	100%	9.760.450.600	100%	10.587.483.000	-	11.510.000.000	-	11.860.000.000	100%	43.717.933.600	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp		
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Dinas Kominfo															
		Persentase perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	-	-	-	100%		100%		100%		100%		100%			
		Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah															
		Program Permendagri 13 Tahun 2006															
2	2 1 1 1	1 5 1 1	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	98,05	98,7	612.897.052	-	-	-	-	-	-	98,7	612.897.052	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro	
2	2 1 1 1	1 6 1 1	Program Pengembangan Sistem Pendukung Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan usaha mikro	0,4	0,42	505.342.770	-	-	-	-	-	-	0,42	505.342.770		
		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah															
		Program Permendagri 90 Tahun 2019															
2	1 7	0 5	Program Pendidikan dan Latihan	Persentase koperasi bersertifikat NIK	0	81,29%	-	80,13%	750.310.000	86,50%	500.318.900	-	773.058.000	773.058.000	86,50%	2.796.744.900	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp		
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Perkoperasian	Persentase jumlah koperasi yang disetujui permohonan bersertifikat NIK	-	-	-	75,0%		75,0%		75,0%		75,0%		75,0%			dan Menengah
2	1	0	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro terfasilitasi yang beromzet naik	-	-	7%	829.985.000	7%	309.850.000	-	715.000.000	-	715.000.000	7%	2.569.850.000	
				Persentase Usaha Mikro dibina yang beromzet naik	-	-	7%		7%		7,33%	715.000.000	8%	715.000.000	8%		
Urusan Kepemudaan dan Olah Raga																	
Program Permendagri 13 Tahun 2006																	
2	2	1	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Jumlah Pemuda Berprestasi yang dikirim kompetisi	16	2 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga
				Jumlah Atlit yang ikut kejuaraan di tingkat Provinsi dan Nasional	189	124 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.640.940.745	
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga																	
Program Permendagri 90 Tahun 2019																	
2	1	0	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah medali yang diraih di bidang olahraga	50 medali	79 medali	-	33 medali	33 medali	35 medali	35 medali	35 medali	35 medali	265 medali	265 medali	10.136.838.550	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga
Urusan Kebudayaan																	
Program Permendagri 13 Tahun 2006																	
2	2	1	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Kekayaan Budaya yang dipentaskan	31,6	4%	1.901.047.967	-	-	-	-	-	-	-	-	1.901.047.967	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan,





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp		
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Program Permendagri 90 Tahun 2019																
3	303	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar sesuai standar	-	-	5,88%											
			Persentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	0	0	100%	8.242.965.872	100%	6.261.231.818	100%	3.256.000.000	100%	3.256.000.000	100%	29.885.229.000		Dinas Perdagangan
	Unsur Staf																
	Program Permendagri 13 Tahun 2006																
4	401	Program Penataan Daerah Otonom Baru	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Kepala daerah yang tepat Syarat	6 dokumen	6 dokumen		817.968.835							6 dokumen	817.968.835		Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pemerintahan Umum)
			Penyampaian LKPj Tepat Waktu	tepat waktu										tepat waktu			
4	407	Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama	Persentase Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi	100	100		1.018.377.035							100	1.018.377.035		Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat)
4	402	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Produk Hukum yang berkualitas	100	100%		847.826.505							100%	847.826.505		Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
4	403	Program Pengembangan Kinerja dan Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Capain Kinerja (LKj Perangkat Daerah) Bernilai Sangat Baik (≥100)	79,41	94,12%		534.955.164							94,12%	534.955.164		Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)







Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp		
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4 4 0 4	1 Program Perencanaan Fisik dan Sarana Prasarana Kota	Persentase Capaian target program pembangunan bidang prasarana wilayah	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	515.325.581	
		Persentase Dokumen Perencanaan pembangunan prasarana wilayah yang dapat dimanfaatkan	100%	-	515.325.581	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-		
Perencanaan																	
Program Permendagri 90 Tahun 2019																	
5 0 1	2 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi sesuai ketentuan	100%	100%	-	100%	1.579.333.325	100%	1.317.008.885	100%	1.669.300.135	100%	1.669.300.135	100%	6.857.358.025		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan																	
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan																	
Program Permendagri 13 Tahun 2006																	
4 4 0 6	1 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	Persentase Tercukupinya Usulan Diklat Aparatur	100	113%	1.642.075.075	-	-	-	-	-	-	-	-	113%	1.642.075.075	Badan Kepegawaian Daerah	
4 4 0 6	1 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase pengembangan dan pembinaan ASN	99,6	112%	814.211.395	-	-	-	-	-	-	-	-	112%	814.211.395		
4 4 0 6	1 Program Penataan Aparatur	Persentase Penempatan PNS Sesuai SKM	103,24	96%	288.459.697	-	-	-	-	-	-	-	-	96%	288.459.697		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp	
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Kepegawaian															
	Program Permendagri 90 Tahun 2019															
503	02	Program Kepegawaian Daerah	Nilai IKM Pelayanan Kepegawaian	87,97	87,62	87,52	2.032.523.200	87,6	2.644.572.260	87,7	2.775.000.000	87,7	2.800.000.000	87,7	10.636.280.960	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Pendidikan dan Pelatihan															
	Program Permendagri 90 Tahun 2019															
504	02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase peningkatan kapasitas sesuai dengan keahlian dan kompetensi	-	-	100%	2.648.819.070	-	4.426.619.390	-	4.600.000.000	-	4.600.000.000	100%	19.998.851.865	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Persentase Realisasi Pengembangan SDM	-	-	10%		12%		13%		14%	14%			
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan															
	Penelitian dan Pengembangan															
	Program Permendagri 13 Tahun 2006															
4407	01	Program Pengembangan Kajian dan Penelitian	Persentase hasil penelitian/kajian yang dapat dimanfaatkan	100%	100%	199.688.047								100%	199.688.047	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penelitian dan Pengembangan															
	Program Permendagri 90 Tahun 2019															
505	02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	persentase hasil penelitian/kajian yang dapat dimanfaatkan	100%	100%		727.489.507	100%	874.737.757	100%	1.220.033.946	100%	1.220.033.946	100%	4.271.082.145	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp		
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4	4 0 9	1	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam RKPD	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	198.987.534	Kecamatan Taman
			Persentase Peserta yang Memberikan Usulan	100%	198.987.534	-	-	-	-	-	-	-	-	100%			
4	4 0 9	1	Program Dana Kelurahan	Indek Perkembangan Kelurahan	0,73	100%	5.629.024.604	-	-	-	-	-	-	-	100%	5.629.024.604	
Unsur Kewilayahan																	
Kecamatan																	
Program Permendagri 90 Tahun 2019																	
7	7 0 1	0 3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 usulan	18 usulan	-	18 usulan	18 usulan	-	-	-	-	18 usulan	13.421.306.895	Kecamatan Kartoharjo	
			Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan Kartoharjo	-	100%	-	100%	4.028.206.193	3.052.276.276	100%	3.465.000.000	100%	3.480.750.000	100%			
7	7 0 1	0 3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	-	-	18 usulan	18 usulan	-	-	3.433.080.378	-	3.447.234.397	18 usulan	13.663.323.270	Kecamatan Manguharjo	
			Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi	-	100%	100%	4.743.071.967	2.644.100.425	100%	100%		100%		100%			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp	
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan Manguharjo														
7	0 1 3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	90 usulan	90 usulan		18 usulan		18 usulan		-		-		18 usulan		
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan Taman		100%		100%	3.373.446.350	100%	3.210.061.090	100%	3.370.564.145	100%	3.539.092.352	100%	5.305.579.331	Kecamatan Taman
PRIORITAS I TOTAL Rp.					341.376.427.780	557.689.380.055	533.600.798.818	539.560.122.056	551.299.788.313	2.523.526.516.988						
% Terhadap Belanja Daerah						49	42	39	39							
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp	
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
PRIORITAS II																
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																
Urusan Pendidikan																
Program Permendagri 13 Tahun 2006																
1	1 0 5 1	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	100%	100%	239.807.439									100%	239.807.439	Dinas Pendidikan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RIMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp		
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Persentase Sekolah Standar Nasional Pendidikan	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-		
1 0 8 1	1 1 1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar PAUD	106,70%	98.48%	4.703.194.291	-	-	-	-	-	-	-	98.48%	4.703.194.291		
1 0 9 1	1 1 1	Program Pendidikan NonFormal	Jumlah Lembaga yang terakreditasi	80	100%	464.060.253	-	-	-	-	-	-	-	100%	464.060.253		
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan																	
Program Permendagri 90 Tahun 2019																	
1 0 1 3	0 0 1	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Sekolah yang Berkurikulum SNP	100%	100%	-	100%	572.110.560	100%	3.480.307.628	100%	5.319.203.262	100%	5.324.203.262	100%	16.430.719.214	Dinas Pendidikan
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
Program Permendagri 13 Tahun 2006																	
1 0 3	1 1 3	Program Peningkatan Kualitas Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Kota	Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan	100	95,04	15.595.185.816	-	-	-	-	-	-	-	95,04	15.595.185.816		
1 0 3	1 1 3	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik	92,41	94.03%	57.038.311.374	-	-	-	-	-	-	-	94.03%	57.038.311.374		
1 0 3	1 1 3	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran/ Drainase/ Gorong-gorong	Persentase Panjang Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan air tidak tersumbat	89,75	90,40%	14.047.224.710	-	-	-	-	-	-	-	90,40%	14.047.224.710		
1 0 3	1 1 3	Program Pengendalian Banjir	Jumlah Titik/ Lokasi Banjir/ Genangan	12	12 Titik	7.217.269.810	-	-	-	-	-	-	-	12 Titik	7.217.269.810		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp	
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.063	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase Terlayannya air bersih	94			-	-	-	-	-	-	-	-			
1.003	Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Ketaatan Terhadap RTRW	100%	86%	736.311.193	-	-	-	-	-	-	-	-	86%	736.311.193	
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
Program Permendagri 90 Tahun 2019																
1.032	Program Pengelolaan Sumberdaya Air (SDA)	Persentase rawan banjir/genangan	-	-	-	20,05%	12.299.394.650	19,09%	8.369.843.440	18,47%	28.517.074.300	17,34%	31.368.781.730	17,34%	98.737.388.030	
1.033	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang terlayani kebutuhan air minum	-	-	-	100%		100%	101.669.000	100%	111.835.900	100%	123.019.490	100%	336.524.390	
1.036	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Panjang Drainase dalam Kondisi Baik	90,96%	90,40%	-	80,03%	22.274.002.000	80,06%	20.731.396.010	80,09%	48.653.618.200	80,12%	53.518.980.020	80,12%	165.621.452.220	
1.038	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan Gedung Sesuai Ketentuan	100%	100%	-	100%	20.857.814.000	100%	18.746.270.000	100%	25.922.380.000	100%	28.514.618.000	100%	98.616.248.000	
1.039	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan	100%	100%	-	100%	19.966.147.160	100%	14.499.606.270	100%	21.178.289.462	100%	23.296.118.408	100%	81.160.898.290	
1.030	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dalam Kondisi Mantab	93,64%	94,03%	-	94,50%	58.330.391.462	95,00%	49.495.103.351	95,50%	109.548.668.724	96,00%	120.503.535.596	96,00%	384.418.242.032	
1.031	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Pelaku jasa Konstruksi yang memenuhi standart	-	-	-	47,68%	500.000.000	62,83%	540.000.000	77,98%	594.000.000	94,95%	653.400.000	94,95%	2.287.400.000	

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp		
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		kompetensi															
1	0 3 2	1 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	100%	100%		100%	1.280.982.460	100%	1.880.000.000	100%	2.068.000.000	100%	2.274.800.000	100%	7.722.800.000	
		Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman															
		Program Permendagri 13 Tahun 2006															
1	1 0 5 4	1 Program Lingkungan Sehat Perumahan Permukiman	Persentase Rumah tinggal layak huni dan bersanitasi	99,26	99,65		1.969.696.172							99,65	1.969.696.172	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Indeks Perumahan Permukiman			99,65%									99,65%			
		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman															
		Program Permendagri 90 Tahun 2019															
1	0 4 2	0 Program pengembangan Perumahan	Persentase Pengembangan Perumahan	100%	100%		1.292.650.000	100%	2.745.911.000	100%	4.900.000.000	100%	4.900.000.000	100%	13.838.561.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1	0 4 3	0 Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman yang tidak Kumuh	100%	98,10%		7.283.612.424	99%	5.618.815.000	99,50%	6.720.000.000	100%	6.920.000.000	100%	26.542.427.424		
		Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat															
		Program Permendagri 13 Tahun 2006															
1	1 0 5 5	1 Program Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah	Persentase kasus Penegakan Perda yang diselesaikan	100	100		276.423.739							100	276.423.739	Satuan Polisi Pamong Praja	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp		
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	dan Peraturan Walikota																
1 0 5	1 1 1 Program Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)	100%	100	1.193.872.410	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1.193.872.410		
1 0 5	1 1 1 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Korban Bencana Alam yang Tertangani	100	100%	1.485.457.021	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.485.457.021	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Persentase Tingkat Pemenuhan atau Kecukupan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	100	100%		-	-	-	-	-	-	-	-	100%			
		Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	-	100%		-	-	-	-	-	-	-	-	100%			
		Persentase Early Warning System (EWS) di daerah rawan bencana	-	100%		-	-	-	-	-	-	-	-	100%			
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																
	Program Permendagri 90 Tahun 2019																
1 0 5	0 0 4 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	100%		100%	1.285.321.000	100%	1.289.528.000	100%	2.336.187.000	100%	2.361.187.000	100%	8.293.882.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp			
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	0	0	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Korban Bencana yang ditangani	100%	-	100%		100%		100%		100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
				Persentase Tingkat Pemenuhan atau Kecukupan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bencana	100%	-	100%	1.377.859.000	0%	1.717.005.000	0%	2.030.000.000	0%	2.275.000.000	0%	7.411.174.000		
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial																		
Program Permendagri 90 Tahun 2019																		
1	0	0	Program Penanganan Bencana	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	-	-	100%	344.885.800	100%	628.979.400	100%	859.284.765	100%	954.760.850	100%	2.787.910.815	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1	0	0	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	-	-	100%	103.194.134		186.106.080		213.236.600		236.929.556		475.720.016		
				Persentase Pengelolaan Taman makam Pahlawan dalam kondisi baik	-	-	100%		100%		100%		100%		100%			
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																		
Urusan Tenaga Kerja																		
Program Permendagri 13 Tahun 2006																		
2	2	1	Program Perlindungan dan Pengembangan Kelembagaan Ketenagakerjaan	Persentase perselsihan yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	98		100	712.873.503								100	712.873.503	Dinas Tenaga Kerja







Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp	
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			-	-	-	-		12,50%		22,43%		42,20%		42,20%		
2	0 8 7	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase pelaksanaan kegiatan perlindungan khusus anak	-	-	100%		-		-		-		100%		
			Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak	-	-	-	81.739.101	0,003	410.605.078	-	168.349.000	-	177.000.000	0,003	734.126.420	
			Persentase kasus kekerasan terhadap anak	-	-	-		0,04		0,04		0,04		0,04		
Urusan Pangan																
Program Permendagri 13 Tahun 2006																
2	2 0 5 3	1 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	95,4	95,04	-	-	-	-	-	-	-	-	95,04		
			Indeks Ketahanan Pangan	-	80,64	-	707.485.783	-	-	-	-	-	-	80,64	707.485.783	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan																
Program Permendagri 90 Tahun 2019																
2	0 9 3	0 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan	-	-	95,8		-		-		-		95,8		
			Persentase Angka Kecukupan Energi (%)	-	-	100%	1.287.926.000	100%	1.095.000.000	100%	1.287.200.000	100%	1.307.500.000	100%	4.977.626.000	
2	0 9	0 Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan dan Rawan Pangan	-	-	-		-		25%	60.000.000	22%	60.000.000	22%	120.000.000	
2	0 9 5	0 Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Peningkatan Sample Pangan Aman yang Teruji (%)	-	-	80	211.622.000	-	175.000.000	-	318.000.000	-	335.000.000	80	1.039.622.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp		
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Persentase Pangan Segar Aman yang Teruji (%)	-	-	-	80		80		80		80		80			
Urusan Pertanian																	
Program Permendagri 13 Tahun 2006																	
2	2	1	Program Pelayanan Pertanahan	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	109.354.539	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
0	5		Persentase Rekomendasi Ijin Pertanahan yang diterbitkan	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100			
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian																	
Program Permendagri 90 Tahun 2019																	
2	1	0	Program Pengelolaan Izin Lokasi	100%	0	0	85.000.000	100%	349.901.600	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	464.901.600	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
2	1	0	Prgram Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100%	100%	100%	-	100%	36.200.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	86.200.000		
2	1	0	Program Penatagunaan Tanah	100%	100%	100%	120.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	360.000.000		
Urusan Lingkungan Hidup																	
Program Permendagri 13 Tahun 2006																	
2	2	1	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	58,97	64,01	445.978.043	-	-	-	-	-	-	-	64,01	445.978.043	Dinas Lingkungan Hidup	
2	2	1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	44,7	53,19	747.189.821	-	-	-	-	-	-	-	53,19	747.189.821		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp			
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2	205	1	Program Penataan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	31,39	44,59	354.933.375	-	-	-	-	-	-	-	44,59	354.933.375		
2	205	1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	74,9	74,97	5.528.779.345	-	-	-	-	-	-	-	74,97	5.528.779.345		
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup																		
Program Permendagri 90 Tahun 2019																		
2	11	0	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Data Perencanaan LH yang Tersedia	61,54%	64,10%	-	69,23%	397.958.000	71,79%	419.892.000	79,49%	583.000.000	79,50%	642.000.000	79,50%	2.230.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	44,89%	53,19%	-	48%	1.242.680.365	49%	1.161.745.000	50%	1.760.000.000	50,10%	1.937.000.000	50,10%	6.666.000.000	
2	11	4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	-	-	-	96,83	125.500.000	96,83	56.500.000	-	200.000.000	225.000.000	96,83	675.000.000		
				Persentase jumlah spesies KEHATI Lokal Daerah	-	-	-	94,32%	-	94,32%	-	97,20%	100%	100%	100%	-		
2	11	5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	-	70,96	-	71,0	257.127.000	71,5	41.500.000	75%	200.000.000	78%	225.000.000	78%	640.000.000	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp	
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	1 1 0 1 6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	40%	44,59%	-	52,90%	336.516.400	64,70%	681.549.200	76,47%	532.000.000	88,20%	585.000.000	88,20%	2.038.762.500	
2	1 1 0 1 8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	-	100%	-	90%	654.550.000	100%	670.000.000	100%	851.400.000	100%	1.040.000.000	100%	3.439.400.000	
2	1 1 0 1 0	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	-	100%	-	90%	85.000.000	100%	94.000.000	100%	104.000.000	100%	114.000.000	100%	397.000.000	
2	1 1 1 1 1	Program Pengelolaan Persampahan	-	74,97%	-	74%	8.576.232.000	73%	7.951.800.000	72%	47.928.000.000	71%	61.190.000.000	71%	127.268.970.000	
		Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil														
		Program Permendagri 13 Tahun 2006														
2	2 0 5 6	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	81,03	82%	206.825.853	-	-	-	-	-	-	-	-	82%	206.825.853	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	2 0 6 6	Program Penataan dan Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	-	92,00%	1.332.303.658	-	-	-	-	-	-	-	-	92,00%	1.332.303.658	





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp	
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1.4.2	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Angka UKP (Usia Kawin Pertama) < 20 tahun	5,58%	4,95%	≤ 4.8%	-	-	≤ 4.7%	755.101.420	-	686.573.713	-	707.170.924	≤ 4.7%	2.375.972.396	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Meningkatnya Jumlah SSK	-	4 SSK	-	4 SSK	300.956.040	7 SSK		8 SSK		9 SSK	9 SSK			
		Meningkatnya Kampung KB yang berstandar paripurna	-	3 Kampung KB	-	3 Kampung KB		4 Kampung KB		5 Kampung KB		6 Kampung KB	6 Kampung KB			
2.1.4.3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Menurunnya Unmet Need	4.2%	11,60%	16,93%	-	2.727.576.000	8,00%	2.554.439.400	7,50%	2.867.064.740	7,00%	2.953.076.682	7,00%	11.108.317.322	
2.1.4.4	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya kepesertaan anggota Tribina PUS yang ber-KB	79,10%	82,25%	80,25%	-	257.495.200	81,00%	1.331.867.514	82,00%	784.633.813	83,00%	808.172.827	83,00%	3.135.200.234	
Urusan Perhubungan																
Program Permendagri 13 Tahun 2006																
2.2.0.9	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas	74	80	-	3.860.798.508	-	-	-	-	-	-	-	80	3.860.798.508	Dinas Perhubungan
		Persentase Perlengkapan Jalan	58%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58%		
2.2.0.9	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	420.660	539.916 orang	-	1.760.306.299	-	-	-	-	-	-	-	539.916 orang	1.760.306.299	
		Kinerja angkutan Umum	38%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38%		
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan																
Program Permendagri 90 Tahun 2019																
2.2.5.2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta fasilitas perlengkapan	-	-	84%	8.363.009.965	-	88%	9.178.999.000	92%	10.562.531.500	96%	10.562.531.500	96%	38.719.362.180	Dinas Perhubungan







Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp		
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	2 1 4	1 5	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi	50	60	257.773.734	-	-	-	-	-	-	-	60	257.773.734	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik																
			Program Permendagri 90 Tahun 2019														
2	2 0	0 2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	80	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	313.278.000	100%	499.250.000	550.000.000	550.000.000	100%	1.912.528.000			
				Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	-	-	-	1	1	1	1	1	1				
	Urusan Persandian																
			Program Permendagri 13 Tahun 2006														
2	2 1 5	1 5	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase PD yang mengimplementasikan keamanan informasi	8,8	25	486.210.682	-	-	-	-	-	-	25	486.210.682	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian																
			Program Permendagri 90 Tahun 2019														
2	2 1	0 2	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi	-	-	-	II (dua) Level	-	-	-	-	-	II (dua) Level	-	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	100%	100%	100%	195.502.695	100%	350.000.000	500.000.000	600.000.000	100%	1.645.502.695			





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp		
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	2 3 3	0	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	-	-	36%	-	37%	100.000.000	37%	260.000.000	38%	280.000.000	38%	640.000.000	
Urusan Kearsipan																	
Program Permendagri 13 Tahun 2006																	
2	2 1 8	1 5	Program Penyelamatan, Peningkatan SDM dan Layanan Arsip Daerah	Jumlah Berkas Arsip yang dikelola	55.323 berkas	56.300 berkas	-	-	-	-	-	-	-	-	56.300 berkas	426.396.352	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Jumlah Unit Daerah Kearsipan yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	-	5 unit	-	-	-	-	-	-	-	5 unit			
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan																	
Program Permendagri 90 Tahun 2019																	
2	2 4	0 2	Program Pengelolaan Arsip	Jumlah berkas arsip yang dikelola	57.615 berkas	60.004 berkas	59.500 berkas	-	-	-	-	-	-	59.500 berkas	2.987.956.945	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
				Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	-	82%	84%	436.331.945	86%	651.625.000	88%	900.000.000	90%	1.000.000.000			90%



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp	
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2 2 4 0 3	Program Perlindungan dan Penyelamatan arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	-	8,2	-	8,2	-	8,4	149.291.000	8,6	150.000.000	8,8	200.000.000	8,8	499.291.000	
Urusan Pemerintahan Pilihan																
Urusan Kelautan dan Perikanan																
Program Permendagri 13 Tahun 2006																
3 3 0 5 1	Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	Persentase Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan	1	1	496.518.752	-	-	-	-	-	-	-	-	1	496.518.752	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Rasio Pendapatan pelaku usaha perikanan dengan biaya produksi	-	2,25		-	-	-	-	-	-	-	-	2,25		
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan																
Program Permendagri 90 Tahun 2019																
3 2 5 4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Presentase Peningkatan Produksi Perikanan	-	-	-	5%	296.130.000	-	395.000.000	-	630.000.000	-	1.120.000.000	5%	2.441.130.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp		
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah total produksi perikanan budidaya (ton)	274,8	-	275,3	-	277	-	280	-	285	-	290	-	290	
3	2 5 5	0	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah total produksi perikanan tangkap (ton)	0	-	0	-	89	80.000.000	-	89	115.000.000	89	120.000.000	89	315.000.000
3	2 5 6	0	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan	-	-	-	1%	459.215.000	-	422.732.000	-	470.000.000	-	490.000.000	1%	1.869.215.600
			Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	15,4	-	15,5	-	15,6	-	15,7	-	15,8	-	15,9	-	15,9	
Urusan Pariwisata																	
Program Permendagri 13 Tahun 2006																	
3	3 0 2	1 5 2	Program Pengembangan Pemasaran dan Destinasi Pariwisata	Jumlah Promosi dan Peningkatan sumberdaya pariwisata	8	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	843.086.338
			Persentase Peningkatan Promosi yang dilaksanakan	25	-	2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2%	
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata																	
Program Permendagri 90 Tahun 2019																	
3	2 6 2	0	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	2 destinasi	-	2 destinasi	-	2 destinasi	265.000.000	-	2 destinasi	489.048.300	-	453.750.000	2 destinasi	1.695.000.000
			Persentase peningkatan destinasi wisata yang ditetapkan	-	-	-	0%	-	10%	-	-	20%	-	30%	-	30%	
3	2 6 3	0	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	5 event	-	3 event	-	4 event	459.149.000	-	4 event	546.928.750	-	907.500.000	4 event	3.390.000.000





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp		
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	2	0	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Lahan Aman Bencana Pertanian (%)	0	0	70	171.200.400	72	111.750.000	74	350.000.000	76	400.000.000	76	1.032.950.400	
3	2	0	Program Perizinan usaha Pertanian	Persentase kelompok tani yang memiliki Izin Usaha Pertanian (%)	0	0	-	-	10	50.000.000	12	100.000.000	15	150.000.000	15	300.000.000	
3	2	0	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Jumlah SDM Pertanian Terlatih (%)	0	0	15	131.363.000	20	148.837.400	20	800.000.000	20	800.000.000	20	1,885,840,400	
Urusan Perdagangan																	
Program Permendagri 13 Tahun 2006																	
3	3	0	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengawasan Perdagangan Non Pasar Rakyat	Persentase Pertumbuhan Perdagangan Non Pasar Rakyat	-	1,76%	861.719.402	-	-	-	-	-	-	-	1,76%	861.719.402	Dinas Perdagangan
3	3	0	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Jumlah Barang Kena Cukai ilegal	0	0	46.401.600	-	-	-	-	-	-	0	46.401.600		
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan																	
Program Permendagri 90 Tahun 2019																	
3	3	0	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase perusahaan yang memperbarui perijinan	100%	100%	100%	388.870.000	100%	107.083.000	100%	155.000.000	100%	155.000.000	100%	600.100.000	Dinas Perdagangan
3	3	0	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Bahan Pokok dengan Harga Stabil	100%	100%	100%	77.966.680	-	77.500.800	-	196.000.000	-	240.000.000	-	867.724.000	
				Persentase pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan barang penting	100%	100%	100%	-	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab			
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp				
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
3	3	0	6	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase UTTP dan BDKT yg telah melakukan tera dan pengawasan BDKT	100%	100%	-	100%	342.050.000	100%	216.946.035	100%	287.000.000	100%	287.000.000	100%	1.102.019.000	
3	3	0	7	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah produk perdagangan yang dipromosikan	-	15 produk	-	15 produk	379.622.600	-	243.423.850	-	726.000.000	-	726.000.000	15 produk	3.849.545.000	
					Persentase produk perdagangan yang dipromosikan	100%	100%	-	100%		100%		100%		100%	100%			
Urusan Perindustrian																			
Program Permendagri 13 Tahun 2006																			
3	3	0	5	7	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Persentase IKM yang berstandart	17,09	19,63%	440.979.658	-	-	-	-	-	-	-	19,63%	440.979.658	
3	3	0	6	7	Program Pembinaan Industri	Persentase IKM yang melaksanakan GMP (Good Manufacturing Practice)	80	100%	41.523.000	-	-	-	-	-	-	-	100%	41.523.000	Dinas Tenaga Kerja
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian																			
Program Permendagri 90 Tahun 2019																			
3	3	1	2	0	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase tersedianya Dokumen Induk Perindustrian	-	-	-	100%	563.351.320	100%	364.324.050	100%	615.000.000	100%	615.000.000	2.945.151.320	
						persentase IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat	-	-	-	2,5%		5%		5%		5%			Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3	3	1	4	0	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang mengikuti Publikasi Produk	-	-	-	12,80%	407.053.895	12,80%	591.025.135	12,80%	610.000.000	12,80%	610.000.000	2.336.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp	
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		persentase IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat	-	-	-	10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		
	Urusan Transmigrasi															
	Program Permendagri 13 Tahun 2006															
3058	Program Ketransmigrasian	Persentase Pendaftar transmigrasi yang terfasilitasi	80%	80%	19.425.615	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	19.425.615	Dinas Tenaga Kerja
	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi															
	Program Permendagri 90 Tahun 2019															
3323	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Pendaftar Transmigrasi yang Terfasilitasi	-	-	-	3%	13.500.000	-	14.850.000	-	31.335.000	-	34.968.500	-	94.653.500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase Penduduk yang mendapatkan sosialisasi ketransmigrasian	-	-	-	-	-	20%	-	40%	-	60%	-	80%	-	
	Unsur Staf															
	Program Permendagri 13 Tahun 2006															
4051	Program Peningkatan Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pengadaan barang/ jasa sesuai regulasi	100	32,11	493.425.447	-	-	-	-	-	-	-	-	32,11	493.425.447	Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pembangunan)
		Persentase jumlah pengadaan barang/jasa yang terealisasi	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp		
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4 0 4 1	2 Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Persentase OPD yang melaksanakan kegiatan sesuai jadwal	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	105.974.436	
		Persentase jumlah tender yang terealisasi	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	
4 0 1 1	2 Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Pemerintah Daerah	Jumlah Perjanjian Kerjasama	5 kerja sama	10 kerjasama	186.458.697	-	-	-	-	-	-	-	-	10 kerjasama	186.458.697	Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pemerintahan Umum)	
4 0 9 1	1 Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Persentase Jumlah Kegiatan sosialisasi Bidang Cukai yang dilaksanakan	100	100	77.840.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	77.840.000	Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat)	
4 0 5 1	2 Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ekonomi	Persentase kelompok sosial ekonomi yang difasilitasi	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-		
4 0 8 1	1 Program Stabilisasi Ekonomi Daerah	Tingkat Inflasi	4%	1,8	189.597.882	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	189.597.882		
4 0 6 1	1 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Kedinasan Pimpinan	100	105,87%	593.745.402	-	-	-	-	-	-	-	-	105,87%	593.745.402	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)	
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan																	
Sekretariat Daerah																	
Program Permendagri 90 Tahun 2019																	





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp		
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Sekretariat DPRD																	
Program Permendagri 90 Tahun 2019																	
4	0 2	0 2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan Tugas dan Fungsi	81,29	90,42	79	12.826.552.255	80	14.587.486.385	81	19.318.960.080	82	22.288.971.373	82	72.546.774.111	Sekretariat DPRD
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan																	
Perencanaan																	
Program Permendagri 90 Tahun 2019																	
5	0 1	0 3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase capaian target program pembangunan daerah	-	-	100%	1.452.140.380	-	1.887.650.000	-	2.376.650.000	-	2.376.650.000	-	8.279.198.640	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan																	
Keuangan																	
Program Permendagri 13 Tahun 2006																	
4	4 0 5	4 1 7	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase penerbitan SP2D tepat waktu	100%	100%	217.944.427	-	-	-	-	-	-	-	100%	217.944.427	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4	4 0 5	4 1 5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	968.759.403	-	-	-	-	-	-	-	Tepat Waktu	968.759.403	
				Presentase OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai SAP	100%	100%		-	-	-	-	-	-	100%			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp	
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4 0 5	1 6	Program Pengelolaan Anggaran Daerah	Pengesahan Perda APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	-	-	-	-	-	-	-	-	Tepat Waktu	676.717.415	
			Pengesahan Dokumen DPA dan DPPA	Tepat Waktu	Tepat Waktu	-	-	-	-	-	-	-	-	Tepat Waktu		
4 0 5	1 8	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Kontribusi pengelolaan aset terhadap PAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Presentase keakuratan data aset OPD	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	2.790.892.165	
			Presentase peningkatan Nilai aset pemda	-	6%	-	-	-	-	-	-	-	-	6%		
			Presentase aset yang diasuransikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4 0 5	1 9	Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Ketersediaan Basis Data Pajak daerah	100	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	211.988.000	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah penerimaan pajak daerah	-	118,26%	-	-	-	-	-	-	-	-	118,26%		
4 0 5	2 0	Program Peningkatan Manajemen Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak daerah	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	453.729.000	Badan Pendapatan Daerah
			Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		
Keuangan																
Program Permendagri 90 Tahun 2019																
5 0 2	0 2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	100%	100%	100%	60.340.673.185	100%	11.270.987.599	100%	7.505.329.560.00	100%	7.510.329.650.00	100%	73.121.335.148	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 0 2	0 3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Aset yang berkondisi baik	100%	100%	100%	3.748.942.400	100%	2.099.685.020	100%	3.337.189.000.00	100%	3.337.189.000.00	100%	13.348.756.040	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp	
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50024	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pajak Asli Daerah	-	-	-	1,5%	616.777.500	-	1.200.439.000	-	1.447.675.000	-	1.499.358.000	1,5%	4.995.628.000	Badan Pendapatan Daerah
		Persentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak	10%	10%	10%	10%		10%		10%		10%				
		Peningkatan Capaian Penagihan Pajak Daerah	37%	41%	41%	41%		42%		43%		43%				
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan																
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan																
Program Permendagri 13 Tahun 2006																
406	405	1	Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kepegawaian	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian sesuai SOP	99	145%	197.835.501	-	-	-	-	-	-	145%	197.835.501	Badan Kepegawaian Daerah
406	406	1	Program Fasilitas Kesejahteraan PNS	Persentase penyelesaian SK terkait kesejahteraan PNS yang sesuai SOP	107,4	108%	95.467.940	-	-	-	-	-	-	108%	95.467.940	
Unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah																
Program Permendagri 13 Tahun 2006																
403	405	1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase OPD yang maturitas SPI nya level 3	25	25	1.341.655.581	-	-	-	-	-	-	25	1.341.655.581	Inspektorat
				Persentase Temuan Hasil pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	-	96,42%		-	-	-	-	-	-	96,42%		
403	406	1	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase aparatur pengawas yang bersertifikat	100%	100%	372.981.909	-	-	-	-	-	-	100%	372.981.909	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp		
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4 4 0 3	1	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Sisdur Pengawasan	Persentase dokumen kebijakan dan sisdur pengawasan yang terpenuhi	100%	100%	5.996.400	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	5.996.400	
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan																	
Inspektorat Daerah																	
Program Permendagri 90 Tahun 2019																	
6 0 1	0 2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3	-	25%	-	30%	848.332.295	35%	1.237.019.000	40%	1.428.000,80	45%	1.533.500,00	45%	4.728.339.000	Inspektorat
6 0 1	0 3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan serta Asistensi yang Terpenuhi	-	100%	-	100%	1.019.621.160	100%	1.138.997.000	100%	1.327.550,00	100%	1.387.500,00	100%	4.738.923.000	
Fungsi Penunjang Kecamatan																	
Program Permendagri 13 Tahun 2006																	
4 4 0 9	0 5	Program Penyelenggaraan Kelurahan	Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100%	100%	5.114.048.355	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	5.114.048.355	Kecamatan Kartoharjo
4 4 0 9	1 6	Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketentraman Ketertiban Umum	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100	129.785.839	-	-	-	-	-	-	-	-	100	129.785.839	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp		
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4 0 9	1 0 5	Program Penyelenggaraan Kelurahan	Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100%	100	5.193.265.339	-	-	-	-	-	-	-	100	5.193.265.339	Kecamatan manguharjo	
4 0 9	1 0 6	Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketertarikan Ketertiban Umum	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	129	137.775.000	-	-	-	-	-	-	-	129	137.775.000		
4 0 9	1 0 5	Program Penyelenggaraan Kelurahan	Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100%	100	4.540.005.727	-	-	-	-	-	-	-	100	4.540.005.727	Kecamatan Taman	
4 0 9	1 0 6	Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketertarikan Ketertiban Umum	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100	94.685.512	-	-	-	-	-	-	-	100	94.685.512		
Unsur Kewilayahan																	
Kecamatan																	
Program Permendagri 90 Tahun 2019																	
7 0 1	0 2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kartoharjo	87,56	87,7	-	87,7	7.476.445.846	87,75	6.902.855.400	87,8	6.118.927.554	87,85	6.424.851.850	87,85	25.515.710.436	Kecamatan Kartoharjo
7 0 1	0 4	Program Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum	persentase pengkoordinasian ketertarikan dan ketertiban umum di kecamatan	100%	100%	-	100%	171.476.620	100%	700.192.835	100%	770.212.119	100%	847.233.330	100%	3.707.258.105	







Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp		
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
8014	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Orkemas berbadan hukum		40%	-	45%		-		-		-		45%	1.366.317.150		
		Persentase Status Kelembagaan Orkemas	81,8%	72,91%	-	68%	272.985.000	71%	222.985.000	73%	363.343.000	77%	399.677.300	77%			
8015	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase koordinasi yg dilakukan dengan pemangku kepentingan	100%	100%	-	100%	536.633.650	100%	553.661.370	100%	735.875.052	100%	809.462.557	100%	2.699.006.929		
8016	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Konflik horisontal di dalam masyarakat	0 konflik	0 konflik	-	0 konflik	1.454.339.864	0 konflik	1.803.048.050	-	2.094.339.450	-	2.303.773.395	0 konflik	7.805.255.850		
		Persentase konflik yang terfasilitasi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
PRIORITAS II TOTAL Rp.					180.336.867.618		231.915.497.773		366.696.635.778		447.581.878.169		484.499.835.438		1.711.030.714.775		
% Terhadap Belanja Daerah							20		29		32		34				
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp		
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
PRIORITAS III																	
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																	
Urusan Pendidikan																	
Program Permendagri 13 Tahun 2006																	
001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	-	3.267.693.851	-	-	-	-	-	-	-	100%	3.267.693.851	Dinas Pendidikan	
002	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	-	454.161.000	-	-	-	-	-	-	-	100%	454.161.000		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp		
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
0	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	510.735.000	-	-	-	-	-	-	-	100%	510.735.000	
0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	43.619.666	-	-	-	-	-	-	-	100%	43.619.666	
Urusan Kesehatan																	
Program Permendagri 13 Tahun 2006																	
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	2.037.319.629	-	-	-	-	-	-	-	100%	2.037.319.629	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
0	0	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	241.003.270	-	-	-	-	-	-	-	100%	241.003.270	
0	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	0	
0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	236.846.187	-	-	-	-	-	-	-	100%	236.846.187	
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	1.149.200.000	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.149.200.000	Rumah Sakit Umum Daerah
0	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	709.511.400	-	-	-	-	-	-	-	100%	709.511.400	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp		
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan																	
Program Permendagri 90 Tahun 2019																	
1	0	0	2	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana/ Rumah Sakit Umum Daerah
							A skor	68.817.477.025	A skor	144.172.163.268	A skor	163.367.925.605	A skor	177.304.750.594	A skor	539.562.195.363	
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
Program Permendagri 13 Tahun 2006																	
0	0	0	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	2.547.836.748	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
							100%	100%	2.547.836.748								
0	0	0	2	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	1.182.086.523	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
							100%	100%	1.182.086.523								
0	0	0	3	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	149.347.797	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
							100%	100%	149.347.797								
0	0	0	4	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	24.155.280	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
							100%	100%	24.155.280								
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
Program Permendagri 90 Tahun 2019																	
1	0	0	3	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							A Skor	10.781.209.533	A Skor	10.888.336.546	A Skor	11.638.000.000	A Skor	12.801.800.000	A Skor	45.574.481.500	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp			
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																	
	Program Permendagri 13 Tahun 2006																	
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	1.618.412.784,00								100%	1.618.412.784	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
0	0	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	1.418.155.843,00								100%	1.418.155.843		
0	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	2.985.645.750,00								100%	2.985.645.750		
0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	23.031.285,0000								100%	23.031.285		
	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																	
	Program Permendagri 90 Tahun 2019																	
1	0	0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah				A skor	9.312.818.310	A skor	12.021.276.047	A skor	12.482.880.000	A skor	12.613.880.000	A skor	46.430.854.357	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Urusan Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat																	
	Program Permendagri 13 Tahun 2006																	
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	2.648.978.709								100%	2.648.978.709	Satuan Polisi Pamong Praja	
0	0	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	438.981.387								100%	438.981.387		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp			
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
0	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	666.155.500	-	-	-	-	-	-	-	100%	666.155.500		
0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	84.332.080	-	-	-	-	-	-	-	100%	84.332.080		
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	436.894.218	-	-	-	-	-	-	-	100%	436.894.218	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
0	0	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	172.465.421	-	-	-	-	-	-	-	100%	172.465.421		
0	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	23.577.338	-	-	-	-	-	-	-	100%	23.577.338		
0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	18.776.380	-	-	-	-	-	-	-	100%	18.776.380		
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																		
Program Permendagri 90 Tahun 2019																		
1	0	0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	-	-	-	A skor	10.019.592.000	A skor	9.609.780.000	A skor	13.747.287.000	A skor	14.052.268.000	A skor	51.887.828.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	0	0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	-	-	-	A Skor	1.950.082.000	A Skor	2.082.695.000	A Skor	2.280.000.000	A Skor	2.456.000.000	A Skor	8.857.767.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp			
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Urusan Sosial																		
Program Permendagri 13 Tahun 2006																		
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	1.422.363.218	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.422.363.218	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
0	0	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	245.516.984	-	-	-	-	-	-	-	100%	245.516.984		
0	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-		
0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	64.748.000	-	-	-	-	-	-	-	100%	64.748.000		
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial																		
Program Permendagri 90 Tahun 2019																		
1	0	0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	-	-	-	A Skor	6.442.905.810	A Skor	6.830.143.535	A Skor	6.844.397.143	A Skor	8.214.537.455	A Skor	28.535.339.008	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																		
Urusan Tenaga Kerja																		
Program Permendagri 13 Tahun 2006																		
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	758.331.623	-	-	-	-	-	-	-	100%	758.331.623	Dinas Tenaga Kerja	
0	0	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	88.295.850	-	-	-	-	-	-	-	100%	88.295.850		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp			
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
0	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	
0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	19.452.572	-	-	-	-	-	-	-	100%	19.452.572	-	
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja																		
Program Permendagri 90 Tahun 2019																		
2	0	0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	-	-	-	A Skor	5.300.663.865	A Skor	5.238.330.795	A Skor	5.357.110.000	A Skor	5.981.831.000	A Skor	21.877.935.660	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Urusan Pangan																		
Program Permendagri 13 Tahun 2006																		
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	865.812.108	-	-	-	-	-	-	-	100%	865.812.108	-	
0	0	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	186.483.850	-	-	-	-	-	-	-	100%	186.483.850	-	
0	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	
0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	133.675.637	-	-	-	-	-	-	-	100%	133.675.637	-	
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan																		
Program Permendagri 90 Tahun 2019																		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp	
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2 0 0 9 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	-	-	-	A Skor	5.287.701.000	A Skor	5.339.979.000	A Skor	5.582.976.000	A Skor	5.901.774.000	A Skor	22.349.522.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
<b>Urusan Lingkungan Hidup</b>																
<b>Program Permendagri 13 Tahun 2006</b>																
0 0 0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	1.286.187.243	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.286.187.243	Dinas Lingkungan Hidup
0 0 0 2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	1.045.473.700	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.045.473.700	
0 0 0 3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	134.723.700	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	134.723.700	
0 0 0 4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	36.146.685	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	36.146.685	
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup</b>																
<b>Program Permendagri 90 Tahun 2019</b>																
2 1 1 0 1 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	-	-	-	A Skor	13.895.013.290	A Skor	16.042.269.915	A Skor	24.526.150.000	A Skor	26.762.525.000	A Skor	87.950.375.000	Dinas Lingkungan Hidup
<b>Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>																
<b>Program Permendagri 13 Tahun 2006</b>																
0 0 0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	1.333.142.665	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.333.142.665	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp			
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
0	0	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	248.902.352	-	-	-	-	-	-	-	100%	248.902.352		
0	0	3	Program - Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-			
0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	57.876.645	-	-	-	-	-	-	100%	57.876.645			
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																		
Program Permendagri 90 Tahun 2019																		
2	1	0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi Saking Perangkat Daerah	-	-	-	A Skor	6.472.406.250	A Skor	5.801.555.935	A Skor	6.572.058.965	A Skor	7.300.944.853	A Skor	26.549.062.114	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan Perhubungan																		
Program Permendagri 13 Tahun 2006																		
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	2.730.773.052	-	-	-	-	-	-	-	100%	2.730.773.052	Dinas Perhubungan	
0	0	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	1.006.554.701	-	-	-	-	-	-	100%	1.006.554.701			
0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	116.917.346	-	-	-	-	-	-	100%	116.917.346			
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan																		





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp			
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	930.275.729	-	-	-	-	-	-	-	100%	930.275.729	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro	
0	0	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	180.335.900	-	-	-	-	-	-	100%	180.335.900			
0	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-			
0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	42.937.880	-	-	-	-	-	-	100%	42.937.880			
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal																		
Program Permendagri 90 Tahun 2019																		
2	1	0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	-	-	-	A skor	5.085.389.120	A skor	5.420.298.000	A skor	5.893.386.800	A skor	6.629.000.000	A skor	23.503.893.920	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Urusan Kepemudaan dan Olah Raga																		
Program Permendagri 13 Tahun 2006																		
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	1.977.536.155	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.977.536.155	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olah Raga	
0	0	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	277.041.980	-	-	-	-	-	-	100%	277.041.980			
0	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp			
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	39.275.000	-	-	-	-	-	-	-	100%	39.275.000		
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan																		
Program Permendagri 90 Tahun 2019																		
2	2	0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	-	-	-	A skor	5.748.993.860	A skor	6.054.839.300	A skor	7.210.103.230	A skor	7.890.343.553	A skor	27.620.249.083	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemuda an, dan Olah Raga
Urusan Perpustakaan																		
Program Permendagri 13 Tahun 2006																		
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	588.196.787	-	-	-	-	-	-	-	100%	588.196.787	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
0	0	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	149.494.950	-	-	-	-	-	-	-	100%	149.494.950		
0	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-		
0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	34.500.125	-	-	-	-	-	-	-	100%	34.500.125		
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan																		
Program Permendagri 90 Tahun 2019																		
2	2	0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	-	-	-	A Skor	3.546.179.100	A Skor	4.542.772.847	A Skor	10.326.104.191	A Skor	6.215.428.111	A Skor	24.630.484.249	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab				
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp					
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
<b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b>																				
<b>Urusan Perdagangan</b>																				
<b>Program Permendagri 13 Tahun 2006</b>																				
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	974.317.788	-	-	-	-	-	-	-	100%	974.317.788	Dinas Perdagangan			
0	0	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	724.303.634	-	-	-	-	-	-	-	100%	724.303.634				
0	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-				
0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	71.793.085	-	-	-	-	-	-	-	100%	71.793.085				
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan</b>																				
<b>Program Permendagri 90 Tahun 2019</b>																				
3	3	0	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	-	-	-	-	A Skor	9.790.847.343	A Skor	9.549.876.897	A Skor	13.252.010.800	A Skor	10.665.000.000	A Skor	43.632.226.000	Dinas Perdagangan
<b>Unsur Staf</b>																				
<b>Program Permendagri 13 Tahun 2006</b>																				
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	378.993.952	-	-	-	-	-	-	-	100%	378.993.952	Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pembangunan)			
0	0	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	109.939.801	-	-	-	-	-	-	-	100%	109.939.801				



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp		
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
0	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	
0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	31.462.496	-	-	-	-	-	-	-	100%	31.462.496	
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	262.645.714	-	-	-	-	-	-	-	100%	262.645.714	Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pemerintahan Umum)
0	0	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	31.758.800	-	-	-	-	-	-	100%	31.758.800		
0	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-		
0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	6.025.885	-	-	-	-	-	-	100%	6.025.885		
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	322.561.091	-	-	-	-	-	-	-	100%	322.561.091	Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat)
0	0	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	26.896.800	-	-	-	-	-	-	100%	26.896.800		
0	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp		
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	16.250.060	-	-	-	-	-	-	-	100%	16.250.060	
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	278.133.862	-	-	-	-	-	-	-	100%	278.133.862	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
0	0	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	80.347.350	-	-	-	-	-	-	100%	80.347.350		
0	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-		
0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	33.344.181	-	-	-	-	-	-	100%	33.344.181		
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	257.735.237	-	-	-	-	-	-	-	100%	257.735.237	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
0	0	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	32.222.901	-	-	-	-	-	-	100%	32.222.901		
0	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-		
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	4.897.751.441	-	-	-	-	-	-	-	100%	4.897.751.441	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp			
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
0	0	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	2.629.970.034	-	-	-	-	-	-	-	100%	2.629.970.034		
0	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	3.339.441.172	-	-	-	-	-	-	-	100%	3.339.441.172		
0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	116.897.405	-	-	-	-	-	-	-	100%	116.897.405		
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan																		
Sekretariat Daerah																		
Program Permendagri 90 Tahun 2019																		
4	0	0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	74,10	74,25		75,88	1.728.166.744	77,00	2.594.471.000	78,00	1.841.500.000	80,01	1.985.000.000	80,01	8.077.051.534,00	Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan)
4	0	0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	74,10	74,25		75,88	1.002.214.210	77,00	934.234.250	78,00	1.106.157.500	80,01	1.131.157.500	80,01	4.241.797.000	Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)
4	0	0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	74,10	74,25		75,88	1.164.160.000	77,00	1.207.275.500	78,00	2.004.611.100	80,01	2.181.121.200	80,01	7.114.993.300	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat)
4	0	0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	74,10	74,25		75,88	1.423.175.660	77,00	1.642.838.620	78,00	1.768.300.800	80,01	1.853.300.800	80,01	7.383.628.920	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp	
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4 0 0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	74,10	74,25	-	75,88	24.544.397.355	77,00	38.232.357.247	78,00	44.420.000.000	80,01	37.845.000.000	80,01	144.733.335.952,00	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)
Unsur Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD																
Program Permendagri 13 Tahun 2006																
0 0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi pekantoran	100%	100%	4.878.406.808	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	4.878.406.808	Sekretariat DPRD
0 0 2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	1.409.043.278	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.409.043.278	
0 0 3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	599.860.431	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	599.860.431	
0 0 4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	24.685.750	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	24.685.750	
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan																
Sekretariat DPRD																
Program Permendagri 90 Tahun 2019																
4 0 2 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	-	-	-	A Skor	28.062.224.608	A Skor	26.626.426.832	A Skor	28.628.827.351	A Skor	30.818.263.079	A Skor	124.656.398.476	Sekretariat DPRD
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan																
Perencanaan																



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp				
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	<b>Program Permendagri 13 Tahun 2006</b>																		
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	993.597.507	-	-	-	-	-	-	-	100%	993.597.507	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
0	0	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	131.735.900	-	-	-	-	-	-	100%	131.735.900				
0	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	196.700.000	-	-	-	-	-	-	100%	196.700.000				
0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	61.785.325	-	-	-	-	-	-	100%	61.785.325				
	<b>Perencanaan</b>																		
	<b>Program Permendagri 90 Tahun 2019</b>																		
5	0	0	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	-	-	-	A Skor	7.267.072.443	A Skor	7.622.714.907	A Skor	8.614.815.907	A Skor	8.614.815.907	A Skor	33.138.465.814	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	<b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</b>																		
	<b>Keuangan</b>																		
	<b>Program Permendagri 13 Tahun 2006</b>																		
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	14.845.730.133	-	-	-	-	-	-	-	100%	14.845.730.133	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
0	0	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	133.757.900	-	-	-	-	-	-	100%	133.757.900				
0	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp			
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	19.545.833	-	-	-	-	-	-	-	100%	19.545.833		
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	522.228.025	-	-	-	-	-	-	-	-	522.228.025	Badan Pendapatan Daerah	
0	0	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	119.490.755	-	-	-	-	-	-	-	119.490.755			
0	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	625.250.400	-	-	-	-	-	-	-	625.250.400			
0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	2.099.925	-	-	-	-	-	-	-	2.099.925			
Keuangan																		
Program Permendagri 90 Tahun 2019																		
5	0	0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	-	-	-	A Skor	51.021.944.546	A Skor	51.820.233.266	A Skor	52,763,515,150.00	A Skor	52,985,016,150.00	A Skor	210.135.196.834	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	0	0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	-	-	-	BB Skor	9.451.784.500	BB Skor	9.957.607.000	BB Skor	11.283.907.000	BB Skor	12.497.738.000	A Skor	43.706.984.000	Badan Pendapatan Daerah
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan																		
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan																		
Program Permendagri 13 Tahun 2006																		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp			
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	1.024.288.537	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.024.288.537	Badan Kepegawaian Daerah	
0	0	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	209.307.565	-	-	-	-	-	-	-	100%	209.307.565		
0	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	82.464.000	-	-	-	-	-	-	-	100%	82.464.000		
0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	44.821.269	-	-	-	-	-	-	-	100%	44.821.269		
Kepegawaian																		
Program Permendagri 90 Tahun 2019																		
5	0	0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	-	BB	-	BB Skor	6.649.877.000	BB Skor	6.109.101.755	A skor	6.505.000.000	A skor	6.630.000.000	A skor	25.551.547.176	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah																		
Program Permendagri 13 Tahun 2006																		
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	676.154.854	-	-	-	-	-	-	-	100%	676.154.854	Inspektorat	
0	0	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	49.383.650	-	-	-	-	-	-	-	100%	49.383.650		
0	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-		
0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	98.561.086	-	-	-	-	-	-	-	100%	98.561.086		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab			
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp				
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan																			
Inspektorat Daerah																			
Program Permendagri 90 Tahun 2019																			
6	0	0	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	-	-	A skor	7.491.696.106	A skor	9.516.293.200	A skor	10.026.190,40	A skor	10.053.480,00	A skor	36.155.146.000	Inspektorat
Fungsi Penunjang Kecamatan																			
Program Permendagri 13 Tahun 2006																			
0	0	0	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	1.174.418.863	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.174.418.863	Kecamatan Kartoharjo
0	0	0	2	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	111.107.233	-	-	-	-	-	-	-	100%	111.107.233	
0	0	0	3	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	231.123.600	-	-	-	-	-	-	-	100%	231.123.600	
0	0	0	4	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	56.855.545	-	-	-	-	-	-	-	100%	56.855.545	
0	0	0	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	883.825.773	-	-	-	-	-	-	-	100%	883.825.773	Kecamatan Manguharjo
0	0	0	2	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	124.253.927	-	-	-	-	-	-	-	100%	124.253.927	
0	0	0	3	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	183.296.500	-	-	-	-	-	-	-	100%	183.296.500	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp			
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	109.251.169	-	-	-	-	-	-	-	100%	109.251.169		
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	904.837.383	-	-	-	-	-	-	-	100%	904.837.383		
0	0	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	139.546.607	-	-	-	-	-	-	-	100%	139.546.607		
0	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	193.332.000	-	-	-	-	-	-	-	100%	193.332.000		
0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	95.130.738	-	-	-	-	-	-	-	100%	95.130.738		
<b>Unsur Kewilayahan</b>																		
<b>Kecamatan</b>																		
<b>Program Permendagri 90 Tahun 2019</b>																		
7	0	0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	-	-	-	A skor	11.379.379.567	A skor	11.536.794.226	A skor	12.352.851.052	A skor	12.937.816.056	A skor	50.234.139.723	Kecamatan manguharjo
7	0	0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	-	-	-	A Skor	10.930.705.433	A Skor	10.620.493.313	A Skor	10.619.477.978	A Skor	10.635.336.056	A Skor	47.161.967.782	Kecamatan kartoharjo
7	0	0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	-	-	-	A skor	11.964.523.606	A skor	11.329.439.485	A skor	11.895.911.459	A skor	12.490.707.032	A skor	49.139.685.398	Kecamatan Taman

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp		
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Fungsi Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik																
	Program Permendagri 13 Tahun 2006																
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	577.948.571	-	-	-	-	-	-	-	100%	577.948.571	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
0	0	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	67.374.100	-	-	-	-	-	-	-	100%	67.374.100	
c	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	90.150.000	-	-	-	-	-	-	-	100%	90.150.000	
0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	20.500.000	-	-	-	-	-	-	-	100%	20.500.000	
	Unsur Pemerintahan Umum																
	Kesatuan Bangsa dan Politik																
	Program Permendagri 90 Tahun 2019																
8	0	0	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
								A Skor	3.701.735.223	A Skor	3.852.008.697	A Skor	4.403.180.867	A Skor	4.667.497.867	A Skor	
PRIORITAS III TOTAL Rp.							89.643.778.136		351.323.145.273		372.694.447.150		400.683.471.253		384.297.295.536		1.598.642.137.348
% Terhadap Belanja Daerah									31		29		29		27		

Keterangan :  
 Prioritas I  
 Prioritas II  
 Prioritas III

digunakan untuk belanja wajib mengikat dan pencapaian visi misi kepala daerah  
 digunakan untuk pencapaian visi misi kepala daerah dan belanja wajib mengikat  
 digunakan untuk belanja urusan pemerintahan lainnya



## BAB VIII

### KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### 8.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Daerah merupakan alat ukur kuantitatif untuk mengevaluasi dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Daerah juga dapat dikatakan sebagai Indikator Kinerja Utama bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih karena dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode RPJMD. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah. Tujuan dalam penetapan IKU Kepala Pemerintah Daerah adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator sasaran daerah (*outcome*). Pencapaian indikator sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan daerah, khususnya dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah, yang meliputi aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja daerah ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Indikator kinerja utama pemerintah Kota Madiun memuat indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran sebagai tolok ukur penilaian kinerja walikota dan Wakil walikota periode 2019-2024. IKU daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebutlah secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah dalam pencapaian indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Kota Madiun.

IKU daerah maupun IKU perangkat daerah merupakan indikator kinerja dampak (*impact*) untuk mengukur tujuan dan/atau sasaran RPJMD. Penetapan IKU Kota Madiun tahun 2019 – 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut

**Tabel 8.1**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Madiun**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2019)	Realisasi	Target*				
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	(B) 67,34	(B) 65,55	(B) 67	(B) 68	(B) 69	(BB) 70,01	
2	livable city (Indeks Kenyamanan Kota)	85,32	86,67	87,78	88,19	88,60	89,01	
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,88	80,91	81,25	81,70	82,15	82,35	
4	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,05	94,38	94,40	94,44	94,49	94,51	
5	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	6,78	6,69	6,38	6,40	6,42	6,44	
6	Indeks ketentraman	-	76,87	76,95	77,05	77,15	77,2	
7	Indeks Gini	0,35	0,39	0,38	0,37	0,36	0,35	

\*Angka proyeksi

Terdapat 7 indikator kinerja utama dalam P-RPJMD Kota Madiun 2019-2024. Penetapan tujuh IKU tersebut didasarkan kondisi objektif Kota Madiun untuk mencapai kesejahteraan pada masa yang akan datang. Tujuh IKU tersebut setidaknya dapat memberi gambaran kualitas pembangunan sampai akhir periode RPJMD tahun 2024 yang meliputi aspek kualitas sumber daya manusia, pembangunan ekonomi berkualitas, dan kondisi masyarakat yang harmonis, yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai dan tata kelola pemerintahan yang profesional.

## 8.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Selain dari IKU, kinerja pemerintah Kota Madiun tahun 2019-2024 dapat dilihat dari target indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan. Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dilihat dari tiga aspek utama yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah. Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi kinerja utama penyelenggaraan pemerintah daerah seperti Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, dan lain sebagainya. Aspek Pelayanan Umum meliputi empat fokus yaitu Urusan Wajib Layanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Layanan Dasar, Urusan Pilihan, dan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.

Aspek Daya Saing Daerah meliputi empat fokus yaitu Kemampuan Ekonomi Daerah, Iklim Berinvestasi, Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, dan Sumber Daya Manusia. Rincian mengenai indikator dan target capaian tiap tahun kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dilihat dalam tabel berikut



**Tabel 8.2**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Madiun 2019-2024**

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>									
<b>a</b>	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,69	-3,39	2,95-3,95	3,06-5,11	3,08-5,75	3,11-5,95	3,11-5,95	Indikator makro
2	PDRB Per Kapita	juta	60,01	52,57	59,78	60,01	65,34	70,34	70,34	Indikator makro
3	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	6,78	6,69	6,38	6,4	6,42	6,44	6,44	Indikator Tujuan Kota
4	Indeks Gini	Indeks	0,35	0,39	0,38	0,37	0,36	0,35	0,35	Indikator Tujuan Kota
5	Angka Kemiskinan	%	4,35	4,98	5,09	4,87	4,65	4,55	4,55	Indictor sasaran kota
<b>b</b>	Fokus Kesejahteraan Sosial									
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	80,88	80,91	81,25	81,70	82,15	82,35	82,35	Indikator Tujuan Kota
<b>I</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Sosial</b>									
1	Persentase PMKS yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar minimal	%	-	92,12%	91%	92%	93%	94%	94%	Indikator Tujuan PD
2	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	-	-	-	93%	94%	95%	95%	Indikator Sasaran PD
3	Persentase PMKS yang diberdayakan	%	-	-	-	90%	91%	92%	92%	Indikator Sasaran PD
4	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	%	-	-	-	19%	20%	21%	21%	Indikator Sasaran PD
5	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam Menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial	%	-	-	90%	-	-	-	90%	Indikator Program PD
6	persentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	%	-	-	-	50%	58%	66%	66%	Indikator Program PD
7	persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	-	-	90%	90%	91%	91%	91%	Indikator Program PD

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	8	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	%	-	-	18,7%	-	-	-	18,7%	Indikator Program PD
	9	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	%	-	-	-	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	10	Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	11	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	-	-	100%	-	-	-	100%	Indikator Program PD
	12	Persentase Pengelolaan Taman makam Pahlawan dalam kondisi baik	%	-	-	-	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	13	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	930	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	14	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	15	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	layanan	3 ( SLRT, WEB dan Kotak Saran)	3 ( SLRT, WEB dan Kotak Saran)	3	3	3	3	3	Lppd
	16	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	orang	-	800	810	820	830	840	840	Lppd
	17	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	tim	2 (PPT, SLRT)	2 (PPT, SLRT)	2 (PPT, SLRT)	2 (PPT, SLRT)	2 (PPT, SLRT)	2 (PPT, SLRT)	2 (PPT, SLRT)	Lppd
	18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	orang	-	800	810	820	830	840	840	Lppd



Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	19	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	unit	-	4	4	4	4	4	4	Lppd
	20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	orang	-	800	165	160	165	170	170	Lppd
	21	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	unit	-	2 (Shelter, Rumah Aman PPT)	2	2	2	2	2	Lppd
	22	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	orang	-	501 (Shelter dan ngebrok)	10	50	55	60	1.167	Lppd
	23	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	orang	-	7	9	9	12	20	57	Lppd
	24	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	unit	-	3 (Kursi roda, tandu, alat bantu jalan/Krek )	5	7	9	11	11	Lppd
	25	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	paket	-	1	1	1	1	1	1	Lppd
	26	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	orang	-	24	161	165	170	175	175	Lppd
	27	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	orang	-	-	1	1	1	1	1	Lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	28	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	orang	473 (Peksos Profesional 5, TKSK 3, TKS 14, PSM 135, Wanita Pemimpin Kesos 98, Penyuluh Sosial 218)	176 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	176 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	176 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	176 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	176 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	176 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	Lppd
	29	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan social	orang	-	116	118	60	65	70	70	Lppd
	30	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	kali	-	2	2	2	2	2	2	Lppd
	31	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	orang	-	3	4	5	5	5	5	Lppd
	32	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	orang	-	102	105	107	109	111	111	Lppd
	33	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	orang	-	218	220	222	224	226	226	Lppd
	34	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	orang	72	218	220	15	17	20	20	Lppd



Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	35	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	orang	-	58	60	62	64	66	66	Lppd
	36	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	orang	-	7479 (Rumah Roboh dan Terdampak covid 19)	0	3.300	3.300	3.300	3.300	Lppd
	37	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	orang	-	1 (Rumah Roboh)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	Lppd
	38	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	tempat	-	0	0	0	0	0	0	Lppd
	39	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan		-	7478 (Terdampak Covid-19)	0	0	0	0	0	Lppd
	40	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial		-	1	0	300	300	300	300	Lppd
	41	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia		-	176 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	176 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	176 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	176 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	176 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	176 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	Lppd
	42	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		930	91	93	95	97	100	1	Spm
	43	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti			453	457	460	465	470	1	Spm
	44	Jumlah Warga Negara lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti			133	135	137	139	140	1	Spm
	45	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti			88	90	92	94	96	1	Spm

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	46		Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	0	1	36	36	36	36	36	Spm
	47	%	Persentase Penurunan PMKS	-	1,5	-	-	-	-	1,5	Indikator Lama
	48	%	Persentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	-	92,12	91%	-	-	-	91%	Indikator Lama
	49	%	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Tertangani	-	100%	-	-	-	-	100%	Indikator Lama
<b>II</b>			<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>								
	1	Indeks	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,05	94,38	94,4	94,44	94,49	94,51	94,51	Indikator tujuan kota
	2	Indeks	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77,07	77,18	77,07	77,18	77,20	77,22	77,22	Lanjutan indikator sasaran kota dan Indikator Tujuan PD
	3	%	Rasio KDRT	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	-	-	0,02%	Indikator Tujuan PD
	4	%	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	12,78%	25,21%	12,78%	13%	13%	13,5%	13,5%	Indikator Sasaran PD
	5	%	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	6	%	persentase anggaran sub kegiatan tahun N+1 yang di ARG melalui PPRG	-	-	-	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	7	%	persentase keluarga yang berkualitas	-	-	3%	6%	12%	15%	15%	Indikator Sasaran PD
	8	%	Persentase pengaduan tindak kekerasan yang diselesaikan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	9	nilai	Prevalensi kekerasan terhadap anak	-	-	-	0,003 nilai	0,002 nilai	0,002 nilai	0,002 nilai	Indikator Sasaran PD
	10	%	persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	-	-	10%	15%	20%	30%	30%	Indikator Program PD
	11	%	persentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas	-	-	5%	10%	20%	30%	30%	Indikator Program PD



Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Jumlah dokumen Data terpilah gender dan anak	Do kumen	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Indikator Program PD
13	persentase penanganan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
14	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak		-	-	-	0,003	0,003	0,002	0,002	Indikator Program PD
15	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	%	-	-	-	12,50%	22,43%	42,20%	42,20%	Indikator Program PD
16	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	%	-	-	-	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	Indikator Program PD
17	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	3,01	17,53%	10%	15%	20%	30%	30%	Lppd
18	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0,01%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Lppd
19	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)		0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Lppd
20	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG		-	36 (OPD dan BUMD)	36	63	65	70	70	Lppd
21	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota		-	34 OPD	68	96	123	129	129	Lppd
22	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak		-	5 (Madiun Today, RRI, Radar Madiun, JTV, Radio Suara Madiun)	4 (Madiun Today, RRI, Radar Madiun, Radio Suara Madiun)	4 (Madiun Today, RRI, Radar Madiun, Radio Suara Madiun)	4 (Madiun Today, RRI, Radar Madiun, Radio Suara Madiun)	4 (Madiun Today, RRI, Radar Madiun, Radio Suara Madiun)	4 (Madiun Today, RRI, Radar Madiun, Radio Suara Madiun)	Lppd
23	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal		-	11 (Panti Asuhan Anak)	15	15	15	15	15	Lppd













Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17		0	0	0	0	0	0	0	Lppd
	18		0	0	0	0	0	0	0	Lppd
	19	orang	6	6	6	6	6	6	6	Lppd
	20		0	0	0	0	0	0	0	Lppd
	21		0	0	0	0	0	0	0	Lppd
	22		0	0	0	0	0	0	0	Lppd
	23		0	0	0	0	0	0	0	Lppd
	24		0	0	0	0	0	0	0	Lppd
	25		0	0	0	0	0	0	0	Lppd
<b>II</b>										
a										
<b>1</b>										
<b>I</b>										
	1	Tahun	11,12	11,14	11,14	11,15	11,16	11,16	11,16	Indikator sasaran kota
	2	Tahun	14,39	14,39	14,4	14,41	14,42	14,43	14,43	Indikator sasaran kota



Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikat Pendidik	%	-	65%	65%	65%	66%	67%	67%	Indikator Tujuan PD
4	Angka Partisipasi PAUD dan Pendidikan Dasar	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Tujuan PD
5	APM Paud, SD, dan SMP	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
6	Persentase Guru, kasek dan Pengawas berkompentensi	%	-	-	65%	65%	66%	67%	67%	Indikator Sasaran PD
7	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
8	Presentase Sekolah yang Berkurikulum SNP	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
9	Wajib belajar 9 tahun	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
10	Presentase Sekolah yang Berkurikulum SNP	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
11	Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikasi yang Berprestasi	%	78,98%	81.25%	20%	20%	25%	25%	25%	Indikator Program PD
12	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD		5.768	5.122	4.500	4.210	4.000	3.750	3.750	Lppd
13	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		19.687	18.229	17.000	16.750	16.500	16.000	16.000	Lppd
14	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama		8.442	8.819	8.000	7.750	7.500	7.250	7.250	Lppd
15	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		-	202	200	195	180	170	170	Lppd
16	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	lembaga	99	99	16	16	16	16	16	Lppd





Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	25	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	anak	3.284	3.284	3.284	3.284	3.284	3.284	Lppd
	26	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	anak	11.482	11.400	11.400	11.000	11.000	11.000	Lppd
	27	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	anak	10.957	10.500	10.500	10.000	10.000	10.000	Lppd
	28	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	rasio	01.24	01.23	01.23	01.22	01.20	01.20	Lppd
	29	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	rasio	01.29	01.28	01.28	01.27	01.27	01.27	Lppd
	30	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	orang	831	803	760	715	674	674	Lppd
	31	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	orang	649	629	371	538	513	513	Lppd
	32	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	rasio	01.04	01.04	01.04	01.04	01.04	01.04	Lppd
	33	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	rasio	01.07	01.07	01.05	01.05	01.05	01.05	Lppd
	34	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	orang	184	176	171	165	161	167	Lppd
	35	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	orang	90	86	80	72	68	68	Lppd





Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	Orang		01.15	01.25	01.27	01.29	01.30	01.30	Lppd
46	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	Orang		61	40	37	35	30	30	Lppd
47	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	Orang		61	40	37	35	30	30	Lppd
48	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Orang		65	70	70	73	73	73	Lppd
49	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	Orang		6	6	6	6	6	6	Lppd
50	jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar(SD/MI, SMP/MTs)	Orang	31.801	30.204	26.937	26.450	26.311	26.301	26.214	spm
51	jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Orang	96	202	200	210	225	230	230	spm
52	jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Orang	5.768	5.122	4.500	4.250	4.000	3.750	3.750	spm
53	Indeks Pengetahuan	Indeks	0,77	0,77	-	-	-	-	0,77	Indikator Lama
54	Persentase Sekolah Standar Nasional Pendidikan	%	-	85	-	-	-	-	85	Indikator Lama
55	Persentase Jumlah tenaga pendidik yang bersertifikasi	Guru	76,66	76,66	-	-	-	-	76,66	Indikator Lama
56	Angka Partisipasi Murni SD/SMP	Skor	152,99	127,04	-	-	-	-	127,04	Indikator Lama

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	57	Angka Partisipasi Kasar PAUD	Skor	-	95,61	-	-	-	-	95,61	Indikator Lama
	58	Jumlah Lembaga non formal yang Terakreditasi	lembaga	-	106 lembaga	-	-	-	-	106 lembaga	Indikator Lama
	<b>II</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan</b>									
	1	Angka Harapan Hidup	Skor	72,75	72,81	72,83	72,83	72,83	72,83	72,83	Indikator sasaran kota
	2	Persentase Keluarga Sehat	%	-	0%	50%	52%	54%	56%	56%	Indikator tujuan PD
	3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,84	83,54	81,99	82,21	-	-	82,66	Indikator Sasaran PD
	4	Persentase Indikator SPM mencapai target	%	66,67%	50,00%	50,00%	58,33%	-	-	58,33%	Indikator Sasaran PD
	5	Persentase rumah tangga sehat	%	-	68,00%	69,00%	70,00%	71,00%	72,00%	72,00%	Indikator Sasaran PD
	6	Persentase rumah sehat	%	-	84,00%	86,00%	88,00%	89,00%	90,00%	90,00%	Indikator Sasaran PD
	7	Persentase rata-rata upaya kesehatan bersumber masyarakat berstrata puri	%	-	60,38%	61,50%	62,00%	62,50%	63,00%	63,00%	Indikator Sasaran PD
	8	Indeks Keluarga Sehat	%	-	0,45	0,50	0,52	0,54	0,56	0,56	Indikator Sasaran PD
	9	Persentase tenaga kesehatan yang teregristrasi	%	-	88,00%	89,00%	90,00%	91,00%	92,00%	92,00%	Indikator Sasaran PD
	10	Persentase capaian aplikasi sarana prasarana kesehatan (ASPAK) Puskesmas	%	-	84,32%	84,32%	84,60%	84,80%	85,00%	85,00%	Indikator Sasaran PD
	11	Persentase peningkatan sarana pelayanan kefarmasian yang beroperasi sesuai standart	%	-	70,00%	72,00%	74,00%	76,00%	78,00%	78,00%	Indikator Sasaran PD
	12	Persentase masyarakat Kota Madiun yang memiliki jaminan kesehatan	%	-	96,00%	97,00%	98,00%	99,00%	100,00%	100,00%	Indikator Sasaran PD
	13	Persentase rata-rata IKM puskesmas se- Kota Madiun	%	-	83,57%	86,00%	86,20%	86,40%	86,60%	86,60%	Indikator Sasaran PD
	14	Rata - rata nilai PKP Puskesmas	%	-	92,34%	86,63%	86,92%	87,53%	88,11%	88,11%	Indikator Sasaran PD
	15	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	%	-	66,67%	50,00%	66,67%	75,00%	75,00%	75,00%	Indikator Program PD















Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	62	Cakupan pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	%	100,12%	98.82%	100%	100%	100%	100%	100%	Spm
	63	Persentase anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	97,51%	79.41%	100%	100%	100%	100%	100%	Spm
	64	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	%	107,18%	104.63%	100%	100%	100%	100%	100%	Spm
	65	Persentase warga negara usia 60 Tahun ke atas mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	%	93,20%	76.10%	100%	100%	100%	100%	100%	Spm
	66	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	89,21%	55.85%	100%	100%	100%	100%	100%	Spm
	67	Persentase Penderita diabetes melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	106,54%	112.74%	100%	100%	100%	100%	100%	Spm
	68	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan jiwa sesuai standar	%	107,44%	108.90%	100%	100%	100%	100%	100%	Spm
	69	Persentase orang terduga Tuberculosis (TBC) mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	83,43%	63,78%	100%	100%	100%	100%	100%	Spm
	70	Persentase orang dengan resiko terinfeksi ( <i>human immunodeficiency virus</i> ) HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	103,70%	111.81%	100%	100%	100%	100%	100%	Spm
	71	Indeks Kesehatan	Indeks	0,81	0,81	-	-	-	-	0,81	Indikator Lama

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	72	Status Akreditasi SNARS	-	Lulus Paripurna Akreditasi SNARS	-	-	-	-	Lulus Paripurna Akreditasi SNARS	Indikator Lama	
	73	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Kota Madiun	Indeks	-	79,17	-	-	-	79,17	Indikator Lama	
	74	Persentase Pencapaian Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit	%	-	50	-	-	-	50	Indikator Lama	
	75	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Sesuai Standar	%	100	100	-	-	-	100	Indikator Lama	
	76	Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	%	100	100	-	-	-	100	Indikator Lama	
	77	Persentase Penyediaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	%	-	91,15	-	-	-	91,15	Indikator Lama	
	78	Persentase Penduduk Kota Madiun yang menjadi peserta JKN	%	100	95,17	-	-	-	95,17	Indikator Lama	
	79	Persentase Kesehatan Masyarakat yang Sesuai Standart	%	-	25	-	-	-	25	Indikator Lama	
	80	Persentase Penurunan Kasus Kejadian Luar Biasa	%	-	-1940	-	-	-	-1940	Indikator Lama	
	81	Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	%	-	75	-	-	-	75	Indikator Lama	
<b>III</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>									
	1	Indeks Ketentraman	Indeks	-	76,87	76,95	77,05	77,15	77,2	77,2	Lanjutan Indikator Tujuan Kota
	2	Indeks Rasa Aman	Indeks	73,55	76,05	76,15	76,2	76,27	76,35	76,35	Lanjutan Indikator sasaran kota









Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	24	Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	orang	9 orang	9 orang	9 orang	9 orang	9 orang	9 orang	9 orang	Lppd
	25	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	orang	16 orang	22 orang	22 orang	22 orang	22 orang	22 orang	22 orang	Lppd
	26	Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran	jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	Lppd
	27	Pelayanan Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan Perkada	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Spm
	28	Pelayanan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Spm
	29	Cakupan penanganan penanggulangan bencana	%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	Indikator Tujuan PD
	30	Indeks Resiko Bencana	Indeks	-	116 indeks	115 indeks	114 indeks	113 indeks	112 indeks	112 indeks	Indikator Tujuan PD
	31	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	Indikator Sasaran PD
	32	Persentase Korban Bencana yang tertangani	%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	33	Persentase terlatihnya masyarakat dalam penanganan bencana	%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	34	Persentase bantuan bencana kepada korban bencana	%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	35	Persentase penyampaian informasi kebencanaan secara berkala	%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	36	Persentase sarana prasarana penanggulangan bencana dalam kondisi baik	%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Jumlah Destana yang terbentuk	%	0	2 desa/ kelurahan	4 desa/ kelurahan	5 desa/ kelurahan	6 desa/ kelurahan	7 desa/ kelurahan	7 desa/ kelurahan	Indikator Sasaran PD
38	Persentase Early Warning System (EWS) di daerah rawan Bencana	%	-	100	100	-	-	-	100	Indikator Sasaran PD
39	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
40	Persentase Tingkat Pemenuhan atau Kecukupan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bencana	%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	Indikator Program PD
41	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	845 orang	845 orang	845 orang	845 orang	845 orang	845 orang	845 orang	Lppd
42	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	Lppd
43	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	orang	310 orang	560 orang	400 orang	400 orang	400 orang	400 orang	400 orang	Lppd
44	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	0	0	0	100%	100%	100%	100%	Lppd
45	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
46	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	%	0	0	0	0	100%	100%	100%	Lppd
47	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	%	0	0	0	0	0%	100%	100%	Lppd
48	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	%	4,60%	0,80%	5%	5%	5%	5%	5%	Lppd



Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	%	3,80%	0,57%	5%	5%	5%	5%	5%	Lppd
50	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
51	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan		0	0	0	0	0	0	0	Lppd
52	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB		0	0	0	0	0	0	0	Lppd
53	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
54	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
55	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
56	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Spm
57	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Spm
58	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Spm
59	Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota		-	1.3 orang setiap RT	-	-	-	-	1.3 orang setiap RT	Indikator Lama
60	Persentase Kasus Penegakan Perda yang diselesaikan	%	100	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Persentase Penanggulangan Korban Bencana	%	100	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
<b>2</b>	<b>Tidak Terkait Pelayanan Dasar</b>									
<b>I</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja</b>									
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	skor	3,85	8,32	8,15	5,74	5,12	5,00	5,00	Lanjutan Indikator sasaran kota
2	persentase calon tenaga kerja yang ditempatkan	%	-	-	20%	20%	30%	30%	30%	Indikator Tujuan PD
3	persentase perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Tujuan PD
4	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	60,29%	68,01	55%	60%	-	-	60%	Indikator Tujuan PD
5	persentase penyerapan tenaga kerja sektor formal dan informal	%	-	73,04%	70%	75%	-	-	75%	Indikator Sasaran PD
6	persentase perusahaan yang menerapkan perlindungan tenaga kerja sesuai standart	%	100%	100%	70,00%	71,50%	-	-	71,50%	Indikator Sasaran PD
7	persentase calon tenaga kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi	%	-	-	40%	40%	50%	50%	50%	Indikator Sasaran PD
8	persentase peningkatan pemberian informasi peluang kerja kepada pencari kerja	%	-	-	10%	15%	20%	25%	25%	Indikator Sasaran PD
9	persentase perusahaan yang menerapkan perlindungan tenaga kerja	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
10	persentase peningkatan tenaga kerja sektor informal yang mendapatkan jaminan sosial	%	-	-	10%	10%	10%	10%	10%	Indikator Sasaran PD
11	persentase Penurunan Kasus-kasus Perselisihan Hubungan Industrial	%	-	-	10%	10%	-	-	10%	Indikator Program PD
12	persentase Pencari Kerja yang dilatih	%	21,75%	0,69%	23%	23%	-	-	23%	Indikator Program PD





Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	24		Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	-	5	8	10	12	15	15	Lppd
	25	%	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	-	0%	0%	30%	30%	30%	30%	Lppd
	26	%	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	26%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	Lppd
	27	%	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	Lppd
	28	%	Persentase LPK yang terakreditasi	26%	50%	38%	38%	40%	40%	40%	Lppd
	29	%	Persentase LPK yang memiliki perizinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	30	%	Jumlah penganggur yang dilatih	850	35	230	230	230	230	230	Lppd
	31	%	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	32	%	Persentase penyerapan lulusan	66%	66%	20%	20%	20%	20%	20%	Lppd
	33	%	Lulusan bersertifikat kompetensi	66%	66%	20%	20%	20%	20%	20%	Lppd
	34	%	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	-	0%	0%	25%	25%	25%	25%	Lppd
	35	%	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	-	0%	0%	25%	25%	25%	25%	Lppd



Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	36	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	%	-	0%	1%	1%	1,50%	2%	2%	Lppd
	37	Data tingkat produktivitas total	%	-	64,00%	62,50%	63%	64%	65,00%	65,00%	Lppd
	38	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	%	-	30%	25%	25%	27%	30%	30%	Lppd
	39	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	%	-	48%	30%	30%	30%	30%	30%	Lppd
	40	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan		-	23	23	23	23	23	23	Lppd
	41	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	42	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	-	100%	70%	70%	73%	75%	75%	Lppd
	43	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	%	-	3%	5%	5%	4%	3%	3%	Lppd
	44	Jumlah mogok kerja		-	0	5	5	4	4	4	Lppd
	45	Jumlah penutupan perusahaan		-	0	10	10	9	9	9	Lppd
	46	Jumlah perselisihan kepentingan		-	0	15	15	14	13	13	Lppd







Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	66		Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	-	0	0	0	0	0	0	Lppd
	67	%	Persentase Tenaga Kerja yang terlindungi	-	60	-	-	-	-	60	Indikator Lama
	68	Orang	Persentase lulusan pelatihan yang berkompeten	-	35 orang	-	-	-	-	35 orang	Indikator Lama
	<b>II</b>		<b>Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>								
	1	Indeks	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A-82	A-83,56	A-84	A-85	A-86	A-87	A-87	Indikator Tujuan PD
	2	%	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99,99	100%	92%	92,45%	92,72%	92,98%	92,98%	Indikator Sasaran PD
	3	%	Persentase Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan	-	60%	60,50%	70,00%	70,50%	80,00%	80,00%	Indikator Sasaran PD
	4	%	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	99,18	93,33%	84%	84,00%	84,50%	85%	85%	Indikator Program PD
	5	%	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	100	93,33%	94%	94,25%	94,50%	94,75%	94,75%	Indikator Program PD
	6	%	Akurasi database kependudukan	-	-	99%	99,10%	99,15%	99,20%	99,20%	Indikator Program PD
	7	%	Perekaman KTP elektronik	-	99,34%	98,25%	98,50%	98,75%	99,00%	99,00%	Lppd
	8	%	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	-	81,76%	81,00%	90,00%	92,00%	94,00%	94,00%	Lppd
	9	%	Kepemilikan akta kelahiran	-	98,90%	98,90%	99,00%	99,10%	99,20%	99,20%	Lppd
	10		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	-	2 OPD dengan Perjanjian Kerjasama dan 20 lembaga pengguna data kependudukan	18,18%	39,39%	63,63%	90,90%	90,90%	Lppd
	11	%	Penerbitan akta perkawinan	-	100%	99,00%	99,10%	99,20%	99,30%	99,30%	Lppd
	12	%	Penerbitan akta perceraian	-	100%	99,00%	99,10%	99,20%	99,30%	99,30%	Lppd
	13	%	Penerbitan akta kematian	-	100%	98,50%	98,75%	99,00%	99,25%	99,25%	Lppd





Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	9	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada/tidak	-	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	Lppd
	10	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/tidak	-	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Lppd
	11	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	unit	-	-	1	1	1	1	1	Lppd
	12	Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/tidak	-	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Lppd
	13	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/tidak	-	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	Lppd
	14	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada/tidak	-	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Lppd
	15	Rasio Ketersediaan Pangan Utama dan Konsumsi Pangan	skor	-	1,38	-	-	-	-	1,38	Indikator Lama
	16	Persentase Peningkatan Ketersediaan Pangan Utama	%	-	0,18	-	-	-	-	0,18	Indikator Lama
	<b>IV</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>									
	1	<i>Contraception Prevalency Rate diatas rata-rata nasional</i>	%		72,76%	62,17%	62,54%	63,00%	64,00%	64,00%	Indikator Sasaran PD
	2	Persentase Angka UKP (Usia Kawin Pertama) < 20 tahun	%	≤ 5.58%	≤ 4.95%	≤ 4.8%	≤ 4.7%	-	-	≤ 4.7%	Indikator Program PD
	3	Menurunnya Unmet Need	%	4.2%	11,60%	16,93%	8,00%	7,50%	7,00%	7,00%	Indikator Program PD
	4	Meningkatnya kepesertaan anggota Tribina PUS yang ber-KB	%	79,10%	82,25%	80,25%	81,00%	82,00%	83,00%	83,00%	Indikator Program PD





Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	15	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	-	72,76	50,00%	51,00%	52,00%	53,00%	53,00%	Lppd
	16	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif		-	56	56	56	56	56	56	Lppd
	17	Persentase pelayanan KB Pasca Peralinan	%	-	44,90%	45,00%	45,01%	45,02%	45,03%	45,03%	Lppd
	18	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	%	-	64,96%	64,96%	64,96%	64,96%	64,96%	64,96%	Lppd
	19	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	20	Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total	skor	1,91	1,98	<2.1					
	21	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	%	-	42,88	-	-	-	-	42,88	Indikator Lama
	<b>V</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika</b>									
	1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,82	Tidak ada penilaian tahun 2020	2,83 (BAIK)	2,85 (BAIK)	2,87 (BAIK)	2,90 (BAIK)	2,90 (BAIK)	Lanjutan Indikator Sasaran Kota
	2	Indeks Domain Layanan SPBE	indeks	-	-	2,80	2,87	2,95	3,10	3,10	Indikator Tujuan PD
	3	Indeks Domain Manajemen SPBE				1,9	1,93	1,97	2,01	2,01	Indikator Tujuan PD
	4	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Skor	87,1	87,25	90	91	92	93	93	Indikator Sasaran PD
	5	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD















Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	%	-	0%	0	100%	100%	100%	100%	Lppd
	10	%	-	0%	0	100%	100%	100%	100%	Lppd
	11	%	50	60	80	-	-	-	80	Indikator Lama
<b>VII</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Persandian</b>									
	1	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	2	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	3	%	-	65%	65%	67%	68%	70%	70%	Lppd
	4		-	0%	0	0	0	0	0	Lppd
	5	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	6	%	-	100%	70%	75%	80%	85%	85%	Lppd
	7	%	-	88,23%	88,50%	88,80%	89,00%	89,50%	89,50%	Lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan									
8	Indeks Keamanan Informasi	level			II (dua) Level				II (dua) Level	Indikator Lama
9	Persentase PD yang mengimplementasikan keamanan informasi	%	-	25	-	-	-	-	25	Indikator Lama
<b>VIII</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan</b>									
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	skor	2,38	2,38	2,4	2,42	2,44	2,46	2,46	Indikator Tujuan PD
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun	Indeks	8,6	8,7	8,80	8,90	90	9,10	9,10	Indikator Sasaran PD
3	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	5,35%	5,59%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	Indikator Program PD
4	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	%	-	-	36%	37%	37%	38%	38%	Indikator Program PD
5	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk		-	1 penduduk : 3 Buku	1 penduduk : 3 Buku	1 penduduk : 3 Buku	1 penduduk : 3 Buku	1 penduduk : 3 Buku	1 penduduk : 3 Buku	Lppd
6	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	%	-	3,8 %	4%	4,30%	4,60%	4,90%	4,90%	Lppd
7	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk		-	1 tenaga perpustakaan : 369 penduduk	2 tenaga perpustakaan : 369 penduduk	3 tenaga perpustakaan : 369 penduduk	4 tenaga perpustakaan : 369 penduduk	5 tenaga perpustakaan : 369 penduduk	6 tenaga perpustakaan : 369 penduduk	Lppd
8	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	%	-	55%	56%	57%	58%	59%	59%	Lppd
9	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	eksemplar	-	56 Eksemplar	10 eksemplar	10 eksemplar	10 eksemplar	10 eksemplar	96 eksemplar	Lppd
10	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	Lppd
11	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	Lppd
12	Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan	%	-	33,25%	-	-	-	-	33,25%	Indikator Lama



Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	13	Indeks	-	87,24	72	-	-	-	72	Indikator Lama
	<b>IX</b>									
	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan</b>									
	1	Indeks Penyelenggaraan Kearsipan	-	-	56	57	58	59	59	Indikator Tujuan PD
	2	Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Arsip	-	-	9%	9%	9%	9%	9%	Indikator Sasaran PD
	3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja (alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	-	82%	84%	86%	88%	90%	90%	Indikator Program PD
	4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	-	8,2	8,2	8,4	8,6	8,8	8,8	Indikator Program PD
	5	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	-	9%	9%	9%	9%	9%	45%	Lppd
	6	persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	-	15%	9%	9%	9%	9%	51%	Lppd
	7	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	-	12%	6%	6%	6%	6%	36%	Lppd
	8	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	-	0% Aplikasi RIKANDI belum di auncing oleh ANRI	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	Lppd
	9	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	-	Belum Dilakukan Pemusnahan	Belum Dilakukan Pemusnahan	1 kali	1 kali	1 kali	3 Kali	Lppd
	10	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	-	22 daftar arsip yang diselamatkan	25 daftar arsip yang diselamatkan	28 daftar arsip yang diselamatkan	31 daftar arsip yang diselamatkan	34 daftar arsip yang diselamatkan	34 daftar arsip yang diselamatkan	Lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/ kota yang sesuai NSPK di provinsi	-	2 Perangkat Daerah Provinsi	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	2 Perangkat Daerah Provinsi	Lppd
	12	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	-	18 arsip hasil alih media	21 arsip hasil alih media	24 arsip hasil alih media	27 arsip hasil alih media	30 arsip hasil alih media	30 arsip hasil alih media	Lppd
	13	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	-	2 Daftar Arsip	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	2 Daftar Arsip	Lppd
	14	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	-	1 (satu) SOP Layanan Peminjaman Arsip	1 (satu) SOP Layanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	Lppd
	15	Persentase Unit Kearsipan yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	-	5 unit	-	-	-	-	5 unit	Indikator Lama
	16	Jumlah Berkas Arsip Yang Dikelola	57.615 berkas	60,004 berkas	59.500 berkas	-	-	-	59.500 berkas	Indikator Lama
<b>3</b>		<b>Fokus Pelayanan Urusan Pilihan</b>								
<b>I</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi</b>								
	1	Persentase pendaftar transmigrasi yang terfasilitasi	2%	2%	3%	3%	3%	3%	3%	Indikator Sasaran PD
	2	persentase Penduduk yang mendapatkan sosialisasi ketransmigrasian	-	-	-	20%	20%	20%	20%	Indikator Program PD
	3	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	-	0	tidak ada kawasan transmigrasi					Lppd



Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	4	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	-	0	tidak ada pemukiman transmigrasi yang difasilitasi					Lppd	
	5	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	-	0	tidak ada pemukiman transmigrasi yang dibina					Lppd	
<b>4</b>	<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>										
<b>I</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>										
	1	Nilai Indeks reformasi birokrasi	Indeks	(B) 67,34	(B) 65,55	(B) 67	(B) 68	(B) 69	(BB) 70,01	(BB) 70,01	Lanjutan Indikator Tujuan Kota
	2	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah Daerah	Skor	B (63,5)	BB (70,01)	BB (73)	BB (76)	BB (79)	A (80,01)	A (80,01)	Lanjutan indikator sasaran kota
	3	Persentase Penyediaan data dan informasi yang mutakhir, valid, komprehensif, aman, transparan dan cepat dalam rangka fasilitasi pengambilan keputusan	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Tujuan PD
	4	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Tinggi/ Sangat Tinggi	3,3056 Sangat Tinggi	3,385 Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Lanjutan Indikator Sasaran Kota
	5	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun	Indeks	82,85 (baik)	85,501 (baik)	82,85 (baik)	83 (baik)	85 (baik)	86 (baik)	86 (baik)	Lanjutan Indikator Sasaran Kota
	6	Nilai indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	-	B	C	B	B	B	B	Indikator Sasaran Rutin Semua PD dan Indikator Tujuan Kecamatan
	7	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Skor	A	A	A	A	A	A	A	Indikator Program Rutin Semua PD
	8	Persentase Indeks RB Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Madiun bernilai baik	%	-	-	70%	72%	74%	76%	78%	Indikator Tujuan PD

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	9	Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Madiun yang berpredikat BB	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	10	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	11	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks			80,08				80,08	Indikator Program PD
	12	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	13	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Indeks			80,98				80,98	Indikator Program PD
	14	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	15	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Lppd
	16	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	3,93%	21,52%	21,55%	21,60%	21,65%	21,70%	21,70%	Lppd
	17	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	83,35%	87,42%	87,50%	87,60%	87,70%	87,80%	87,80%	Lppd
	18	Persentase Capaian Kinerja Indikator Sasaran Kota (LKJ Kota) Sesuai Target yang ditetapkan	%	-	74%	-	-	-	-	74%	Indikator Lama
	19	persentase jumlah pengadaan barang/jasa yang terealisasi	%	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
	20	persentase OPD yang melaporkan progres fisik dan keuangan tepat waktu sesuai jadwal pelaksanaan	%	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama



Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	21	jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi	kali	-	15	-	-	-	-	15	Indikator Lama
	22	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang indeks Kepuasan Masyarakatnya Bernilai Baik	%	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
	23	Nilai IKM Bagian Umum	Indeks	-	81	-	-	-	-	81	Indikator Lama
	24	IKM di Bidang Administrasi dan Keuangan	Indeks	-	81	-	-	-	-	81	Indikator Lama
	25	IKM di Bidang Kerumahtanggaan	Indeks	-	81	-	-	-	-	81	Indikator Lama
	26	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang keprotokolan dan kepegawaian	Indeks	-	81	-	-	-	-	81	Indikator Lama
	27	Pelayanan Dibidang Hukum	jenis	-	3 jenis	-	-	-	-	3 jenis	Indikator Lama
	28	Persentase Pencapaian Kinerja Pemerintahan Tepat waktu	%	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
	29	Persentase Pelayanan Kedinasan Pimpinan	%	-	105	-	-	-	-	105	Indikator Lama
	30	Jumlah Dokuem Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang tepat syarat	Do kumen	-	6 dokumen	-	-	-	-	6 dokumen	Indikator Lama
	31	Jumlah Ferjanjian Kerjasama	kali	-	10 Kerjasama	-	-	-	-	10 Kerjasama	Indikator Lama
	32	Persentase Produk Hukum yang Berkualitas	%	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
	33	Nilai Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik	skor	-	2,75	-	-	-	-	2,75	Indikator Lama
	34	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai regulasi	%	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
	35	Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Kinerja (LKJ Perangkat Daerah) Bernilai Sangat Baik (≥ 100)	%	-	94,12	-	-	-	-	94,12	Indikator Lama

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Persentase Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi	%	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
37	Persentase OPD yang melaksanakan kegiatan sesuai jadwal	%	-	0	-	-	-	-	0	Indikator Lama
38	jumlah kegiatan pendukung aktivitas ekonomi	Kali	-	4	-	-	-	-	4	Indikator Lama
39	Jumlah kegiatan terkait penyelesaian peredaran rokok ilegal	kali	-	2	-	-	-	-	2	Indikator Lama
40	Tingkat Inflasi	skor	-	1,8	-	-	-	-	1,8	Indikator Lama
41	Persentase Kelompok Sosial Ekonomi yang difasilitasi	%	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
42	Persentase Jumlah Kegiatan Sosialisasi Bidang Cukai Yang Dilaksanakan	%	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
<b>II Sekretariat DPRD</b>										
1	Persentase Terpenuhinya Hak Keuangan dan Administratif DPRD sesuai ketentuan Peratuarn Perundang-Undangan)	%	-	-	-	100%	-	-	100%	Indikator Tujuan PD
2	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	-	-	80	80	85	86	86	Indikator Tujuan PD
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	-	-	-	84	-	-	84	Indikator Sasaran PD
4	Persentase Tertib Administrasi	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
5	Persentase Kompetensi Sumber Daya Manusia	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
6	Persentase Sarana dan Prasarana yang berkualitas	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
7	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum yang Sesuai dengan Standart Pelayanan	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD



Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	8	Persentase Fasilitas Penganggaran APBD yang Sesuai Dengan Standart Pelayanan	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	9	Persentase Fasilitas Pengawasan Pelaksanaan APBD yang Sesuai dengan Standart Pelayanan	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan Tugas dan Fungsi	Indeks	81,29	90,42	79	80	81	82	82	Indikator Program PD
	11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan Perundang-Undangan, Dokumentasi dan Rapat	Indeks	-	80	-	-	-	-	80	Indikator Lama
<b>5</b>	<b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</b>										
<b>III</b>	<b>Perencanaan</b>										
	1	Tercapainya Target Sasaran – sasaran RPJMD	%	86%	70%	80%	85%	-	-	85%	Indikator Tujuan PD
	2	Indeks Perencanaan	Indeks	-	32	33	34	35	36	36	Indikator Tujuan PD
	3	Sinergitas dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA)	%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	Indikator Sasaran PD
	4	Persentase Capaian Kinerja Atas Target Indikator Program Pemerintah Kota Madiun	%	93%	91%	100%	100%	-	-	100%	Indikator Sasaran PD
	5	Indeks Kualitas RPJMD	Indeks	-	31	32	33	34	35	35	Indikator Sasaran PD
	6	Indeks Kualitas RKPD	Indeks	-	31	32	33	34	35	35	Indikator Sasaran PD
	7	Persentase capaian kinerja program RKPD	%	-	90%	91%	92%	93%	94%	94%	Indikator Sasaran PD
	8	Nilai SAKIP pada komponen perencanaan	Skor	-	23,65	24	24,5	25	25,5	25,5	Indikator Sasaran PD

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	9	persentase program penanganan covid-19 yang dilaksanakan	%	-	0	91	0	0	0	0	Indikator Sasaran PD
	10	persentase sasaran Perangkat Daerah yang berbasis outcome	%		90%	91%	92%	93%	94%	94%	Indikator Sasaran PD
	11	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Sesuai Ketentuan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	12	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	13	Sinergitas dokumen perencanaan Kota Madiun, Provinsi dan Nasional	%	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
	14	Penerapan Kebijakan pembangunan daerah yang menerapkan konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)	%	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
	15	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaannya sesuai Ketentuan	%	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
	16	Persentase Capaian target program pembangunan bidang ekonomi, sosil dan budaya	%	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
	17	Persentase Dokumen Perencanaan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya yang dapat dimanfaatkan	%	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
	18	Persentase Capaian target program pembangunan bidang prasarana wilayah	%	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
	19	Persentase Dokumen Perencanaan pembangunan prasarana wilayah yang dapat dimanfaatkan / Persentase capaian target sasaran pembangunan Kota Madiun Bidang Prasarana Wilayah	%	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
	20	Persentase Pemerintah Kota yang capaian kinerjanya lebih dari 80	%	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama



Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
IV	<b>Keuangan</b>										
	1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP/ WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Lanjutan Sebelumnya Indikator Sasaran Kota Menjadi Indikator Tujuan PD
	2	Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai WTP	%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	Indikator Sasaran PD
	3	Persentase pemanfaatan aset daerah	%	-	-	96%	96%	96%	96%	96%	Indikator Sasaran PD
	4	Persentase aset yang dilindungi	%	70,85%	77%	80%	80%	-	-	80%	Indikator Sasaran PD
	5	Persentase tersusunnya Laporan BTT	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	6	Persentase Pengelolaan kas daerah yang akuntabel	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	7	Persentase Tersusunnya dokumen Perencanaan Penganggaran yang tepat waktu dan berkualitas	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	8	Persentase Laporan Keuangan OPD yang sesuai SAP	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	9	Persentase bidang tanah pemerintah kota yang bersertifikat	%	-	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Indikator Sasaran PD
	10	Realisasi kinerja keuangan yang memenuhi target	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	11	Pengelolaan Aset yang berkondisi baik	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	12	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	19,68%	21%	21,10%	21,20%	21,20%	21,30%	21,30%	Lppd
	13	Rasio PAD terhadap PDRB Non Migas	%	2,52%	2,49%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	Lppd
	14	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (expenditures)	%	66,15%	60,63%	60,70%	60,90%	62,20%	63%	63%	Lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	83,36%	79,38%	80%	80%	80%	80%	80%	Lppd
16	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	107	106%	93,15%	95,50%	102%	103%	103%	Lppd
17	Manajemen Aset	Ya/ tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Lppd
18	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	19,47%	22,15%	21,50%	20,10%	19%	18%	18%	Lppd
19	Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Rp.	82.332.000.000	76.350.000.000	76.978.000.000	80.255.000.000	-	-	80.255.000.000	Indikator Tujuan PD
20	Capaian Target Pajak Daerah	%	-	-	-	100%	100%	100%	100%	Indikator Tujuan PD
21	Persentase peningkatan target pajak daerah	%	-	-	-	5%	5%	5%	5%	Indikator Tujuan PD
22	persentase Peningkatan Target Pajak daerah	%	35%	36%	37%	38%	-	-	38%	Indikator Sasaran PD
23	persentase peningkatan objek pajak yang dipantau dengan IT	%	-	-	-	5%	5%	5%	5%	Indikator Sasaran PD
24	persentase peningkatan pembayaran pajak melalui transaksi elektronik	%	-	-	-	5%	5%	5%	5%	Indikator Sasaran PD
25	persentase Pencapaian Target Pajak daerah berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah	%	-	-	-	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
26	persentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	Indikator Program PD
27	Peningkatan Capaian Penagihan Pajak Daerah	%	37%	41%	41%	41%	42%	43%	43%	Indikator Program PD
28	Persentase Peningkatan nilai Aset Pemerintah Daerah	%	-	6	-	-	-	-	6	Indikator Lama
29	Persentase Bidang tanah bersertifikat	%	-	77%	-	-	-	-	77%	Indikator Lama



Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	30	Persentase Kontribusi Pajak daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	%	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
	31	Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu	Tidak/ tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	-	-	-	-	Tepat Waktu	Indikator Lama
	32	Pengesahan Perda APBD Tepat Waktu	Tidak/ tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	-	-	-	-	Tepat Waktu	Indikator Lama
	33	Persentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu	%	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
	34	Kontribusi Pengelolaan Aset Terhadap PAD	Rp.	-	8.407.092.860	-	-	-	-	8.407.092.860	Indikator Lama
	35	Persentase Ketersediaan Basis Data Pajak Daerah	%	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
	36	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	%	-	118	-	-	-	-	118	Indikator Lama
<b>IV</b>		<b>Kepegawaian</b>									
	1	Indeks Profesionalisme ASN	Indeks	69,65	69,66	69,66	70	-	-	69,66	Indikator Tujuan PD
	2	Indeks Sistem Merit	Indeks	-	130,5	170	190	220	250	250	Indikator Tujuan PD
	3	Persentase Penempatan Jabatan Sesuai Kompetensi	%	17,25	34,38	23,52	25,5	-	-	23,52	Indikator Lama
	4	Prosentase Penempatan Pegawai dalam Jabatan sesuai dengan SKJ	%	-	-	50%	50%	60%	70%	70%	Indikator Sasaran PD
	5	Persentase penilaian kinerja pegawai dengan hasil baik	%	-	-	95%	95%	-	-	95%	Indikator Sasaran PD
	6	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	%	-	-	30	33	-	-	33	Indikator Sasaran PD
	7	Persentase kesesuaian usulan pengadaan sesuai dengan jumlah formasi yang dibutuhkan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	8	Persentase perencanaan ASN sesuai dengan kebutuhan	%	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	9	Persentase SKP ASN yang bernilai baik (lebih dari 75)	%	0	0	90%	90%	90%	90%	90%	Indikator Sasaran PD

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Persentase Pelanggaran Disiplin ASN	%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	Indikator Sasaran PD
11	Persentase terpenuhinya penggajian, penghargaan sesuai dengan aturan yang berlaku	%	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
12	Persentase data kepegawaian yang mutakhir	%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
13	Persentase Pemberhentian ASN tepat waktu	%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
14	Nilai IKM Pelayanan Kepegawaian	Indeks	87,97	87,62	87,52	87,6	87,7	87,7	87,7	Indikator Program PD
15	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	-	167%	184%	222%	268%	339%	339%	Lppd
16	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	-	10%	11%	14%	17%	18%	18%	Lppd
17	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	-	72%	74%	80%	84%	87%	87%	Lppd
18	Persentase Nilai SKP Pegawai yang Bernilai Baik	%	-	100%	-	-	-	-	100%	Indikator Lama
19	Persentase Tercukupinya Usulan Diklat Aparatur	%	-	113	-	-	-	-	113	Indikator Lama
20	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian sesuai SOP	%	-	145	-	-	-	-	145	Indikator Lama
21	Persentase Penyelesaian SK Terkait Kesejahteraan PNS yang sesuai SOP	%	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
22	Persentase Penempatan PNS sesuai SKM	%	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
23	Persentase Kedisiplinan ASN	%	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
24	Persentase Pengembangan ASN	%	-	112	-	-	-	-	112	Indikator Lama



Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>V</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>										
	1	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai PP 11 Thn 2017	%	-	30%	30%	33%	35%	37%	37%	Indikator Sasaran PD
	2	Persentase Realisasi Pengembangan SDM	%	-	-	10%	12%	13%	14%	14%	Indikator Program PD
<b>VI</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>										
	1	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	-	1892	1892	1900	1925	1950	1950	Indikator Sasaran Kota dan Indikator Sasaran PD
	2	Indeks kualitas penelitian/kajian	Indeks		32	33	34	35	36	36	Indikator Sasaran PD
	3	persentase program SMART CITY yang dilaksanakan	%		75%	80%	85%	90%	95%	95%	Indikator Sasaran PD
	4	persentase peningkatan jumlah usulan jenis data untuk diajukan rekomendasi	%		5%	5%	5%	5%	5%	5%	Indikator Sasaran PD
	5	persentase hasil penelitian/kajian yang dapat dimanfaatkan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
<b>6</b>	<b>Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan</b>										
<b>VII</b>	<b>Inspektorat Daerah</b>										
	1	Level Maturitas SPIP Kota Madiun	Skor	2	2	3	3	-	-	3	Indikator Tujuan PD
	2	Penilaian Mandiri SPIP	Skor	-	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.4	Indikator Tujuan PD
	3	persentase Temuan Hasil pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	%	-	91%	92%	93%	-	-	93%	Indikator Sasaran PD
	4	Level Kapabilitas APIP	skor	-	2+	2+	2+	-	-	2+	Indikator Sasaran PD

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Laporan keuangan tersampaikan tepat waktu	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
6	Nilai IKM Inspektorat	Indeks	-	87 indeks	88 indeks	89 indeks	90 indeks	91 indeks	91 indeks	Indikator Sasaran PD
7	Nilai Survey Kepuasan atas Kinerja Inspektorat	Nilai	-	4.05	4.1	4.15	4.2	4.25	4.25	Indikator Sasaran PD
8	Persentase Tindak lanjut pengaduan masyarakat yang terselesaikan dengan cepat dan tepat	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
9	Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang bersertifikat dan profesional	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
10	Persentase Laporan BMD yang tersampaikan secara tertib dan tepat waktu	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
11	Persentase Rumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pengawasan yang disusun sesuai dengan Etika dan Profesionalisme	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
12	Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Administrasi Pengawasan yang tersampaikan secara tertib dan tepat waktu	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
13	Persentase laporan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal yang tersampaikan secara tertib dan tepat waktu	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
14	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Ketaatan yang Dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja perangkat daerah	%	-	-	-	60%	65%	70%	70%	Indikator Sasaran PD
15	Persentase jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan kinerja yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah	%	-	-	-	60%	65%	70%	70%	Indikator Sasaran PD



Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Persentase rekomendasi hasil pengawasan lainnya yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah	%	-	-	-	60%	65%	70%	70%	Indikator Sasaran PD
17	Persentase rekomendasi hasil reviu rencana keuangan daerah yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja keuangan daerah	%	-	-	-	60%	65%	70%	70%	Indikator Sasaran PD
18	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Madiun	Nilai	-	-	-	71 nilai	75 nilai	81 nilai	81 nilai	Indikator Sasaran PD
19	Nilai rata - rata evaluasi SAKIP oleh Inspektorat minimal dalam kategori Baik pada perangkat daerah Kota Madiun	Nilai	-	-	-	76,01	79,01	80,01	80,01	Indikator Sasaran PD
20	Penilaian mandiri maturitas SPIP Terintegrasi	Nilai	-	-	-	2.00	2.50	3.00	3.00	Indikator Sasaran PD
21	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	Indeks	-	2.0	2.0	2.0	2.50	3.00	3.00	Indikator Sasaran PD
22	Jumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang diusulkan untuk mendapatkan predikat menuju WBK	Unit	-	-	-	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	Indikator Sasaran PD
23	Persentase rekomendasi rencana aksi hasil koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah	%	-	-	-	60%	65%	70%	70%	Indikator Sasaran PD
24	Persentase rekomendasi hasil reviu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah	%	-	-	-	60%	65%	70%	70%	Indikator Sasaran PD
25	Indeks persepsi pegawai Inspektorat atas Kepuasan Kinerja Inspektorat Kota Madiun	Indeks	-	-	-	3.50	3.75	4.00	4.00	Indikator Sasaran PD
26	Persentase realisasi dukungan layanan manajemen pengawasan internal	%	-	-	-	60%	70%	80%	80%	Indikator Sasaran PD

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	27	%	-	-	-	60%	70%	80%	80%	Indikator Sasaran PD
	28	%	-	25%	30%	35%	40%	45%	45%	Indikator Program PD
	29	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	30	skor	-	2	3	3	3	3	3	Lppd
	31	Skor	-	2+	2+	2+	3	3	3	Lppd
	32	orang	-	25 Orang	-	-	-	-	25 Orang	Indikator Lama
	33	%	-	100%	-	-	-	-	100%	Indikator Lama
<b>7</b>	<b>Unsur Kewilayahan</b>									
<b>VIII</b>	<b>Kecamatan</b>									
	1	%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	Indikator Tujuan PD
	2	%	0%	11%	33%	44%	55%	66%	66%	Indikator Sasaran PD
	3	%	11%	22%	33%	44%	55%	66%	66%	Indikator Sasaran PD
	4	%		11%	22%	33%	44%	55%	55%	Indikator Sasaran PD
	5	Indeks		2,77	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	Indikator Sasaran PD
	6	Indeks		2,85	2,90	2,93	2,96	2,99	2,99	Indikator Sasaran PD



Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Nilai Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan Taman	Indeks		2,60	3,25	3,30	3,50	3,70	3,70	Indikator Sasaran PD
8	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Manguharjo	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
9	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Kartoharjo	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
10	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Taman	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
11	persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	%	100%	100%	100%				100%	Indikator Sasaran PD
12	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan Manguharjo	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
13	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan Kartoharjo	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
14	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan Taman	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
15	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Manguharjo	Indeks	93,34	90,54	90,49	90,03	90,03	90,03	90,03	Indikator Program
16	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kartoharjo	Indeks	87,56	87,7	87,7	87,75	87,8	87,85	87,85	Indikator Program

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	17	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Taman	Indeks	88,30	88,29	88,12	88,46	88,78	88,94	88,94	Indikator Program
	18	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan Manguharjo dan tidak dilaksanakan OPD lain	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
	19	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan Kartoharjo dan tidak dilaksanakan OPD lain	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
	20	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan Taman dan tidak dilaksanakan OPD lain	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
	21	Persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Manguharjo	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
	22	Persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kartoharjo	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
	23	Persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Taman	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
	24	jumlah usulan prioritas musrenbang kecamatan yang terakomodir dalam RKPD di kecamatan	usulan	18 usulan	18 usulan	18 usulan	-	-	-	18 usulan	Indikator Program PD
	25	Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	%	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
	26	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindak lanjuti	%	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
	27	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam RKPD	%	-	10	-	-	-	-	10	Indikator Lama
	28	Indeks perkembangan kelurahan	skor	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
<b>8</b>	<b>Unsur Pemerintahan Umum</b>										
<b>IX</b>	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik</b>										





Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
A	<b>Kemampuan Ekonomi</b>										
I	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>										
	1	Persentase koperasi yang berkualitas	%	0,70%	1,30%	10,53%	11,76%	-	-	11,76%	Indikator Tujuan PD
	2	Persentase pertumbuhan Usaha Mikro yang beromzet naik	%	-	-	0,05%	0,05%	-	-	0,05%	Indikator Tujuan PD
	3	persentase Usaha Mikro yang beromzet naik	%	-	-	0,047%	0,075%	0,09%	0,12%	0,12%	Indikator Tujuan PD
	4	persentase koperasi yang bersertifikat NIK	%	-	-	80%	83%	85%	87%	87%	Indikator Tujuan PD
	5	Persentase koperasi aktif	%	99,33%	98,69%	98,69%	98,71%	-	-	98,71%	Indikator Sasaran PD
	6	Persentase Usaha Mikro yang beromzet naik	%	-	-	0,05%	0,05%	-	-	0,05%	Indikator Sasaran PD
	7	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Yang Bersertifikat Nik	%	-	-	3%	3%	3%	3%	3%	Indikator Sasaran PD
	8	Persentase jumlah koperasi yang jenis usahanya bertambah	%	-	-	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	Indikator Sasaran PD
	9	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Yang Beromzet Naik Setelah Dipromosikan	%	-	-	15%	15%	15%	15%	15%	Indikator Sasaran PD
	10	Persentase peningkatan Pelaku Usaha Mikro Yang Beromzet Naik Setelah Pembinaan	%	-	-	10%	10%	10%	10%	10%	Indikator Sasaran PD
	11	Persentase koperasi bersertifikat NIK	%	0	81,29%	80,13%	86,50%	-	-	86,50%	Indikator Program PD
	12	Persentase koperasi aktif dengan omzet meningkat	%	-	-	30%	30%	-	-	30%	Indikator Program PD
	13	Persentase Usaha Mikro terfasilitasi yang beromzet naik	%	-	-	7,00%	7,00%	-	-	7,00%	Indikator Program PD
	14	Persentase Usaha Mikro dibina yang beromzet naik	%	-	-	7%	7%	7,33%	8%	8%	Indikator Program PD
	15	Persentase jumlah koperasi yang disetujui permohonan bersertifikat NIK	%	-	-	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	Indikator Program PD
	16	Persentase koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah	%	-	-	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	Indikator Program PD









Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	33	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	34	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	%	-	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	Lppd
	35	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	%	-	0%	0,02%	0,04%	0,06%	0,07%	0,07%	Lppd
	36	Persentase jumlah usahamikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	%	-	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	Lppd
	37	Rasio usaha mikroyang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	-	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	Lppd
	38	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	%	-	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	Lppd
	39	persentase pertumbuhan usaha mikro yang mandiri	%	-	0,005	-	-	-	-	0,005	Indikator Lama
	40	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	%	-	0,42	-	-	-	-	0,42	Indikator Lama
	<b>II</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal</b>									
	1	ICOR	Poin	1,70	-0,91	5,00	4,79	4,58	4,37	4,37	Indikator Tujuan PD
	2	Nilai Realisasi Penanaman Modal	M	968,702 M	377,632 M	191 M	193 M	194 M	195 M	195 M	Indikator Sasaran PD
	3	Persentase penerbitan ijin sesuai SP	%	-	-	78%	80%	82%	85%	85%	Indikator Sasaran PD
	4	Jumlah Rekomendasi Terhadap peraturan daerah/peraturan walikota yang terkait dengan investasi	rekom	-	-	2 rekom	2 rekom	2 rekom	2 rekom	2 rekom	Indikator Sasaran PD

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	5	Persentase terpenuhinya informasi yang dibutuhkan investor	%	-	-	-	80%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	6	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanaman modal	%	-	0	0	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	7	Persentase investor yang merealisasikan investasinya	%	-	19,23%	13%	26%	32%	39%	39%	Indikator Program PD
	8	Persentase Pelayanan Perizinan Terselesaikan	%	-	-	80%	85%	90%	95%	95%	Indikator Program PD
	9	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	Perusahaan	-	-	80 perusahaan	100 perusahaan	100 perusahaan	100 perusahaan	100 perusahaan	Indikator Program PD
	10	persentase Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik	%	-	-	90%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	11	Persentase peningkatan investasi dikabupaten/ kota	%	-66,15%	-66,17%	-49,33%	1,05%	0,52%	0,52%	0,52%	Lppd
	12	PERDA mengenai pemberian fasilitas/ intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Dokumen	-	RUPM	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Lppd
	13	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	Dokumen	-	RUPM	0	0	1 dokumen	0	1 dokumen	Lppd
	14	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Dokumen	-	RUPM	0	0	0	1 dokumen	1 dokumen	Lppd
	15	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Kali	-	0	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Lppd
	16	Kegiatan pameran penanaman modal	Kali	-	0	0	0	1 kali	1 kali	1 kali	Lppd
	17	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Kali	-	0	-	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Lppd
	18	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Orang	-	39	267	275	280	285	285	Lppd
	19	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Buah	1999	2035	1500	1600	1700	1800	1800	Lppd





Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	8	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	Ada/ tidak	-	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Lppd
	9	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	orang	-	90 Orang	0	245	250	260	260	Lppd
	10	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi	ekor	-	477.406 ekor	477.406 ekor	497.400 ekor	517.400 ekor	537.406 ekor	537.406 ekor	Lppd
	11	Presentase Peningkatan Produksi Perikanan	%	-	-	5%	-	-	-	5%	Indikator Program PD
	12	Persentase peningkatan Pendapatan pelaku usaha perikanan	%	-	1%	-	-	-	-	1%	Indikator Lama
	<b>IV</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata</b>									
	1	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	8,6	8,7	8,6	8,7	8,8	8,9	8,9	Lanjutan Sebelumnya Indikator Sasaran Kota Menjadi Indikator Tujuan PD
	2	Jumlah Penetapan destinasi wisata	Destinasi	0	1 destinasi	2 destinasi	3 destinasi	4 destinasi	5 destinaai	5 destinaai	Indikator Tujuan PD
	3	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	421.753	351.554	375.000	400.000	425.000	450.000	450.000	Indikator Sasaran PD
	4	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	destinasi	2 destinasi	2 destinasi	2 destinasi	2 destinasi	-	-	2 destinasi	Indikator Program PD
	5	Persentase Peningkatan Destinasi Pariwisata yang ditetapkan	%	0	0	0	10%	20%	30%	30%	Indikator Program PD
	6	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Event	5 event	3 event	4 event	4 event	-	-	4 event	Indikator Program PD
	7	Persentase Peningkatan Pemasaran Pariwisata yang diselenggarakan	%	0	0	5%	10%	15%	20%	20%	Indikator Program PD



Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Persentase SDM pariwisata pembekalan sektor kepariwisataan	%	-	18,68%	18,68%	19,00%	19,50%	20%	20%	Indikator Program PD
9	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	2%	-93%	1%	2%	2%	3%	3%	Lppd
10	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	-	10.67%	5%	7%	9%	10%	10%	Lppd
11	Tingkat hunian akomodasi	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
12	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	-	4,80%	4,90%	5%	5,10%	5,20%	5,20%	Lppd
13	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	-	265,70%	265,80%	265,90%	266%	266,10%	266,10%	Lppd
14	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata		0	0	0	0	0	0	0	Lppd
15	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota		-	704	704	704	704	704	704	Lppd
16	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	orang	12.314	853	875	900	925	950	975	Lppd
17	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	kali	3	5	5	5	5	28	28	Lppd
18	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi		0	0	0	0	0	0	0	Lppd
19	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri		Belum ada	Belum ada	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	Lppd
20	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	%	18,68%	18,68%	18,68%	19,00%	19,50%	20%	20%	Lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	21	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	tempat	0	0	3	3	3	3	3	Lppd
	22	Pertumbuhan Sektor Pariwisata	%	-	8,60%	-	-	-	-	8,60%	Indikator Lama
	23	Persentase Peningkatan Promosi yang dilaksanakan	%	-	2	-	-	-	-	2	Indikator Lama
	<b>V</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian</b>									
	1	Peningkatan produktivitas pertanian (ton/ha)	Ton/ ha	7,21 ton/Ha	6,9 ton/ha	7,21 ton/Ha	7,22 ton/Ha	-	-	7,22 ton/Ha	Indikator Sasaran PD
	2	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan dengan biaya produksi	skor	1,205	1,206	1,21	1,214	1,216	1,221	1,221	Indikator Sasaran PD
	3	Rasio Pendapatan Petani dengan Biaya Produksi	rasio	-	1,1	1,1	1,12	1,14	1,16	1,16	Indikator Sasaran PD
	4	Efektifitas Sarana Pertanian (%)	%	-	-	50	55	60	65	65	Indikator Program PD
	5	persentase Pengembangan Prasarana yang Berfungsi dengan baik (%)	%	-	-	50	50	75	100	100	Indikator Program PD
	6	Persentase Jumlah Hewan dan Produk asal Hewan yang Terawasi (%)	%	-	-	75%	75%			75%	Indikator Program PD
	7	persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Jumlah Menular (%)	%	-	50,86	10	10	10	10	10	Indikator Program PD
	8	persentase Lahan Aman Bencana Pertanian (%)	%	-	-	70	72	74	76	76	Indikator Program PD
	9	persentase kelompok tani yang memiliki Izin Usaha Pertanian (%)	%	-	-		10	12	15	15	Indikator Program PD
	10	persentase Jumlah SDM Pertanian Terlatih (%)	%	-	-	15	20	20	20	20	Indikator Program PD
	11	Produktivitas pertanian per hektar per tahun		Nilai sama dengan indikator no.1							Lppd



Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	12	Sarana pertanian yang diberikan	Jenis	-	13 jenis	1	2	2	2	7	Lppd
	13	Prasarana pertanian yang digunakan	Jenis	-	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	Lppd
	14	Penerbitan izin usaha pertanian	Kali	-	-	0	2	2	2	2	Lppd
	15	Persentase prasarana yang digunakan	%	-	66.7%	75	75	75	75	75	Lppd
	16	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian dikab/kota	%	-	-	-	50	50	50	50	Lppd
	17	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana(%)	%	-	50,86	50	50	50	50	50	Lppd
	18	Persentase Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan	%	-	2%	-	-	-	-	2%	Indikator Lama
	19	Nilai Tukar Usaha Pertanian, Peternakan dan Perikanan	%	-	1,389	-	-	-	-	1,389	Indikator Lama
	<b>VI</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan</b>									
	1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	5,82	-10,83	2,16	2,44	2,91	3,16	3,16	Lanjutan Indikator Sasaran Kota
	2	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Jasa	%	-	-0,93	0,58	0,76	0,84	1,02	1,02	Indikator Sasaran Kota
	3	Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Perdagangan	%	23,56	24,05	24,05	24,05	-	-	24,05	Indikator Tujuan PD
	5	Persentase Nilai Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB		-	-	-	24,05	24,05	24,05	24,05	Indikator Tujuan PD
	6	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Perdagangan	%	0	1,76	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8	Indikator Sasaran PD





Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	b. Toko swalayan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
20	Persentase penerbitan TDG	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
21	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
22	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
23	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
24	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	Ada/ tidak	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Lppd
25	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	Lppd
26	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Ada/ tidak	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Lppd
27	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	%		95%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
38	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
39	Persentase Pertumbuhan Perdagangan Non Pasar Rakyat	%	-	1,76	-	-	-	-	1,76	Indikator Lama







Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	22	%	-	1,28%	1%	1%	1,20%	1,20%	1,20%	Lppd
	23	%	-	-12,84	-	-	-	-	-12,84	Indikator Lama
	24	%	-	17,09	-	-	-	-	17,09	Indikator Lama
	25	%	-	80	-	-	-	-	80	Indikator Lama
<b>B</b>	<b>Fasilitas Wilayah Infrastruktur</b>									
	1	Indeks	85,32	86,67	87,78	88,19	88,60	89,01	89,01	Indikator Tujuan Kota
<b>I</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>									
	1	Indeks	96,72	96,85	98,06	98,25	98,42	98,59	98,59	Lanjutan Indikator Sasaran Kota dan Indikator Tujuan PD
	2	%	-	-	79,84%	80,89%	81,58%	82,82%	82,82%	Indikator Sasaran PD
	3	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran dan Indikator Program PD
	4	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	5	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	6	%	93,64%	94,03%	94,50%	95,00%	95,50%	96%	96%	Indikator Sasaran PD











Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	40		-	0	0	0	0	0	0	Lppd
	41		-	0	0	0	0	0	0	Lppd
	42		-	0	0	0	0	0	0	Lppd
	43	%	-	100	100	100	100	100	100	Lppd
	44		-	0	0	0	0	0	0	Lppd
	45		-	0	0	0	0	0	0	Lppd
	46		-	0	0	0	0	0	0	Lppd
	47		-	0	0	0	0	0	0	Lppd
	48		-	0	0	0	0	0	0	Lppd
	49		-	0	0	0	0	0	0	Lppd
	50		-	0	0	0	0	0	0	Lppd
	51	%	-	98%	98%	98%	98%	98%	98%	Lppd
	52	Buah	-	400	410	415	420	425	425	Lppd















Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90		-	50	50	50	50	50	50	Lppd
	91		-	0	0	0	0	0	0	Lppd
	92	%	-	100	100	100	100	100	100	Lppd
	93	%	100	100	100	100	100	100	100	SPM
	94	%	-	90	90	90	90	90	90	SPM
	95	%	100	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
	96	%	92,41	94.03%	-	-	-	-	94.03%	Indikator Lama
	97	titik	-	12 titik	-	-	-	-	12 titik	Indikator Lama
<b>II</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>									
	1	Indeks	85,69	87,12	89,13	90,14	91,17	92,19	92,19	Sebelumnya Indikator Sasaran Kota Menjadi Indikator Tujuan PD
	2	Indeks	99,65	99,65	99,60	99,68	99,80	99,90	99,90	Lanjutan Indikator Sasaran PD





Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	17		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	0	0	0	0	0	0	lppd
	18		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	0	0	0	0	0	0	lppd
	19		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0	0	0	0	0	0	0	lppd
	20		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	0	0	0	0	0	0	lppd
	21		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	0	0	0	0	0	0	lppd
	22		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	0	0	0	0	0	0	lppd
	23	KK	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	65 KK	65 KK	105 KK	105 KK	105 KK	105 KK	lppd
	24		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	0	0	0	0	0	0	lppd
	25		Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	0	0	0	0	0	0	lppd
	26	Ha	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	0 ha	52,41 ha	40,41 ha	28,41 ha	16,41 ha	0 ha	0 ha	lppd
	27	Unit	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	129 unit	115 unit	133 unit	60 unit	100 unit	100 unit	637 unit	lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	28	ha	0 ha	12,08 ha	10,08 ha	12,08 ha	12,08 ha	0 ha	0 ha	lppd
	29	unit	42329	42329	42329	42329	42329	42329	42329	lppd
	30	unit	129 unit	115 unit	133 unit	60 unit	100 unit	100 unit	637 unit	lppd
	31	unit	20 unit	21 unit	133 unit	60 unit	60 unit	60 unit	60 unit	lppd
	32	unit	0	1438 unit	1438 unit	1438 unit	1438 unit	1438 unit	1438 unit	lppd
	33	%	-	171,87%	171,87%	171,87%	171,87%	171,87%	171,87%	lppd
	34	unit	-	133	50	50	50	50	333	lppd
	35	unit	37	38	38	38	38	38	38	lppd
	36	unit	-	5948 unit	5948 unit	5948 unit	5948 unit	5948 unit	5948 unit	lppd
	37	unit	-	5948 unit	5948 unit	5948 unit	5948 unit	5948 unit	5948 unit	lppd
	38	unit	-	5948 unit	5948 unit	5948 unit	5948 unit	5948 unit	5948 unit	lppd
	39	unit	-	5948 unit	5948 unit	5948 unit	5948 unit	5948 unit	5948 unit	lppd
	40	Unit	-	5948 unit	5948 unit	5948 unit	5948 unit	5948 unit	5948 unit	lppd
	41	orang	37	38	38	38	38	38	38	lppd
	42	Orang	37	38	38	38	38	38	38	lppd
	43	orang	37	38	38	38	38	38	38	lppd
	44	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Spm
	45	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	spm
	46	%	99,95	99,95	-	-	-	-	99,95	Indikator Lama





Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12		0	0	0	0	0	0	0	Lppd
	13		0	0	0	0	0	0	0	Lppd
	14		0	0	0	0	0	0	0	Lppd
	15	%	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
<b>IV</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup</b>									
	1	Indeks	-	60,15	57,69	57,77	57,85	57,93	57,93	Lanjutan indikator Sasaran Kota dan Indikator Tujuan PD
	2	Indeks	-	51,28	51,29	51,3	51,31	51,32	51,32	Indikator sasaran PD
	3	Indeks	-	83,26	82,73	82,90	83,09	83,26	83,26	Indikator sasaran PD
	4	%	94,00%	97,01%	98,00%	98,50%	99,00%	99,00%	99%	Indikator sasaran PD
	5	%	61,54%	64,10%	69,23%	71,79%	79,49%	79,50%	79,50%	Indikator Program PD
	6	%	44,89%	53,19%	48%	49%	50%	50,10%	50,10%	Indikator Program PD
	7	%	-	-	-	94,32%	97,20%	100%	100%	Indikator Program PD
	8	%	-	70,96	71	71,5	75%	78%	78%	Indikator Program PD
	9	%	40%	44,59%	52,90%	64,70%	76,47%	88,20%	88,20%	Indikator Program PD





Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21		-	tidak ada MHA	tidak ada MHA	tidak ada MHA	tidak ada MHA	tidak ada MHA	tidak ada MHA	Lppd
	22		-	tidak ada MHA	tidak ada MHA	tidak ada MHA	tidak ada MHA	tidak ada MHA	tidak ada MHA	Lppd
	23	%	-	0	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	24	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	25	%	-	-	96,83%	96,83%	-	-	96,83%	Indikator Lama
	26	%	-	64,1	-	-	-	-	64,1	Indikator Lama
	27	%	-	44,59	-	-	-	-	44,59	Indikator Lama
<b>V</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan</b>									
	1	%	0,45	0,38	0,43	0,42	0,41	0,4	0,4	Indikator Tujuan PD
	2	Km/jam	-	37 km/jam	38 km/jam	39 km/jam	40 km/jam	41 km/jam	41 km/jam	Indikator Sasaran PD
	3	%	39%	42%	40%	41%	42%	43%	43%	Indikator Sasaran PD
	4	%	-	-	84%	88%	92%	96%	96%	Indikator Program PD
	5		-	-	-	-	-	-	-	Lppd
	6	%	0,45	0,38	0,43	0,42	0,41	0,4	0,4	Lppd



Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan		
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	7		Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	8		Terlaksananya pelayanan uji berkala	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	9		Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	10		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	11		Kepadatan Lalu Lintas	%	36,93%	33%	-	-	-	-	33%	Indikator Lama
	12		Persentase Perlengkapan jalan	%	64%	67%	-	-	-	-	67%	Indikator Lama

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

#### **9.1 Pedoman Transisi**

Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kota Madiun 2019-2024 berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017. RPJMD Kota Madiun Periode 2019-2024 merupakan Tahap IV (empat) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Madiun Tahun 2005-2025. Kedudukan RPJMD dalam RPJPD sangat penting untuk menjaga kesinambungan dari suatu periode 5 (lima) tahun pemerintahan ke periode 5 (lima) tahun berikutnya. RPJPD tahun 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan RPJMD, yang masing-masing tahapan telah pula memuat rumusan indikatif arahan prioritas kebijakan. Kedudukan RPJMD 2019-2024 Kota Madiun juga merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun setiap tahunnya. P-RPJMD juga merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (P-Renstra-PD) dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Madiun terpilih Tahun 2019-2024 akan berakhir pada tanggal 29 April 2024. Sementara itu, dokumen RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 akan berakhir pada akhir bulan Desember 2024. Oleh karena itu, untuk menjamin adanya kesinambungan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan memastikan, bahwa pada akhir perodesasi dari dokumen RPJMD ini tidak akan terjadi kekosongan regulasi, maka ditetapkan antara lain sebagai berikut :

1. Walikota dan Wakil Walikota Madiun terpilih Tahun 2019-2024 dapat terus melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai program dan kegiatan yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021;
2. Sambil menunggu penetapan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024, maka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2022 berpedoman pada rancangan awal P-RPJMD 2019 – 2024 dan memperhatikan RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;



3. Tahun pertama dari P-RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, yaitu Tahun 2021 dan seterusnya untuk selama 5 (lima) tahun.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

## **9.2 Kaidah Pelaksanaan**

Perubahan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 dijadikan sebagai landasan oleh Pemerintah Kota Madiun dan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang akan dituangkan kedalam dokumen rencana pembangunan tahunan kota Madiun untuk selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024, termasuk dalam penyusunan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (P-Renstra PD) Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja tahunan Perangkat Daerah (Renja PD) untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Berkaitan dengan itu, maka dalam dokumen RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 perlu dirumuskan beberapa kebijakan tentang kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Madiun dan seluruh pemangku kepentingan seperti masyarakat umum, dunia usaha, para akademis dan seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, berkewajiban untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen P-RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 dengan penuh tanggung jawab;
2. Walikota dan Wakil Walikota Madiun, dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan agar dalam implementasinya selaras dan bersinergi dengan dokumen P-RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024;
3. Untuk menjamin agar target capaian setiap program dapat dicapai secara optimal, maka sesuai kewenangannya Sekretaris Daerah Kota Madiun berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan P-RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024;

5. Dalam upaya menjamin efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan P-RPJMD Kota Madiun tahun 2019-2024, maka Bappeda Kota Madiun berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh PD dalam perumusan rencana pembangunan daerah;
6. Sesuai Pasal 43 dan 46 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Walikota wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap setiap dokumen rencana (Renstra dan Renja PD) yang disusun oleh seluruh PD;
7. Dalam hal dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2022 ditetapkan lebih awal dari dokumen P-RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, maka apabila terdapat ketidakselarasan dan keserasian dengan RPJMD, dokumen RKPD dimaksud perlu disempurnakan sesuai dokumen RPJMD ini.

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**H. MAIDI**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah**

**u.b.  
Kepala Bagian Hukum**



**BUDI WIPOWO, SH**  
**Membina Tingkat I**  
**NIP. 19750117 199602 1 001**